



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA
JABATAN (LKPJ-AMJ)
WALIKOTA TANGERANG
TAHUN 2013-2018**

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
<https://www.tangerangkota.go.id>

**KOTA TANGERANG
2018**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tangerang.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan (LKPJ AMJ), yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Maka untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Tahun 2013-2018 disusun.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) tahun 2013 – 2018 merupakan ringkasan dari pencapaian kinerja pada LKPJ tahunan mulai dari LKPJ tahun 2014 sampai dengan LKPJ tahun 2017, ditambah dengan realisasi sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2018. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) kepada Dewan yang terhormat, disamping sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang yang berlaku, juga merupakan wujud tekad, semangat dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang.

Melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) kami menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk jajaran pemerintah serta masyarakat Kota Tangerang yang telah memberikan dukungannya dalam rangka ikut menyuksekan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kota Tangerang.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan strategi kebijakan Pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tercapai visi Kota Tangerang sebagai kota yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah.

Wabillahi Taufiq WalHidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tangerang, Juli 2018
WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. DASAR HUKUM	I-1
1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH	I-3
1.2.1. Kondisi Geografis Daerah	I-3
1.2.2. Kondisi Demografi	I-10
1.2.3. Kondisi Ekonomi	I-20
1.2.4. Kinerja Pembangunan Daerah	I-30
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	II-1
2.1. VISI DAN MISI	II-1
2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH	II-6
2.3. PRIORITAS DAERAH	II-10
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
TAHUN 2014-2018	III-1
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	III-1
3.1.2. Intensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah	III-2
3.1.3. Ektensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah	III-2
3.1.4. Target Dan Realisasi Pendapatan	III-3
3.1.5. Permasalahan Dan Solusi	III-4
3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014-2018	III-7
3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	III-7
3.2.2. Anggaran Dan Realisasi Belanja	III-11
3.2.3. Permasalahan dan Solusi	III-12
3.3. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
TAHUN 2018	III-13
3.3.1 Pendapatan Daerah	III-16
3.3.2 Belanja Daerah	III-17
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN	IV-1
4.2.1. Urusan Pendidikan	IV-1
4.2.2. Urusan Kesehatan	IV-10
4.2.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	IV-28
4.2.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	IV-39
4.2.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	IV-50
4.2.6. Urusan Sosial	IV-54
4.2.7. Urusan Tenaga Kerja	IV-65
4.2.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan	

Perlindungan Anak	IV-70
4.2.9. Urusan Pangan	IV-74
4.2.10. Urusan Pertanahan	IV-79
4.2.11. Urusan Lingkungan Hidup	IV-81
4.2.12. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	IV-91
4.2.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	IV-95
4.2.14. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	IV-97
4.2.15. Urusan Perhubungan	IV-103
4.2.16. Urusan Komunikasi Dan Informasi	IV-108
4.2.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	IV-114
4.2.18. Urusan Penanaman Modal	IV-118
4.2.19. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga	IV-121
4.2.20. Urusan Statistik	IV-128
4.2.21. Urusan Persandian	IV-131
4.2.22. Urusan Kebudayaan	IV-132
4.2.23. Urusan Perpustakaan	IV-138
4.2.24. Urusan Kearsipan	IV-142
4.2.25. Penunjang Urusan Inspektorat	IV-146
4.2.26. Penunjang Urusan Perencanaan	IV-149
4.2.27. Penunjang Urusan Keuangan	IV-163
4.2.28 Penunjang Urusan Kepergawaiuan	IV-166
4.2.29. Pendukung Urusan Sekretariat Daerah	IV-170
4.2.30. Pendukung Urusan Sekretariat DPRD	IV-175
4.2.31. Pendukung Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik	IV-178
4.2.32. Urusan Kewilayahann	IV-181
4.2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN	IV-182
4.2.1. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	IV-182
4.2.2. Urusan Pariwisata	IV-185
4.2.3. Urusan Pertanian	IV-189
4.2.4. Urusan Perdagangan	IV-194
4.2.5. Urusan Perindustrian	IV-200
4.3. CAPAIAN SASARAN RPJMD KOTA TANGERANG	IV-204
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V-1
5.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA	V-1
5.2. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN	V-13
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	VI-1
6.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH	VI-1
6.2 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	VI-3
6.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH	VI-11
6.4 PEMBINAAN BATAS WILAYAH	VI-15
6.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	VI-18
6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	VI-30
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Tahun 2014-2017	I-20
Grafik 1.2	Perkembangan Inflasi Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014-2017	I-28
Grafik 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Tahun 2012 – 2016 dan Perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional	I-32
Grafik 1.4	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang Tahun 2012-2016	I-34
Grafik 1.5	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang Tahun 2011-2016	I-35
Grafik 1.6	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Tahun 2014-2017	I-37
Grafik 3.1.	Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2014-2018	III-3
Grafik 3.2.	Pertumbuhan Realisasi dan Pencapaian Pendapatan Daerah TA 2014-2018	III-4
Grafik 3.3.	Rencana dan Realisasi Belanja Daerah TA 2014-2018	III-12
Grafik 3.4.	Pertumbuhan Realisasi dan Pencapaian Belanja Daerah TA 2014-2018	III-12
Grafik 3.5.	Target dan Realisasi Pendapatan TA 2018 (s.d. Triwulan I tahun 2018) dalam Milyar Rupiah	III-15
Grafik 3.6.	Target Realisasi dan Realisasi Pendapatan TA 2018 (s.d. Triwulan I tahun 2018)	III-15
Grafik 3.7.	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018 (s.d. Triwulan I tahun 2018)	III-16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang	I-4
Gambar 1.2	Peta Struktur Geologi Kota Tangerang	I-7
Gambar 6.1.	Peta Lokasi Banjir Tahun 2014	VI-20
Gambar 6.2.	Peta Lokasi Genangan Banjir Tahun 2015	VI-21
Gambar 6.3.	Peta Lokasi Genangan Banjir Tahun 2016	VI-23

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
<https://www.tangerangkota.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (km)	I-4
Tabel 1.2	Luas dan Batas Administrasi Kota Tangerang	I-5
Tabel 1.3	Kondisi Topografi Kota Tangerang	I-6
Tabel 1.4	Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang	I-8
Tabel 1.5	Curah Hujan di Kota Tangerang	I-9
Tabel 1.6	Luas Lahan Menurut Penggunaan Di Kota Tangerang Tahun 2015-2016	I-9
Tabel 1.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2017	I-10
Tabel 1.8	Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kota Tangerang Tahun 2017	I-11
Tabel 1.9	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tangerang Tahun 2017	I-12
Tabel 1.10	Penduduk Kota Tangerang (Menurut Kelompok Umur) Tahun 2017	I-13
Tabel 1.11	Rasio Ketergantungan Penduduk Tiap Kecamatan Kota Tangerang Tahun 2017	I-14
Tabel 1.12	Jumlah Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2014–2017	I-15
Tabel 1.13	Jumlah Murid dan Guru Tiap Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2014-2017	I-16
Tabel 1.14	Penduduk Yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan (Lapangan Usaha) di Kota Tangerang Tahun 2014-2017	I-17
Tabel 1.15	Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Yang Tersedia (Menurut Tingkat Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2017	I-19
Tabel 1.16	PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 (Milyar Rupiah)	I-24
Tabel 1.17	PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (=2010) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014–2017 (Milyar Rupiah)	I-25
Tabel 1.18	Peranan Sektor Terhadap PDRB ADHB Dan ADHK Tahun 2014–2017	I-26
Tabel 1.19	PDRB per Kapita Kota Tangerang Tahun 2014-2017	I-27
Tabel 1.20	Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Periode 2014-2017	I-28
Tabel 1.21	Realisasi Investasi PMDN Dan PMA Berdasarkan Izin Usaha Periode 2010 – 2017 Di Kota Tangerang	I-29
Tabel 1.22	Perkembangan Investasi PMDN Dan PMA Berdasarkan Izin Prinsip/Minat Investasi PMDN Dan PMA Periode 2010 – 2017	I-30
Tabel 1.23	Komponen IPM Kota Tangerang Tahun 2014 – 2017	I-31

Tabel 1.24 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012 – 2016	I-31
Tabel 1.25. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rupiah) Tahun 2011-2016	I-34
Tabel 1.26. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang	I-35
Tabel 1.27. Nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2014-2017	I-38
Tabel 2.1 Penjelasan Visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018	II-1
Tabel 2.2 Misi dan Penjelasan Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018	II-2
Tabel 2.3 Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018	II-4
Tabel 2.4 Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018	II-4
Tabel 2.5 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang	II-11
Tabel 2.6 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Prioritas Pembangunan Nasional	II-13
Tabel 2.7 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten	II-15
Tabel 2.8 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Urusan Pemerintahan Daerah	II-17
Tabel 2.9 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Sasaran Pembangunan Daerah	II- 19
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2014-2018	III-3
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2014-2018	III-12
Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018 (s.d. Triwulan I tahun 2018)	III-14
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 (s.d. Triwulan I tahun 2018)	III-16
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018 (s.d. Triwulan I tahun 2018)	III-18
Tabel 4.1 Capaian Indikator Program Pada Urusan Pendidikan Tahun 2014-2018	IV-2
Tabel 4.2. Capaian Indikator Program Pada Urusan Kesehatan Tahun 2014-2018	IV-13
Tabel 4.3. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2014-2018	IV-31
Tabel 4.4. Capaian Indikator Program Pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2018	IV-40
Tabel 4.5. Sebaran dan Luas Kawasan Kumuh	IV-43
Tabel 4.6. Capaian Indikator Program Pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2018	IV-50
Tabel 4.7. Capaian Indikator Program Pada Urusan Sosial Tahun 2014-2018	IV-56

Tabel 4.8. Capaian Indikator Program Pada Urusan Tenaga Kerja Tahun 2014-2018	IV-66
Tabel 4.9. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2018	IV-71
Tabel 4.10. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pangan Tahun 2014-2018	IV-74
Tabel 4.11. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pertanahan Tahun 2014-2018	IV-80
Tabel 4.12. Capaian Indikator Program Pada Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018	IV-83
Tabel 4.13. Capaian Indikator Program Pada Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2018	IV-92
Tabel 4.14. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2014-2018	IV-95
Tabel 4.15. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2018	IV-99
Tabel 4.16. Capaian Indikator Program Pada Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018	IV-104
Tabel 4.17. Capaian Indikator Program Pada Urusan Komunikasi Dan Informasi Tahun 2014-2018	IV-109
Tabel 4.18. Capaian Indikator Program Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2014-2018	IV-115
Tabel 4.19 Capaian Indikator Program Pada Urusan Penanaman Modal Tahun 2014-2018	IV-119
Tabel 4.20 Capaian Indikator Program Pada Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga Tahun 2014-2018	IV-122
Tabel 4.21. Capaian Indikator Program Pada Urusan Statistik Tahun 2014-2018	IV-129
Tabel 4.22. Capaian Indikator Program Pada Urusan Persandian Tahun 2014-2018	IV-131
Tabel 4.23. Capaian Indikator Program Pada Urusan Kebudayaan Tahun 2014-2018	IV-133
Tabel 4.24. Capaian Indikator Program Pada Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2018	IV-139
Tabel 4.25. Capaian Indikator Program Pada Urusan Kearsipan Tahun 2014-2018	IV-143
Tabel 4.26. Capaian Indikator Program Pada Urusan Penunjang Inspektorat Tahun 2014-2018	IV-146
Tabel 4.27. Capaian Indikator Program Pada Urusan Penunjang Perencanaan Tahun 2014-2018	IV-151
Tabel 4.28. Capaian Indikator Program Pada Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2014-2018	IV-163
Tabel 4.29. Capaian Indikator Program Pada Urusan Penunjang Kepegawaian Tahun 2014-2018	IV-167
Tabel 4.30. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2014-2018	IV-171

Tabel 4.31. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2014-2018	IV-176
Tabel 4.32. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pendukung Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2014-2018	IV-179
Tabel 4.33. Capaian Indikator Program Pada Urusan Kelautan Dan Perikanan Tahun 2014-2018	IV-183
Tabel 4.34. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pariwisata Tahun 2014-2018	IV-185
Tabel 4.35. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pertanian Tahun 2014-2018	IV-190
Tabel 4.36. Capaian Indikator Program Pada Urusan Perdagangan Tahun 2014-2018	IV-195
Tabel 4.37. Capaian Indikator Program Pada Urusan Perindustrian Tahun 2014-2018	IV-201
Tabel 4.38. Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018	IV-205
Tabel 5.1 Tugas Pembantuan yang Diterima Tahun 2014-2018	V-2
Tabel 5.2. Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak Terserap	V-10
Tabel 6.1 Kerjasama Antar Daerah Tahun 2014 -2018	VI-2
Tabel 6.2. Lokasi Genangan Banjir Tahun 2014	VI-20
Tabel 6.3. Genangan Banjir Tahun 2015	VI-21
Tabel 6.4. Genangan Banjir Tahun 2016	VI-23
Tabel 6.5. Penyebab Terjadinya Kebakaran Tahun 2014	VI-26
Tabel 6.6. Penyebab Terjadinya Kebakaran Tahun 2015	VI-27
Tabel 6.7. Penyebab Terjadinya Kebakaran Tahun 2016	VI-27
Tabel 6.8. Penyebab Terjadinya Kebakaran Tahun 2017	VI-27
Tabel 6.9. Komposisi Pegawai Satpol PP Tahun 2014	VI-33
Tabel 6.10. Komposisi Pegawai Satpol PP Tahun 2015	VI-33
Tabel 6.11. Komposisi Pegawai Satpol PP Tahun 2016	VI-34
Tabel 6.12. Komposisi Pegawai Satpol PP Tahun 2017	VI-34
Tabel 6.13. Jumlah Anggaran Satpol PP Tahun 2014-2018	VI-35
Tabel 6.14 Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar Tahun 2014 – 2018 (s.d. Triwulan I tahun 2018)	VI-35
Tabel 6.15. Peredaran Minuman Keras Di kota Tangerang Tahun 2014 – 2018 (s.d. Triwulan I tahun 2018)	VI-36
Tabel 6.16. Operasi Pelacuran/PSK Tahun 2014-2018 (s.d. Triwulan I tahun 2018)	VI-36

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban - Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut LKPJ-AMJ, penyusunannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Substansi LKPJ-AMJ merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ-AMJ Walikota Tangerang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10).

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1 Kondisi Geografis Daerah

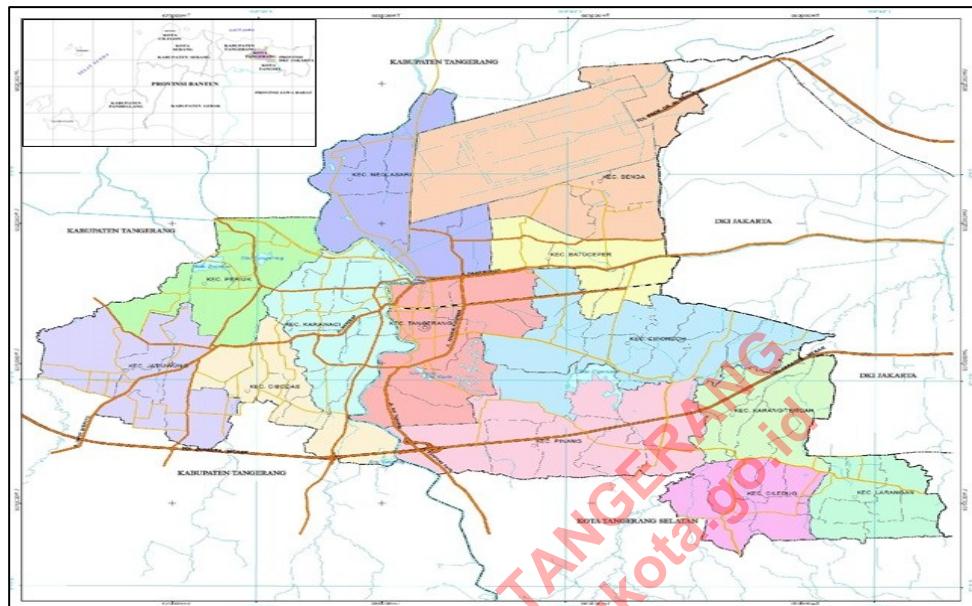
Kota Tangerang secara geografis terletak pada koordinat $106^{\circ}44'55''$ - $106^{\circ}33'3,1''$ Bujur Timur (BT) dan $6^{\circ}5'46''$ - $6^{\circ}15'23''$ Lintang Selatan (LS). Kota Tangerang memiliki luas ± 164.55 km² atau sekitar 1.59% dari luas Propinsi Banten (termasuk Bandara Soekarno-Hatta seluas ± 19.69 km²) dan merupakan wilayah yang terkecil kedua setalah Kota Tangerang Selatan. yang berjarak ± 65 km dari Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten dan berjarak ± 27 km dari Ibukota DKI Jakarta, berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga. Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Sepatan di Kabupaten Tangerang;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curug di Kabupaten Tangerang serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren di Kota Tangerang Selatan;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di DKI Jakarta;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Cikupa di Kabupaten Tangerang.

Secara administratif Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan 985 Rukun Warga (RW) dan 4.930 Rukun Tetangga (RT). Sebagaimana dijelaskan dalam 0, 0 dan 0. Kecamatan Larangan merupakan kecamatan terjauh dari Ibukota Tangerang (sekitar 14 km) dan Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan terdekat dari Ibukota Tangerang. Jarak paling jauh antar kecamatan adalah antara Kecamatan Larangan dengan Kecamatan Benda yaitu sekitar 21 km dan jarak paling dekat antar kecamatan adalah antara Kecamatan Cibodas dengan Kecamatan

Jatiuwung yaitu sekitar 1 km. Terkait luas wilayah. Kecamatan Pinang merupakan wilayah terluas di Kota Tangerang (21,59 Km²).

Gambar 1.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang



Sumber: Bappeda Kota Tangerang, Tahun 2017

Tabel 1.1. Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (km)

Kecamatan	Ciledug	Larangan	Karang Tengah	Cipondoh	Pinang	Tangerang	Karawaci	Cibodas	Jatiuwung	Periuk	Neglasari	Batuceper	Benda
District	Ciledug	Larangan	Karang Tengah	Cipondoh	Pinang	Tangerang	Karawaci	Cibodas	Jatiuwung	Periuk	Neglasari	Batuceper	Benda
1. Ciledug	xx	3	4	5	7	11	12	15	17	15	13	15	18
2. Larangan	3	xx	3	8	10	14	15	18	20	18	16	18	21
3. Karang Tengah	4	3	xx	6	8	12	13	16	18	16	14	11	14
4. Cipondoh	5	8	6	xx	4	6	9	10	12	10	8	3	6
5. Pinang	7	10	8	4	xx	7	4	3	5	3	9	11	14
6. Tangerang	11	14	12	6	7	xx	4	5	6	4	2	4	7
7. Karawaci	12	15	13	9	4	4	xx	2	4	6	6	8	11
8. Cibodas	15	18	16	10	3	6	2	xx	1	5	8	10	13
9. Jatiuwung	17	20	18	12	5	7	4	1	xx	3	9	10	14
10. Periuk	15	18	16	10	3	4	6	5	3	xx	4	8	11
11. Neglasari	13	16	14	8	9	2	6	8	9	4	xx	4	7
12. Batuceper	15	18	11	3	11	4	8	10	11	8	4	xx	3
13. Benda	18	21	14	6	14	7	11	13	14	11	7	3	xx

Sumber : Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 1.2. Luas dan Batas Administrasi Kota Tangerang

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah			Batas Wilayah Administrasi			
			Kel.	RW	RT	Utara	Timur	Selatan	Barat
1	Ciledug	8.77	8	104	399	Kec. Karang Tengah Kec. Pinang	Kec. Larangan	Kab. Tangerang	Kab. Tangerang
2	Larangan	9.40	8	90	426	Prov. DKI Jakarta	Prov. DKI Jakarta	Kab. Tangerang	Kec. Ciledug. Kec. Karang Tengah
3	Karang Tengah	10.47	7	74	361	Kec. Cipondoh	Prov. DKI Jakarta	Kec. Ciledug	Kec. Pinang
4	Cipondoh	17.91	10	100	612	Kec. Batureper.	Kec. Karang Tengah.	Kec. Pinang.	Kec. Tangerang
						Prov. DKI Jakarta	Prov. DKI Jakarta	Kec. Karang Tengah	
5	Pinang	21.59	11	75	464	Kec. Cipondoh. Kec. Tangerang	Kec. Karang Tengah	Kab. Tangerang	Kec. Cibodas
						Kec. Neglasari.	Kec. Cipondoh. Kec. Pinang	Kec. Pinang	Kec. Karawaci
6	Tangerang	15.79	8	78	404	Kec. Batureper	Kec. Tangerang	Kec. Cibodas	Kec. Cibodas. Kec. Periuk
7	Karawaci	13.48	16	127	575	Kec. Neglasari	Kec. Tangerang	Kec. Cibodas	Kec. Jatiuwung
8	Cibodas	9.61	6	90	471	Kec. Periuk. Kec. Karawaci	Kec. Pinang	Kab. Tangerang	Kec. Jatiuwung
9	Jatiuwung	14.41	6	41	225	Kec. Periuk	Kec. Cibodas	Kab. Tangerang	Kab. Tangerang
10	Periuk	9.54	5	69	435	Kab. Tangerang	Kec. Neglasari.	Kec. Jatiuwung.	Kab. Tangerang
							Kec. Karawaci	Kec. Cibodas	
11	Neglasari	16.08	7	50	239	Kab. Tangerang	Kec. Benda	Kec. Karawaci.	Kab. Tangerang.
							Kec. Batureper	Kec. Tangerang	Kec. Periuk
12	Batureper	11.58	7	46	231	Kec. Benda	Prov. DKI Jakarta	Kec. Cipondoh. Kec. Tangerang	Kec. Neglasari
							Prov. DKI Jakarta	Kec. Batureper. Kec. Neglasari	
13	Benda*)	5.92	5	41	199	Kab. Tangerang	Prov. DKI Jakarta		Kec. Neglasari
Jumlah		164.55	104	985	5041				

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2017

*) Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta (19.69 km²)

1.2.1.1 Kondisi Topografi

Secara topografi. Kota Tangerang berada pada ketinggian 10 - 18 meter di atas permukaan laut (dpl). Bagian utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter dpl seperti Kecamatan Benda. Sedangkan bagian selatan memiliki ketinggian 18 meter dpl seperti Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Larangan.

Dilihat dari kemiringan tanahnya. sebagian besar wilayah Kota Tangerang mempunyai tingkat kemiringan lahan antara 0-3% dan sebagian kecil wilayah pada bagian selatan kota memiliki kemiringan lahannya antara 3-8%, yang terdapat di Kelurahan Parung Serab dan Kelurahan Paninggilan Selatan di Kecamatan Ciledug serta Kelurahan Cipadu Jaya di Kecamatan Larangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan di Kota Tangerang cukup landai. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi pengembangan Kota Tangerang secara umum, terutama untuk pengembangan kegiatan perkotaan. Kondisi Topografi Kota Tangerang bisa dilihat pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3. Kondisi Topografi Kota Tangerang

No.	Kecamatan	Kondisi Topografi	
		Kemiringan Lahan	Ketinggian dpl (m)
1	Ciledug	0-3%	18
2	Larangan	0-3%	18
3	Karang Tengah	0-3%	18
4	Cipondoh	3-8%	14
5	Pinang	0-3%	14
6	Tangerang	0-3%	14
7	Karawaci	0-3%	14
8	Jatiuwung	0-3%	14
9	Cibodas	3-8%	14
10	Periuk	0-3%	14
11	Batuceper	0-3%	14
12	Neglasari	0-3%	14
13	Benda	0-3%	10

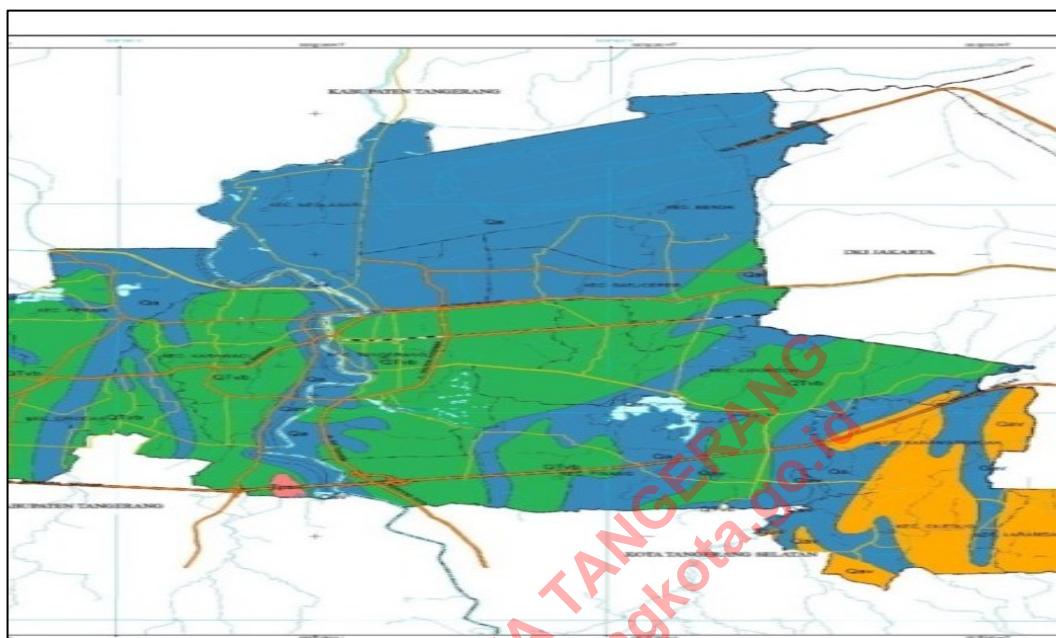
Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2017

1.2.1.2 Kondisi Geologi

Kota Tangerang secara geologis berada pada suatu tinggian struktur yang dikenal dengan sebutan Tangerang High. Tinggian ini terdiri atas batuan tersier yang memisahkan Cekungan Jawa Barat Utara di bagian barat dengan Cekungan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusinan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan nomal. berarah utara-selatan.

Batuan yang menutupi Kota Tangerang terdiri dari endapan alluvium, endapan kipas alluvium, dan satuan Tuf Banten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2

Gambar 1.2. Peta Struktur Geologi Kota Tangerang



Sumber: Bappeda Kota Tangerang, 2018

Di Sub Cekungan Jakarta, berdasarkan data pemboran menunjukkan adanya endapan alluvium yang menebal ke arah utara, yang disusun oleh klastika halus hingga kasar, sedangkan cekungan di Barat Tangerang High memiliki ciri endapan pantai dan delta. Struktur-struktur tersebut pada saat ini sulit dijumpai di permukaan karena endapan kuarter yang berumur lebih muda telah menutupi lapisan batuan tersebut. Endapan Kuarter yang menimpa batuan tersebut berupa batuan vulkanik yang berasal dari Gunung Gede-Pangrango dan Salak. Hampir seluruh daerah kajian ditutupi oleh batuan vulkanik yang berasal dari Gunung Gede-Pangrango dan alluvium.

1.2.1.3 Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Tangerang dilintasi oleh Sungai Cisadane yang memiliki debit air $70 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan mengalir sejauh 15 km membagi Kota Tangerang menjadi dua bagian yaitu bagian Timur sungai dan bagian barat sungai. Kecamatan yang terletak di bagian barat Sungai Cisadane meliputi Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Periuk, Kecamatan Neglasari, dan sebagian Kecamatan Tangerang. Sedangkan Kecamatan yang terletak di bagian timur Sungai Cisadane meliputi sebagian Kecamatan Tangerang, Kecamatan Pinang,

Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Batuceper, Kecamatan Benda, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug, dan Kecamatan Larangan.

Sungai-sungai lain seperti Sungai Cirarab yang merupakan batas sebelah Barat Kota Tangerang wilayah Kecamatan Jatiuwung dengan Kecamatan Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang. Kali Ledug yang merupakan anak Sungai Cirarab, Kali Sabi, dan Kali Cimone, sungai-sungai tersebut berada di sebelah Barat Sungai Cisadane, sedangkan pada bagian Timur Sungai Cisadane terdapat pula sungai/kali yang meliputi Kali Pembuangan Cipondoh. Kali Angke, Kali Wetan, Kali Pasanggrahan, Kali Cantiga, dan Kali Pondok Bahar. Di samping itu, di Kota Tangerang juga terdapat saluran air yang meliputi Saluran Mokevart, Saluran Irigasi Induk Tanah Tinggi, Saluran Induk Cisadane Barat, Saluran Induk Cisadane Timur, dan Saluran Induk Cisadane Utara.

Selain sungai, di Kota Tangerang terdapat Situ Cipondoh yang berada di Kecamatan Cipondoh dengan luas kurang lebih 1,26 Km². Selama ini Situ Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir, Irigasi, cadangan air baku, dan rekreasi. Berikut disajikan tabel 1.4 tentang Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang:

Tabel 1.4. Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang

Nama Daerah Aliran Sungai (Das)	Panjang (Km)	Lebar (M)	Tinggi (M)	Debit (M ³ /Detik)
DAS Cisadane	15	100	5,35	88
DAS Cirarab	7	11	3,50	36
DAS Angke	10	12	5,50	24
Kota Tangerang	32	-	-	-

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2017

1.2.1.5. Kondisi Klimatologi

Kota Tangerang merupakan daerah beriklim tropis, berdasarkan pada penelitian di Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang terdapat data berupa data temperatur (suhu) udara, kelembaban udara, dan curah hujan. Dalam hal ini yang dimaksud curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir dalam satuan milimeter (mm). Curah hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter.

Volume rata-rata curah hujan di Kota Tangerang selama tahun 2016 adalah 221,9 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari, yaitu 507,6 mm

sedangkan banyak hari hujan tertinggi dalam 1 tahun adalah pada Bulan Februari dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 hari.

Tabel 1.5. Curah Hujan di Kota Tangerang

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Kelembaban (%)
Januari	185,3	14	82
Februari	507,6	22	85
Maret	197,3	15	83
April	197,3	11	80
Mei	271,3	18	83
Juni	311,4	13	81
Juli	190,9	16	82
Agustus	160,0	14	78
September	126,0	19	971
Okttober	160,3	18	81
Nopember	219,7	18	81
Desember	135,4	16	80
Rata-rata	221,9	16,2	81,3
Tahun 2015	147,5	11,0	77,2
Tahun 2014	205,9	14,0	79,1
Tahun 2013	192,5	15,0	76,7

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2017

1.2.1.4 Penggunaan Lahan

Kota Tangerang dengan posisi yang berbatasan langsung dengan ibukota negara telah mendorong penguatan identitas Kota Tangerang sebagai Kota industri dan Jasa. Hal tersebut dapat terlihat dari pesatnya peningkatan pembangunan khususnya pada bidang pemukiman dan jasa yang tergambar dari penggunaan lahan di Kota Tangerang selama dua tahun terakhir.

Penggunaan lahan di Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel 1.6 di bawah ini.

Tabel 1.6. Luas Lahan Menurut Penggunaan Di Kota Tangerang Tahun 2015-2016

No	Penggunaan Lahan	Tahun 2015 (Ha)	Prosentasi Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2015	Tahun 2016 Luas (Ha)	Prosentasi Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2016	Selisih Luas (Ha)
1	Transportasi	1 503,21	8,23	1 517,91	8,31	14,70
2	Perairan	505,82	2,77	518,46	2,84	12,64
3	Area Terbuka	8 568,76	46,91	8 666,49	47,45	97,73
4	Pertanian dan Peternakan	1 202,85	6,59	1 200,78	6,57	- 2,07
5	Perkantoran & Perekonomian	442,31	2,42	218,92	1,20	- 223,41
6	Industri	1 051,44	5,76	1 082,56	5,93	31,12
7	Fasilitas Pendidikan	42,12	0,23	44,95	0,25	2,83

No	Penggunaan Lahan	Tahun 2015 (Ha)	Prosentasi Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2015	Tahun 2016 Luas (Ha)	Prosentasi Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2016	Selisih Luas (Ha)
8	Fasilitas Kesehatan	6,51	0,04	6,50	0,04	- 0,01
9	Fasilitas Olahraga	16,44	0,89	163,50	0,90	147,06
10	Fasilitas Peribadatan	38,47	0,21	38,69	0,21	0,22
	Luas Total	13.377,93	74,05	13.458,76	73,7	80,81

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2017

1.2.2 Kondisi Demografi

1.2.2.1 Kondisi Demografi

Kondisi demografi Kota Tangerang meliputi berbagai data/informasi terkait dengan kependudukan antara lain: jumlah penduduk. komposisi penduduk menurut jenis kelamin. struktur usia. serta jenis pekerjaan dan pendidikan.

Kota Tangerang sebagai wilayah hinterland pertumbuhan penduduknya tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran (fertilitas). tetapi juga oleh perpindahan (migrasi). Identifikasi terhadap jumlah penduduk. komposisi penduduk menurut jenis kelamin. struktur usia. jenis pekerjaan dan pendidikan sebagai bahan untuk memformulasikan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan diuraikan sebagai berikut.

1.2.2.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan jika memiliki kualitas yang memadai. Oleh karena itu. penanganan kependudukan tidak hanya pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Sementara itu pada tabel 1.7. menunjukkan besarnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar 4,05%. Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan yang mempunyai LPP paling tinggi yaitu 5,64%, sedangkan Kecamatan Batuceper merupakan kecamatan yang mempunyai (LPP) paling rendah yaitu 2,26%. Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2014-2016 menjadi menurun dikarenakan adanya penghapusan data ganda yang ada di Kota Tangerang.

Tabel 1.7. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)				LPP 2016-2017 %
		2014	2015	2016	2017	
1	Ciledug	173.265	131.375	119.313	125.624	5,29

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)				LPP 2016-2017 %
		2014	2015	2016	2017	
2	Larangan	184.977	147.419	133.264	137.080	2,86
3	Karang Tengah	131.591	111.790	97.961	102.459	4,59
4	Cipondoh	262.350	201.696	179.511	188.961	5,26
5	Pinang	185.785	165.425	151.207	156.654	3,60
6	Tangerang	168.844	164.646	136.074	143.751	5,64
7	Karawaci	177.907	181.823	169.354	173.501	2,45
8	Jatiuwung	121.420	102.067	96.723	100.172	3,57
9	Cibodas	150.320	159.732	135.742	141.681	4,38
10	Periuk	140.503	135.438	122.620	127.557	4,03
11	Batuceper	97.634	91.856	84.860	86.777	2,26
12	Neglasari	111.930	115.707	104.036	107.890	3,70
13	Benda	93.368	77.520	72.101	75.554	4,79
Kota Tangerang		1.999.894	1.786.494	1.602.766	1.667.661	4,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 2017 (Data Per Desember 2017)

Secara keseluruhan, jumlah penduduk di masing-masing kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2014 sampai Tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini terjadi akibat adanya proses pemutakhiran NIK dari KTP manual menjadi KTP-el. Sehingga beberapa penduduk yang memiliki data kependudukan ganda (duplicate) dapat dieleminir.

Berdasarkan tabel 1.7 dan tabel 1.8, Kecamatan Cipondoh merupakan wilayah yang memiliki penduduk paling besar dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kota Tangerang. yaitu 188.961 jiwa atau 11,33% dari penduduk Kota Tangerang. Sedangkan penduduk terendah berada di Kecamatan Benda sebanyak 75.554 jiwa atau 4,53% dari penduduk Kota Tangerang. Adapun kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Cibodas sebesar 14.743 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Neglasari yaitu sebesar 6.710 jiwa/km² dibawah kepadatan penduduk Kota Tangerang yang rata-rata sebesar 10.135 jiwa/km².

Tabel 1.8. Distribusi dan Kepadatan Penduduk di Kota Tangerang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Distribusi Persentase	Luas (km ²)	Persentase terhadap Kota Tangerang	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Ciledug	7,53	8,77	5,33	14.324
2	Larangan	8,22	9,40	5,71	14.583
3	Karang Tengah	6,14	10,47	6,36	9.786
4	Cipondoh	11,33	17,91	10,88	10.551
5	Pinang	9,39	21,59	13,12	7.256
6	Tangerang	8,62	15,79	9,60	9.104
7	Karawaci	10,40	13,48	8,19	12.871
8	Cibodas	8,50	9,61	5,84	14.743
9	Jatiuwung	6,01	14,41	8,76	6.952
10	Periuk	7,65	9,54	5,80	13.371

No.	Kecamatan	Distribusi Persentase	Luas (km ²)	Persentase terhadap Kota Tangerang	Kepadatan (jiwa/km ²)
11	Neglasari	6,47	16,08	9,77	6.710
12	Batuceper	5,20	11,58	7,04	7.494
13	Benda	4,53	5,92	3,60	12.763
	Tahun 2017	100,00	164,55	100,00	10.135

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 2017 (Data Per Desember 2017)

1.2.2.3 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun 2017 penduduk Kota Tangerang menurut jenis kelamin dan persebarannya dapat dilihat pada tabel 1.9, dimana penduduk Kota Tangerang di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Peningkatan penduduk yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kota Tangerang terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Tabel 1.9. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tangerang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah (jiwa)		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1	Ciledug	63.294	62.330	125.624	102
2	Larangan	68.646	68.434	137.080	100
3	Karang Tengah	51.540	50.919	102.459	101
4	Cipondoh	95.127	93.834	188.961	101
5	Pinang	79.057	77.597	156.654	102
6	Tangerang	72.401	71.350	143.751	101
7	Karawaci	87.458	86.043	173.501	102
8	Cibodas	71.234	70.447	141.681	101
9	Jatiuwung	51.463	48.709	100.172	106
10	Periuk	64.872	62.685	127.557	103
11	Neglasari	55.104	52.786	107.890	104
12	Batuceper	44.228	42.549	86.777	104
13	Benda	38.675	36.879	75.554	105
	Tahun 2017	843.099	824.562	1.667.661	102
	Tahun 2016	813.412	789.354	1.602.766	103
	Tahun 2015	912.216	874.278	1.786.494	104
	Tahun 2014	1.021.298	978.596	1.999.894	104

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 2017
(Data Per Desember 2017)

1.2.2.4 Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda-beda.

Informasi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Selain itu informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Jumlah penduduk Kota Tangerang pada masing-masing usia pada tabel 1.10 berikut ini:

Tabel 1.10. Penduduk Kota Tangerang (Menurut Kelompok Umur) 2017

No.	Kelompok Umur	Penduduk Kota Tangerang		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	65.864	60.770	126.634
2	5 – 9	70.517	65.489	136.006
3	10 – 14	69.445	65.597	135.042
4	15 – 19	61.881	59.110	120.991
5	20 – 24	68.890	67.321	136.321
6	25 – 29	73.068	73.818	146.886
7	30 – 34	78.798	79.346	158.144
8	35 – 39	83.361	85.218	168.579
9	40 – 44	71.357	72.986	144.343
10	45 – 49	62.999	61.388	124.387
11	50 – 54	46.764	47.039	93.803
12	55 – 59	37.016	36.866	73.882
13	60 – 64	25.865	23.039	48.904
14	65+	27.274	26.575	53.849
Tahun 2017		843.099	824.562	1.667.661
Tahun 2016		813.412	789.354	1.602.766
Tahun 2015		912.214	874.28	1.786.494
Tahun 2014		855.727	821.751	1.999.894

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. 2017 (Data Per Desember 2017)

Dari tabel 1.10 di atas jumlah penduduk pada kelompok usia anak (0-4 tahun) jumlahnya mencapai 126.634 jiwa. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Seiring dengan jumlah proporsi usia anak dalam komposisi penduduk maka peningkatan kualitas anak sebagai sumber daya manusia membutuhkan perhatian yang besar. Sedangkan jumlah penduduk pada kelompok usia (15-64 tahun) yang merupakan usia produktif berjumlah 1.269.976 jiwa atau sekitar 76,15% dari jumlah penduduk Kota Tangerang. Kondisi ini mengartikan bahwa potensi SDM dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di Kota Tangerang tahun 2017 terlihat relatif besar, sehingga perlu adanya upaya antisipasi terhadap penyediaan sarana-prasarana pada tiga bidang tersebut, terutama bidang ketenagakerjaan/lowongan kerja.

Terkait dengan jumlah penduduk menurut struktur usia, maka dapat pula dihitung besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk (Dependency Ratio) pada wilayah dan pada tahun tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar seorang penduduk usia produktif harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif. Besarnya rasio ketergantungan penduduk di Kota Tangerang pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.11.

Tabel 1.11. Rasio Ketergantungan Penduduk Tiap Kecamatan Kota Tangerang Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)			Jumlah	Depedency Ratio
		0 – 14	15 - 64	65+		
1	Ciledug	29.382	92.024	4.218	125.624	36.51
2	Larangan	30.740	100.710	5.630	137.080	36.11
3	Karang Tengah	23.443	74.955	4.061	102.459	36.69
4	Cipondoh	45.542	137.654	5.765	188.961	37.27
5	Pinang	37.569	114.514	4.571	156.654	36.80
6	Tangerang	33.283	104.816	5.652	143.751	37.15
7	Karawaci	41.656	125.355	6.490	173.501	38.41
8	Cibodas	33.558	103.280	4.843	141.681	37.18
9	Jatiuwung	25.784	73.104	1.284	100.172	37.03
10	Periuk	30.392	94.372	2.793	127.557	35.16
11	Neglasari	26.049	78.036	3.805	107.890	38.26
12	Batuceper	21.460	62.838	2.479	86.777	38.10
13	Benda	18.824	54.472	2.258	75.554	38.70
	Tahun 2017	397.682	1.216.130	53.849	1.667.661	37.13
	Tahun 2016	322.783	1.214.949	65.034	1.602.766	31.92
	Tahun 2015	359.610	1.364.694	62.190	1.786.494	30,91
	Tahun 2014	511.135	1.443.544	45.215	1.999.894	38.54

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. 2017 (Data Per Desember 2017)

Berdasarkan tabel 1.11 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 struktur penduduk Kota Tangerang diperkirakan memiliki nilai rasio ketergantungan sebesar 37,13%. Hal ini berarti bahwa diantara 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 37 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Atau dengan kata lain bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar sebanyak 37 penduduk usia non produktif. Diantara 13 kecamatan, maka Kecamatan Benda merupakan kecamatan yang memiliki rasio ketergantungan paling tinggi, yaitu sebesar 38,80% dan Kecamatan Periuk merupakan kecamatan yang memiliki rasio ketergantungan terendah, yaitu sebesar 35,16%.

1.2.2.5 Profil Pendidikan

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, kewenangan pengelolaan pendidikan sebagai salah satu urusan wajib pelayanan

dasar. Dengan demikian, diharapkan akses masyarakat terhadap pendidikan dapat meningkat dan sektor pendidikan dapat dikelola dengan lebih baik sehingga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.

Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pembangunan yang harus dilakukan bersama adalah bukan hanya mengelola sumber daya alam. namun juga perlu membangun kualitas sumber daya manusianya.

Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah Kota Tangerang menyelenggarakan urusan pendidikan yang merupakan bagian dari urusan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah tadi. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan ini, beberapa faktor penting yang menjadi perhatian penting sebagai modal pembangunan manusia antara lain ketersediaan sekolah dan ketersediaan guru.

Adapun jumlah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan yang berada di Wilayah Kota Tangerang pada tahun 2014-2017 ditampilkan pada tabel 1.12 berikut ini:

Tabel 1.12. Jumlah Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Sekolah di Kota Tangerang					
	TK/RA	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	SMK	Jumlah
2014	691	572	237	103	119	1.722
2015	719	580	238	92	109	1.738
2016	754	577	240	115	126	1.812
2017	769	582	259	108	130	1848

Sumber: Profil Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah sekolah jenjang TK/RA. SMP/MTs dan SMK. Hal ini dapat berarti bahwa dengan peningkatan jumlah TK/RA. SMP/MTs dan SMK seiring dengan semakin besarnya siswa yang akan masuk pada jenjang ini.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam analisis kependidikan adalah perbandingan antara murid dengan guru (ratio murid-guru), yang dapat menunjukkan tingkat faktor efektivitas proses belajar-mengajar di sekolah pada masing-masing tingkatan. Semakin besar rasio murid-guru akan mengindikasikan ketidakefektifan dalam proses

belajar-mengajar. sebaliknya semakin kecil nilai rasio murid-guru akan memberikan informasi tentang semakin efektifnya proses belajar-mengajar. Berikut ini perbandingan antara murid dengan guru (rasio murid-guru) di Kota Tangerang tahun 2014-2017.

**Tabel 1.13. Jumlah Murid dan Guru Tiap Kecamatan di Kota Tangerang
Tahun 2014-2017**

KECAMATAN	TK/RA		SD/MI		SMP/MTS		SMA/MA		SMK	
	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru
Ciledug	3.032	488	15.160	587	5.482	230	2.434	104	6.275	229
Cipondoh	3.035	476	19.691	907	8.720	434	3.335	176	4.995	262
Tangerang	3.009	384	18.022	883	13.540	641	5.567	315	12.927	673
Jatiuwung	3.093	811	9.528	398	3.058	126	851	48	666	40
Batuceper	3.047	540	8.435	400	2.730	160	1.437	84	1.301	63
Benda	3.053	525	6.585	307	2.093	98	341	13	1555	63
Larangan	3.035	400	14.309	546	1.928	92	1.116	56	469	25
Karang Tengah	3.004	256	11.611	482	4.116	186	2.404	146	1.696	77
Pinang	3.022	413	17.174	721	4.611	204	1.864	124	5.871	218
Karawaci	3.028	386	18.464	877	6.770	327	5.681	299	7.025	302
Cibodas	3.010	254	12.779	557	5.646	240	1.341	75	1.602	73
Periuk	2.993	227	15.836	659	3.222	175	1.355	53	2.268	107
Neglasari	2.999	260	9.637	441	3.394	129	1.251	69	1.950	130
Tahun 2017	39.360	5.420	177.231	7.765	65.310	3.042	28.977	1.562	48.600	2.262
Tahun 2016	35.589	3.753	204.988	10.126	82.373	5.056	33.712	2.639	45.370	3.622
Tahun 2015	36.044	4.203	238.042	9.848	81.079	4.257	32.168	2.702	47.061	3.534
Tahun 2014	35.693	3.428	199.699	9.636	84.416	5.098	41.453	3.310	51.047	3.534

Sumber: Profil Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2017

Dari tabel 1.12 dan tabel 1.13 terlihat bahwa pendidikan pra sekolah seperti pendidikan taman kanak-kanak (TK) dan RA pada tahun 2017 tersedia sebanyak 769 sekolah, dengan jumlah murid TK/RA sebanyak 39.360 murid. Fasilitas gedung Sekolah Dasar (SD/MI) yang tersedia pada tahun 2017 adalah sebanyak 582 sekolah dengan rincian SD/MI negeri sebanyak 339 sekolah, SD/MI swasta sebanyak 243 sekolah. Jumlah murid pada jenjang pendidikan dasar ini di tahun 2017 sebanyak 177.231 siswa dengan guru sebanyak 7.765 orang, sehingga dapat dihitung rasio guru-murid SD sebesar 1:23 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sekitar 23 murid.

Untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP/MTs) pada tahun 2017 tersedia 259 sekolah yang terdiri dari SMP/MTs negeri sebanyak 35 sekolah dan SMP/MTs swasta sebanyak 224 sekolah, dengan jumlah murid sebanyak 65.310 orang yang terdiri dari SMP/MTs negeri sebanyak 27.653 orang dan SMP/MTs swasta sebanyak

37.657 Orang. Jumlah guru SMP/MTs sebanyak 3.042 orang. Sehingga terhitung rasio guru-murid SMP/MTs adalah 1:21 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sebanyak 21 murid.

Fasilitas pendidikan untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2017 tersedia 108 sekolah yang terdiri dari SMA/MA Negeri sebanyak 17 sekolah dan SMA/MA Swasta sebanyak 91 sekolah. Jumlah murid SMA/MA di tahun 2017 sebanyak 28.977 orang dengan rincian jumlah murid SMA/MA Negeri sebanyak 14.811 orang dan jumlah murid SMA/MA Swasta sebanyak 14.166 orang. Jumlah guru SMA/MA sebanyak 1.562 orang. Sehingga Rasio guru-murid untuk tingkat SMA/MA adalah 1:19 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sekitar 19 murid.

Fasilitas pendidikan untuk tingkat SMK di kota Tangerang pada tahun 2017 sebanyak 130 sekolah yang terdiri dari SMK Negeri sebanyak 9 sekolah dan SMK Swasta sebanyak 121 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 48.600 yang terdiri dari SMK Negeri sebanyak 9.386 orang dan SMK Swasta sebanyak 39.214 orang. Sedangkan jumlah guru SMK sebanyak 2.262 orang. Sehingga Rasio guru-murid untuk tingkat SMK adalah 1:21 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sekitar 21 murid.

1.2.2.6 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. dikarenakan tenaga kerja sebagai motor penggerak pembangunan. Aktivitas pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja jauh tertinggal dibanding dengan pertambahan angkatan kerja dari waktu ke waktu. Pembangunan harus mereposisi paradigmanya menjadi berorientasi pada ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dan produktivitas.

Pada tahun 2017, jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan di Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel 1.14 berikut ini:

Tabel 1.14. Penduduk Yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan (Lapangan Usaha) di Kota Tangerang Tahun 2014–2017

No.	SektorPekerjaan	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, perburuhan, kehutanan, dan	7.913	7.085	8.540	9.720

No.	Sektor Pekerjaan	2014	2015	2016	2017
	perikanan				
2	Industri Pengolahan	316.875	264.599	349.442	243.005
3	Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi	243.904	249.033	259.998	252.725
4	Jasa Kemasyarakatan	180.060	209.025	185.442	223.564
5	Lainnya	174.229	182.981	187.683	243.005
Jumlah		922.981	912.723	991.105	972.018

Sumber: BPS Kota Tangerang, Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.14, pada tahun 2017 karakteristik pekerja di Kota Tangerang sebagian besar bekerja di sektor industri pengolahan dan perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi. Sementara sektor pertanian, perburuhan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja.

Gambaran persebaran tenaga kerja menurut sektor pekerjaan (lapangan usaha) tersebut mengindikasikan bahwa Kota Tangerang mempunyai potensi ketenagakerjaan di bidang perindustrian, perdagangan, dan jasa. Sektor (lapangan usaha) tersebut merupakan ciri khas aktivitas perekonomian daerah yang berbentuk kota. Potensi lain yang mungkin tidak banyak memberikan kontribusi ketenagakerjaan seperti pertanian, perburuhan, kehutanan, dan perikanan dapat dikembangkan melalui program padat karya produktif dan kewirausahaan. Dengan demikian, sejalan dengan perkembangannya, sektor pekerjaan (lapangan usaha) dapat ditingkatkan melalui penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya bagi penduduk Kota Tangerang dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal.

Salah satu pendekatan yang sering dilakukan terkait dengan ketenagakerjaan adalah optimalisasi kemampuan dan keterampilan berdasarkan kebutuhan serta penyesuaian jenis lowongan pekerjaan dengan kualifikasi tingkat pendidikan serta keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja. Pada tahun 2017, di Kota Tangerang terdapat 19.232 orang pencari kerja, sedangkan banyaknya lowongan kerja yang tersedia (terdaftar) sebanyak 15.902 lowongan. Hal ini berarti bahwa kesempatan kerja (lowongan kerja yang tersedia) tidak seimbang dengan pertambahan angkatan kerja (bekerja dan tidak bekerja) dari waktu ke waktu.

Tabel 1.15. Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Yang Tersedia (Menurut Tingkat Pendidikan) di Kota TangerangTahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	PencariKerja			LowonganKerja		
		Lk	Pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1	TidakTamat SD	1	0	1	0	0	0
2	SD	18	72	98	16	70	86
3	SLTP	175	382	557	184	397	681
4	SLTA	5.847	5.540	11.387	2.596	2.566	5.162
5	Diploma/Sarjana Muda	181	315	496	405	514	946
6	Sarjana	839	872	1.711	365	368	733
7	PascaSarjana (S2)	12	19	31	10	28	38
Tahun 2017		7.072	7.200	14.281	3.576	3.943	7.646
Tahun 2016		9.965	9.267	19.232	7.566	8.336	15.902
Tahun 2015		9.694	9.641	19.335	7.714	6.598	14.312
Tahun 2014		7.12	6.344	13.464	6.846	6.444	13.29

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Tahun 2017

Dari tabel 1.15 terlihat bahwa berdasarkan jenis kelamin, pencari kerja pada tahun 2017 didominasi oleh tamatan SLTA sebanyak 11.387 orang, sedangkan lowongan kerja yang tersedia untuk lulusan SLTA sebanyak 5.162 lowongan.

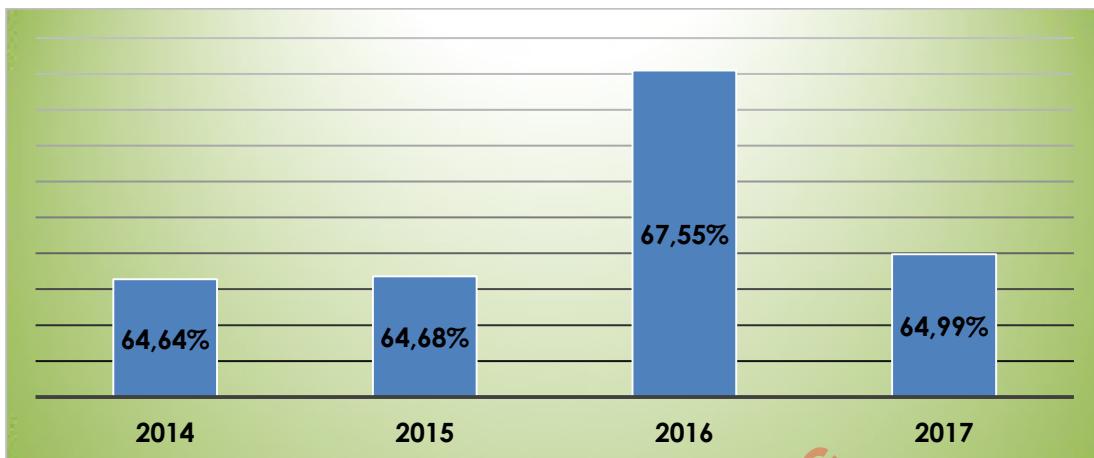
Indikator ketenagakerjaan yang bisa digunakan untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPak adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Secara formulasi TPak bisa dihitung melalui rasio antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang selama 4 tahun terakhir bisa dilihat pada grafik 1.1 berikut ini:

**Grafik 1.1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang
Tahun 2014-2017**



Sumber : BPS Kota Tangerang, Tahun 2017

Berdasarkan grafik 1.1, terlihat bahwa selama tahun 2017 nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 67,55% menjadi 64,99%. Dan secara rata-rata TPak Kota Tangerang Tahun 2014-2017 sebesar 65,47%. Hal ini menunjukkan bahwa selama 4 tahun terakhir (2014–2017) secara rata-rata diantara 100 orang yang termasuk ke dalam Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) terdapat 65 orang yang merupakan Angkatan Kerja.

1.2.3 Kondisi Ekonomi

Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak terhadap kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang secara nyata dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan perekonomian membutuhkan kebijakan ekonomi yang mampu mengarahkan segala tindakan perekonomian menuju tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan suatu hal yang kompleks. karena banyaknya keterkaitan variabel ekonomi yang harus diperhitungkan. Hal ini menuntut daerah untuk lebih serius dan seksama memperhatikan seluruh faktor, variabel, dan indikator ekonomi makro yang terlibat di dalam pembangunan. Kondisi ekonomi daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi secara umum pada tahun sebelumnya (diantaranya PDRB, Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Inflasi) serta rencana ekonomi makro pada kurun waktu tertentu.

Perekonomian daerah dapat menjadi reflektor dan tolok ukur kinerja perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan di bidang ekonomi. Kerangka ekonomi daerah akan memuat faktor fundamental ekonomi daerah yang memberikan kontribusi agregat ekonomi berdasarkan penggunaan maupun sektor riil lapangan usaha dalam batasan-batasan kemampuan ekonomi daerah. Perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal dan internal. Kondisi lingkungan eksternal dapat berupa perkembangan dan perubahan faktor, variabel, dan indikator ekonomi dalam wilayah cakupan yang lebih luas seperti ekonomi Regional atau Nasional. Sementara itu, kondisi lingkungan internal dapat berupa perkembangan dan perubahan berbagai faktor, variabel, dan indikator ekonomi yang berada di dalam daerah tersebut akibat adanya gejolak sosial-politik yang membawa kepada adanya perubahan kebijakan pembangunan.

1.2.3.1 Potensi Unggulan Daerah

Kedudukan dan peran Kota Tangerang yang strategis karena berada di antara Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan secara regional merupakan bagian dari Kawasan Megapolitan Jabodetabekpunjur. serta didukung dengan aksesibilitas yang baik, seperti:

1. Keberadaan Jalan Toll Jakarta-Merak dan Bandara Soekarno-Hatta

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang memiliki keuntungan dalam pemanfaatan fasilitas publik kota metropolitan. Apalagi jika ditunjang dengan kemudahan (aksesibilitas) ke kota Jakarta dan kota-kota penting di Banten dan Jawa Barat, yaitu dengan adanya ruas jalan tol Jakarta-Merak sepanjang 100 km serta keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, maka akan semakin memperluas aksesibilitas dan meningkatkan mobilitas penduduk Kota Tangerang dalam beraktivitas dan berinteraksi antar kota dan antar penduduknya.

2. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan jalan yang didukung oleh rencana jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR II) (Serpong-BSH), jalan rel double track Kereta Api (Tangerang-Jakarta), perpanjangan koridor IV Busway (Kalideres-Tangerang) dan Frontage tol (Jakarta-Merak) serta jaringan jalan lokal. Keberadaan jaringan jalan tersebut sebagai penghubung dalam kota yang berfungsi untuk mempermudah akses dan

pengembangan prasarana distribusi bagi masyarakat khususnya yang beraktivitas di sektor/bidang industri dan perdagangan.

Dengan kedudukan geografis dan dukungan aksesibilitas tersebut Kota Tangerang mempunyai beberapa potensi kawasan strategis dan potensi ruang yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikembangkan. antara lain:

1. Sungai Cisadane

Sungai Cisadane yang membelah Kota Tangerang mengalir dari hulunya di Gunung Pangrango Bogor dan berhilir ke Laut Jawa dengan panjang sekitar 137,8 km. Sungai Cisadane memiliki sembilan anak sungai dan jutaan warga yang menggantungkan hidup terhadapnya sebagai sumber baku air minum dan MCK (mandi, cuci, dan kakus). Selain itu, Sungai Cisadane mempunyai debit aliran relatif tinggi serta kedalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi prasarana transportasi alternatif (transportasi air), pengairan (irigasi) pertanian dan sebagai pendukung budidaya perikanan air tawar.

2. Situ/Danau

Keberadaan situ yang berlokasi di Kota Tangerang memiliki prospek dan potensi yang baik apabila mampu dikelola dengan optimal. Hal ini terlihat dari karena beberapa situ mempunyai lokasi yang cukup strategis, antara lain Situ Cipondoh dan Situ Bulakan yang dapat dikembangkan menjadi obyek pariwisata daerah.

3. Pariwisata

Kota Tangerang memiliki beberapa lokasi objek wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata rohani. Obyek-obyek wisata tersebut perlu dikelola dengan profesional sehingga bukan hanya mencapai tujuan-tujuan ekonomis seperti meningkatkan arus kunjungan wisatawan. tetapi juga dapat memelihara cagar budaya dan sejarah yang sangat penting dalam perkembangan Kota Tangerang. Selain itu, Kota Tangerang juga memiliki berbagai tempat dan agenda budaya yang jika dikelola lebih baik akan mendatangkan arus wisatawan dan mendorong perekonomian wilayah. serta akan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata, seni,dan budaya, serta akan memperkokoh karakter dan jati diri masyarakat Kota Tangerang.

Untuk itu, idealnya tidak direduksi hanya sebatas pemeliharaan seni dan tradisi masyarakat, tetapi juga upaya untuk mengelaborasi nilai-nilai yang terdapat dalam setiap tempat pariwisata dan agenda budaya tersebut untuk kemudian

dijadikan salah satu elemen dalam membangun kultur dan karakter masyarakat Kota Tangerang. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar kekayaan yang dimiliki ini terus disosialisasikan dan dipromosikan khususnya kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang sehingga akan lebih mengenal dan timbul rasa memiliki terhadap kekayaan pariwisata, seni dan budaya tersebut. Untuk meningkatkan program pariwisata ini, Pemerintah Daerah Kota Tangerang perlu mengedakan berbagai event wisata dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan operator pariwisata.

4. Industri

Dilihat dari jumlah industri yang ada, Kota Tangerang termasuk kota industri. Kedekatan dengan Ibukota negara dan kemudahan akses terhadap berbagai prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara, menyebabkan Kota Tangerang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif bagi pelaku industri. Oleh karena itu, sektor industri memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Sektor industri merupakan sektor yang dominan kontribusinya terhadap perekonomian di Kota Tangerang. Pengembangan sektor ini akan berdampak signifikan bagi masyarakat Kota Tangerang. Pembangunan industri di Kota Tangerang diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh dalam menciptakan landasan perekonomian yang kuat agar tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri.

Sektor industri yang perlu terus dikembangkan adalah industri pengolahan karena memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang tinggi. Untuk pengembangannya, perlu dibangun kawasan-kawasan industri baru dengan infrastruktur yang memadai. Untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif industrialisasi terhadap lingkungan, perlu dipilih industri-industri non-polutif dan kewajiban bagi pengembang kawasan industri untuk membangun sarana IPAL.

1.2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan di

suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu (biasanya dalam tahun tertentu), tanpa memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain, suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB disajikan menggunakan dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan. PDRB ADHB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

PDRB ADHB di Kota Tangerang pada tahun 2014-2017 secara absolut mengalami peningkatan yang konsisten di setiap tahunnya. Pada tahun 2014 sebesar Rp.109.956,07 miliar, meningkat menjadi Rp.148.272,09 miliar di tahun 2017 atau meningkat sebesar 34,85%.

Tabel 1.16. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.533,55	1.736,20	1.904,07	2.088,91
2	Pertambangan dan Pergalian	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	37.463,77	40.120,08	42.032,74	44.129,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	182,94	250,35	268,78	289,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66,64	73,74	79,90	83,73
6	Kontruksi	7.855,12	8.643,22	9.266,13	10.224,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.379,28	13.099,18	13.640,58	14.108,23
8	Transportasi dan Pergudangan	28.532,18	36.417,97	42.102,75	48.418,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.499,67	1.691,12	1.856,20	2.032,77
10	Informasi dan Komunikasi	5.098,71	5.476,81	5.957,41	6.250,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.764,58	3.083,52	3.568,91	3.950,12
12	Real Estate	5.532,65	6.159,24	6.742,55	7.230,32
13	Jasa Perusahaan	1.045,63	1.216,57	1.349,04	1.490,72
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.254,78	1.443,11	1.609,43	1.757,54

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
15	Jasa Pendidikan	2.348,91	2.574,55	2.781,60	3.044,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	927,29	1.005,14	1.090,92	1.180,33
17	Jasa Lainnya	1.470,37	1.685,93	1.834,42	1.993,20
Produk Domestik Regional Bruto		109.956,07	124.676,73	136.085,43	148.272,09

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2017 diolah Bapeeda

Berdasarkan tabel 1.16 terlihat bahwa struktur perekonomian Kota Tangerang selama tahun 2014-2017 masih didominasi oleh industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, dan perdagangan besar dan eceran. Industri pengolahan mengalami peningkatan dari sebelumnya (2016) sebesar Rp.42.032,74 miliar menjadi Rp.44.129,26 miliar pada tahun 2017. Begitu juga dengan sektor transportasi dan pergudangan serta sektor perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor. Keduanya mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2017. Secara keseluruhan masing-masing lapangan usaha mengalami trend peningkatan.

**Tabel 1.17. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (=2010)
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 (Miliar Rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.204,68	1.290,53	1.364,49	1.444,82
2	Pertambangan dan Pergalian	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	34.007,79	35.049,96	36.037,67	37.485,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	158,71	157,08	174,62	183,24
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66,99	70,48	75,39	79,39
6	Kontruksi	5.938,31	6.456,08	6.850,60	7.527,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.449,94	11.921,93	12.321,32	12.959,81
8	Transportasi dan Pergudangan	13.133,40	14.132,37	15.236,02	16.170,60
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.208,70	1.295,36	1.404,10	1.500,76
10	Informasi dan Komunikasi	6.083,28	6.666,41	7.243,73	8.137,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.228,70	2.409,29	2.707,06	2.945,87
12	Real Estate	5.312,63	5.615,61	6.051,16	6.476,43
13	Jasa Perusahaan	850,92	910,62	974,99	1.037,94
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	919,49	984,14	1.057,38	1.112,17
15	Jasa Pendidikan	1.769,86	1.891,04	2.028,28	2.146,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	767,46	796,83	847,99	896,13
17	Jasa Lainnya	1.082,67	1.163,71	1.247,11	1.317,92
Produk Domestik Regional Bruto		86.183,53	90.811,44	95.621,91	101.421,30

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2017 diolah Bapeeda

Jika dilihat lebih lanjut. PDRB Berdasarkan Harga Konstan selama kurun waktu empat tahun (2014-2017) cenderung meningkat dari Rp.86.183,53 Miliar (Tahun 2014), menjadi Rp.101.421,30 Miliar (Tahun 2017) atau meningkat sebesar 17,68%.

**Tabel 1.18. Peranan Sektor Terhadap PDRB ADHB Dan ADHK
Tahun 2014-2017**

Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
	%	%	%	%	%	%	%	%
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,39	1,40	1,39	1,42	1,40	1,43	1,41	1,42
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	34,07	39,46	32,18	38,60	30,89	37,69	29,76	36,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,20	0,17	0,20	0,18	0,20	0,18
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,08	0,06	0,08	0,06	0,08	0,06	0,08
F. Konstruksi	7,14	6,89	6,93	7,11	6,81	7,16	6,90	7,42
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,26	13,29	10,51	13,13	10,02	12,89	9,52	12,78
H. Transportasi dan Pergudangan	25,95	15,24	29,21	15,56	30,94	15,93	32,65	15,94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,36	1,40	1,36	1,43	1,36	1,47	1,37	1,48
J. Informasi dan Komunikasi	4,64	7,06	4,39	7,34	4,38	7,58	4,22	8,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,51	2,59	2,47	2,65	2,62	2,83	2,66	2,90
L. Real Estat	5,03	6,16	4,94	6,18	4,95	6,33	4,88	6,39
M,N. Jasa Perusahaan	0,95	0,99	0,98	1,00	0,99	1,02	1,01	1,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,14	1,07	1,16	1,08	1,18	1,11	1,19	1,10
P. Jasa Pendidikan	2,14	2,05	2,06	2,08	2,04	2,12	2,05	2,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,89	0,81	0,88	0,80	0,89	0,80	0,88
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,34	1,26	1,35	1,28	1,35	1,30	1,34	1,30
Produk Domestik Regional Bruto	100,00							

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2017 diolah Bappeda

Hal yang perlu diingat bahwa PDRB hanya merupakan angka agregat aktivitas ekonomi suatu wilayah, sehingga belum mewakili derajat pemerataan hasil pembangunan. Disamping itu perhitungan PDRB bukan hanya berdasar pada fungsi waktu saja, tapi juga merupakan fungsi aktivitas ekonomi utama yang sangat dipengaruhi kondisi global lainnya seperti: kondisi ekonomi dunia dan regional, alokasi belanja pemerintah, investasi masyarakat, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, inflasi, dan seterusnya. Dengan demikian tolok ukur kesuksesan dan keberhasilan perekonomian tidak hanya diukur dari angka PDRB saja melainkan

harus melibatkan indikator ekonomi lain yang menunjukkan kinerja pemerataan kesejahteraan suatu wilayah.

1.2.3.3 Pendapatan Per Kapita

Potensi pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari besaran pendapatan per kapitanya atau dalam hal ini sama dengan PDRB perkapita. PDRB perkapita meningkat berarti pemerintah telah menjalankan fungsi pembangunannya dengan baik. Berikut ini PDRB per kapita Kota Tangerang pada periode tahun 2014 – 2017.

Tabel 1.19. PDRB per Kapita Kota Tangerang Tahun 2014-2017

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	109.956.046,12	124.676.707,52	136.085.437,95	148.272.091,33
Penduduk	1.999.928	2.047.237	2.093.622	2.105.361
PDRB per Kapita (Juta Rp)	54,98	60,90	65,00	70,43

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2017 diolah Bappeda

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kapita atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, secara agregat PDRB per kapita Kota Tangerang mencapai Rp.70,43 juta rupiah, meningkat 8,35% bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp.65 juta rupiah. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pada tahun sebelumnya (2016) sebesar 6,73%, namun peningkatannya lebih rendah dibandingkan pada tahun periode tahun 2014-2015 berturut-turut sebesar 13,52% dan 10,77%.

1.2.3.4 Laju Inflasi

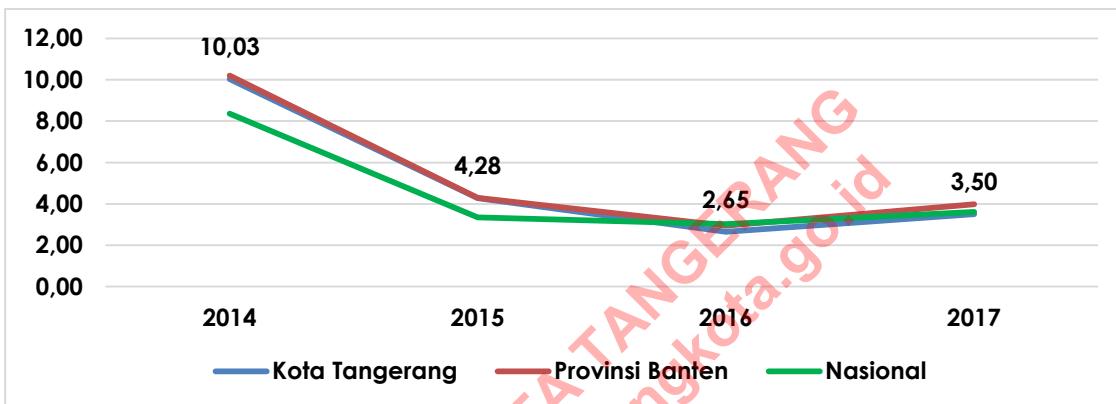
Kota Tangerang selama periode tahun 2014-2017 cenderung dapat mengendalikan tingkat inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2014, berada pada dua digit (10,03%), pada tahun selanjutnya 2015 sampai dengan 2017 Kota Tangerang dapat mengendalikan inflasi pada posisi satu digit, bahkan tingkat inflasi dibawah 5%. Inflasi sepanjang tahun 2017 dipengaruhi oleh harga-harga yang diatur pemerintah (*administered prices*), utamanya penyesuaian tarif listrik bagi golongan 900 Volt Ampere nonsubsidi. Rendahnya inflasi pada 2017 disebabkan upaya pemerintah dalam menjaga pergerakan harga pangan atau *volatile food*.

Tabel 1.20. Perkembangan Inflasi Tahunan Tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Periode 2014-2017

Tahun	Inflasi (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2014	10,03	10,20	8,36
2015	4,28	4,29	3,35
2016	2,65	2,94	3,02
2017	3,50	3,98	3,61

Sumber: BPS RI dan Provinsi Banten, 2017

Grafik 1.2. Perkembangan Inflasi Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2014-2017



Sumber : BPS RI, Provinsi Banten, Kota Tangerang, 2018

1.2.3.5 Investasi

Sektor investasi merupakan salah satu upaya bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya persaingan antar daerah dalam meningkatkan daya tarik investasi dari daerahnya masing-masing. Mengingat daya tarik investasi dipengaruhi oleh banyak hal. maka tiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar investor mau melakukan investasi. Selain itu. dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maka diperlukan investasi baik yang berasal dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri/asing (PMA).

Kegiatan pengembangan penanaman modal (investasi), sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, seperti menciptakan lapangan kerja, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Banten dan DPMPTSP tahun 2016 bahwa nilai investasi di Kota Tangerang berdasarkan izin prinsip (minat investasi) sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 untuk investasi dalam negeri (PMDN) mencapai sebesar Rp.3.652.727.100.000, dan nilai investasi asing (PMA) dalam bentuk US\$ sebesar US\$.239.514.800 atau Rp.3.209.498.300.000. Total investasi di Kota Tangerang berdasarkan izin prinsip pada Tahun 2016 adalah Rp.6.862.225.400.000. Jumlah investasi tersebut diperoleh dari 48 proyek PMA dan 35 proyek PMDN. Total jumlah investasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan hampir 100% dari tahun sebelumnya. Gambaran perkembangan investasi dalam kurun waktu Tahun 2010-2017 berdasarkan izin usaha dapat dilihat pada tabel 1.21. berikut ini.

**Tabel 1.21. Realisasi Investasi PMDN Dan PMA Berdasarkan Izin Usaha
Periode 2010 – 2017 Di Kota Tangerang**

Tahun	Data Hasil IU PMDN		Data Hasil IU PMA			Total Investasi Rp (Jutaan)
	Jumlah Izin	Jumlah Investasi Rp (Jutaan)	Jumlah Izin	Nilai Dalam USD (Ribuan)	Dalam Jutaan Rp (Kurs 1 USD = Rp. 13.300,-)	
2017	1.287	5.594.922,8	51	157.414,2	2.093.608,9	7.688.531,7
2016	35	3.652.727,1	48	239.514,8	3.209.498,3	6.862.225,4
2015	30	1.994.319,4	47	133.772,4	1.672.155,0	3.666.474,4
2014	38	3.837.046,7	51	538.854,8	6.735.685,0	10.572.731,7
2013	20	478.765,7	39	286.664,5	3.583.306,3	4.062.072,0
2012	11	2.607.430,3	37	149.273,9	1.865.923,8	4.473.354,1
2011	4	70.954,8	27	83.580,0	1.044.750,0	1.115.704,8
2010	3	95.089,9	12	48.638,9	607.986,3	703.076,2
Jumlah	18.331.256,7		Jumlah	1.637.713,5	20.597.350,2	238.985.297,3

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Banten. 2017

*) DPMPTSP per Desember 2017

Sedangkan nilai investasi berdasarkan izin usaha sampai dengan bulan desember tahun 2017 untuk investasi dalam negeri (PMDN) mencapai sebesar Rp.5.594.922.800.000, dan nilai investasi asing (PMA) dalam bentuk US\$ sebesar US\$.157.414.200 atau Rp.2.093.608.900.000. Total investasi di Kota Tangerang berdasarkan izin usaha pada Tahun 2017 adalah Rp.7.688.531.700.000. Jumlah investasi tersebut diperoleh dari 51 proyek PMA dan 1.287 proyek PMDN.

Tabel 1.22. Perkembangan Investasi PMDN Dan PMA Berdasarkan Izin Prinsip / Minat Investasi PMDN Dan PMA Periode 2010 – 2017

Tahun	DATA IP PMDN		DATA IP PMA			Total Investasi Rp (Juta)
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi Rp (Juta)	Jumlah Proyek	Nilai Dalam USD (Ribuan)	Dalam Jutaan Rp (Kurs 1 USD = Rp. 13.300,-)	
2017	71	4.311.621,9	121	418.745,1	5.569.309,83	9.880.931,73
2016	50	1.062.357,6	86	847.706,9	11.359.272,5	12.421.630,06
2015	51	1.185.539,1	76	303.252,7	3.790.658,8	4.976.197,85
2014	63	5.811.733,8	101	480.105,7	6.001.321,3	11.813.055,05
2013	30	1.228.880,0	57	164.586,6	2.057.332,5	3.286.212,50
2012	4	97.880,9	26	117.816,5	1.472.706,3	1.570.587,15
2011	7	428.175,1	21	80.378,7	1.004.733,8	1.432.908,85
2010	4	26.000,0	8	5.701,0	71.262,5	97.262,50
Jumlah	13.089.830,8		Jumlah	1.570.586,3	19.967.324,83	189.856.119,23

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Banten. 2017

*) DPMPTSP per Desember 2017

Berdasarkan data kedua tabel di atas (tabel 1.20 dan tabel 1.21) menunjukkan Pemerintah Kota Tangerang memiliki kebijakan sangat terbuka terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Tangerang.

1.2.4 Kinerja Pembangunan Daerah

1.2.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari berbagai indikator makro ekonomi dan sosial yang kerap digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah, implementasinya terkadang bisa menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini terjadi karena keberhasilan pembangunan tidaklah cukup hanya diukur dengan menggunakan indikator makro ekonomi dan sosial. Dengan demikian, untuk menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah harus menggunakan indikator yang secara resmi digunakan oleh badan dunia, yaitu The United Nations Development Programme (UNDP).

Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat merupakan program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan misi pembangunan daerah Kota Tangerang. Melalui pembangunan bidang ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat harus dapat diwujudkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.23. Komponen IPM Kota Tangerang Tahun 2014 – 2017

Komponen IPM Kota Tangerang	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,09	71,29	71,34	71,38
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,86	12,90	13,41	13,44
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,20	10,20	10,28	10,29
Pengeluaran (Ribu Rupiah)	13.671,00	13.766,00	13.911,00	14.104,00
Indeks Harapan Hidup	78,60	78,61	78,98	79,05
Indeks Pengetahuan	69,72	69,83	71,52	71,63
Indeks Pengeluaran	79,69	79,90	80,22	80,64
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,87	76,08	76,81	77,01

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018

Kecenderungan angka IPM Kota Tangerang menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang secara berkelanjutan telah membawa hasil yang positif.

1.2.4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kota Tangerang berusaha memaksimalkan potensi sumberdaya manusianya untuk mengolah potensi yang ada.

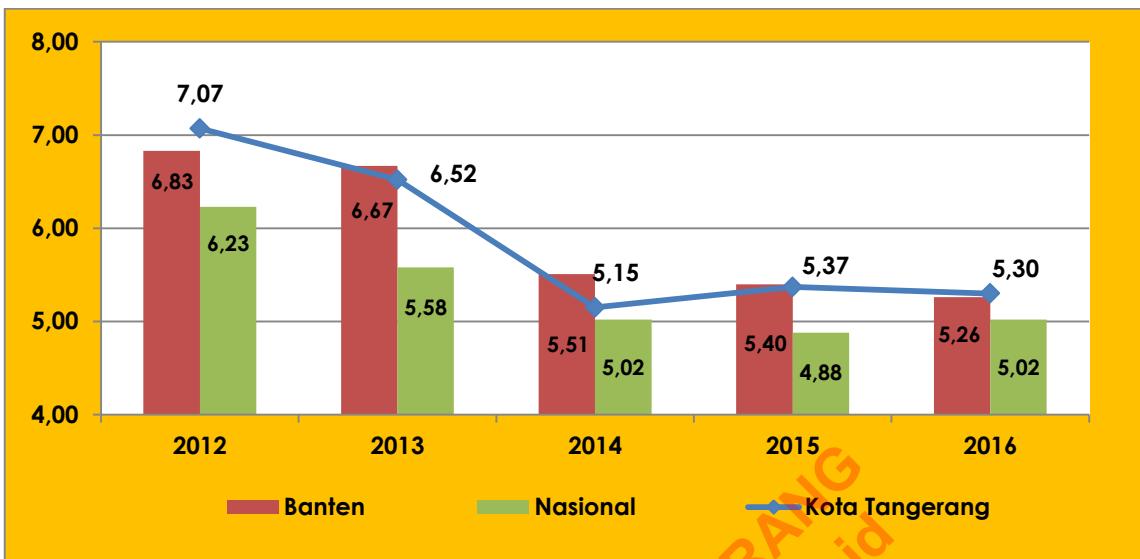
Pada tahun 2016 perekonomian Kota Tangerang mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang tahun 2016 sebesar 5,30%, sedangkan tahun 2014 dan 2015 sebesar 5,15% dan 5,37%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,36%. Seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif.

Tabel 1.24. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012 – 2016

Tahun	LPE (%)		
	Kota Tangerang	Provinsi Banten	Nasional
2012	7,07	6,83	6,23
2013	6,52	6,67	5,58
2014	5,15	5,51	5,02
2015	5,37	5,40	4,88
2016	5,30	5,26	5,02

Sumber: BPS, 2017

Grafik 1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tangerang Tahun 2012 – 2016 dan Perbandingannya dengan Provinsi Banten dan Nasional



Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten dan Pusat

Selama periode 2012-2016, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Tingkat Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan nasional.

Secara umum, pertumbuhan ekonominya cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik. Pada tahun 2016, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan domestik, Kota Tangerang tetap dapat mempertahankan LPE-nya di atas Provinsi Banten dan Nasional. Relatif stabilnya iklim perekonomian Kota Tangerang selama ini harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi.

1.2.4.3 Tingkat Kemiskinan

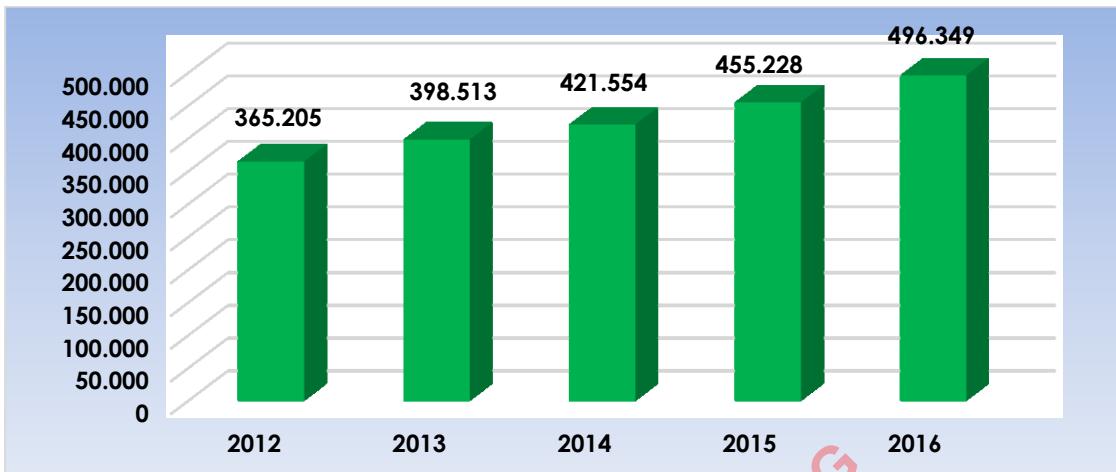
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, termasuk Indonesia. Masalah mendasar (kemiskinan) tidak hanya menyangkut jumlah/persentase atau identifikasi penduduk miskin yang layak mendapat bantuan saja, juga menyangkut masalah definisi kemiskinan itu sendiri. Perbedaan definisi ini akan mengakibatkan perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan dan perbedaan dalam persepsi atas hasil dan implementasinya.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Standar minimal kehidupan ini berbeda antara suatu daerah dengan daerah lain, karena sangat tergantung kebiasaan/adat/budaya, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya. Kemiskinan di suatu wilayah terjadi karena beberapa faktor antara lain yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, tingginya angka ketergantungan antara penduduk yang bekerja dan pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata. Disamping itu, ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan *in efficiency economic*, terdapat alokasi asset yang tidak efisien dan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar dan kemudian menyebabkan kesenjangan yang semakin melebar.

Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas dan tidak ada masyarakat yang dapat merasa nyaman dengan kondisi dimana rekan-rekan satu wilayahnya berada dalam kesengsaraan karena kemiskinan yang diderita mereka. Mungkin karena alasan itulah mengapa setiap agama menekankan pentingnya bekerja untuk menanggulangi kemiskinan dan juga merupakan salah satu alasan mengapa bantuan internasional untuk mengatasi kemiskinan selalu didukung secara universal oleh setiap bangsa yang demokratis. Seperti yang kita ketahui bahwa pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan (GK) Kota Tangerang merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten/Kota yang ada di Banten yaitu sebesar Rp.455.228 pada tahun 2015 dan Rp.496.349 pada tahun 2016 atau naik sebesar 9,01%.

**Grafik 1.4. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Tangerang
Tahun 2012-2016**



Sumber : BPS Kota Tangerang, 2017

Tingginya Garis Kemiskinan Kota Tangerang dikarenakan tingginya harga komoditi makanan dan bukan makanan seperti perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya berimbas pada konsumsi masyarakat kelompok marginal di Kota Tangerang. Kontribusi makanan (terutama beras) terhadap garis kemiskinan sangat tinggi yaitu sebesar 17,47%. Garis kemiskinan berasal dari makanan menyumbang sebesar 61,97% dan non makanan 38,02%.

**Tabel 1.25. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rupiah)
Tahun 2011-2016**

Tahun	Makanan	Bukan Makanan	Total
2011	377.062	438.666	815.728
2012	367.189	383.759	750.948
2013	497.673	636.888	1.134.561
2014	545.683	767.712	1.313.395
2015	588.960	765.752	1.354.712
2016	662.693	851.199	1.513.892

Sumber : BPS Kota Tangerang, 2017

Tabel 1.25 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk Kota Tangerang hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2011-2016. Rata-rata pengeluaran penduduk Kota Tangerang tahun 2015 sebesar Rp.1.354.712 naik menjadi Rp.1.513.892 pada tahun 2016, Apabila dibandingkan dengan garis Kemiskinan Kota Tangerang yang besarnya Rp.496.349 maka pengeluaran penduduk miskin kota tangerang besarnya hanya sepertiga dari pengeluaran rata-rata penduduk Kota Tangerang. Komposisi pengeluaran untuk makanan sebesar 43,77% jauh lebih kecil

jika dibandingkan pengeluaran non makanan sebesar 56,23%. Data ini menunjukkan kebalikan dari pengeluaran pola konsumsi penduduk miskin dimana persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan 61,97% jauh lebih besar dibanding non makanan yang sebesar 38,02%.

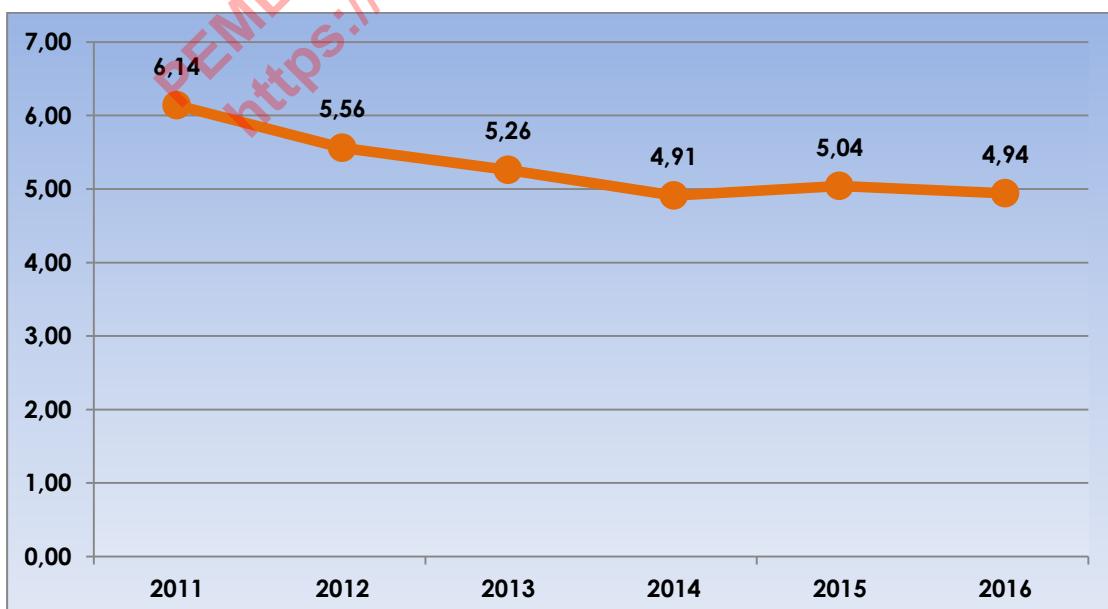
Tabel 1.26. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Tangerang Tahun 2011-2016

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/ kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2011	337.543	114.330	6,14
2012	365.205	106.500	5,56
2013	398.513	103.100	5,26
2014	421.554	98.800	4,91
2015	455.228	102.560	5,04
2016	496.349	102.880	4,94

Sumber: BPS Kota Tangerang

Tabel 1.26 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Tangerang dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dimana selalu terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin sampai tahun 2014 dan naik kembali di tahun 2015 dan kembali turun di tahun 2016.

Grafik 1.5. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tangerang Tahun 2011-2016



Sumber: BPS Kota Tangerang

Program kesehatan gratis, pendidikan melalui Program Tangerang Cerdas, infrastruktur dan subsidi pangan relatif tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang. Masyarakat dengan pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan biasanya hanya dengan sedikit goncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar masuk menjadi miskin.

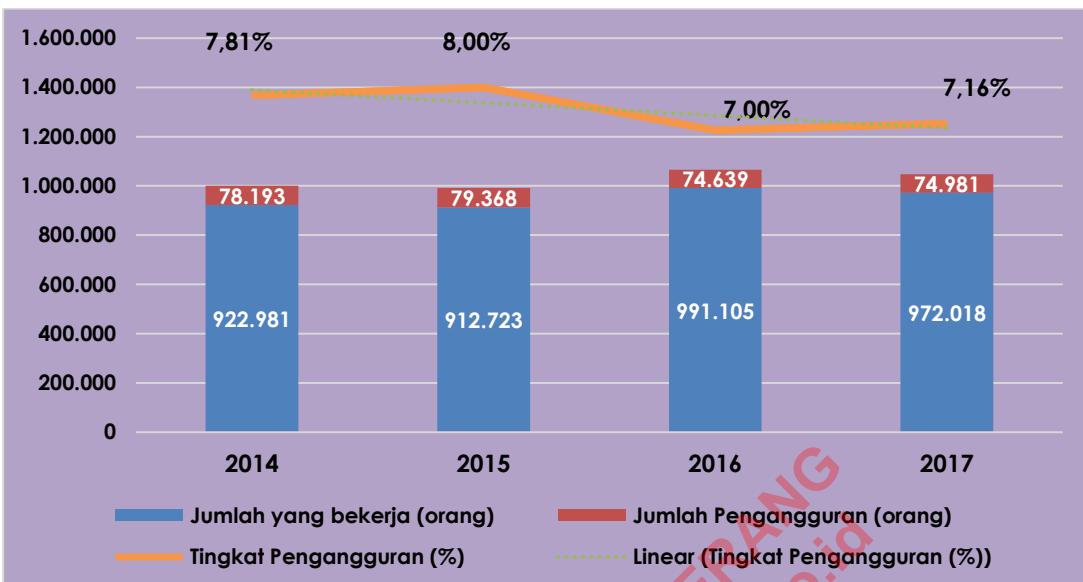
Oleh karenanya program-program pro kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk mereka yang berada dibawah garis kemiskinan tetapi juga masyarakat yang rentan miskin yaitu masyarakat yang dengan mudah jatuh ke bawah garis kemiskinan.

1.2.4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan progam dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Secara formulasi, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung melalui rasio antara jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017, jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan di Kota Tangerang sebanyak 74.981 orang, sedangkan jumlah angkatan kerjanya sebanyak 1.046.999 orang. Sehingga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang tahun 2017 sebesar 7,16%. Hal ini mengartikan bahwa diantara 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Jika dibandingkan dengan 4 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang cenderung stabil dikisaran 7 s.d 8 persen.

**Grafik 1.6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Tangerang Tahun 2014-2017**



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2017

1.2.4.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan parameter yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah selaku penyedia jasa layanan.

Metode pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Tangerang Tahun 2014-2017 mengikuti gradasi penilaian dalam angket dengan dasar teknik skala Likert. Teknik skala Likert mengarahkan persepsi responden terhadap empat alternatif pilihan jawaban yang tersedia dalam angket, sehingga dalam hasil pengukurannya akan mendapatkan 4 kelas penilaian, yaitu :

- ⇒ Kategori A (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di survei dinilai Sangat Baik oleh masyarakat) dengan nilai 81,26 sampai dengan 100,00.
- ⇒ Kategori B (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di survei dinilai Baik oleh masyarakat) dengan nilai 62,51 sampai dengan 81,25.
- ⇒ Kategori C (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di survei dinilai Kurang Baik oleh masyarakat) dengan nilai 43,76 sampai dengan 62,50.
- ⇒ Kategori D (pelaksanaan pelayanan di unit penyelenggara pelayanan yang di survei dinilai Tidak Baik oleh masyarakat) dengan nilai 25,00 sampai dengan 43,75.

Tabel 1.27. Nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2014-2017

No.	Tahun Pengukuran	Nilai IKM	Kategori	Mutu
1	2014	63,50	C	Baik
2	2015	78,77	B	Baik
3	2016	80,45	B	Baik
4	2017	82,621	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi SETDA Kota Tangerang, 2017

Berdasarkan data dalam tabel di atas, diperoleh peningkatan yang linear dan signifikan atas nilai IKM Kota Tangerang Tahun 2014-2017. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penilaian IKM tiap tahun yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang mampu memotivasi tiap unit-unit penyelenggara pelayanan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya.

BAB 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 Visi Kota Tangerang

Visi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:

**"TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS,
DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL
KARIMAH"**

Penjelasan terhadap penjelasan visi tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penjelasan Visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah	Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju	Terwujudnya Kota Tangerang yang maju dalam berbagai hal, melalui pemberian pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan tata kelola perkotaan yang berorientasi lingkungan.
	Terwujudnya Kota Tangerang yang Mandiri	Terwujudnya Kota Tangerang yang mandiri, melalui pembangunan yang dilakukan dengan memaksimalkan segenap potensi daerah yang dimiliki untuk mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dalam diri segenap masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama dan ikut bertanggung jawab dalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah.
	Terwujudnya Kota Tangerang yang Dinamis	Terwujudnya Kota Tangerang yang dinamis yaitu kehidupan yang berkesinambungan dengan mengikuti era perkembangan zaman dengan tetap menjaga mencerminkan kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang meskipun berbeda latar belakang etnis dan budaya, namun memiliki semangat kebersamaan dan nasionalisme berbasis kedaerahan, tenggang rasa dan tanggung jawab, sikap toleransi yang universal, dalam membangun Kota Tangerang.
	Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera	Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, melalui perwujudan masyarakat Kota Tangerang yang sejahtera yaitu memiliki tatanan kehidupan yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan, dan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan daerah.
	Terwujudnya Masyarakat Akhlakul Karimah	Terwujudnya masyarakat Kota Tangerang yang memiliki akhlakul karimah, yaitu terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madani <i>madaniyyah</i> dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (<i>baldatun toyibatun warabun ghafur</i>).

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018

2.1.2 Misi Kota Tangerang

Misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi;
3. Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi;
4. Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas;
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman.

Adapun penjelasan misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penjelasan Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Visi	Misi	Penjelasan Misi
Terwujudnya Kota Tangerang Yang Maju, Mandiri, Dinamis, Dan Sejahtera, Dengan Masyarakat Yang Berakhhlakul Karimah	Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional	Pelaksanaan Pembangunan Akan Berjalan Dengan Optimal Apabila Ditunjang Oleh Tata Pemerintahan Yang Baik, Akun-Tabel, Dan Transparan. Perwujudan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Aparatur Yang Mengedepankan Profesionalisme, Kompetensi, Kualitas, Transparansi, Objektifitas, Dan Bebas Dari Intervensi Politik Dan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional.

Visi	Misi	Penjelasan Misi
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Mempercepat Kemajuan Kota Tangerang, Yang Dilakukan Dengan Memajukan Kegiatan Ekonomi Yang Menjadi Sektor Unggulan, Seperti Perdagangan Dan Jasa, Industri, Dan Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi (UMKM) Sehingga Mampu Bersaing, Serta Memperluas Kesempatan Kerja, Mengurangi Pengangguran, Dan Mengentaskan Kemiskinan.
	Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi	Pengembangan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Ditujukan Untuk Meningkatkan Masyarakat Yang Berdaya Saing, Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Tangerang, Yang Ditunjang Dengan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi. Hal Ini Dilakukan Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Sumberdaya Manusia, Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Pelayanan, Serta Faktor Pendukung Lainnya.
	Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas	Penyediaan Dan Peningkatan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas. Mutlak Diperlukan Sekaligus Dapat Untuk Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Berlangsungnya Kegiatan Ekonomi Dan Investasi Secara Produktif. Sarana Perkotaan Merupakan Faktor Penunjang Bagi Kegiatan Ekonomi Kota Tangerang.
	Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman	Peningkatan Kualitas Dan Daya Dukung Lingkungan Untuk Mendukung Dalam Rangka Melaksanakan Merupakan Salah Satu Pilar Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman, Serta Seimbang Antara Dapat Menciptakan Kondisi Kemajuan Yang Seimbang Antara Peningkatan Aspek Sosial Dan Ekonomi Dengan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018

2.1.3 Tujuan Pembangunan Kota Tangerang

Perumusan tujuan pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Misi	Tujuan		
Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional	1.1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Inovatif, Dan Akuntabel (Good Governance)	
	1.2	Mengembangkan E-Government Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Pendukung Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan, Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Publik	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi	2.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Memantapkan Sinergitas Antar Sektor Perekonomian	
Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi	3.1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan Beserta Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukungnya Yang Layak, Memadai, Dan Berkualitas	
Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas	4.1	Meningkatkan Sistem Pengendalian Banjir Yang Memadai	
	4.2	Mengembangkan Sistem Transportasi Perkotaan Yang Modern Dan Terpadu	
Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman	5.1	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana	

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018

2.1.4 Sasaran Pembangunan Kota Tangerang

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Hasil perumusan sasaran pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4. Sasaran Pembangunan Kota Tangerang

Misi		Tujuan	Sasaran	
1	Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional	1.1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Inovatif, Dan Akuntabel (Good Governance)	1.1.1	Terwujudnya Penataan Pertanahan

Misi		Tujuan		Sasaran	
				1.1.8	Persandian Yang Berkualitas Terwujudnya Perencanaan Serta Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Yang Berkualitas
				1.1.9	Terwujudnya Kearsipan Yang Berkualitas
		1.2	Mengembangkan E-Government Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Pendukung Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan, Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Publik	1.2.1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berbasis Teknologi Informasi
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi	2.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dengan Memantapkan Sinergitas Antar Sektor Perekonomian	2.1.1	Terwujudnya Keberdayaan UMKM Dan Koperasi Sebagai Pendukung Perekonomian
				2.1.2	Terwujudnya Peningkatan Investasi Dan Kemudahan Perijinan
				2.1.3	Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Memadai Dan Berkualitas
				2.1.4	Meningkatnya Kepariwisataan
				2.1.5	Terwujudnya Perdagangan Yang Berkualitas Serta Peningkatan Perlindungan Konsumen
				2.1.6	Terwujudnya Industri Yang Maju
3	Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi	3.1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan Beserta Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukungnya Yang Layak, Memadai, Dan Berkualitas	3.1.1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan
				3.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas Kesehatan
				3.1.3	Terwujudnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				3.1.4	Terwujudnya Keluarga Sejahtera Melalui Keluarga Berencana
				3.1.5	Terwujudnya Pelayanan Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial
				3.1.6	Terwujudnya Penciptaan Dan Perluasan Lapangan Kerja
				3.1.7	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Dan Pelestarian Kebudayaan Daerah
				3.1.8	Terwujudnya Kepemudaan Dan Keolahragaan Yang Mandiri Dan Berprestasi
				3.1.9	Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesatuan, Kebangsaan, Kepolitan Dan Hukum
				3.1.10	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
				3.1.11	Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Dan Kegemaran Membaca Masyarakat

Misi		Tujuan		Sasaran	
4	Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan Berkualitas	4.1	Meningkatkan Sistem Pengendalian Banjir Yang Memadai	4.1.1	Terwujudnya Pengendalian Banjir Dan Genangan
		4.2	Mengembangkan Sistem Transportasi Perkotaan Yang Modern Dan Terpadu	4.2.1	Terwujudnya Jaringan Jalan Dan Sarana Pendukungnya Yang Mantap
				4.2.2	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan Terpadu
5	Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman	5.1	Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Bencana	5.1.1	Terwujudnya Peningkatan Penanggulangan Bencana
				5.1.2	Terwujudnya Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Layak
				5.1.3	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Berkualitas
				5.1.4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

2.2.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Adapun rumusan Strategi Umum pembangunan daerah jangka menengah Kota Tangerang sebagai berikut:

Strategi Umum 1 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan Sistem data/informasi pembangunan daerah yang meliputi ketersediaan, kelengkapan, kevalidan, dan akuntabilitasnya, serta pengembangan dan berbagai kajian/penelitian sebagai unsur pendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Strategi Umum 2 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem aplikasi pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta ketersediaan sarana-prasarana pendukung seperti: perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), dan kompetensi operator (brainware), serta didukung juga oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai (berkemampuan/berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses, praktis, dan aman).

Strategi Umum 3

: Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap ruang lingkup sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian (pemantauan & pengawasan), serta evaluasi pembangunan daerah yang meliputi: 1).ruang lingkup substansi/materi; 2).ruang lingkup pekerjaan; 3).ruang lingkup wilayah; serta 4).ruang lingkup waktu.

Strategi Umum 4

: Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial-budaya-kemasyarakatan yang berkeagamaan, berkemanusiaan, berkeadilan, dan berkebudayaan, dengan sumberdaya aparatur yang kompeten dan kapabel, serta penggunaan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir.

Strategi Umum 5

: Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan keterpaduan perekonomian lokal dengan perekonomian global (nasional dan regional), yang berbasis pada perekonomian kerakyatan serta berorientasi pada peningkatan kemandirian dan daya saing daerah.

- Strategi Umum 6** : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelayanan publik/masyarakat serta pelayanan aparatur pemerintahan daerah.
- Strategi Umum 7** : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dasar perkotaan dan penguatan sistem daya dukung lingkungan, serta pengintegrasian sistem/jaringan transportasi dan kelalulintasan perkotaan.
- Strategi Umum 8** : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap penataan dan pengelolaan kepemerintahan dan keadministrasian yang baik (bersih-amanah), akuntabel, dan transparan, yang mampu menjalin koordinasi, kemitraan, dan kerjasama dengan berbagai stakeholder pembangunan (masyarakat umum, dunia usaha, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) lainnya, dan dengan lembaga legislatif daerah (DPRD), serta juga didukung oleh struktur dan unsur birokrasi yang berintegritas, berkompetensi, responsif, adaptif, empatik, dan profesional.
- Strategi Umum 9** : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap perluasan cakupan dan peningkatan pemanfaatan hasil (outcome) pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pemantapan dan peningkatan sistem daya dukung

dan keberlanjutan ekologis dalam pembangunan daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tahun Dasar (s.d 2013)** : Kompilasi dan analisis baseline data dan hasil evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah sampai dengan tahun dasar (2013).
- Tahun I (2014)** : Pemenuhan dan peningkatan kualitas data/informasi pendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat sektoral maupun spasial (kewilayahannya).
- Tahun II (2015)** : Pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta aplikasi sistem pendukungnya.
- Tahun III (2016)** : Pengarahan dan penggerahan semua sumberdaya (SDM, SDA, dan SDB) menuju perbaikan dan pencapaian prestasi dan kualitas kerja (kinerja) di segala bidang/sektor dan wilayah.
- Tahun IV (2017)** : Penyeimbangan kembali (restabilisasi) terhadap orientasi/arah serta kapasitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil review dan evaluasi.
- Tahun V (2018)** : Pemantapan dan penguatan jalur keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Tahun Transisi (2019)** : Pemantapan dan pelanjutan keberhasilan melalui penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas daya dukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.3 PRIORITAS DAERAH

2.3.1. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang

Berdasarkan hasil pemaperasian (sinkronisasi) Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang yang dihasilkan sebanyak 11 (sebelas) prioritas yaitu:

1. Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih;
2. Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau;
3. Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau;
4. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
5. Ketahanan Pangan Daerah;
6. Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai;
7. Kondisivitas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah;
8. Pengelolaan Energi;
9. Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingkungan);
10. Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat;
11. Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat.

Selain itu, berikut ini tabel keterkaitan dan pemaperasian (sinkronisasi) antara prioritas pembangunan daerah Kota Tangerang dengan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, prioritas pembangunan daerah Kota Tangerang dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten, serta keterkaitan dan pemaperasian (sinkronisasi) antara prioritas pembangunan daerah Kota Tangerang dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan sasaran pembangunan daerah, sebagai pelengkap dari penjelasan di atas.

Tabel 2.5. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018	ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018								
	1 Peningkatan Kualitas Pendidikan	2 Peningkatan Kualitas Kesehatan	3 Penanggulangan Kemiskinan	4 Perluasan Kesempatan Kerja	5 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Ekonomi Lokal	6 Penataan Ruang Kota yang Berkelanjutan	7 Pengembangan Sistem Transportasi	8 Penanganan Banjir	9 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
1. Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih									√
2. Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	√		√						
3. Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau		√	√						
4. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial			√	√	√	√			
5. Ketahanan Pangan Daerah		√	√						
6. Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai						√	√	√	
7. Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha				√	√				
8. Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan						√		√	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018	ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018								
	1 Peningkatan Kualitas Pendidikan	2 Peningkatan Kualitas Kesehatan	3 Penanggulangan Kemiskinan	4 Perluasan Kesempatan Kerja	5 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Ekonomi Lokal	6 Penataan Ruang Kota yang Berkelanjutan	7 Pengembangan Sistem Transportasi	8 Penanganan Banjir	9 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingkungan)									
9. Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat						√			
10. Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat			√		√				

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

Tabel 2.6. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Prioritas Pembangunan Nasional

PRIORITY PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG	PRIORITY PEMBANGUNAN NASIONAL													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Reformasi birokrasi & Tata Kelola	Pendidikan	Kesehatan	Penanggulangan Kemiskinan	Ketahanan Pangan	Infrastruktur	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	Energi	LH dan Pengelolaan Bencana	Daerah Tertggal, Terdpat, Terluar & Pasca Konflik	Kebudayaan, Eko. Kreatif & Inovasi Teknologi	Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Bidang Perekonomian	Bidang Kesejahteraan Rakyat	
1. Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	✓													
2. Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau		✓												
3. Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau			✓											
4. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial				✓										
5. Ketahanan Pangan Daerah					✓									
6. Pelayanan						✓								

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Reformasi birokrasi & Tata Kelola	Pendidikan	Kesehatan	Penanggulangan Kemiskinan	Ketahanan Pangan	Infrastruktur	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	Energi	LH dan Pengelolaan Bencana	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik	Kebudayaan, Eko. Kreatif & Inovasi Teknologi	Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Bidang Perekonomian	Bidang Kesejahteraan Rakyat	
Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai														
7. Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha														
8. Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingkungan)														
9. Ketentraman dan Keteribatan serta Perlindungan Masyarakat														
10. Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat														

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

Tabel 2.7. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN						
	1	2	3	4	5	6	7
	Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemantapan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian	Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah	Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis
1. Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih						√	
2. Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau		√					
3. Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau		√					
4. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	√						
5. Ketahanan Pangan Daerah	√						
6. Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai				√			
7. Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha							√
8. Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingkungan)					√		
9. Ketentraman dan Ketertiban serta						√	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN						
	1	2	3	4	5	6	7
Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemantapan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian	Pemantapan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah	Pengelolaan dan Revitalisasi Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Pengembangan dan Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis	
Perlindungan Masyarakat							
10. Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat			✓				

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

Tabel 2.8. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Urusan Pemerintahan Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7	Prioritas 8	Prioritas 9	Prioritas 11	
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha		Pengelolaan Energi	Daya Dukung Lingk. dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat
A.	Urusan Wajib											
1	Pendidikan		√									
2	Kesehatan			√								
3	Pekerjaan umum					√						
4	Perumahan rakyat					√						
5	Penataan ruang					√						
6	Perencanaan pembangunan					√						
7	Perhubungan					√						
8	Lingkungan hidup								√			
9	Pertanahan	√										
10	Kependudukan dan catatan sipil	√										

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7	Prioritas 8	Prioritas 9	Prioritas 10	Prioritas 11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Pengelolaan Energi	Daya Dukung Lingk. dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Ketenra man dan Keteribukan serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat
11	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			√							
12	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera			√							
13	Sosial			√							
14	Ketenagakerjaan			√							
15	Koperasi dan usaha kecil dan menengah			√							
16	Penanaman modal						√				
17	Kebudayaan										√
18	Kepemudaan dan olah raga		√								
19	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri								√		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7	Prioritas 8	Prioritas 9	Prioritas 10	Prioritas 11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Pengelolaan Energi	Daya Dukung Lingk. dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat
20	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	√										
21	Ketahanan pangan					√						
22	Pemberdayaan masyarakat dan desa				√							
23	Statistik	√										
24	Kearsipan	√										
25	Komunikasi dan informatika								√			
26	Perpustakaan		√									
B. Urusan Pilihan												
1	Pertanian;					√						
2	Pariwisata;											√
3	Kelautan dan perikanan;					√						

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Prioritas 4	Prioritas 5	Prioritas 6	Prioritas 7	Prioritas 8	Prioritas 9	Prioritas 10	Prioritas 11
Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Pengelolaan Energi	Daya Dukung Lingk. dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat	
4 Perdagangan;								✓			
5 Industri;								✓			

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Tabel 2.9. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Sasaran Pembangunan Daerah

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Pengelolaan Energi	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat	
1.1.1	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem pendaftaran, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan penyelesaian konflik pertanahan	√										
1.1.2	Terwujudnya pemantapan & pengembangan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah	√										

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha		Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masy.	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masy.
1.1.3	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Kepemerintahan dan Keadministrasian Umum, serta Kesejahteraan Masy. yang Responsif, Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan Sinergis	√										
1.1.4	Terwujudnya pemantapan & pengembangan Sistem Manajemen & Administrasi Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel	√										
1.1.5	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pengawasan Pembangunan Daerah	√										

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha		Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat
1.1.6	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Adm. Kepegawaian Daerah	√										
1.1.7	Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional		√									
1.1.8	Terwujudnya pemantapan & pengembangan penuhan peralatan & perlengkapan keadministrasi an perkantoran	√										

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat	
1.1.9 Terwujudnya pemantapan & pengembangan kemitraan dan kerjasama yang proporsional dan profesional antara Eksekutif dengan Legislatif untuk menghasilkan Peraturan Daerah	√										
1.1.10 Terwujudnya pemantapan & pengembangan Sistem Manajemen Data/ Informasi Pembangunan Daerah	√										
1.1.11 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan berbagai kajian, penelitian, dan inovasi pemb. daerah	√										
1.1.12 Terwujudnya pemantapan & pengembangan Sistem Kearsipan Daerah	√										

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Pengelolaan Energi	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Ketenaraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat
1.1.13	Terwujudnya pemantapan & pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Daerah							✓				
1.2.1	Terwujudnya pemantapan & pengembangan pelayanan publik dan aparatur secara profesional, cepat, tepat, dan akurat, dg berbasis pada teknologi informasi yang efektif dan efisien	✓										
1.2.2	Terwujudnya pemantapan & pengembangan sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang terintegrasi, terstandarisasi, serta memadai	✓										

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha		Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat
2.1.1	Terwujudnya pemantapan & pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan Koperasi sbg pendukung keg ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal				✓							
2.1.2	Terwujudnya pemantapan & pengembangan Sistem Investasi Daerah yang transparan serta didukung oleh iklim investasi yang kondusif							✓				

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Pengelolaan Energi	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat	
2.1.3	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Kewaspadaan, dan Kemasayarakatan					√						
2.1.4	Terwujudnya pemantapan & pengembangan agribisnis serta budidaya pertanian & peternakan yg berorientasi pada intensifikasi pertanian					√						
2.1.5	Terwujudnya pemantapan & pengembangan Sistem & Jaringan Kepariwisataan Daerah										√	

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha		Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)		Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat
2.1.6	Terwujudnya pemantapan & pengembangan intensifikasi budidaya perikanan darat					√						
2.1.7	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perdagangan Daerah dan peningkatan perlindungan konsumen								√			
2.1.8	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah								√			

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisi vitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha		Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)		Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masy.	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masy.
3.1.1	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pendidikan Daerah yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan kerja		√									
3.1.2	Terwujudnya pemantapan & pengembangan Sistem & Jaringan Pelyn & Akses Kesehatan yg berkualitas & terjangkau			√								

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Pengelolaan Energi	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat	
3.1.3	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya pemberdayaan dan perlindungan anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga			✓								
3.1.4	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera			✓								
3.1.5	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial-masyarakat			✓								

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha		Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)		Ketenarman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat
3.1.6	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Ketenagakerjaan Daerah yang berbasis Keahlian serta berorientasi pada penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan				✓							
3.1.7	Terwujudnya pemantapan & peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah											✓
3.1.8	Terwujudnya pemantapan & pengembangan Sistem Kepemudaan dan Keolahragaan Daerah yg mandiri & berprestasi		✓									

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisi vitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Pengelolaan Energi	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masy.	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masy.	
3.1.9	Terwujudnya pemantapan dan pening-katan kesadaran masy. thd kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan									✓		
3.1.10	Terwujudnya pemantapan & pengembangan sistem penegakan peraturan daerah yang manusiawi dan berkeadilan	✓										
3.1.11	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Keberdayaan Masy. yang berbasis pada kebutuhan dasar dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masy.				✓							

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Pengelolaan Energi	Ketenaraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masy.	
3.1.12	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat		√									
4.1.1	Terwujudnya pemantapan & pengembangan sistem perenc-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan yang partisipatif, koordinatif dan integratif, serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahannya					√						

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisi vitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha		Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)		Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masy.	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masy.
4.1.2	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kependidikan, kebudayaan, dan kepustakaan yang layak dan memadai		✓									
4.1.3	Terwujudnya pemantapan & pengembangan thd pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kesehatan yang layak dan memadai			✓								

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Pengelolaan Energi	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat
4.1.4	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana kebinamargaan daerah yang layak dan memadai					√						
4.1.5	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan penyediaan perlengkapan sarana-prasarana transportasi dan kelaluiintasan yang layak, memadai, dan terpadu					√						
4.1.6	Terwujudnya pemantapan & pengembangan ketersediaan sarana & prasarana Perekonomian & Sosial-Kemasy. yang layak											√

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Pengelolaan Energi	Ketenaraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat	
	dan memadai											
4.1.7	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai	✓										

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Pengelolaan Energi	Ketenaraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat	
4.2.1	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi serta Manajemen dan Rekayasa Lalulintas yang modern dan terpadu yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai					√						
5.1.1	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan, pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak bencana								√			

SASARAN (MISI) PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih	Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Ketahanan Pangan Daerah	Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai	Kondisivitas Iklim Investasi Daerah dan Iklim Usaha		Pengelolaan Energi	Daya Dukung Lingkungan & Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingk.)	Ketenarman dan Ketertiban serta Perlindungan Masy.	Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masy.
5.1.2	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman									√		
5.1.3	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Penataan dan Pengelolaan Ruang Wilayah Perkotaan									√		
5.1.4	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pembangunan Ekologis (sosial, lingkungan, ekonomi) yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan									√		

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
<https://www.tangerangkota.go.id>

BAB 3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2014-2018

3.1.1 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

PAD terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

Dana Perimbangan terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/BukanPajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari: Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah langkah yang dilakukan antara lain:

- Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan; dan
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD.

Dalam kurun waktu Tahun 2014-2018, dilakukan berbagai langkah dan upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif.

3.1.2 Intensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah

Upaya intensifikasi pajak dan/atau retribusi daerah adalah meningkatkan penerimaan yang dilakukan dengan cara melakukan pemungutan lebih menekankan pada potensi yang akurat dan terukur. Upaya intensifikasi yang telah dilakukan antara lain adalah:

1. Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat usaha);
2. Melakukan pendataan untuk memperoleh data Subjek/Objek Pajak yang belum terdaftar;
3. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya;
4. Melakukan teguran terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang menunggak laporan maupun pembayarannya;
5. Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat maupun menunggak pembayaran;
6. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan SKPD pemungut setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah;
7. Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan retribusi dengan cara peningkatan, pengendalian, dan pengawasan;
8. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;
10. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagaian dari upaya tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan; dan
11. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial untuk membayar kewajibannya tepat waktu.

3.1.3 Ektensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah

Upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui:

Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru. Namun demikian dalam hal penggalian sumber pendapatan yang baru tersebut tidak hanya semata-mata untuk memperoleh sumber pendapatan.

Seperti halnya dalam ekstensifikasi di pajak daerah yang dilakukan, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010, yaitu: 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi; 2) Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 3) Obyek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat; 5) Potensinya memadai; 6) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif; 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

3.1.4 Target Dan Realisasi Pendapatan

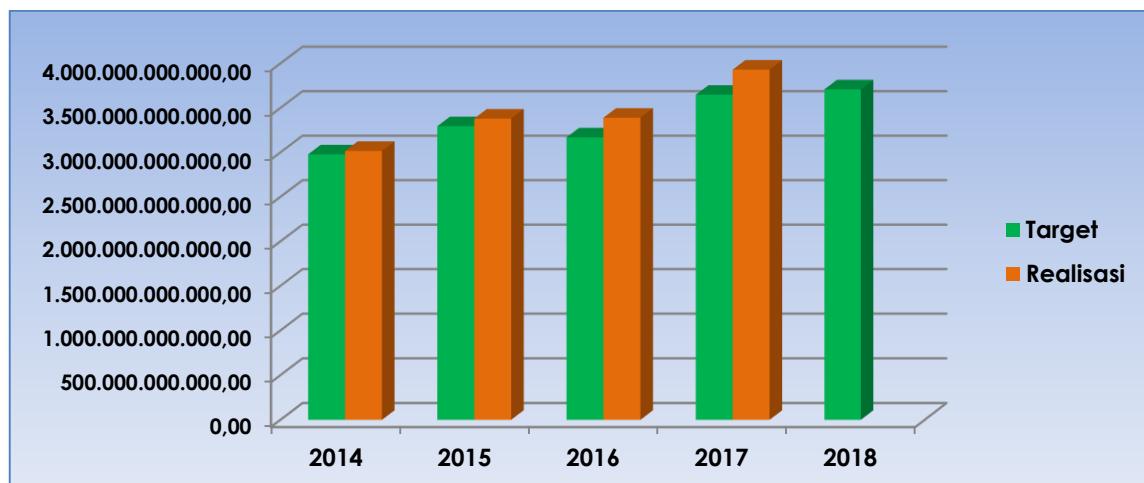
Berdasarkan arah kebijakan pendapatan sebagaimana telah diuraikan diatas, berikut ini disajikan target dan realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014-2018 yang dapat dilihat pada tabel 3.1 serta gambar 3.1 dan 3.2 berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2014-2018

No	Tahun Anggaran	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Capaian Pendapatan (%)	Rata-rata Capaian s/d 2017 (%)
1	2014	2.977.599.316.157,00	3.016.402.369.860,00	98,78	
2	2015	3.294.192.110.809,00	3.379.639.309.942,00	100,74	
3	2016	3.168.609.881.640,00	3.388.855.221.210,00	107,55	
4	2017	3.647.470.734.253,00	3.930.164.161.844,00	109,27	104,09
5	2018	3.708.387.835.169,00	745.477.329.316,00	20,10	
	Jumlah	16.796.259.878.028,00	14.460.538.392.172,00	86,09	

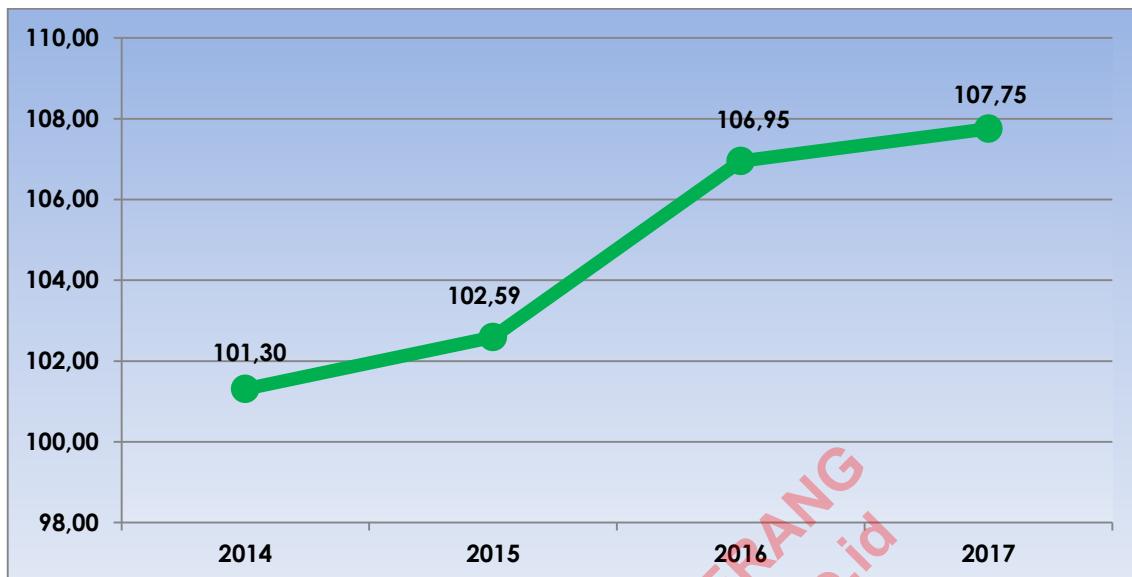
Sumber : DPKD Kota Tangerang, 2018
Tahun 2018 s/d triwulan I.

Grafik 3.1. Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2014-2018



Sumber: DPKD Kota Tangerang Tahun 2018

Grafik 3.2. Pertumbuhan Realisasi dan Pencapaian Pendapatan Daerah TA 2014-2018



Sumber: DPKD Kota Tangerang Tahun 2018

3.1.5 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

- a. Pajak Daerah
 - i Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atas usahanya, mengingat sampai saat ini jarang terjadi Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri mendaftarkan obyeknya;
 - ii Adanya perbedaan persepsi pada masyarakat maupun dengan unsur aparatur dalam memahami kewenangan pemungutan pajak, sehingga ada objek yang semestinya menjadi Objek Pajak Daerah (Hiburan) malah menjadi Objek Pajak Pusat (PPn);
 - iii Kurangnya ketataan Wajib Pajak memenuhi kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya, hal tersebut terlihat dari adanya tunggakan yang belum terselesaikan;
 - iv Kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang juga selaku Wajib Pungut untuk melaporkan omset yang sebenarnya;
 - v Proses administrasi dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak memerlukan waktu yang cukup panjang; dan

- vi Khusus Wajib Pajak pada areal Bandara, umumnya merasa keberatan membayar pajak, karena selain kewajiban membayar pajak, mereka dikenakan *konsesi* dari PT. (Persero) Angkasa Pura II yang tarifnya tidak jauh berbeda dengan tarif pajak.
- b. Retribusi Daerah
- i. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat mengenai pencabutan beberapa jenis retribusi yang cukup potensial di Kota Tangerang;
 - ii. Kapasitas yang tersedia tidak mengalami pertambahan sehingga potensi obyek retribusi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
- c. Dana Perimbangan
- i. Pemerintah Pusat dalam perhitungan dan pengalokasian Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Objek Pajak Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 belum mencerminkan transparansi dan akuntabilitas;
 - ii. Ketentuan mengenai Dana Perimbangan yang harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan yang harus disepakati oleh kabupaten/kota seringkali menimbulkan hambatan dalam pendistribusian Dana Perimbangan ke kabupaten/kota se Provinsi Banten;
 - iii. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (IHH/PSDH, Royalti dan Pungutan Hasil Perikanan) belum transparan sehingga kebijakan mengenai besaran dana bagi hasil yang seharusnya diterima Kota Tangerang tidak sesuai dengan realisasi pada Kas Daerah; dan
 - iv. Adanya keterlambatan penyampaian pagu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Pusat ke kabupaten/kota sehingga menyulitkan penyusunan APBD.

Solusi/upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan kebijakan dalam pengelolaan pendapatan berupa:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- i. Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Peningkatan koordinasi dan pelibatan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan manajemen/pengelolaan PAD sesuai

- dengan regulasi/aturan perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran dan capaiannya berdasarkan indikator dan tolok ukur yang digunakan;
- iii. Peningkatan efisiensi, efektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-sumber PAD;
 - iv. Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD;
 - v. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang dilakukan melalui kerjasama/kemitraan (*partnership*) dengan berbagai pihak-pihak yang erkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan (*fairness*) serta tidak memberatkan masyarakat;
 - vi. Pengkajian dan penyempurnaan berbagai regulasi/peraturan perundangan dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian target PAD melalui kegiatan yang bersifat telaahan terhadap regulasi/peraturan perundangan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target PAD; dan
 - vii. Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan mudah serta didukung oleh sistem informasi.
- b. Dana Perimbangan
- i. Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundangan yang berlaku;
 - ii. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Dana Bagi Hasil, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;

- iii. Peningkatan validitas data yang menjadi komponen dalam perhitungan pembagian DAU dan DAK seperti data jumlah penduduk (terutama jumlah penduduk miskin), luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, PDRB, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM);
 - iv. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya stabilisasi Dana Perimbangan Daerah.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- i. Pendekatan dengan pihak Pemerintah Provinsi Banten dan upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. Stabilisasi dan/atau peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan 8% yang dilakukan melalui upaya-upaya optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - iii. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat, dalam upaya peningkatan kerjasama pembangunan regional (upaya pengembangan kerjasama wilayah Jabodetabekjur).

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014-2018

3.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah:

- a. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;
- b. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendeklasian wewenang;
- c. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat (*public interest*); dan

- d. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

3.2.1.1 Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
 1. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU setiap tahun (2013-2018) dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
 2. Belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun anggaran berkenaan.
 3. Belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.
 4. Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas.
 5. Tambahan Penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu

dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

c. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

c. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berkenaan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.1.2 Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan

dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

b. Belanja Pegawai

1. Honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
2. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dimaksudkan untuk hadiah perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

c. Belanja Barang dan Jasa

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
2. Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
3. Pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
4. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, yang tempat penyelenggaranya di luar daerah dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang

akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.

6. Penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
 7. Penyiapan regulasi, kelembagaan, pendataan, sistem, standar pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia serta penyiapan sarana dan prasarana.
- d. Belanja Modal
1. Jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah.
 2. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ini terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Tangerang senantiasa menambah atau meningkatkan nilai Belanja Langsung melalui program/kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Perlu dijelaskan bahwa pada Belanja Tidak Langsung terdapat banyak item belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama pada pos belanja hibah.

3.2.2 Anggaran Dan Realisasi Belanja

Anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Tangerang periode Tahun Anggaran 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.2 serta gambar 3.3 dan 3.4 berikut :

Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2014-2018

No.	Tahun Anggaran	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian Belanja (%)	Rata-rata Capaian s/d 2017 (%)
1	2014	3.510.664.614.205,00	2.656.087.931.653,00	74,32	
2	2015	4.187.571.847.064,00	3.101.050.547.898,00	84,85	
3	2016	4.325.578.379.939,00	3.697.723.843.685,00	82,27	
4	2017	4.491.146.524.148,69	3.896.051.044.375,78	77,95	79,85
5	2018	4.415.108.608.107,72	609.038.444.939,00	13,79	
	Jumlah	20.930.069.973.464,40	13.959.951.812.550,80	66,70	

Sumber: DPKD Kota Tangerang, 2018

Tahun 2018 s/d triwulan I.

Grafik 3.3. Rencana dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2014-2018



Sumber: DPKD Kota Tangerang Tahun 2018

Grafik 3.4. Pertumbuhan Realisasi dan Pencapaian Belanja Daerah TA 2014-2018



Sumber: DKPD Kota Tangerang Tahun 2018

3.2.3 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan utama Belanja Daerah sejak pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014-2018 terutama dikarenakan adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat, diantaranya adalah:

1. Adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber daya yang tersedia;
2. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
3. Banyak alternatif/usulan program menurut bidang pembangunan yang perlu dilaksanakan;
4. Kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas/Badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; dan
5. Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD telah berjalan.

Dalam penerapan kebijakan umum belanja daerah dan penyelesaian permasalahan dilakukan beberapa solusi yaitu dengan menerapkan strategi yang lebih mengutamakan pada pencapaian sasaran program pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dan penanganan masalah-masalah khusus yang perlu segera ditangani serta menampung aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah.

3.3 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2018

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2018.

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan

daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2018 anggaran Belanja Daerah Kota Tangerang ditetapkan sebesar Rp.4.415.108.608.107,72 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.599.596.744.478,00, Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.391.098.774.000,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.717.692.316.691,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran yang sebesar Rp.706.720.772.938,72 yang ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Anggaran dan Realisasi APBD selama Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Triwulan I tahun 2018 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

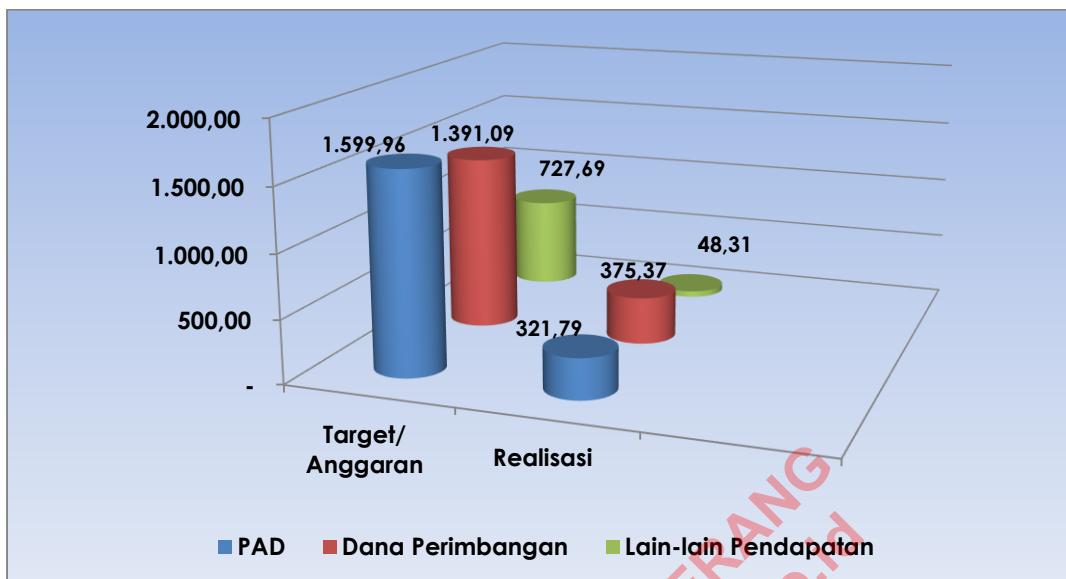
**Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018
(s.d. Triwulan I tahun 2018)**

Uraian	Target/ Anggaran	Realisasi	%	Target Capai an (%)
I. Pendapatan	3.708.387.835.169,00	745.477.329.316,00	20,10	14,63
I.1. Pendapatan Asli Daerah	1.599.596.744.478,00	321.798.235.499,00	20,12	13,69
I.2. Dana Perimbangan	1.391.098.774.000,00	375.367.961.847,00	26,98	15,00
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	717.692.316.691,00	48.311.131.970,00	6,73	15,99
II. Belanja	4.415.108.608.107,72	609.038.444.939,00	13,79	28,74
II.1 Belanja Tidak Langsung	1.508.269.731.105,78	266.843.459.776,00	17,69	29,98
II.2 Belanja Langsung	2.906.838.877.001,94	342.194.985.163,00	11,77	28,10
Surplus/Defisit	(706.720.772.938,72)	136.438.884.377,00		
III. Pembiayaan				
III.1 Penerimaan	711.720.772.938,72	892.740.079.919,22	125,43	100,00
III.2 Pengeluaran	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	100,00
SiLPA Tahun Berjalan	706.720.772.938,72	887.740.079.919,22		

Sumber: DPKD Kota Tangerang, 2018

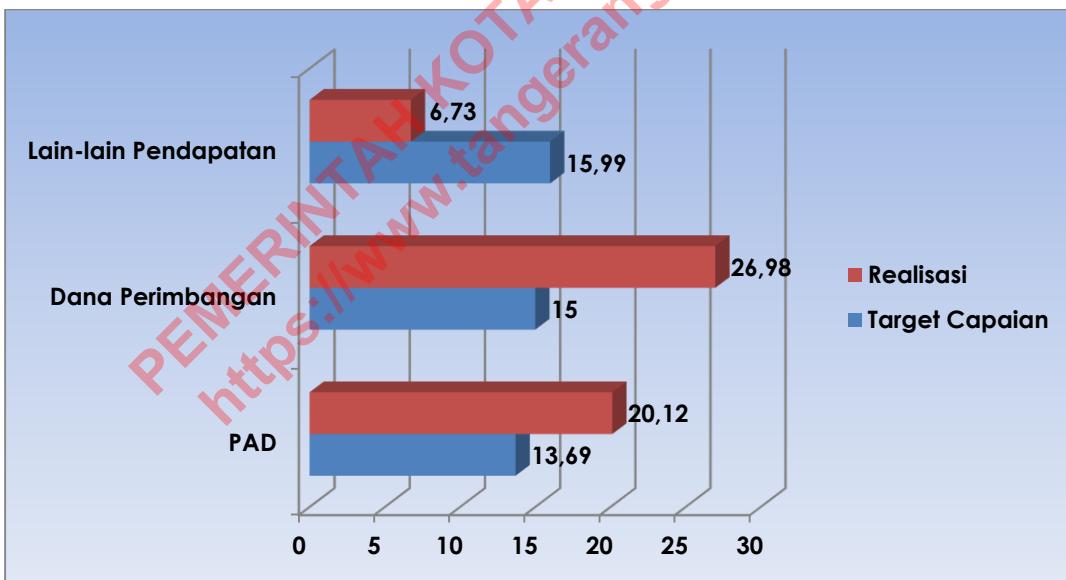
Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan sampai dengan Triwulan I tahun 2018 telah secara umum melampaui target yang ditetapkan, dimana telah mencapai 20,10% dibandingkan dengan target capaian sebesar 14,63% dengan realisasi capaian tertinggi adalah pada Dana Perimbangan sebesar 26,98%.

Grafik 3.5. Target dan Realisasi Pendapatan TA 2018
(s.d Triwulan I tahun 2018) dalam Miliar Rupiah



Sumber: DPKD Kota Tangerang, 2018

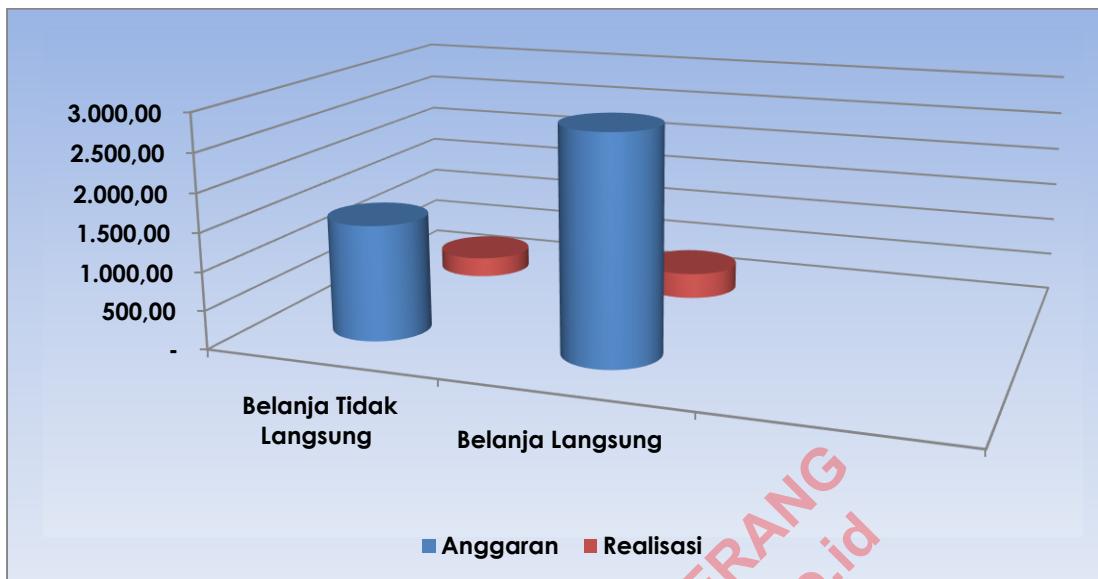
Grafik 3.6. Target Realisasi dan Realisasi Pendapatan TA 2018
(s.d. Triwulan I tahun 2018)



Sumber: DPKD Kota Tangerang, 2018

Sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar Rp.609.038.444.939,00 atau 13,79% berada di bawah target realisasi sebesar 28,74% dengan capaian realisasi terendah adalah belanja langsung sebesar 11,77%.

Grafik 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018
(s.d Triwulan I tahun 2018)



Sumber: DPKD Kota Tangerang, 2018

3.3.1 Pendapatan Daerah

Penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.3.708.387.835.169,00 dan sampai dengan Triwulan I tahun 2018 telah direalisasikan sebesar Rp.745.477.329.316,00 atau 20,10%. Realisasi penerimaan pendapatan daerah sampai dengan 31 Maret 2018 terdiri dari:

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018
(s.d. Triwulan I tahun 2018)

Uraian	Target	Realisasi	%	Target Capaian (%)
I. Pendapatan Asli Daerah	1.599.596.744.478,00	321.798.235.499,00	20,12	13,69
I.1. Pajak Daerah	1.323.500.000.000,00	286.903.376.585,00	21,68	12,82
I.2. Retribusi Daerah	81.483.427.073,00	11.960.996.376,00	14,68	16,42
I.3. Hasil Perus. Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	19.064.991.338,00	11.441.354.647,00	60,01	15,00
I.4. Lain-lain PAD yang Sah	175.548.326.067,00	11.492.507.891,00	6,55	18,83
II. Dana Perimbangan	1.391.098.774.000,00	375.367.961.847,00	26,98	15,00
II.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	297.105.600.000,00	58.688.871.550,00	19,75	15,00
II.2 Dana Alokasi Umum	866.113.340.000,00	288.704.436.000,00	33,33	15,00
II.3 Dana Alokasi Khusus	227.879.834.000,00	27.974.654.297,00	12,28	15,00
III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	717.692.316.691,00	48.311.131.970,00	6,73	15,99
III.1 Hibah	141.601.000.000,00	0,00	0,00	20,00
III.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah	541.091.316.691,00	30.811.131.970,00	5,69	15,00

Uraian	Target	Realisasi	%	Target Capaian (%)
lainnya				
III.4 Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	35.000.000.000,00	17.500.000.000,00	50,00	15,00
Pendapatan	3.708.387.835.169,00	745.477.329.316,00	20,10	14,63

Sumber: DPKD Kota Tangerang, 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian realisasi tertinggi berasal dari dana perimbangan sebesar 26,98% atau Rp.375.367.961.847,00 dari target sebesar Rp.1.391.098.774.000,00.

Adapun yang menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada atau yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang, baik sumber daya manusia maupun sumber/potensi yang dimiliki daerah berupa penerapan dasar hukum pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain; peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; koordinasi konsultansi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah.

3.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.4.415.108.608.107,72 dan sampai dengan 31 Maret 2018 direalisasikan sebesar Rp.609.038.444.939,00 (13,79%). Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk pendanaan belanja tidak langsung sebesar Rp.1.508.269.731.105,78 dan belanja langsung sebesar Rp.2.906.838.877.001,94

Alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.2.906.838.877.001,94 diperuntukan bagi pendanaan program dan kegiatan pada 43 SKPD yang meliputi 24 urusan wajib, 5 urusan pilihan, dan 8 Penunjang.

Alokasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2018 diprioritaskan pada pendanaan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Peningkatan manajemen transportasi perkotaan;
3. Peningkatan manajemen sumber daya pemerintah dan masyarakat kota;
4. Peningkatan sanitasi dan drainase perkotaan;
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan; dan

7. Peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Realisasi belanja daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini.

**Tabel 3.5.Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2018
(s.d. Triwulan I tahun 2018)**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Target Capaian (%)
I. Belanja Tidak Langsung	1.508.269.731.105,78	266.843.459.776,00	17,69	29,98
I.1. Belanja Pegawai	1.414.567.689.075,78	257.416.570.169,00	18,20	25,46
I.2. Belanja Bunga	00,00	00,00		
I.3. Belanja Hibah	88.108.625.000,00	9.405.094.000,00	10,67	100,00
I.4 Belanja Bantuan Keuangan	1.593.417.030,00	0,00		
I.5 Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	21.795.607,00	0,54	100,00
II. Belanja Langsung	2.906.838.877.001,94	342.194.985.163,00	11,77	28,10
II.1 Belanja Pegawai	77.041.524.380,00	13.943.805.488,00	18,10	49,23
II.2 Belanja Barang dan Jasa	1.803.749.623.084,94	302.352.551.735,00	16,76	29,08
II.3 Belanja Modal	1.026.047.729.537,00	25.898.627.940,00	2,52	24,79
Belanja	4.415.108.608.107,72	609.038.444.939,00	13,79	28,74

Sumber: DPKD Kota Tangerang, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi belanja yang tertinggi adalah belanja pegawai sebesar 18,20% (Rp.257.416.570.169,00) dari anggaran sebesar Rp.1.414.567.689.075,78

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Pengukuran pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Tangerang tahun 2014-2018 diterjemahkan dalam pencapaian program pembangunan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa kriteria penilaian realisasi kinerja dibagi menjadi 5 kategori yaitu:

1. Interval nilai $91\% \leq 100\%$ berpredikat sangat tinggi;
2. Interval nilai $76\% \leq 90\%$ berpredikat tinggi;
3. Interval nilai $66\% \leq 75\%$ berpredikat sedang;
4. Interval nilai $51\% \leq 65\%$ berpredikat rendah;
5. Interval nilai $\leq 50\%$ berpredikat sangat rendah

4.1. URUSAN WAJIB YANG DILAKUKAN

4.1.1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.966.437.459.129,76 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.520.211.496.420,00

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.1.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.43.933.550.450,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.256.950.000,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.119.580.381.276,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.199.030.421.590,00 yang dilaksanakan melalui 53 (lima puluh) kegiatan

3. Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Menengah selama tahun 2014-2016 dapat terealisasi sebesar Rp.311.286.195.642,00 yang dilaksanakan melalui 25 (dua puluh lima) kegiatan, selanjutnya mulai tahun 2017 dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Banten.

4. Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.4.259.883.850,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.142.939.000,00 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.324.485.398.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.171.775.404.000,00 yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan

6. Program Dana BOS

Program Dana BOS selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.142.110.209.964,76 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.141.601.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 362 (tiga ratus enam puluh dua) kegiatan

4.1.1.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.1 Capaian Indikator Program Pada Urusan Pendidikan Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Capaian Indikator Program					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat Ketersediaan Dan Kelengkapan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD Yang Layak Dan Memadai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00
		Tingkat Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Tingkat Keterse dian Sarana Prasarana Kebutuhan Pendidikan Dasar Yang Layak Dan Memadai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Capaian Indikator Program					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100,00	100,00	100,01	100,02	99,04	100,01
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/ Paket B	%	100,00	100,00	100,00	100,06	99,07	100,01
		Tingkat Keterse diaan Dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Untuk Guru, Kepala Sekolah, Dan Staf Kependidikan Lainnya Dalam Satuan Pendidikan Dasar Yang Layak Dan Memadai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00
		Tingkat Layanan Terhadap Siswa Miskin Pendidikan Dasar	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Angka Putus Sekolah SD/MI	%	100,00	200,00	320,84	346,03	254,60	241,72
		Angka Putus Sekolah SMP/Mts	%	100,00	100,00	183,75	647,56	391,20	257,83
		Angka Melanjut kan SD/MI Ke SMP/Mts	%	100,00	100,00	101,90	101,31	101,12	100,80
		Angka Kelulusan Siswa SD/MI	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Angka Kelulusan Siswa SMP/Mts	% per tah un	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	Program Pendidikan Menengah	Tingkat Keterse diaan Sarana Prasarana Kebutuhan Pendidikan Menengah Yang Layak Dan Memadai	%	100,00	100,00	100,00			100,00
		Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMA/MA	%	100,00	100,00	102,79			100,93

No	Program	Indikator Program		Capaian Indikator Program					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	%	100,00	100,00	97,54			99,18
		Tingkat Keterse diaan Dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Untuk Guru, Kepala Sekolah, Dan Staf Kependidi kan Lainnya Dalam Satuan Pendidikan Menengah	%	100,00	100,00	100,00			100,00
4	Program Pendidikan Non Formal	Tingkat Kompe tenси Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tingkat Kompe tenси Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Satuan Formal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Tahun 2018

- Indikator Tingkat Ketersediaan Dan Kelengkapan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD Yang Layak Dan Memadai** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya buku raport PAUD yang diadakan dibagi banyaknya buku raport PAUD yang seharusnya diadakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, adapun capaian sampai dengan triwulan I sebesar 80,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%. Hal ini dikarenakan dari tahun 2014-2017 pemenuhan Buku Raport PAUD dan TK sebanyak 97.500-Buku yang dialokasikan pada setiap tahunnya sebanyak 19.500-Buku Raport untuk PAUD dan TK dapat terealisasi 100%.
- Indikator Tingkat Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan PAUD** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga pendidik PAUD yang mendapat insentif dibagi jumlah tenaga pendidik PAUD yang seharusnya, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, adapun capaian sampai dengan triwulan I

sebesar 80,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%. Hal ini dikarenakan selama tahun 2014-2017 pemberian insentif kepada 1200-pendidik PAUD terus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatnya kompetensi pendidik PAUD, dengan realisasi capaian indikator sebesar 100,00%.

3. **Indikator Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Kebutuhan Pendidikan Dasar Yang Layak Dan Memadai** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya buku raport SD dan SMP Negeri yang diadakan dibagi banyaknya buku raport SD dan SMP Negeri yang seharusnya diadakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, adapun capaian sampai dengan triwulan I sebesar 80,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%. Hal ini dikarenakan dari tahun 2014-2017 pemenuhan Buku Raport SD dan SMP Negeri sebanyak 188.750 – Buku Raport yang dialokasikan pada setiap tahunnya sebanyak 28.000-Buku Raport SD Negeri dan 9.750-Buku Raport SMP Negeri dapat terealisasi 100,00%.
4. **Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,02%. Untuk tahun 2018 sampai triwulan I tercapai sebesar 99,04% dan pada akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi 100,00%.
5. **Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,06%. Untuk tahun 2018 sampai triwulan I tercapai sebesar 99,07% dan pada akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi 100,00%.
6. **Indikator Tingkat Ketersediaan Dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Untuk Guru, Kepala Sekolah, Dan Staf Kependidikan Lainnya Dalam Satuan Pendidikan Dasar Yang Layak Dan Memadai** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya sekolah SD dan SMP yang dilengkapi sarpras untuk guru,kepala sekolah dan staf kependidikan (meubelair dll) dibagi banyaknya sekolah SD dan SMP yang seharusnya dilengkapi sarpras untuk guru,kepala sekolah dan staf kependidikan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% . Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I tercapai sebesar 80,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

7. **Indikator Tingkat Layanan Terhadap Siswa Miskin Pendidikan Dasar** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan pendidikan dibagi jumlah siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Jumlah siswa miskin yang mendapatkan bantuan biaya personal dan SPP pada jenjang pendidikan dasar dari tahun 2014-2017 telah terealisasi sebanyak 74.885-siswa miskin dengan realisasi 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I telah tercapai realisasi sebesar 100,00%.
8. **Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama & jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 346,03% hal ini disebabkan jumlah murid yang putus sekolah jauh lebih kecil dibanding jumlah siswa yang bersekolah di Kota Tangerang. Capaian yang signifikan ini atas penyelenggaraan Program Tangerang Cerdas oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa miskin penduduk Kota Tangerang. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I telah tercapai realisasi sebesar 254,60%.
9. **Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs dibagi jumlah siswa pada tingkat yang sama & jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 647,56%. Capaian yang signifikan ini atas penyelenggaraan Program Tangerang Cerdas oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa miskin penduduk Kota Tangerang. Untuk tahun 2018 telah tercapai realisasi sebesar 391,20%.
10. **Indikator Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas I pada jenjang SMP/MTs dibagi jumlah siswa SD/MI yang baru lulus dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 101,31%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I telah tercapai sebesar 101,12%.
11. **Indikator Angka Kelulusan Siswa SD/MI** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa SD/MI jenjang akhir yang lulus dibagi jumlah siswa SD/MI jenjang akhir dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

12. **Indikator Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa SMP/MTs jenjang akhir yang lulus dibagi jumlah siswa SMP/MTs jenjang akhir dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
13. **Indikator Tingkat Ketersedian Sarana Prasarana Kebutuhan Pendidikan Menengah Yang Layak Dan Memadai** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya buku raport SMA dan SMK negeri yang diadakan dibagi banyaknya buku raport SMA dan SMK Negeri yang seharusnya diadakan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2016 sebesar 100,00%. Dan untuk tahun 2017-2018 pencapaian Indikator ini menjadi kewenangan Provinsi.
14. **Indikator Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMA/MA** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya siswa SMA/SMK/MA/Paket C dibagi jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2016 sebesar 135,70%. Dan untuk tahun 2017-2018 pencapaian Indikator ini menjadi kewenangan Provinsi.
15. **Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dibagi jumlah penduduk kelompok usia 16-18 Tahun dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2016 sebesar 119,18%. Dan untuk tahun 2017-2018 pencapaian Indikator ini menjadi kewenangan Provinsi.
16. **Indikator Tingkat Ketersediaan Dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Untuk Guru, Kepala Sekolah, Dan Staf Kependidikan Lainnya Dalam Satuan Pendidikan Menengah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya sekolah SMA dan SMK negeri yang dilengkapi sarpras untuk guru, kepala sekolah dan staf kependidikan (meubelair dll) dibagi banyaknya sekolah SMA dan SMK Negeri yang seharusnya dilengkapi sarpras untuk guru, kepala sekolah dan staf kependidikan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2016 sebesar 100,00%. Dan untuk tahun 2017-2018 pencapaian Indikator ini menjadi kewenangan Provinsi.
17. **Indikator Tingkat Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga pendidik non formal yang ditingkatkan kompetensinya dibagi jumlah tenaga pendidik non formal yang seharusnya ditingkatkan kompetensinya dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Pencapaian Indikator ini dilakukan dengan

penyelenggaraan pembinaan pendidik non formal melalui kegiatan pelatihan kompetensi sebanyak 350-Orang dengan alokasi pembinaan sebanyak 70-orang pada setiap tahunnya. Untuk tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi 100,00%.

- 18. Indikator Tingkat Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Satuan Formal** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga pendidik formal yang ditingkatkan kompetensinya dibagi jumlah tenaga pendidik formal yang seharusnya ditingkatkan kompetensinya dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Pencapaian Indikator ini dilakukan dengan penyelenggaraan pemberian insentif kepada sebanyak 16.155-Orang yang terdiri dari pendidik TK/RA/SD/MI/SMP/MTs dan SKH. Untuk tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.1.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan penyelenggaraan Indikator Tingkat Layanan Terhadap Siswa Miskin Dikdas yang terjadi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Data yang dipergunakan sebagai acuan penyaluran adalah data PPLS tahun 2011 sehingga di tahun 2014 banyak siswa miskin sudah tidak ada pada sekolah yang bersangkutan atau sudah ada pada jenjang sekolah yang lebih tinggi, sehingga sulit dilakukan sinkronisasi data.
- Data PPLS siswa miskin Kota Tangerang yang seluruhnya berjumlah 37.172-orang yang terdiri dari 25.087-Siswa SD/MI dan 12.085-Siswa SMP/MTs hanya terealisasi berdasarkan data hasil verifikasi sebanyak 21.687-Orang.

Permasalahan penyelenggaraan Indikator Tingkat Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang layak dan memadai yang terjadi pada tahun 2016 adalah sbb :

- Pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.4.106.450.000,00 yang diperuntukkan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada beberapa sekolah SD Swasta, dalam pelaksanaannya terkendala adanya beberapa aturan/ketentuan sbb :

1. Sesuai Petunjuk Teknis (Permendikbud nomor 81 tahun 2015) :

- a. Pasal 7 ayat (1) : Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan (fisik) dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK secara swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pasal 7 ayat (3) : proporsi pembiayaan peningkatan sarana dan prasarana (fisik dan non fisik) memenuhi rentang 40,00% sampai dengan 60,00%.
2. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011, tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah :
- a. Pasal 1 nomor 14 : Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - b. Pasal 10 ayat (1) : Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
3. Sesuai Peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 04/D/P/2016 tanggal 25 Januari 2016 :
Pasal 6 ayat (6) syarat sekolah penerima bantuan RKB
- a. sekolah mempunyai potensi berkembang (dalam tiga tahun terakhir mempunyai jumlah siswa stabil atau meningkat) (jumlah siswa minimal 60 siswa);
 - b. memiliki jumlah rombongan belajar melebihi jumlah ruang kelas yang ada (berdasarkan data dari dapodik);
 - c. memiliki lahan yang luasnya minimal 72 m² (ilustrasi 8m x 9m) dengan ketentuan pemakaian lahan tersebut tidak mengurangi lapangan upacara atau lapangan olahraga;
 - d. dan persyaratan administrasi lainnya seperti surat kepemilikan lahan sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan penjabaran nomor 1 - 3 di atas, maka kegiatan Pembangunan RKB Dikdas yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Permasalahan penyelenggaraan Indikator Tingkat Ketersediaan sarana prasarana pendidikan dasar yang layak dan memadai yang terjadi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Terkait penyerapan anggaran masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai 100,00% bahkan tidak dapat direalisasikan mengingat penyelenggaran kegiatan pada anggaran perubahan (ABT) waktu pelaksanaan terlalu singkat, adapun kegiatan sebagaimana dimaksud adalah :
 1. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD (Silpa DAK SD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.888.291.022,00 (Dinas Pendidikan)

2. Pembangunan RKB Dikdas (DAK SMP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.161.278.000,00 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena tidak ada SMP Swasta yang dijadikan target output memenuhi persyaratan kepemilikan lahan sesuai juknis DAK Pendidikan tahun 2017.

2. Solusi

Upaya yang dilakukan terhadap Permasalahan di tahun 2014

- Melakukan koordinasi data PPLS dengan BPS dan Bappeda sehingga data yang akan digunakan ditahun 2015 lebih valid.

- Melakukan verifikasi data dengan melibatkan unsur Kecamatan dan Kelurahan

Upaya yang dilakukan terhadap Permasalahan penyelenggaraan di tahun 2016

- Menyampaikan surat pengembalian dana alokasi DAK kepada DPKD dengan Tembusan disampaikan kepada Bapak Walikota Tangerang.

Upaya yang dilakukan terhadap Permasalahan di tahun 2017 :

Kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD (Silpa DAK SD) akan dilaksanakan ditahun yang akan datang dengan persiapan yang direncanakan pada APBD Murni bukan APBD Perubahan.

4.1.2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.351.824.662.212,30 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.383.754.963.779,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.2.1 Program dan Kegiatan

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program obat dan perbekalan kesehatan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.32.233.899.968,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.10.415.397.370,00. yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program upaya kesehatan masyarakat selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.523.022.601.069,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.144.621.842.531,00. yang dilaksanakan melalui 56 (lima puluh enam) kegiatan

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program pengawasan obat dan makanan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.816.701.760,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.254.165.000,00. yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.9.166.522.300,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.12.782.008.500,00. yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.4.362.848.585,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.889.849.600,00. yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program pengembangan lingkungan sehat selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.921.302.100,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.559.568.000,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.10.498.195.994,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.690.047.500,00 yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan

8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program standarisasi pelayanan kesehatan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.3.575.546.032,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.839.500.000,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

9. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.114.832.763.017,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.52.726.399.760,00 yang dilaksanakan melalui 45 (empat puluh lima) kegiatan

10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.12.724.788.152,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.972.671.500,00 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan

11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.352.575.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.61.691.500,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.268.791.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.305.817.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

13. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.012.908.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.112.267.500,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.458.346.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.3.817.725.500,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

15. Program Kemitraan Jaminan Kesehatan

Program kemitraan jaminan kesehatan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.457.672.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.0 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

16. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.207.557.136.648,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 16 (enam belas) kegiatan

17. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.9.199.042.920,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.0 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan

18. Program Peningkatan Pelayanan Umum

Program peningkatan pelayanan umum selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.158.142.811.969,30 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.112.433.757.200,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4.1.2.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.2. Capaian Indikator Program Pada Urusan Kesehatan Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014 - 2017	2018 (Tw-1 Jan - Mar)
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017			
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Presentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Di Puskesmas, Pustu, Pusling, Dan Poliklinik	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	43,64	
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat	%	105,13	101,69	102,50	101,23	102,64	98,33	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Kota Tangerang	%	200,00	207,99	100,00	100,00	152,00	100,00	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Kota Tangerang	%	100,00	100,00	166,67	125,00	122,92	250,00	
		Cakupan Pelayanan JKN (BPJS)	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Program Pengawasan	Presentase Sarana Obat Dan	%	100,00	98,44	100,00	100,00	99,61	107,58	

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014 - 2017	2018 (Tw-1 Jan - Mar)
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017			
	Obat dan Makanan	Bahan-Bahan Berbahaya Yang Memenuhi Syarat								
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	%	200,00	102,97	110,64	105,05	129,66	100,00	
		Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	%	282,31	100,00	159,60	115,35	164,31	97,08	
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Prevalensi Balita Gizi Kurang (BB/U)	%	140,45	62,84	136,52	141,59	120,35	143,65	
		Presentase Balita Gizi Buruk (BB/TB)	%	316,26	260,42	154,71	240,09	242,87	168,83	
		Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	107,00	116,49	103,91	94,74	105,54	Minim al balita harus ditimb ang 8X	
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	%	107,14	116,92	110,10	109,54	110,93	91,67	
		Cakupan Rumah Sehat	%	100,62	104,70	98,52	99,68	100,88	101,23	
		Cakupan Kualitas Air Minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	%	98,82	100,00	99,39	93,31	97,88	70,59	
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Kelurahan	%	100,00	100,00	96,15	100,00	99,04	Masih proses	

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014 - 2017	2018 (Tw-1 Jan - Mar)
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017			
		Universal Child Immunization (UCI)								pema ntaua n
		AFP Rate Per 100.000 Penduduk < 15 Tahun	per 100.000	48,32	95,54	130,84	139,88	103,64		
		Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV Dan AIDS	%	300,83	100,00	38,46	117,40	139,17		
		Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)	%	85,57	85,46	144,07	135,80	112,73		
		Penemuan Penderita Diare	%	157,15	100,00	83,88	121,92	115,74		
		Penemuan Penderita Pneumoni Balita	%	79,00	100,00	154,72	143,98	119,42		
		Penderita DBD Ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Persentase Calon Jemaah Haji Yang Diperiksa Kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
		Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Usia 15-49 Tahun	%	103,83	104,56	107,35	119,61	108,84		
		Proporsi Penduduk Yg Terinfeksi HIV Lanjut Yang Memiliki Akses Pd Obat Antiretroviral	%	110,90	100,03	112,69	125,55	112,29		
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Sarana Kesehatan Yang Memenuhi Syarat	%	100,00	100,00	98,36	140,63	109,75		51,39
9	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana	Persentase Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014 - 2017	2018 (Tw-1 Jan - Mar)
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017			
9	Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Yang Layak								
		Persentase Puskes-Mas, Puskesmas Pembantu Dan Ja-Ringannya Dengan Kondisi Sarana Dan Prasarana Memadai	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Di Setiap RW	pos yan du/ RW	102,48	99,62	101,62	102,00	101,43	102,19	
10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Yang Layak	Cakupan Ketersediaan Puskesmas Dan Puskesmas Pembantu Di Setiap Kecamatan	Pus kes ma s/ kec .	152,24	100,00	156,00	168,00	144,06	168,00	
		Persentase Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Yang Layak	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	%	114,94	100,00	107,00	117,65	109,90	33,33	
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Pra Sekolah	%	100,09	100,00	101,87	101,15	100,78	7,98	
13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan Pemeriksaan Pra Usila Dan Usila	%	105,76	97,11	105,40	109,83	104,52	47,42	
14	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Presentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan Yang Memenuhi Syarat	%	93,90	100,00	95,56	101,01	95,62	110,09	

No	Program	Indikator Program		Tahun					2018 (Tw-1 Jan - Mar)
		Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	Capai an 2014 - 2017	
15	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	%	114,94	100,00	107,00	117,65	109,90	32,58
		Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	102,67	100,00	99,05	100,98	100,68	40,86
		Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	%	97,32	100,00	97,93	100,27	98,88	39,31
		Cakupan Neonatal Dengan Komplikasi Yang Ditangani	%	78,95	100,00	109,32	106,42	98,67	23,00
		Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	91,66	100,00	100,53	104,08	99,07	43,41
		Cakupan Kunjungan Bayi	%	111,16	95,96	103,12	102,34	103,14	106,09
16	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/-Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit/-Rumah Sakit Jiwa/-Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Yang Layak Dan Memadai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/-Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tingkat Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Yang Layak Dan Memadai	%	99,97	100,00	112,50	118,18	107,66	107,67
18	Program Peningkatan Pelayanan Umum (BLUD)	Tingkat Pelayanan Umum BLUD	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	133,33	108,33	133,33

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan RSUD Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Presentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Di Puskesmas, Pustu, Pusling, Dan Poliklinik** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dibagi jumlah kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 realisasinya sebesar 43,64%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
2. **Indikator Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa SD setingkat yang diperiksa kesehatannya dibagi sasaran siswa SD & setingkat, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 102,64%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 realisasi sebesar 98,33%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
3. **Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Kota Tangerang** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kunjungan pasien masyarakat kota tangerang di sarana kesehatan masyarakat strata 1 dibagi jumlah masyarakat Kota Tangerang yang mendapat pelayanan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 152,00%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 capaian kinerja sudah tercapai ralisasi sebesar 100,00%.
4. **Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Kota Tangerang** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah masyarakat Kota Tangerang yang mendapat rujukan ke sarana kesehatan strata 2 dibagi jumlah kunjungan pasien masyarakat Kota Tangerang di sarana kesehatan masyarakat di sarana kesehatan strata 2 (rumah sakit), dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar dengan tingkat capaian indikator sebesar 122,92%. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2018 telah tercapai ralisasi sebesar 250,00%. Berdasarkan target BPJS bahwa RNS (Rujukan Non Spesialis) setinggi tingginya adalah 5% dari kunjungan Strata 1.
5. **Indikator Cakupan pelayanan JKN (BPJS)** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah peserta JKN yang berobat ke strata 1 dibagi Peserta JKN yang berkunjung ke strata 1, dengan tingkat capaian indikator tahun selama tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 telah tercapai realisasi sebesar 100,00%.
6. **Indikator Presentase Sarana Obat Dan Bahan-Bahan Berbahaya Yang Memenuhi Syarat** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah sarana obat dan bahan

berbahaya yang memenuhi syarat dibagi jumlah total sarana obat dan bahan berbahaya yang diperiksa/dibina, dengan tingkat capaian kinerja indikator tahun 2014-2017 sebesar 99,61%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 telah tercapai realisasi sebesar 107,58%.

7. **Indikator Cakupan Kelurahan Siaga Aktif** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kelurahan siaga aktif dibagi jumlah kelurahan siaga yang dibentuk, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 129,66%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerjanya sudah terealisasi sebesar 100,00%.
8. **Indikator Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah tangga ber-PHBS hasil survey dibagi jumlah rumah tangga hasil survey, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 164,31%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar 97,08%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%. Proses pemantauan rumah tangga ber-PHBS masih berlangsung sampai dengan akhir tahun.
9. **Indikator Cakupan Balita Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk mendapatkan perawatan di sarana pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan disuatu wilayah kerja dalam waktu yang sama, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 100,00%.
10. **Indikator Prevalensi Balita Gizi Kurang (BB/U)** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah balita gizi kurang dibagi jumlah balita yang ditimbang, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 120,35%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 143,65%.
11. **Indikator Presentase Balita Gizi Buruk (BB/TB)** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk (BB/TB) dibagi jumlah seluruh balita, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 242,87%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 168,83%
12. **Indikator Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah anak balita usia (6-24 bulan) keluarga miskin mendapat MP-ASI dibagi jumlah anak balita usia (6-24 bulan) keluarga miskin, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar

100,00%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 100,00%.

13. **Indikator Cakupan Pelayanan Anak Balita** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan minimal 8 kali dibagi jumlah anak balita, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 105,54,00%. Sampai dengan Triwulan 1 (Januari – Maret) Tahun 2018 capaian kinerja belum dapat terhitung karena kegiatan masih berlangsung dan sasaran harus minimal dipantau 8x tiap bulannya, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
14. **Indikator Persentase Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah tempat tempat umum yang memenuhi persyaratan di satu wilayah dibagi jumlah tempat tempat umum yang diperiksa, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 110,93%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar 91,67%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
15. **Indikator Cakupan Rumah Sehat** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah yang memenuhi syarat kesehatan dibagi Jumlah rumah yang diperiksa, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 108,88%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 101,23%.
16. **Indikator Cakupan Kualitas Air minum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan** diukur berdasarkan perbandingan antara sampel air minum yang memenuhi syarat dibagi jumlah sampel yang di periksa (LABKESDA), dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 97,88%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 sebesar 70,59%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
17. **Indikator Cakupan Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kelurahan mengalami kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani < 24 jam dibagi jumlah kelurahan yang mengalami KLB, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 100,00%.
18. **Indikator Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kelurahan UCI dibagi jumlah kelurahan yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 99,04%. Sampai dengan

Triwulan 1 (Januari – Maret) Tahun 2018 capaian kinerja belum dapat terhitung karena perhitungan kelurahan UCI berdasarkan kelurahan yang melayani imunisasi dasar lengkap pada bayi sampai dengan usia 9 bulan dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

19. **Indikator AFP Rate Per 100.000 Penduduk<15 Tahun** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah kasus AFP non polio yang ditemukan diantara 100.000 penduduk <15 tahun di satu wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah penduduk <15 tahun di wilayah kerja yang sama dalam kurun waktu 1 tahun, dengan tingkat capaian indikator tahun selama tahun 2014-2017 sebesar 103,64%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 9,21%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
20. **Indikator Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV dan AIDS** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk <15 tahun di wilayah kerja yang sama dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah penduduk berusia 15-24 tahun yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 139,17%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 89,34%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
21. **Indikator Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati disuatu wilayah selama 1 tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yg sama, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 112,73%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 67,99%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
22. **Indikator Penemuan Penderita Diare** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penderita diare yang datang dan diobati dibagi Jumlah perkiraan penderita diare, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 115,74%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 51,90%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
23. **Indikator Penemuan Penderita Pneumoni Balita** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pneumoni balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah perkiraan pneumoni balita, dengan tingkat capaian indikator

tahun tahun 2014-2017 sebesar 119,42%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 56,22%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.

24. **Indikator Penderita DBD Ditangani** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP dibagi penderita DBD yang ditemukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 100,00%.
25. **Indikator Persentase Calon Jemaah Haji Yang Diperiksa Kesehatan** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah calon jemaah haji yang diperiksa kesehatan dibagi Jumlah seluruh calon jemaah haji, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja **telah** terealisasi sebesar 105,13%. Hal ini dikarenakan ada Jemaah luar wilayah Kota Tangerang yang dilayani pemeriksaannya.
26. **Indikator Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Usia 15-49 Tahun** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk berusia 15-49 tahun yang terinfeksi HIV-AIDS dibagi jumlah penduduk berusia 15-49 tahun yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 108,84%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 115,11%.
27. **Indikator Proporsi Penduduk Yang Terinfeksi HIV Lanjut Yang Memiliki Akses Pada Obat Antiretroviral** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah ODHA yang saat ini mendapat pengobatan ARV dibagi jumlah ODHA yang layak mendapat pengobatan ARV, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 112,29%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 43,07%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
28. **Indikator Presentase Sarana Kesehatan Yang Memenuhi Syarat** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah sarana kesehatan yang memenuhi syarat dibagi jumlah sarana kesehatan (rumah sakit, klinik, praktek dokter, praktek bidan) yang dibina, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 109,75%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 51,39%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
29. **Indikator Persentase Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Yang Layak** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan jaringannya dengan kondisi paket sarana dan prasarana

yang layak dibagi jumlah puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 100,00%.

30. **Indikator Persentase Puskesmas, Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Dengan Kondisi Sarana Dan Prasarana Memadai** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya dengan kondisi paket sarana dan prasarana memadai dibagi Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 100,00%.
31. **Indikator Cakupan Ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap RW** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang dibangun dibagi jumlah seluruh RW, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 101,43%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 102,19%
32. **Indikator Cakupan Ketersediaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Di Setiap Kecamatan** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang dibangun dibagi jumlah seluruh kecamatan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 144,06%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 168,00%.
33. **Indikator Persentase Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Yang Layak** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata yang layak dibagi jumlah sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 100,00%.
34. **Indikator Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif dibagi Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 109,90%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 33,33%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.

35. **Indikator Cakupan Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak Pra Sekolah** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah anak pra sekolah yang dilakukan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak dibagi jumlah anak pra sekolah, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,78%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 7,98%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
36. **Indikator Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pra usila dan usila yang diperiksa kesehatannya dibagi jumlah pra usila dan usila yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 104,52%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 47,42%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
37. **Indikator Presentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Memenuhi Syarat** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah sarana IRTP yang memenuhi syarat dibagi jumlah total sarana yang dibina/diperiksa, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,12%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 100,08%.
38. **Indikator Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif dibagi jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 109,90%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 33,33%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
39. **Indikator Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah ibu hamil yg memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar min 4 kali dibagi jumlah sasaran ibu hamil, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,68%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 40,86%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
40. **Indikator Cakupan Pelayanan Ibu Nifas** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah ibu nifas yg memperoleh 3x pelayanan nifas sesuai standar dibagi jumlah seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 98,88%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 39,31%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.

- 41. Indikator Cakupan Neonatal Dengan Komplikasi Yang Ditangani** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani dibagi jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 88,12%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 23,00%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
- 42. Indikator Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh sasaran ibu bersalin disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 99,07%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja sebesar sebesar 43,41%, dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00%.
- 43. Indikator Cakupan Kunjungan Bayi** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah bayi yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah bayi lahir hidup, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 103,14%. Sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2018 capaian kinerja telah terealisasi sebesar 106,09%.
- 44. Indikator Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Yang Layak Dan Memadai** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata yang tersedia agar layak dan memadai dibagi banyaknya sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata yang seharusnya tersedia agar layak dan memadai, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100%. Aspek pengadaan sarana dan prasarana RSUD tercapai sampai tahun 2017, sehingga sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi 100 %.
- 45. Indikator Tingkat Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Yang Layak Dan Memadai** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata yang terpelihara agar layak dan memadai dibagi banyaknya sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 107,66%. Aspek pemeliharaan sarana

dan prasarana RSUD tercapai sampai tahun 2017, dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 118,18 %.

46. **Indikator Tingkat Pelayanan Umum BLUD** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya pelayanan umum BLUD yang disediakan dibagi banyaknya pelayanan umum BLUD yang seharusnya disediakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 108,33%. Aspek pelayanan di RSUD dapat memenuhi kebutuhan pelayanan pada masyarakat yang terdiri dari pelayanan poli kesehatan dan layanan penunjang kesehatan dan sampai dengan triwulan I tahun 2018 telah tercapai realisasi sebesar 133,33 %.

4.1.2.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Tenaga pengawas dan pembina di Dinas Kesehatan masih sedikit.
- b. Kurangnya regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan pembinaan sarana obat.
- c. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pemilik sarana terhadap pemenuhan standar pelayanan kefarmasian di Sarana.
- d. Kurangnya regulasi daerah untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU).
- e. Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pemilik DAMIU terhadap pemenuhan standar DAMIU.
- f. Pada tahun 2016, tiga kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Poris Gaga Lama tidak mencapai target UCI, hal ini dikarenakan pergantian petugas imunisasi baru yang belum faham dengan kondisi lapangan dimana banyak perumahan elite yang sulit dijangkau. Satu kelurahan di Pabuaran Tumpeng, disebabkan karena jumlah sasaran yang berkurang, dimana di kelurahan Gerendeng lebih banyak perkantoran.
- g. Tenaga pengawas pangan masih sedikit.
- h. Belum ada tim keamanan pangan terpadu tingkat kota Kota.
- i. Kurangnya kesadaran IRTP terhadap penerapan pengolahan pangan yang baik.
- j. Kurang tersosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya pemeriksaan pemantauan kesehatan selama periode masa nifas, sehingga partisipasi ibu nifas dalam pemeriksaan pasca persalinan kurang mendapatkan perhatian, selain itu

masih adanya mitos dan kepercayaan pada sebagian kecil masyarakat bahwa ibu hamil tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari.

- k. Belum semua rumah sakit yang melaporkan data penanganan komplikasi neonates.
- l. Puskesmas belum bisa menjaring data neonatus karena lebih banyak dirujuk ke rumah sakit dengan alasan harus mendapatkan penanganan definitif.
- m. Tidak tercapainya kinerja di tahun 2014-2017, disebabkan pada tahun 2014 pelaporan pertolongan persalinan dari rumah sakit belum terlaporkan sehingga cakupan pelayanan oleh tenaga kesehatan kompeten masih rendah.
- n. Lahan parkir dan Gedung Manajemen yang masih menyatu dengan Pelayanan,kurangnya SDM khususnya dokter, perawat, apoteker, analis laboratorium, fisioterapis. Pengembangan ruang ICU, NICU, HD.

2. Solusi

- a. Upaya untuk meningkatkan sarana obat dan bahan berbahaya yang memenuhi syarat adalah dengan melibatkan tenaga di Puskesmas yang sebelumnya dilakukan peningkatan kompetensinya melalui pelatihan pembinaan dan pengawasan Sarana Obat dan Bahan Berbahaya, diharapkan dengan adanya petugas Puskesmas yang kompeten, akan semakin banyak sarana obat dan bahan berbahaya yang terbina dan terawasi, sehingga makin banyak sarana obat dan berbahaya yang memenuhi syarat.
- b. Penerapan Perda Tentang Ketertiban Umum, yang didalamnya terdapat tentang ketentuan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan yang saat ini sedang menunggu pengesahannya.
- c. Melibatkan tenaga puskesmas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada DAMIU di wilayah kerjanya.
- d. Penerapan Perda Ketertiban Umum yang masih menunggu pengesahannya.
- e. Melakukan pembinaan secara intensif kepada dua puskesmas tersebut. Untuk di kelurahan Gerendeng - Pabuaran Tumpeng merevisi sasaran. Sehingga pada tahun 2017 capaian Kinerja Cakupan Kelurahan UCI menjadi 100%.
- f. Mengajukan pelatihan Tenaga Pengawas Pangan (DFI) kepada BKPP Kota Tangerang, untuk tahun Anggaran 2017 atau 2018, terutama bagi Petugas Puskesmas di wilayah Kota Tangerang.
- g. Akan dilakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- h. Akan dibantu dengan kegiatan Bimbingan Teknis IRTP, Penyuluhan Keamanan Pangan bagi PJ IRTP (Step awal perijinan PIRT) serta menekankan pada rekomendasi perijinan PIRT agar terlebih dahulu melakukan perbaikan atau segala ketentuan yang dibutuhkan sebelum perijinan dikeluarkan.
- i. Melakukan kunjungan rumah (*home care*) terhadap ibu nifas dan bayi nya agar tetap dapat memperoleh pelayanan nifas sesuai standar.
- j. Sosialisasi dan pemantauan kepada ibu hamil agar melakukan pemeriksaan kesehatan pada periode pasca persalinan (masa nifas).
- k. Sosialisasi pencatatan dan pelaporan format dan telah dilakukan pertemuan penanggungjawab bidang Kesehatan Ibu dan Anak di rumah sakit, dengan melakukan reorientasi perihal pelaporan kesehatan ibu dan anak serta menjelaskan kembali definisi operasional tentang cakupan neonatus dengan komplikasi kepada rumah sakit dan puskesmas.
- l. Peningkatan kapasitas penanganan neonatus bagi tenaga di puskesmas
- m. Perbaikan sistem pelaporan dari Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, sehingga pelaporan pertolongan persalinan yang dilakukan di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya terjaring. Dengan semakin baiknya pelaporan maka capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya dapat mencapai 100,00%.
- n. Penyediaan lahan parkir dan penyediaan lahan untuk pembangunan gedung manajemen, perekruitmen tenaga SDM yang diperlukan dan pengembangan ruangan yang di perlukan.

4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.656.082.922.899,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.612.480.851.150,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.3.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program pembangunan jalan dan jembatan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.798.472.561.120,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp266.263.643.900,00 yang dilaksanakan melalui 31 (tiga puluh satu) kegiatan

2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.429.297.703.616,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.123.092.086.000,00 yang dilaksanakan melalui 18 (delapan belas) kegiatan

3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program pembangunan turap/talud/bronjong selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.81.029.844.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.31.012.500.000,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

4. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.90.950.124.340,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.46.224.944.700,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

5. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.390.026.900,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

6. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.498.790.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.0 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.10.930.364.270,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.2.310.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.50.976.940.600,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.17.620.386.000,00 yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan

9. Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku

Program penyediaan dan pengolahan air baku selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.503.726.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.0 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

10. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.14.342.669.200,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.9.000.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 18 (delapan belas) kegiatan

11. Program Pengendalian Banjir

Program pengendalian banjir selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.104.805.678.727,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.88.813.164.000,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

12. Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Program pengaturan jasa konstruksi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.643.663.600,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.475.900.000,00 yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan

13. Program Perencanaan Tata Ruang

Program perencanaan tata ruang selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.3.940.977.450,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.053.032.000,00 yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan

14. Program Pemanfaatan Ruang

Program pemanfaatan ruang selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.3.575.725.100,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.180.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan

15. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program pengendalian pemanfaatan ruang selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.3.168.597.400,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.914.350.000,00 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan

16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.13.952.840.800,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.8.264.116.750,00 yang dilaksanakan melalui 15 (lima belas) kegiatan

4.1.3.2 Capaian Kinerja

**Tabel 4.3. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Tahun 2014-2018**

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Ca kupon Pelaya nan Sistem Drainase Perkotaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
2	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Tingkat Pemba ngunan Turap Di Wilayah Aliran Sungai Yang Rawan Longsor Lingkup Kewena ngan Kota	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
3	Program Pengembangan Dan Pengelola an Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tingkat Keberfungsian Jaringan Irigasi Pertanian Rakyat	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
4	Program Pengembangan , Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Tingkat Pengemb aangan, Pengelo laan, Dan Kon servasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	81,82	100,00
5	Program Pengendalian Banjir	Tingkat Penanganan Wilayah/Lokasi Banjir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	77,42	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah Panjang Jalan	Km	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah Jembatan	Unit	100,00	100,00	100,00	100,00	98,74	100,00
7	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang	Km	100,00	100,00	100,00	100,00	74,29	100,00
		Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik	Unit	97,83	97,84	98,29	94,89	93,70	97,21
8	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Tingkat Ketersediaan Data Jalan Di Seluruh Wilayah Kota	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
9	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi/Data Base Jalan Yang Lengkap Dan Terbaru	%	100,00	100,00	100,00	100,00	99,49	100,00
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kebinamarga an Yang Layak Dan Memadai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Tingkat Ketersediaan, Publikasi, Dan Pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
12	Program Perencanaan Tata Ruang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Kota	%	100,00	100,00	15,39	184,59	95,48	100,00
		Tingkat Penyelesaian Aturan Perundungan Tentang Rencana Tata Ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
12		Tingkat Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota	%	0,00	0,00	0,00	399,98	88,89	100,00
		Tingkat Ketersediaan Regulasi Penataan Bangunan Dan Lingkungan	%	0,00	0,00	0,00	400,01	100,00	100,00
		Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkota an	%	100,00	100,00	59,84	59,84	61,61	79,92
13	Program Pemanfaatan Ruang	Tingkat Pelaksanaan Pembuatan Data/Informasi Pemanfaatan Ruang	%	100,00	100,00	83,34	116,65	100,00	100,00
14	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Penyelesaian Regulasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	100,00
		Tingkat Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	76,92	100,00

Sumber : Dinas PUPR Kota Tangerang, Tahun 2018

- 1. Indikator Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Drainase Perkotaan** diukur berdasarkan perbandingan antara panjang cakupan pelayanan drainase sistem perkotaan yang terlayani dibagi dengan total panjang drainase perkotaan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 25,00% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi 100,00%.
- 2. Indikator Tingkat Pembangunan Turap Di Wilayah Aliran Sungai Yang Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pembangunan turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan kota dibagi dengan Jumlah pembangunan turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan kota yang seharusnya dibangun, dengan tingkat capaian

indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 25,00% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi 100,00%.

3. **Indikator Tingkat Keberfungsian Jaringan Irigasi Pertanian Rakyat** diukur berdasarkan prosentase keberfungsian jaringan irigasi, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 25,00% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi 100,00%.
4. **Indikator Tingkat Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau, Dan Sumber Daya Air Lainnya** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah embung yang dibangun dibagi dengan jumlah embung yang seharusnya dibangun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 81,82% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi 100,00%. Dengan target embung yang dibangun sebanyak 11 buah dan realisasinya sebanyak 11 embung yang terbangun. Dengan rincian lokasi sebagai berikut :

NO	LOKASI
1	Embong Pondok Bahar
2	Embong Kp. Darussalam
3	Embong Cimone
4	Embong Kel. Nusa Jaya
5	Embong Bugel
6	Embong Cipondoh Makmur
7	Embong Periuk Damai
8	Embong Cipondoh Indah
9	Embong Grand Tomang
10	Embong Griya Ciledug
11	Embong Larangan

5. **Indikator Tingkat Penanganan Wilayah/Lokasi Banjir** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penurunan lokasi banjir dibagi dengan jumlah lokasi banjir, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 71,72% dan sampai dengan akhir tahun 2018. Sampai dengan tahun 2018 akan tercapai realisasi 100,00% dengan jumlah lokasi banjir yang tertangani ditargetkan sebanyak 31 titik/lokasi. Adapun realisasinya sebanyak 31 lokasi yang tertangani dengan rincin lokasi sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN/LOKASI BANJIR
A.	Kecamatan Jatiuwung
1	1. Perumahan Purati, Kel. Alam Jaya
B.	Kecamatan Periuk
2	1. Perumahan Purati, Kel. Gembor
3	2. Perumahan Periuk Jaya, Kel. Periuk Jaya
4	3. Perumahan Total Persada, Kel. Gembor
5	4. Perumahan Periuk Damai, Kel. Periuk
6	5. Perumahan Alamanda
7	6. Perumahan Taman Elang
8	7. Perumahan Mutiara Pluit
C.	Kecamatan Cibodas
9	1. Kel. Panunggangan Barat
10	2. Perumahan Taman Cibodas, Kel. Uwung Jaya
11	3. Cibodas, Kel.Cibodas
D.	Kecamatan Karawaci
12	1. Pondok Arum, Kel. Nambo Jaya
13	2. Perumahan Cimone Mas Permai
14	3. Kelurahan Bojong Jaya
15	4. Kelurahan Sukajadi
16	5. Kelurahan Karawaci Baru
E.	Kecamatan Neglasari
17	1. Kelurahan Selapajang Jaya
18	2. Kelurahan Margasari
F.	Kecamatan Benda
19	1. Rawa Bamban, Kel. Jurumudi Baru
20	2. Kelurahan Benda
G.	Kecamatan Cipondoh
21	1. Gondrong, Kel. Gondrong
22	2. Kelurahan Petir
H.	Kecamatan Pinang
23	1. Pinang Griya, Kel. Pinang)
24	2. Perumahan Taman Pinang Indah Kel. Pinang
I.	Kecamatan Karang Tengah
25	1. Perumahan Pondok Bahar, Kel. Pondok Bahar
26	2. Komplek DDN, Kel. Karang Mulya
27	3. Ciledug Indah, Kel. Pedurenan
28	4. Kelurahan Parung Jaya
29	5. Kelurahan Karang Timur
J.	Kecamatan Ciledug
30	1. Puri Kartika (RW 09), Kel. Tajur
31	2. Wisma Tajur, Kel. Tajur

6. **Indikator Jumlah Panjang Jalan** diukur berdasarkan jumlah panjang jalan yang terbangun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sudah mencapai 100,00%. Sampai dengan tahun 2018 jumlah panjang jalan yang terbangun sepanjang 1402,64 km.
7. **Indikator Jumlah Jembatan** diukur berdasarkan jumlah jembatan yang terbangun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 98,74% dan sampai dengan

akhir tahun 2018 diperkirakan akan terealisasi 100,00%. Sampai dengan tahun 2018 jumlah jembatan yang terbangun sebanyak 238 jembatan.

8. **Indikator Jumlah Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang** diukur berdasarkan panjang jalan dalam kondisi baik, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 93,70% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai 100,00% dengan jumlah panjang jalan kondisi baik dan sedang yang tertangani sepanjang 1402,14 km.
9. **Indikator Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik** diukur berdasarkan panjang jembatan dalam kondisi baik, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 99,49% dan sampai dengan akhir tahun 2018 akan tercapai realisasi 100,00%, dengan jumlah jembatan kondisi baik yang tertangani sebanyak 238 jembatan.
10. **Indikator Tingkat Ketersediaan Data Jalan Di Seluruh Wilayah Kota** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah data jalan diseluruh kota dibagi dengan jumlah data jalan diseluruh kota yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 25,00% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai reaalisasi 100,00%.
11. **Indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi/Data Base Jalan Yang Lengkap Dan Terbaru** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah sistem informasi/data base jalan yang lengkap dan terbaru yang tersedia dibagi dengan jumlah sistem informasi/data base jalan yang lengkap dan terbaru yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 99,49% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi 100,00%.
12. **Indikator Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan yang layak dan memadai** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak dan memadai yang tersedia dibagi dengan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak dan memadai yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sudah mencapai 100,00%, karena target tercapai di tahun 2017.

13. **Indikator Tingkat Ketersediaan, Publikasi, Dan Pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah publikasi, dan pengembangan sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJK) yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah publikasi, dan pengembangan sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJK) yang seharusnya dilaksanakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 25,00% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan akan terlalisasi 100,00%.
14. **Indikator Tingkat Ketersediaan Dokumen Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Kota** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah ketersediaan dokumen kebijakan perencanaan tata ruang kota yang tersedia dibagi dengan dokumen kebijakan perencanaan tata ruang kota yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 184,59%, capaian ini merupakan akumulasi dari capaian 4 tahun sebelumnya. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 95,48% dan sampai dengan akhir tahun 2018 akan tercapai realisasi 100,00%. Sampai dengan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 29 dokumen kebijakan perencanaan tata ruang kota dan dapat terealisasi sebanyak 29 dokumen. Adapun dokumen tersebut terdiri dari 13 dokumen RDTR, 13 Dokumen KLHS RDTR, 1 dokumen revisi RTRW, 1 dokumen KLHS revisi RTRW, 1 dokumen kajian pencapaian RTH.
15. **Indikator Tingkat Penyelesaian Aturan Perundangan Tentang Rencana Tata Ruang** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah aturan perundangan tentang rencana tata ruang yang diselesaikan dibagi dengan jumlah aturan perundangan tentang rencana tata ruang yang seharusnya diselesaikan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sudah mencapai 100,00% karena target sudah terpenuhi di tahun sebelumnya.
16. **Indikator Tingkat Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Tata Ruang Kota** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kota yang dilaksanakan dibagi dengan pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kota yang seharusnya dilaksanakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 399,98%. capaian ini merupakan akumulasi dari capaian 4 tahun sebelumnya.

Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 88,89% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Sampai dengan tahun 2018 ditargetkan pelaksanaan sosialisasi sebanyak 18 kali sosialisasi. Dan realisasinya sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan 13 kali sosialisasi peta analog RTRW di 13 kecamatan, 5 kali sosialisasi peraturan perundang-undangan tata ruang.

- 17. Indikator Tingkat Ketersediaan Regulasi Penataan Bangunan Dan Lingkungan** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah dokumen regulasi penataan bangunan dan lingkungan dibagi dengan jumlah dokumen regulasi penataan bangunan dan lingkungan yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 399,98%. capaian ini merupakan akumulasi dari capaian 4 tahun sebelumnya. Sedangkan capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sudah mencapai 100,00%. Sampai dengan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 19 dokumen regulasi penataan bangunan dan lingkungan dan realisasinya sampai dengan tahun 2018 telah tersedia 13 dokumen RDTR, 1 dokumen Rencana Kawasan Strategis, 4 dokumen RTBL dan 1 okumen Raperwal Penataan Makro dan Mikro Cell
- 18. Indikator Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik/perkotaan yang tersedia dibagi dengan jumlah penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik/perkotaan yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 59,84,26%. capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 61,61% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi 100,00%.
- 19. Indikator Tingkat Pelaksanaan Pembuatan Data/Informasi Pemanfaatan Ruang** diukur berdasarkan perbandingan antarajumlah dokumen data/informasi pemanfaatan ruang yang tersedia dibagi dengan jumlah data/informasi pemanfaatan ruang yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 116,65%. capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sudah mencapai 100% karena target sudah terpenuhi pada tahun sebelumnya.
- 20. Indikator Tingkat Penyelesaian Regulasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah dokumen regulasi pengendalian pemanfaatan ruang yang diselesaikan dibagi dengan jumlah dokumen regulasi pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya diselesaikan, dengan tingkat

capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 83,33%. capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 83,33% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

21. **Indikator Tingkat Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dibagi dengan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya dilaksanakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. capaian indikator tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 76,92% dan sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.3.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Terdapat ruas jalan yang direncanakan akan dibangun belum dapat dilaksanakan karena lahan yang belum bebas
- b. Masih banyaknya titik genangan akibat belum terintegrasi sistem saluran drainase saluran primer-sekunder dan tersier sehingga menyebabkan kesulitan ketika akan membangun saluran drainase yang baru.
- c. Terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur jembatan dan pengendali banjir yang belum terealisasi karena perlu adanya proses rekomendasi teknis dari BBWS.
- d. Belum tercapainya target penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan karena masih minimnya penambahan luasan RTH Publik.

2. Solusi

- a. Penyelesaian proses pembebasan tanah sebelum kegiatan pembangunan jalan dianggarkan
- b. Menyusun masterplan drainase dan DED pembangunan drainase yang terintegrasi dalam rangka mengurangi titik genangan.
- c. Penyelesaian rekomendasi teknis sebelum kegiatan dianggarkan.
- d. Melaksanakan pembebasan lahan guna menambah luasan RTH publik.

4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.234.507.689.256,50 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.119.078.643.860,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.4.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.96.800.508.695,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.23.202.754.100,00 yang dilaksanakan melalui 24 (dua puluh empat) kegiatan

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program lingkungan sehat perumahan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.31.664.513.600,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.19.641.290.800,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.379.481.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.8.264.116.750,00 dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan

4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program pengelolaan areal pemakaman selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.10.410.731.525,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.690.024.000,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

5. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.25.676.681.650,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.5.594.665.700,00 yang dilaksanakan melalui 41 (empat puluh satu) kegiatan

4.1.4.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.4. Capaian Indikator Program Pada Urusan Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Dan Terjangkau Bagi	%	100,00	100,00	98,77	99,99	100,01	99,99

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Penduduk							
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tingkat Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	%	100,00	100,00	75,56	70,91	70,00	84,31
		Persentase Penanganan lingkungan kumuh perkotaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	87,50	100,00
3	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Per Satuan Penduduk	m ² / 100 pen dud uk	100,00	100,00	131,46	129,86	100,01	115,33
4	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Tingkat Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari	%	100,00	100,00	100,00	101,30	92,19	100,33
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tingkat Ketersediaan Air Minum Yang Aman Melalui SPAM Dengan Jaringan Perpipaan Dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	%	100,00	100,00	100,00	107,47	98,50	101,87
		Tingkat Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Ninja (IPLT)	%	100,00	100,00	100,00	50,00	33,33	87,50
		Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah Permukiman Yang Memadai	%	100,00	100,00	100,00	255,47	233,57	138,87
		Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman	%	100,00	269,17	136,84	125,65	117,28	157,91
		Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang	%	89,47	83,55	80,07	83,79	84,59	82,22

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Memadai							
6	Program Pengendali an Pemanfaat an Ruang	Tingkat Pemantauan Dan Pengawasan Bangunan Gedung	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Program Pemanfaat an Ruang	Tingkat Pelaksanaan Pembuatan Data/Informasi Bangunan Gedung	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perkim Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Dan Terjangkau Bagi Penduduk** dengan rata-rata capaian indikator RPJMD selama periode 2014-2017 adalah 99,99%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I sudah tercapai realisasi 100,10%. Secara umum target yang ditetapkan dalam setiap tahun pelaksanaan pembangunan dapat terpenuhi. Melalui pemutakhiran data RTLH pada tahun 2016, maka jumlah RTLH yang dibangun menjadi bertambah. Pada periode 2014-2015 dilakukan pembangunan 1222 unit RTLH dimana 1040 diantaranya melalui dana hibah pada tahun 2015. Tahun 2016 dibangun 1451 unit RTLH (46 unit menggunakan dana bantuan keuangan Provinsi Banten), dan tahun 2017 dilakukan pembangunan 2314 unit RTLH. Dengan demikian sepanjang tahun 2014-2017 telah dibangun 4.987 unit RTLH. Sedangkan pada tahun 2018 direncanakan akan dibangun 1000 unit RTLH.
- Apabila mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal, indikator ini dapat mengukur perbandingan jumlah keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau dengan jumlah keluarga berpenghasilan rendah meskipun indeks keterjangkauan belum dapat dihitung sepenuhnya karena belum tersedianya data median harga rumah dan median penghasilan rumah tangga. Data keluarga miskin tahun 2016 berjumlah 68.577 KK (data kemiskinan Bappeda, 2016) sedangkan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 2.441 unit. Sehingga diperoleh cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah 96,44%. Penghitungan ini dilakukan melalui pendekatan/asumsi jumlah rumah tangga miskin dan jumlah rumah tangga yang miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni.

2. **Indikator Tingkat Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU** diukur berdasarkan perbandingan jumlah lingkungan perumahan yang didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang telah terdata dibandingkan dengan target jumlah pengembang yang terdata PSU dalam periode 5 tahun. Rata-rata tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 84,31%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 70,00% dan sampai akhir 2018 diperkirakan dapat tercapai realisasi sebesar 100,00%.
3. **Indikator Persentase Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan** diukur berdasarkan perbandingan banyaknya permukiman kumuh yang tertangani dengan jumlah seluruh permukiman kumuh di wilayah kota. Rata-rata tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 87,50 % dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Nomor 663/Kep.688-Bapp/2016 luas total lingkungan kumuh di Kota Tangerang adalah 339,87 ha terdiri atas 51,65 ha kawasan kumuh berat, 282,40 ha kawasan kumuh sedang, dan 5,82 ha kawasan kumuh ringan. Kecamatan dengan kawasan kumuh berat terluas adalah Kecamatan Batuceper seluas 12,68 ha terutama terdapat di wilayah Kelurahan Poris Gaga Baru, Kelurahan Poris Gaga dan Kelurahan Batuceper.

Hasil pemutakhiran data indikator bidang perumahan dan permukiman tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat penurunan luas lingkungan kumuh di Kota Tangerang menjadi 38,07 ha. Kawasan kumuh berat yang teridentifikasi tersebut tersebar di 13 (tiga belas) kelurahan di 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Batuceper, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Jatiuwung, dan Kecamatan Benda. Dengan luas kawasan kumuh 38,07 ha dan luas kawasan permukiman di 13 (tigabelas) kecamatan tersebut adalah 7570,72 ha maka persentase luas kawasan kumuh dibandingkan luas kawasan permukiman mencapai 0,50%.

Tabel 4.5. Sebaran dan Luas Kawasan Kumuh

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kelurah an (Ha)	Luas Permukim an (Ha)	Luas Deliniasi Kumuh (Ha)		Prosentase (%)	
					2016	2017	2016	2017
	Batuceper	Poris Gaga Baru	100,00	33,43	1,74	0,00	5,20	0,00
		Poris Gaga	121,79	64,83	6,30	0,00	9,72	0,00
1		Batuceper	127,00	54,20	4,64	0,24	8,56	0,44

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kelurah an (Ha)	Luas Permukim an (Ha)	Luas Deliniasi Kumuh (Ha)		Prosentase (%)	
					2016	2017	2016	2017
	Karawaci	Koang Jaya	67,00	20,90	4,76	0,00	22,78	0,00
2	Karawaci	Sumur Pacing	53,30	21,06	2,96	2,96	14,06	14,06
3		Cimone	110,00	59,30	2,28	2,28	3,84	3,84
4	Ciledug	Paninggilan Utara	107,33	86,47	1,84	1,34	2,13	1,55
5	Neglasari	Karang Anyar	209,71	51,99	1,74	1,74	3,35	3,35
6		Mekarsari	134,20	43,70	5,95	5,74	13,62	13,14
7		Kedaung Baru	113,50	36,00	2,90	2,90	8,06	8,06
8	Cipondoh	Ketapang	180,00	85,93	7,40	7,10	8,61	8,26
9	Cibodas	Cibodas	153,00	76,44	4,36	4,25	5,70	5,56
10		Jatiuwung	110,00	42,76	3,51	3,24	8,21	7,58
11	Jatiuwung	Manis Jaya	162,61	23,91	1,74	1,70	7,28	7,11
12	Benda	Belendung	278,00	88,79	3,53	3,51	3,98	3,95
13		Pajang	62,05	20,56	1,07	1,07	5,20	5,20
Jumlah			2089,49	810,27	56,72	38,07	7,00	4,70

Sumber: Pemutakhiran data indikator bidang perumahan, 2017

Dari jumlah 104 kelurahan di wilayah Kota Tangerang, masih terdapat 13 kelurahan yang memiliki Kawasan permukiman kumuh, dengan demikian hingga triwulan I tahun 2018 telah tertangani permukiman kumuh sebanyak 91 kelurahan (87,5%).

4. **Indikator Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Per Satuan Penduduk** diukur berdasarkan perbandingan luas TPU dalam hektar dan jumlah penduduk. Rata-rata tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 115,33%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I telah tercapai realisasi 100,01%.

Indikator ini menunjukkan besaran luas lahan TPU yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan perhitungan tersebut, tanpa adanya penambahan luas TPU dan adanya penambahan jumlah penduduk maka setiap tahun rasio akan semakin menurun.

Luas tempat pemakaman umum (TPU) yang di seluruh wilayah Kota Tangerang adalah 48,963 ha termasuk diantaranya 10,4 ha lahan TPU Selapajang Jaya yang dikelola oleh pemerintah kota. Jumlah penduduk Kota Tangerang hingga triwulan I tahun 2018 menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 1.671.381 jiwa. Dengan demikian rasio TPU per satuan penduduk adalah 21,89 m²/100 penduduk.

5. **Indikator Tingkat Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari** diukur berdasarkan perbandingan jumlah ketersediaan air baku dengan jumlah kebutuhan air baku berdasarkan MDGs. Rata-rata tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,33%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I teralisis sebesar 92,19% dan sampai akhir tahun 2018 akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Dalam target Millenium Development Goals sumber air yang berasal dari perpipaan harus mencapai 80,00%. Hingga tahun 2018 ketersediaan air baku Kota Tangerang mencapai 11.184 l/dt yang berasal dari instalasi pengolahan air (IPA) PDAM Tirta Benteng, PDAM Tirta Kerta Raharja, maupun IPA swasta. Hasil inventarisasi cakupan air bersih Kota Tangerang tahun 2017 menunjukkan masih adanya kebutuhan tambahan sebesar 695 l/dt untuk zona II (Kecamatan Jatiuwung, Periuk, Cibodas, dan Karawaci) dan 1600 l/dt untuk zona III (Kecamatan Larangan, Pinang, Ciledug, dan Karang Tengah) atau total masih terdapat kekurangan sebesar 2.295 l/dt dari jumlah kebutuhan keseluruhan sebesar 13.479 l/dt (telah terpenuhi sebesar 82,97%). Guna memenuhi kesenjangan ketersediaan air baku tsb telah direncanakan pembangunan IPA Sitanala (kapasitas 1500 l/dt), IPA Panunggangan, serta air baku dari program waduk Karian dalam beberapa tahun yad, sekaligus sebagai upaya mengalihkan sumber air non perpipaan yang selama ini diterima masyarakat menjadi sumber air perpipaan.

6. **Indikator Tingkat Ketersediaan Air Minum Yang Aman Melalui SPAM Dengan Jaringan Perpipaan Dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan** diukur dengan perbandingan ketersediaan air minum yang aman baik melalui perpipaan maupun non perpipaan dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya tersedia. Rata-rata tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 101,87%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 98,50% dan sampai akhir tahun 2018 akan tercapai realisasi melampaui 100,00%.

Indikator ini menggambarkan ketersediaan air minum yang aman baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Pencapaian indikator antara lain dilakukan melalui pembangunan jaringan perpipaan distribusi, retikulasi, dan sambungan rumah (SR), disamping pemeliharaan terminal air dan sumur dalam yang sudah ada sebelumnya.

Pada tahun 2017, Dinas Perumahan dan Permukiman telah membangun jaringan perpipaan air minum bagi 8000 SR disamping PDAM yang membangun 6728 SR, sehingga total yang terbangun adalah 14728 SR.

Sedangkan tahun 2018 dengan penghitungan penambahan jumlah IMB rumah tinggal baru, cluster, apartemen, serta 653 SR yang akan dibangun pemerintah kota maka jumlah ketersediaan air minum yang aman telah menjangkau 98,50% dari seluruh penduduk Kota Tangerang.

7. **Indikator Tingkat Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)** diukur berdasarkan realisasi jumlah IPLT di Kota Tangerang dengan jumlah IPLT yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 87,50%.

Untuk tahun 2018 sampai triwulan I terealisasi sebesar 33,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan terealisasi sebesar 100,00%.

Indikator kinerja ini menggambarkan tingkat ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja. Pelayanan pengolahan lumpur tinja di Kota Tangerang dilakukan baik melalui jaringan perpipaan maupun jaringan non perpipaan.

Adapun jaringan perpipaan yang dimiliki berupa 8 (delapan) kolam oksidasi dan 1 (satu) Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan total kapasitas pengolahan sebesar 2867,6 m³/hari. Jaringan non perpipaan melalui pelayanan angkutan air limbah ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2018 dengan kapasitas 90 m³/hari.

- 8. Indikator Tingkat Ketersediaan Fasilitas Pengelolaan Air Limbah Permukiman Yang Memadai** diukur berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah secara memadai dengan total jumlah penduduk. Tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 138,87%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I sudah tercapai sebesar 233,57 dan sampai akhir tahun 2018 akan tercapai melampaui 100 %.

Indikator ini menggambarkan jumlah rumah yang terlayani sistem pengelolaan air limbah perpipaan di wilayah Kota Tangerang. Hingga tahun 2018 sekitar 52.177 rumah telah memiliki sambungan dengan instalasi pengolahan air limbah baik milik pemerintah kota maupun ipal swasta, dengan rincian 10.690 rumah yang tersambung di 8 (delapan) kolam oksidasi dan IPAL Tanah Tinggi, 41.887 rumah tersambung dengan IPAL swasta.

Masih terdapat potensi pemanfaatan sisa kapasitas IPAL Tanah Tinggi untuk kawasan permukiman di sekitar lokasi IPAL.

- 9. Indikator Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman** diukur berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan total jumlah penduduk. Tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 157,91%. Untuk tahun 2018 sampai triwulan I telah tercapai realisasi 117,80% dan sampai akhir tahun 2018 akan tercapai realisasi melampaui 100,00%.

Akses air bersih yang aman dapat diperoleh melalui jaringan perpipaan (PDAM) maupun non perpipaan. Pada tahun 2016 jaringan perpipaan PDAM telah melayani 25,03% penduduk Kota Tangerang atau sebanyak 401.172 jiwa dan 72,37% penduduk lainnya atau sekitar 1.159.921 jiwa dikategorikan telah memperoleh akses air bersih aman non perpipaan (dapat berupa terminal air dan sumur dalam).

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pembangunan jaringan perpipaan air bersih/air minum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dimana total telah dibangun 14.728 sambungan rumah (SR) terdiri atas 8000 SR dibangun oleh Pemerintah Kota Tangerang serta 6728 SR oleh PDAM. Dan pada tahun 2018 akan dilakukan pembangunan sebanyak 653 SR. Dengan pembangunan ini maka penduduk yang terlayani air bersih aman adalah sekitar 1,646 juta jiwa atau mencapai 98,50% dari total jumlah penduduk.

- 10. Indikator Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai** diukur berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai dengan total jumlah penduduk. Tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 84,72%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 84,59% dan sampai akhir tahun 2018 akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Indikator ini menggambarkan jumlah rumah yang mendapat layanan sistem perpipaan maupun non perpipaan. Mengacu pada data ‘Buku Putih Sanitasi’ bahwa jumlah keluarga dengan sistem sanitasi yang aman pada tahun 2016 mencapai 44,20% dari seluruh keluarga di Kota Tangerang. Jaringan perpipaan yang dimiliki berupa 8 (delapan) kolam oksidasi dan 1 (satu) Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan total kapasitas pengolahan sebesar 2867,6 m³/hari. Jaringan non perpipaan melalui pelayanan angkutan air limbah ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2017 dengan kapasitas 90 m³/hari.

Pada tahun 2017 telah dilakukan pembangunan 1000 unit jamban dan septictank komunal untuk 14 kepala keluarga. Pada tahun 2018 kembali akan dibangun 1671 unit jamban. Dengan memperhitungkan pembangunan jamban dan penambahan unit-unit hunian baru, jumlah penduduk yang terlayani jaringan air limbah yang memadai bertambah sekitar 44.000 jiwa sehingga total jumlah penduduk yang terlayani tahun 2017 adalah sebanyak 848.286 jiwa atau mencapai 50,75% dari jumlah penduduk Kota Tangerang yang seluruhnya berjumlah 1,67 juta jiwa.

- 11. Tingkat Pemantauan Dan Pengawasan Bangunan Gedung dari target 100,00% dapat direalisasikan sebesar 100,00%.** Capaian indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2018 telah tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Indikator ini menggambarkan tindakan awal pengaduan masyarakat. Selama periode 2014-2017 pengawasan yang dilakukan sekitar 1000 dengan rata-rata temuan/masalah sebanyak 75,00%. Bagi pemilik yang bermasalah dilakukan klarifikasi dokumen

perijinan. Tindak lanjut dilakukan antara lain dengan membuat surat pernyataan (bagi yang memiliki IMB namun melanggar) atau dilakukan penyampaian informasi dan laporan kepada dinas yang berwenang. Tingkat realiasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang bermasalah mencapai 100,00%.

12. **Tingkat Pelaksanaan Pembuatan Data/Informasi Bangunan Gedung dari target 100,00% dapat direalisasikan sebesar 100,00%.** Capaian indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2018 telah tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Telah diselesaikan 5 (lima) dokumen dari target 5 (lima) dokumen pada akhir periode RPJMD berupa dokumen data bangunan di seluruh wilayah kecamatan.

13. **Tingkat ketersediaan, publikasi, dan pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK) dari target 100,00% dapat direalisasikan sebesar 100,00%.** Capaian indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2018 telah tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Terdapat 7 (tujuh) indikator layanan yang telah terpenuhi sesuai SIPJK yaitu:

- a. IUJK yang ter up date secara berkala
- b. Data badan usaha JK yang terupdate secara berkala
- c. Data tenaga kerja konstruksi yang terupdate secara berkala
- d. Potensi pasar jasa konstruksi untuk tahun berjalan
- e. Tanda Daftar Usaha perorangan yang ter update secara berkala
- f. Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material yang terupdate setiap 6 bulan
- g. Profil tim pembina jasa konstruksi di kota

14. **Tingkat pelaksanaan pengaturan dan pembinaan jasa konstruksi dari target 100,00% terealisasi 100,00%.** Capaian indikator ini sampai dengan triwulan I tahun 2018 telah tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Terdapat 210 (dua ratus sepuluh) permohonan rekomendasi IUJK sepanjang tahun 2017 dan 155 permohonan pada tahun 2018 dimana seluruhnya dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.1.4.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Masih terdapat kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni/RTLH yang masih memerlukan bantuan dari pemerintah/pemerintah daerah. Untuk validasi data

masih diperlukan peran serta dari aparat kelurahan atau kelompok masyarakat yang berkompeten.

- b. Terdapat pengembang perumahan baik yang masih aktif maupun tidak aktif belum menyerahkan PSU kepada pemerintah kota.
- c. Proses pengukuran dan pemetaan untuk perolehan sepahak (perumahan yang ditinggal pengembang) oleh instansi terkait masih membutuhkan waktu yang cukup lama.
- d. Mengingat kapasitas instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) eksisting sudah sangat terbatas dibutuhkan pembangunan IPLT baru. Namun hingga saat ini belum diperoleh lokasi/lahan yang tepat sebagai calon lokasi IPLT.
- e. Masih terdapat kebutuhan pemenuhan pengolahan air baku untuk air minum perpipaan khususnya di kawasan Kecamatan Jatiuwung, Periuk, Cibodas, Karawaci, Larangan, Pinang, Ciledug, dan Karang Tengah).
- f. Sebagian masyarakat pengguna air tanah sulit beralih ke sistem perpipaan air minum karena merasa sudah nyaman dengan sumber air yang mereka gunakan saat ini (khususnya pengguna sumur dalam).

2. Solusi

- a. Dilakukan pendataan dan pembangunan rumah tidak layak huni secara bertahap.
- b. Guna mempercepat pelaksanaan pembangunan di lapangan dan sekaligus meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, pembangunan RTLH dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan kelompok masyarakat.
- c. Untuk pengembang tidak aktif sesuai Permendagri Nomor 9/2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah akan diupayakan pengambilalihan secara sepahak oleh Pemerintah Kota. Lebih lanjut untuk mengatur pengambilalihan ini telah ditetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
- d. Perlu dijajagi perjanjian kerjasama dengan instansi yang berwenang dalam proses pengukuran dan pemetaan sehingga pelaksanaan dapat lebih cepat.
- e. Masih akan dilakukan pencarian untuk lokasi IPLT.
- f. Untuk memenuhi kebutuhan akan air baku direncanakan akan dibangun IPA Sitanala dan IPA Panunggangan.
- g. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat akan manfaat dari penggunaan sumber air melalui perpipaan.

4.1.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.41.108.234.394,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.35.992.074.184,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.5.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.513.506.150,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.060.850.000,00. yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

2. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.17.265.351.700,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.11.724.730.801,00. yang dilaksanakan melalui 23 (dua puluh tiga) kegiatan

3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.57.972.925.759,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.3.374.866.000,00. yang dilaksanakan melalui 21 (dua puluh satu) kegiatan

4.1.5.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.6. Capaian Indikator Program Pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT	petu gas/ RT	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW	Posk amlin g/ RW	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
2	Program Pemelihara an Kantramtib mas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Patro li/hari	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar peraturan daerah	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat koordinasi pembinaan hukum wilayah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
3	Program peningkatan pemberanta san penyakit masyarakat (pekat)	Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
4	Program Pemberdaya an masyara kat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan pengendalian keamanan lingkungan RT	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
5	Program pencegahan dini dan penanggula ngan korban bencana alam	Tingkat koordinasi penanggulangan bencana	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

Sumber: Satpol PP Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Rasio Petugas Dalam Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Pada Setiap RT** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (linmas) dalam satu kota dibagi banyaknya RT atau sebutan lainnya dalam satu kota, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan pertama sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

2. **Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah operasi penertiban dibagi jumlah banyaknya operasi penertiban dalam 5 tahun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan pertama sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
3. **Indikator Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya poskamling yang dibangun di setiap RW dibagi banyaknya seluruh RW, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan pertama sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
4. **Indikator Tingkat pemanfaatan Poskamling Di Setiap RT** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya poskamling yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan di setiap RT dibagi banyaknya seluruh poskamling, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan pertama sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
5. **Indikator Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kelompok patroli dalam sehari dibagi banyaknya seluruh kecamatan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan pertama sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
6. **Indikator Persentase Pengawasan Lokasi Rawan Pelanggar Peraturan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah lokasi pengawasan rawan pelanggaran Perda dibagi banyaknya kecamatan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan pertama sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
7. **Indikator Tingkat Koordinasi Pembinaan Hukum Wilayah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kegiatan koordinasi pembinaan wilayah yang dilaksanakan dibagi banyaknya kegiatan koordinasi pembinaan wilayah yang seharusnya dilaksanakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan pertama sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

8. **Indikator Tingkat Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya operasi penyakit masyarakat yang dilakukan dibagi banyaknya operasi penyakit masyarakat yang seharusnya dilakukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan pertama sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
9. **Indikator Tingkat Cakupan pengendalian keamanan lingkungan RT** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya keamanan di RT yang keamanan lingkungannya terkendali dibagi Banyaknya seluruh RT, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan pertama sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
10. **Indikator Tingkat koordinasi penanggulangan bencana** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya jenis koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan dibagi banyaknya sosialisasi terkait pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam yang seharusnya dilakukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan pertama sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.5.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang ketertiban umum, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi perijinan tertentu Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen ;
- b. Belum tersedianya lahan/lokasi untuk tempat penampungan para pedagang kaki lima yang selama masih berada di tempat-tempat yang terlarang, hal tersebut karena adanya desakan ekonomi/kebutuhan Pedagang;

- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertibannya dilingkungan masing-masing ;
- d. Belum secara keseluruhan terdeteksi titik rawan pelanggaran Peraturan Daerah secara menyeluruh di wilayah Kota Tangerang ;
- e. Terbatasnya anggota Satpol PP yang menjadi PPNS ;
- f. Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja personil.

2. Solusi

- a. Peningkatan sosialisasi, memberikan penyuluhan-penyuluhan serta pemahaman tentang Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2011 tentang ketertiban umum, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi perijinan tertentu, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen.
- b. Duduk bersama dengan SKPD terkait untuk menyelesaikan penataan dalam rangka tempat/ relokasi para pedagang.
- c. Lebih intens adanya rapat koordinasi dengan wilayah baik dari Kecamatan, Kelurahan, dan RW/RT dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban.
- d. Melakukan monitoring dan pengamanan wilayah serta deteksi dini terhadap titik rawan yang di ~~duga~~ melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Tangerang.
- e. Terselenggaranya pengajuan kepada SKPD terkait dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PPNS.
- f. Adanya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja personil.

4.1.6. Urusan Sosial

Urusan Sosial selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.97.534.628.173,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.57.360.979.900,00

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.6.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.4.384.087.700,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.351.972.500,00 yang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.4.438.702.804,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.3.581.011.000,00 yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

Program pembinaan anak terlantar selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.42.059.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.116.160.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.580.439.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.304.368.000,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program pembinaan panti asuhan/panti jompo selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.677.717.200,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.692.586.000,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

6. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit sosial lainnya) selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.232.610.450,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.111.040.500,00 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.74.203.446.232,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.46.431.443.500,00 yang dilaksanakan melalui 63 (enam puluh) kegiatan

8. Program Pengembangan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Program pengembangan jaminan kesejahteraan sosial selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.728.994.200,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.281.062.500,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

4.1.6.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.7. Capaian Indikator Program Pada Urusan Sosial Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Capaian Indikator Program					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase (%) PMKS Skala Kota Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	%	100.00	100.00	100.00	199.34	79.17	199.34
		Jumlah KUBE Yang Mendapat Bantuan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	100.00
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Petugas Rehabilitasi Sosial Yang Terlatih	%	100.00	100.00	100.00	714.53	714.53	253.63
		Cakupan Ketersediaan Petugas Terlatih Untuk Melakukan Reintegrasi Sosial	% per ta hun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Program pembinaan anak terlantar	Persentase (%) Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Cacat Dan Anak Nakal Yang Mengikuti Pelatihan	%	100.00	100.00	100.00	108.33	86.67	108.33
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase (%) Penyandang Cacat Dan Trauma Yang Mendapat Pembinaan	%	100.00	100.00	210.93	138.18	88.75	138.18
		Persentase (%) Penyandang Cacat, Fisik,	%	100.00	100.00	241.52	237.57	75.00	237.57

No	Program	Indikator Program		Capaian Indikator Program					Capai an 2014-2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial							
5	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Persentase Penghuni Panti Asuhan/Panti Jompo Yang Mendapat Pelatihan Keterampilan	%	100.00	100.00	59.27	104.79	83.83	104.79
		Persentase Tenaga Pelatih Dan Pendidik Panti Asuhan/ Panti Jompo Yang Mendapat Pelatihan Keterampilan	%	100.00	100.00	100.00	106.49	85.19	106.48
		Persentase Panti Sosial Skala Kota Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	% per ta hun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Tingkat Ketersediaan Panti Asuhan/Panti Jompo	% per ta hun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Tingkat keikutsertaan eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Frekuensi pengiriman dan operasi PMKS	%	100.00	100.00	105.55	125.00	100.00	125.00
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100.00	100.00	100.00	100.03	97.37	100.03
		Persentase Bantuan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial-Kemasyarakatan	% per ta hun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Program	Indikator Program		Capaian Indikator Program					Capai an 2014-2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	50.63	78.49	100.00	100.86	100.00	100.86
9	Program Pengembangan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Tingkat Pelayanan Jaminan Kesejahteraan Sosial	% per ta hun	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Korban Bencana Skala Kota Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	% per ta hun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Persentase Korban Bencana Skala Kota Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	% per ta hun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Persentase (%) PMKS Skala Kota Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya** diukur berdasarkan perbandingan jumlah PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dibagi jumlah PMKS skala kota yang seharusnya menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 199,34% dari target 79,17% dapat teralisasikan sebesar 157,81%. Target sampai dengan tahun 2017 sebanyak 960 orang PMKS yang seharusnya menerima program melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya dan dapat terealisasi sebanyak 1.515 orang PMKS. Hal ini disebabkan karena banyaknya minat atau kemauan PMKS terhadap program KUBE yang sangat tinggi. Untuk tahun 2018

sampai dengan sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 79,70% dan sampai akhir tahun 2018 siperkirakan tercapai realisasi melampaui 100,00%.

2. **Indikator Jumlah KUBE Yang Mendapat Bantuan** diukur berdasarkan perbandingan jumlah KUBE yang mendapat bantuan dibagi jumlah KUBE yang seharusnya mendapat bantuan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. dari target 75,00% dapat teralasikan sebesar 75,00%. Realisasi pada tahun 2016 hanya mencapai 80,00% dari target yang telah ditentukan, tetapi kekurangan tersebut telah dicapai pada tahun berikutnya sehingga total sampai dengan tahun 2017 sebanyak 60 KUBE telah mendapat bantuan. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 95,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
3. **Indikator Cakupan Petugas Rehabilitasi Sosial Yang Terlatih** diukur berdasarkan perbandingan jumlah petugas rehabilitasi sosial yang terlatih dibagi jumlah petugas rehabilitasi sosial yang seharusnya terlatih, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 253,63% dari target 100,00% dapat terealisasikan sebesar 253,63%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 714,53% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi melampaui 100,00%. Terjadi lonjakan jumlah petugas rehabilitasi sosial pada tahun 2017 sebanyak 836 petugas yang tersebar diseluruh wilayah Kota Tangerang. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan pimpinan daerah dengan memberikan apresiasi kepada petugas yang sudah berperan dalam pelayanan kesejahteraan sosial yang dirasakan cukup penting.
4. **Indikator Cakupan Ketersediaan Petugas Terlatih Untuk Melakukan Reintegrasi Sosial** diukur berdasarkan perbandingan jumlah petugas terlatih melakukan reintegrasi sosial dibagi jumlah petugas terlatih yang seharusnya melakukan reintegrasi sosial, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dari target 100,00% dapat terealisasikan sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. Sebanyak 117 PSM dan TKSK dari masing-masing kelurahan dan kecamatan seluruhnya melakukan reintegrasi sosial.
5. **Indikator Persentase (%) Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Cacat Dan Anak Nakal Yang Mengikuti Pelatihan** diukur berdasarkan perbandingan jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah anak

terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang seharusnya mengikuti pelatihan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 108.33% dari target 80.00% dapat terealisasikan sebesar 86.67%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 86,67% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Sepanjang tahun 2014-2017 telah melakukan pelatihan perbengkelan dan elektronik kepada 650 orang anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.

6. **Indikator Persentase (%) Penyandang Cacat Dan Trauma Yang Mendapat Pembinaan** diukur berdasarkan perbandingan jumlah penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan dibagi jumlah penyandang cacat dan trauma yang seharusnya mendapat pembinaan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 138.18% dari target 45.26% dapat terealisasikan sebesar 62.54%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 88,75% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Sebanyak 1.531 penyandang cacat dan trauma telah mendapat pembinaan diantaranya tuna daksa, tuna netra, tuna rungu wicara dan tuna ganda.

7. **Indikator Persentase (%) Penyandang Cacat, Fisik, Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial** diukur berdasarkan perbandingan jumlah penyandang cacat fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dibagi jumlah penyandang cacat fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 237.57% dari target 34.44% dapat terealisasikan sebesar 81.83%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 75,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Sepanjang tahun 2014-2017 sebanyak 2.017 penyandang cacat fisik, mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar seperti jaminan permakanan bagi lanjut usia, jaminan biaya hidup bagi lansi dan penyandang cacat yang didanai oleh APBN, APBD provinsi dan APBD Kota Tangerang

8. **Indikator Persentase Penghuni Panti Asuhan/Panti Jompo Yang Mendapat Pelatihan Keterampilan** diukur berdasarkan perbandingan jumlah penghuni panti asuhan/panti jompo yang mendapat pelatihan keterampilan dibagi jumlah penghuni panti asuhan/panti jompo yang seharusnya mendapat pelatihan keterampilan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 104,78% dari target 80,00% dapat

terealisasikan 83,83%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 83,83% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Sebanyak 679 orang penghuni panti yang mendapat keterampilan berupa berbagai macam keterampilan melalui kegiatan pelatihan keewirausahaan bagi penghuni panti, lalu dari kegiatan tersebut menghasil keterampilan seperti Handycraft, memasak, pembuatan kue dan aksesoris.

9. **Indikator Persentase Tenaga Pelatih Dan Pendidik Panti Asuhan/Panti Jompo Yang Mendapat Pelatihan Keterampilan** diukur berdasarkan perbandingan jumlah tenaga pelatih dan pendidik panti asuhan/panti jompo yang mendapat pelatihan keterampilan dibagi jumlah tenaga pelatih dan pendidik panti asuhan/panti jompo yang seharusnya mendapat pelatihan keterampilan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 106,48% dari target 80,00% dapat terealisasikan 85,19%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 85,19% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Sebanyak 230 orang yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan salah satu nya melalui kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Panti. Pelatihan yang dierikan berupa pelatihan manajemen panti, pelatihan administrasi, pelatihan keuangan, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan ilmu parenting.

10. **Indikator Persentase Panti Sosial Skala Kota Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial** diukur berdasarkan perbandingan jumlah panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dibagi jumlah panti sosial skala kota yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dari target 100,00% dapat terealisasikan sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. Sebanyak 25 panti sosial yang seluruhnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

11. **Indikator Tingkat Ketersediaan Panti Asuhan/Panti Jompo** diukur berdasarkan perbandingan jumlah panti asuhan/panti jompo yang tersedia dibagi jumlah panti asuhan/panti jompo yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dari target 100,00% dapat terealisasikan sebesar 100,00%.

Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. sebanyak 25 panti asuhan/panti jompo yang tersedia di Kota Tangerang

- 12. Indikator Tingkat Keikutsertaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan** diukur berdasarkan perbandingan jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah eks penyandang penyakit sosial yang seharusnya mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100.00% dari target 80.00% dapat terealisasikan sebesar 80.00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. Sebanyak 1.384 orang eks penyadang penyakit sosial yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian klien diantaranya membuka usaha salon, usaha warung makan dan perbengkelan.
- 13. Indikator Frekuensi Pengiriman Dan Operasi PMKS** diukur berdasarkan perbandingan jumlah pengiriman dan operasi PMKS yang dilakukan dibagi jumlah pengiriman dan operasi PMKS yang seharusnya dilakukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 125.00% dari target 80.00% dapat terealisasikan sebesar 100.00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. sebanyak 120 kali pengiriman dan operasi PMKS dan hasil operasi dikirimkan ke Panti Sosial milik Kementerian Sosial.
- 14. Indikator Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial** diukur berdasarkan perbandingan jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dibagi jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100.03% dari target 96.50% dapat terealisasikan sebesar 96.53%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 97,37% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
Sebanyak 2.003 Wahana Kesejateraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan saran prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dari target 2.057.

- 15. Indikator Persentase Bantuan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial-Kemasyarakatan** diukur berdasarkan perbandingan bantuan kelembagaan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang diberikan dibagi bantuan kelembagaan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang seharusnya diberikan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100.00% dari target 100.00% dapat terealisasikan sebesar 100.00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. Sebanyak 104 lembaga kesejahteraan sosial yang seluruhnya mendapatkan bantuan kelembagaan salah satunya melalui pemberian bantuan kepada yayasan/organisasi sosial dan LK3.
- 16. Indikator Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial** diukur berdasarkan perbandingan jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dibagi jumlah wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100.91% dari target 96.50% dapat terealisasikan sebesar 97.37%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 17. Indikator Tingkat Pelayanan Jaminan Kesejahteraan Sosial** diukur berdasarkan perbandingan jumlah pelayanan jaminan kesejahteraan sosial yang diberikan dibagi jumlah pelayanan jaminan kesejahteraan sosial yang seharusnya diberikan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100.00% dari target 100.00% dapat terealisasikan sebesar 100.00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. Pelayanan jaminan kesejahteraan sosial berupa jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar, jaminan sosial bagi penyadang cacat berat, bantuan permakunan bagi lanjut usia dan bantuan permakunan bagi anak panti dan diluar panti.
- 18. Indikator Persentase Korban Bencana Skala Kota Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat** diukur berdasarkan perbandingan jumlah korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dibagi jumlah korban bencana skala kota yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100.00% dari target 100.00% dapat terealisasikan sebesar 100.00%. Untuk tahun 2018

sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. sebanyak 52.800 orang korban bencana Kota seluruhnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

4.1.6.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Data PMKS dan data Kemiskinan yang tidak terintegrasi, sehingga program yang memanfaatkan data tersebut akan terkendala jika datanya tidak akurat
- b. Maraknya aktifitas anjal , gepeng dan pengamen di titik tertentu/strategis di Kota Tangerang sangat mengganggu kenyamanan dan keindahan kota.
- c. KUBE yang sudah terbentuk belum mempunyai usaha secara maksimal karena kurangnya modal usaha dan upaya pemasaran yang menjadikan hasil KUBE masih terbatas
- d. Belum adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang didalamnya memuat tentang pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, standar saran dan prasarana, peran masyarakat, pendaftara dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial, SDM, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat. Peraturan daerah ini merupakan peraturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial khususnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.

2. Solusi

- a. Perlu dibuatnya sistem informasi data yang terintegrasi bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Kominfo, Dukcapil, kecamatan dan kelurahan lalu diperlukannya verifikasi dan validasi data minimal 6 bulan sekali.
- b. Pemerintah Kota Tangerang telah memiliki Rumah singgah sebagaimana diamanatkan pasal 14 Perda No 5 tahun 2012 dengan kapasitas 20 Orang sebagai tempat persinggahan bagi anjal, pengamen dan gepeng sekaligus sebagai wadah pembinaan sementara selama 3 hari. Guna mendapat hasil yang lebih optimal

apabila anjal, pengamen dan gepeng evaluasi dan ditangani atau di rehab di Rumah Rehabilitasi milik Pemerintah Kota Tangerang. Disamping itu telah dibentuknya Rumah Perlindungan Sosial untuk penanganan Lansia Terlantar dengan penambahan kapasitas penghuni dan diserta penambahan tenaga pendukung operasional.

- c. Melakukan koordinasi kepada Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Kesehatan dalam rangka pembahasan hasil usaha
- d. Mengajukan pembuatan Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ke bagia hukum untuk dibuatkan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

4.1.7. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerjaselama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.38.726.173.641,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.10.118.480.288,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.7.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.10.833.757.860,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.2.390.203.800,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program peningkatan kesempatan kerjaselama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.4.356.865.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.727.662.500,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan selama tahun 2014-2017 dapat te realisasi sebesar Rp.9.090.867.750,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.910.311.400,00 yang dilaksanakan melalui 14 (empat belas) kegiatan

4.1.7.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.8. Capaian Indikator Program Pada Urusan Tenaga Kerja Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	105,01	104,00	102,35	153,33	87,73	116,17
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	57,97	100,00
		Tingkat Pengembangan Balai Latihan Kerja Daerah	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	101,67	101,56	101,47	102,50	74,76	101,80
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	102,17	100,37	106,00	101,28	64,87	102,46
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Aktif	%	157,16	104,67	133,65	150,97	154,42	136,61
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	105,77
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang dilatih dibagi dengan tenaga kerja yang mendaftar pelatihan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014 – 2017 sebesar 116,17 %. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 87,73 % dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai sebesar 100,00%.

Hal ini dapat tercapai dikarenakan semua pendaftar pelatihan kerja dapat dilayani untuk mendapatkan pelatihan kejuruan berbasis kompetensi di UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan.

2. **Indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kenawirausahaan** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang dilatih pelatihan berbasis kewirausahaan dibagi dengan tenaga kerja yang mendaftar, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014 – 2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 57,97% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Hal ini dapat tercapai dikarenakan semua pendaftar pelatihan kerja dapat dilayani untuk mendapatkan pelatihan kejuruan berbasis kewirausahaan di UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan.
3. **Indikator Tingkat Pengembangan Balai Latihan Kerja Daerah** diukur berdasarkan tingkat pemenuhan jumlah sarana dan prasarana pelatihan yang memadai per tahunnya, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014 – 2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. Hal ini dapat tercapai dikarenakan terpenuhinya syarat penyelenggaraan pelatihan kerja yaitu tersedianya gedung BLK, peralatan pelatihan kerja dan adanya instruktur.
4. **Indikator Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja terdaftar, dengan tingkat capaian indikator antara tahun 2014 – 2017 sebesar 101,80 %. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 74,76% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Hal ini dapat tercapai dikarenakan pencari kerja terdaftar mendapatkan lowongan kerja yang sesuai.
5. **Indikator Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikan pada tingkat Perjanjian Bersama (PB) dibagi dengan jumlah kasus yang dicatatkan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014 – 2017 sebesar 102,46 %. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 64,87% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Hal ini dapat tercapai dikarenakan sebagian besar kasus yang dicatatkan dapat terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).

6. **Indikator Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Aktif** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pekerja/buruh peserta Jamsostek aktif dibagi dengan jumlah pekerja/buruh, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014 – 2017 sebesar 136,61 %. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 154,42% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi melampaui 100,00%. Hal ini dapat tercapai dikarenakan pekerja/buruh semakin banyak yang menjadi peserta Jamsostek aktif.
7. **Indikator Besaran Pemeriksaan Perusahaan** adalah perbandingan jumlah pemeriksaan perusahaan dengan jumlah perusahaan dengan tingkat capaian inidikator tahun 2014 – 2018 sebesar 105,77 %. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00 % dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Hal ini dapat tercapai dikarenakan target pemeriksaan perusahaan dapat dipenuhi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.
8. **Indikator Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan** adalah perbandingan jumlah pengujian peralatan di perusahaan dengan jumlah perusahaan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014 – 2017 sebesar 100,21%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Hal ini dapat tercapai dikarenakan target jumlah pengujian peralatan di perusahaan dapat dicapai oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

4.1.7.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Tidak semua pencari kerja terdaftar menginformasikan/melaporkan keberadaan mereka setelah mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausaha baru
- b. Perusahaan pemberi kerja sebagai peserta Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) tidak seluruhnya melaporkan hasil penempatan tenaga kerja
- c. Tidak semua perusahaan (pemberi kerja) melaporkan lowongan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan
- d. Penganggur terbuka disebabkan banyaknya Angkatan Kerja yang tidak terserap oleh Pasar kerja. Sehingga Angkatan Kerja tidak langsung mulai bekerja atau masih mencari pekerjaan yang sesuai
- e. Informasi ketersediaan lowongan kerja dari pemberi kerja, terkadang dipublikasikan hanya kepada orang-orang tertentu saja (*insider information*)

- f. Pelatihan berbasis kompetensi belum *ter-mapping* antar OPD / SKPD yang juga menyelenggarakan pelatihan kepada masyarakat
- g. Modul Pelatihan berbasis kewirausahaan masih tingkat dasar(*basic*)
- h. Pencari kerja terdaftar/lulusan SMK/SMA dan sarjana, masih banyak yang memilih (banyak pertimbangan) untuk pekerjaan yang akan berpenghasilan tinggi
- i. Balai Latihan Kerja yang menyelenggarakan pelatihan kerja belum disertifikasi/ akreditasi/revitalisasi dan jumlah PNS pengelola pelatihan kerja masih terbatas (kurang)
- j. Jumlah mediator hubungan industrial masih sedikit (hanya 5 orang). Sehingga berpengaruh kepada percepatan penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)
- k. Masih banyak Peraturan Perusahaan (PP) yang dibuat tidak sinkron dengan peraturan Ketenagakerjaan
- l. Masih ada perusahaan yang (diduga) tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Jamsostek Aktif
- m. Masih terdapat Pekerja yang sering mengambil klaim kecelakaan kerja

2. Solusi

- a. Akan dilakukan pemantauan terhadap para pencari kerja agar menginformasikan/ melaporkan keberadaan mereka setelah mendapatkan pekerjaan atau menjadi wirausaha baru
- b. Meminta perusahaan peserta pameran kesempatan kerja (Job Fair) untuk melaporkan hasil rekrutmennya secara berkala kepada Dinas Ketenagakerjaan
- c. Melakukan sosialisasi Peraturan perundang-undangan Kepres No. 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan di Perusahaan dan menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara periodik ke Dinas Ketenagakerjaan. Serta melakukan pendataan lowongan pekerjaan secara langsung ke perusahaan yang ada di wilayah Kota Tangerang.
- d. Akan dilakukan pemantauan terhadap lowongan kerja yang masuk agar selalu update dan meminta perusahaan agar memperbanyak intensitas penyampaian lowongan kerja
- e. Dinas Ketenagakerjaan harus menambah fungsional pengantar kerja untuk pelaksanaan job canvassing (pencarian lowongan pekerjaan) ke perusahaan/ pemberi kerja

- f. Melatih angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur), yang merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan untuk menjadi wirausaha baru dan mendapatkan penghasilan
- g. Memberikan sekolah gratis (beasiswa) kepada lulusan SMP untuk dapat melanjutkan ke SMA/SMK. Selanjutnya lulusan SMK/SMA untuk dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Sehingga lulusan tersebut tidak termasuk dalam Angkatan Kerja yang menganggur.
- h. Memberikan lebih banyak akses peningkatan kesempatan kerja dengan memberikan informasi lowongan kerja melalui pameran kesempatan kerja (job fair) dan mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK)
- i. Penambahan Jumlah fungsional Mediator hubungan industrial untuk percepatan penyelesaian kasus PHI
- j. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Komitmen antara Pekerja dan Pengusaha atas isi (aturan) yang disepakati dalam Peraturan Perusahaan (PP)
- k. Meningkatkan intensitas Pembinaan ke perusahaan terkait pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian) bagi peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
- l. Peningkatan intensitas informasi tentang pentingnya jaminan hari tua untuk kesejahteraan pekerja dan peningkatan intensitas pelatihan pengurangan kecelakaan kerja di perusahaan

4.1.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.14.355.834.545,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.5.685.291.400,00

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.8.1 Program dan Kegiatan

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.3.617.899.100,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.230.894.000,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.226.358.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.572.760.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.6.436.534.250,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.2.268.734.500,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

4.1.8.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.9. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Memahami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan Kelompok/Forum Anak Di Kecamatan	Klpk/ kec amatan	100,00	100,00	50,00	54,00	0,00	76,00
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Ketersediaan Petugas Di Unit Pelayanan Terpadu Yang Memiliki Kemampuan Untuk Menindaklanjuti Pengaduan Atau Laporan Dari Masyarakat	%	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Focal Point SKPD Yang Memiliki Aktifitas Di Dalam Perwujudan Kesetaraan Dan Keadilan Gender	%	93,32	100,00	64,29	69,77	0,00	81,85
		Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Daerah	%	98,10	829,79	102,77	532,96	0,00	390,90
		Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	99,71	99,78	211,35	615,16	0,00	256,50

Sumber: DP3AP2KB Kota Tangerang, Tahun 2018

- 1. Indikator Persentase Kelompok Masyarakat Yang Memahami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)** diukur berdasarkan perbandingan antara Banyaknya kelompok masyarakat yang memahami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dibagi Banyaknya Kelompok Masyarakat (Aparat, TOMA, Organisasi Perempuan, perguruan tinggi), dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Selama kurun waktu 4 tahun sudah dilaksanakan sosialisasi dan informasi terhadap 400 Kelompok Masyarakat (Aparat, TOMA, Organisasi Perempuan, perguruan tinggi).
- 2. Indikator Cakupan Kelompok/Forum Anak Di Kecamatan** berdasarkan perbandingan antara Banyaknya kelompok/forum anak di kecamatan dibagi Banyaknya seluruh kecamatan , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 76,00%. Ketidak tercapaian terhadap target dikarenakan masih ada kecamatan yang baru membentuk 1 kelompok anak sedangkan target yang seharusnya ada 2 kelompok disetiap kecamatan. dan capaian indikator tersebut akan diupayakan tercapai pada tahun 2018. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 3. Indikator Cakupan Ketersediaan Petugas Di Unit Pelayanan Terpadu Yang Memiliki Kemampuan Untuk Menindaklanjuti Pengaduan Atau Laporan Dari Masyarakat**

diukur berdasarkan perbandingan antara Banyaknya petugas yang memiliki kemampuan penanganan pengaduan di unit pelayanan terpadu dibagi Banyaknya petugas penerima pengaduan di unit pelayanan terpadu, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Terdapat 104 unit pelayanan terpadu berikut petugas yang melayaninya di kota tangerang.

- 4. Indikator Persentase Focal Point SKPD Yang Memiliki Aktifitas Di Dalam Perwujudan Kesetaraan Dan Keadilan Gender** diukur berdasarkan perbandingan antara Banyaknya focal point SKPD aktif dibagi Banyaknya seluruh SKPD , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 81,85%. Ketidaktercapaian Indikator ini terjadi karena mutasi jabatan sehingga perlu ada pelatihan peningkatan kapasitas tentang PPRG bagi pemangku jabatan yang baru. dan capaian indikator tersebut akan diupayakan tercapai pada tahun 2018. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 5. Indikator Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara Banyaknya pekerja perempuan di lembaga pemerintahan daerah dibagi Banyaknya seluruh pekerja perempuan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 390,90%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Potensi dan minat perempuan kota tangerang yang bekerja di lembaga pemerintah cukup besar sehingga melampaui target yang ditetapkan.
- 6. Indikator Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta** diukur berdasarkan perbandingan antara Banyaknya pekerja perempuan di lembaga swasta dibagi Banyaknya seluruh pekerja perempuan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 256,50%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Karena selain minat dan potensi juga adanya peluang dan kesempatan yang cukup besar bagi perempuan yang bekerja dilembaga swasta yang ada di kota tangerang.

4.1.8.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Dari 43 OPD yang ada di kota tangerang baru 25 OPD yang telah menganalisis program kegiatan berbasis gender pada OPDnya masing-masing sedangkan untuk 18 OPD belum melakukan analisis program/kegiatan yang ada.

2. Solusi

- a. Mendorong 18 OPD untuk menganalisis program/kegiatan yang berbasis gender untuk segera manganalisa program/kegiatannya melalui kegiatan rapat koordinasi focal point dan peningkatan kapasitas focal point OPD untuk dibentuk focal point pada tahun 2018.

4.1.9. Urusan Pangan

Urusan Pangan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.15.734.936.141,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.17.466.775.666,00

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.9.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian (Pertanian/Perkebunan)

Program peningkatan ketahanan pangan pertanian (pertanian/perkebunan) selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.6.319.764.729,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.3.283.879.800,00 yang dilaksanakan melalui 14 (empat belas) kegiatan

4.1.9.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.10. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pangan Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita	%	100,00	107,56	107,09	100,44	0,00	103,77
		Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita	%	100,00	134,33	206,67	111,56	0,00	138,14
		Tingkat Penguatan Cadangan Pangan Daerah	%	100,00	81,67	306,67	307,78	175,00	194,22

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	%	0,00	100,00	123,15	100,00	74,36	107,72
		Tingkat Stabilitasi Harga Pangan	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	47,00	100,00
		Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan	% per ta hun	100,00	100,00	107,30	100,00	74,36	101,83
		Capaian Peningkatan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	100,00	268,67	219,93	178,80	60,00	191,85
		Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah	%	100,00	186,98	154,48	119,56	0,00	140,26
		Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah	%	100,00	157,50	113,33	108,75	0,00	119,90

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang, Tahun 2018

1. Indikator Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita diukur berdasarkan angka ketersediaan energi per kapita per tahun dibandingkan dengan Angka Kecukupan energi berdasarkan standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG), dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 103,77%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Ketahanan Pangan Daerah dan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian. Tingkat ketersediaan energi per kapita didapat dari perhitungan NBM (neraca bahan makanan) yang merupakan output dari kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Ketahanan Pangan Daerah. Nilai energi per kapita pada tahun 2014 sebesar 1.760 kilo kalori, tahun 2015 sebesar 2.130 kilo kalori, tahun 2016 sebesar 2.120 kilo kalori menggunakan standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2004 sebesar 2.200 kilo kalori dan tahun 2017 sebesar

2.166 kilo kalori menggunakan standar WNPG tahun 2012 sebesar 2.400 kilo kalori. Sehingga ketersediaan energi di Kota Tangerang telah mencapai target.

2. **Indikator Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita** diukur berdasarkan angka ketersediaan protein per kapita per hari untuk masyarakat Kota Tangerang dibandingkan dengan Angka Ketersediaan protein standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2004 sebesar 57 gram/kapita, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 138,14%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Ketahanan Pangan Daerah dan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian. Ketersediaan protein pada tahun 2014 sebesar 45,60 gram, tahun 2015 sebesar 68,9 gram, tahun 2016 sebesar 106 gram menggunakan standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2004 sebesar 57 gram dan tahun 2017 sebesar 63,3 gram menggunakan standar WNPG tahun 2012 sebesar 63 gram. Sehingga ketersediaan protein di Kota Tangerang sudah telah mencapai target.
3. **Indikator Tingkat Penguatan Cadangan Pangan Daerah** diukur berdasarkan Jumlah Cadangan beras yang tersedia dibandingkan dengan target cadangan beras yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 194,22%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 175,00% dan sampai akhir tahun 2018 akan tercapai realisasi melampaui 100,00%. Cadangan pangan beras telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah. Cadangan pangan daerah di Kota Tangerang berupa beras yang dibeli dari Bulog dan disimpan di Perum Bulog dengan MoU. Kota tangerang baru memiliki cadangan pangan pada tahun 2014 sebesar 50 ton dari target 50 ton; tahun 2015 sebesar 49 ton dari target 60 ton; tahun 2016 sebesar 184,67 ton dari target 100 ton; tahun 2017 sebesar 184,67 ton dari target 184,67 ton dan tahun 2018 sebesar 284,67 ton dari target 284,67 ton. Sehingga realisasi cadangan pangan daerah sudah memenuhi target RPMJD tahun 2014 – 2018.
4. **Indikator Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah** diukur berdasarkan jumlah ketersediaan data pasokan, harga dan akses pangan di Kota Tangerang dibagi 3 (tiga), dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 107,72%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 74,36% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Indikator

ini dicapai melalui kegiatan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan dan kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok. Untuk informasi pasokan dilakukan di 13 (tiga belas) lokasi pasar dalam jangka waktu 52 minggu dengan 6 komoditas berupa beras, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur sedangkan untuk informasi harga dilakukan di 13 (tiga belas) lokasi pasar dalam jangka waktu 52 minggu dengan 15 komoditas.

5. **Indikator Tingkat Stabilitasi Harga Pangan** diukur berdasarkan jumlah komoditas dengan kenaikan harga tidak lebih dari 25% dibandingkan dengan jumlah komoditas yang tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 47,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan dan kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok. Ada 9 (sembilan) komoditas yang berpengaruh terhadap laju inflasi menurut Badan Ketahanan Pangan yaitu beras, kacang tanah, telur ayam, cabai merah, bawang merah, minyak goreng, gula, daging ayam dan daging sapi. Selama 5 (lima) tahun berjalan harga pangan di Kota Tangerang dapat dikatakan stabil.
6. **Indikator Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan** diukur berdasarkan rata-rata ketersediaan 7 (tujuh) komoditi pangan dibandingkan dengan rata-rata konsumsi 7 (tujuh) komoditi pangan tersebut dalam satu tahun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 101,83%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 74,36% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan dan kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok. Komoditas yang dipantau adalah beras, bawang merah, cabe merah kriting, cabe rawit merah, telur, daging sapi dan daging ayam. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5% - 40%. Selama 5 (lima) tahun kondisi pasokan pangan di Kota Tangerang dapat dikatakan stabil.
7. **Indikator Capaian Peningkatan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)** diukur berdasarkan bobot gizi (kontribusi energi) dari setiap ragam pangan pada sebuah pola konsumsi pangan pada masyarakat Kota Tangerang , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 191,85%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 60,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai

melampaui 100,00%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Nilai skor PPH memberikan informasi tentang keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH). Realisasi pada tahun 2014 sebesar 20,00% dari target 20,00%; pada tahun 2015 sebesar 80,60% dari target 30,00%; pada tahun 2016 sebesar 87,97% dari target 40,00%; tahun 2017 sebesar 89,40% dari target 50,00%. Realisasi dari tahun 2014 – 2017 sudah mencapai target.

8. **Indikator Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah** diukur dari hasil pemeriksaan sampel, yaitu jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dibandingkan dengan jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 140,26%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan, kegiatan pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan asal hewan dan kegiatan pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan.
9. **Indikator Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah** diukur dari bobot indikator kerawanan pangan yang telah dikerjakan dibandingkan dengan seluruh bobot indikator yang seharusnya dikerjakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 119,90%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan koordinasi ketahanan pangan daerah, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan pemetaan situasi kewaspadaan pangan dan gizi dan kegiatan penanganan kerawanan pangan

4.1.9.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Belum adanya Peraturan daerah untuk meregulasi atau sebagai dasar hukum pengelolaan cadangan pangan daerah.
- b. Masih ditemukannya pangan segar mengandung bahan tambahan makanan berbahaya terutama berasal dari pedagang pemasok luar Kota Tangerang.
- c. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

2. Solusi

- a. Perlu mengajukan Raperda tentang pengelolaan cadangan pangan daerah melalui penyusunan Naskah Akademik .
- b. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kualitas pangan segar terhadap kandungan bahan tambahan makanan berbahaya secara terpadu.
- c. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

4.1.10. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.58.152.224.844,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.119.709.091.369,16

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.10.1 Program dan Kegiatan

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.274.302.496.504,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.120.357.431.101,00 yang dilaksanakan melalui 12 (dua belas) kegiatan

2. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.6.630.000.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.197.250.000,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

3. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Program pengembangan sistem informasi pertanahan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.49.400.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.482.940.514,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4.1.10.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.11. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pertanahan Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
2	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
3	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Tingkat ketersediaan sistem informasi tanah milik pemda	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah** diukur berdasarkan rasio luas lahan bersertifikat terhadap total jumlah lahan yang seharusnya bersertifikat, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan tingkat capaian indikator tahun 2018 triwulan 1 sebesar 25,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
2. **Indikator Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah** diukur berdasarkan rasio jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan terhadap jumlah kasus tanah negara yang terdaftar, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan tingkat capaian indikator tahun 2018 triwulan 1 sebesar 25,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
3. **Indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda** menunjang pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah dalam bentuk kegiatan menyusun data base, diukur berdasarkan rasio jumlah dokumen sistem informasi tanah milik Pemda yang tersedia terhadap jumlah dokumen sistem informasi tanah milik Pemda yang harus disediakan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan tingkat capaian indikator tahun 2018 baru tercapai sebesar 25,00% (Kegiatan penyusunan dokumentasi, informasi, dan pemetaan tanah milik Pemda baru sampai

laporan pendahuluan) dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.10.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Pelayanan terkait dengan urusan pertanahan terkendala pada dokumen yang tidak lengkap, data yang belum akurat, kewenangan yang terbatas sehingga proses apresial dan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemda Kota Tangerang belum maksimal.
- b. Penyelesaian pengaduan/ sengketa tanah milik pemda terkendala pada koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Penanganan kasus sengketa tanah sampai tingkat peradilan sebaiknya dilakukan oleh SKPD teknis atau bagian hukum Setda Kota Tangerang sementara kewenangan Dinas Pertanahan adalah sebagai fasilitasi.
- d. Implementasi tupoksi belum sesuai dengan pelaksanaan program kegiatan (dari sisi regulasi urusan pertanahan tidak ada yang sesuai).

2. Solusi

- a. Berupaya untuk mendapatkan data informasi yang valid terkait dengan aset tanah milik pemda dan di dukung dengan sistem yang lebih baik.
- b. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengadaan tanah dari persiapan sampai sertifikasi.
- c. Perlu ada revisi tupoksi agar sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan.

4.1.11. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.724.207.709.705,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.155.416.363.739,00

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.11.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.366.532.793.942,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.123.560.261.250,00 yang dilaksanakan melalui 21 (dua puluh satu) kegiatan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.24.893.910.160,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.2.748.751.900,00 yang dilaksanakan melalui 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan

3. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.769.255.250,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.183.456.700,00 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.461.739.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.19.060.000,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program peningkatan pengendalian polusi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.593.012.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.291.618.000,00 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan

6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.861.899.100,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.737.601.169,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.106.817.303.812,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.42.136.436.800,00 yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan

4.1.11.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.12. Capaian Indikator Program Pada Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Percentase Pengangkutan Sampah	%	100,00	100,00	100,00	104,00	104,00	101,00
		Percentase Pengoperasian TPA	%	100,00	83,33	174,55	133,33	92,31	116,70
		Percentase Pengurangan Sampah Di Perkotaan	%	104,63	126,33	100,00	100,00	100,00	106,19
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Percentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Percentase Jumlah Usaha Dan/Atau Kegiatan Sumber Tidak Bergerak Yang Memenuhi Persyaratan Administratif Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Keberadaan Limbah B3 Yang Dikelola Dan Dihasilkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Percentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018	
		Peranserta Aktif Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup							
		Tingkat Koordinasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Semakin Efektif Dan Efisien	%	100,00	100,00	99,99	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Pelayanan Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Yang Dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Cakupan Pemantauan Kualitas Air Sungai, Air Tanah Dan Situ, Serta Kualitas Udara Dan Kebisingan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Berfungsiya Alat Sumur Pantau Yang Terintegrasi Dengan Komunikasi Data	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Tingkat Akses/informasi Bidang Lingkungan Hidup	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tingkat Frekuensi Pameran Bidang Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
	Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi	Banyaknya Sarana Dan Prasarana Pendukung Kinerja Administrasi Peralatan Dan Instrumen Pengukuran Yang Layak.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018	
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tingkat Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan Di Wilayah Perkota an *	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25	100,00
		Rasio Jumlah Lokasi Dekorasi Kota Dan Reklame Terpelihara Terhadap Jumlah Dekorasi Kota Dan Reklame Yang Seharusnya *	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Tahun 2018

Catatan : * data realisasi capaian indikator program tahun 2017/2018 ada di Dinas Budaya dan Pariwisata

1. Indikator Persentase Pengangkutan Sampah dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 101,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 104,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai melampaui 100,00%.

Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase pengangkutan sampah selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari perhitungan rasio jumlah sampah yang terangkut dibandingkan dengan total timbulan sampah Kota Tangerang setiap tahunnya.

2. Indikator Persentase Pengoperasian TPA dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 116,70%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 92,30% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai ralisisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase pengoperasian TPA selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari perhitungan dengan formula sebagai berikut setiap tahunnya :

$$SPM = (A \times 40\%) + (B \times 40\%) + (C \times 20\%)$$

Keterangan :

SPM : Standard Pelayanan Minimal

A : Koefisien pengoperasian TPA (nilai interval 0 - 1)

B : Koefisien kualitas pengolahan lindi (nilai interval 0 - 1)

C : Koefisien penanganan gas (nilai interval 0 – 1)

3. **Indikator Persentase Pengurangan Sampah Di Perkotaan** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 106,19%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase pengurangan sampah selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari perhitungan rasio jumlah sampah organik dan anorganik yang tereduksi oleh kegiatan 3R (rata-rata 148,71 ton/hari) dibandingkan dengan jumlah total timbulan sampah (rata-rata 973,91 ton/hari) setiap tahunnya. Indikator program ini juga merupakan inidikator utama dalam mencapai inidikator sasaran misi RPJMD 2013-2018, dengan pencapaian indikator yang melebihi 100%, menunjukkan bahwa setiap target sasaran misi pengurangan sampah yang ditetapkan selalu terealisasi setiap tahunnya.
4. **Indikator Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 85,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase indikator cakupan pengawasan terhadap dokumen lingkungan selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari rasio jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dapat diawasi dibandingkan dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ditargetkan pada tahun berjalan.
5. **Indikator Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 85,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air selama periode 2014 – 2018 yang diperoleh dari Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dapat diawasi dibandingkan dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ditargetkan pada tahun berjalan.
6. **Indikator Persentase Jumlah Usaha Dan/Atau Kegiatan Sumber Tidak Bergerak Yang Memenuhi Persyaratan Administratif Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 85,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018

diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dapat diawasi dibandingkan dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ditargetkan pada tahun berjalan.

7. **Indikator Tingkat Keberadaan Limbah B3 Yang Dikelola Dan Dihasilkan** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 85,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase tingkat keberadaan limbah B3 yang ~~dikelola~~ dan dihasilkan selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari jumlah usaha yang mengikuti sosialisasi pengelolaan B3 dan limbah B3 dibandingkan dengan jumlah usaha yang seharusnya mengikuti sosialisasi B3 setiap tahunnya.
8. **Indikator Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 85,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kota dalam satu tahun.
9. **Indikator Tingkat Peranserta Aktif Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 85,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase tingkat peranserta aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari Jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup dibandingkan dengan Jumlah masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup selama 5 tahun.

- 10. Indikator Tingkat Koordinasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Semakin Efektif Dan Efisien** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 85,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase tingkat koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin efektif dan efisien selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari jumlah koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan.
- 11. Indikator Tingkat Pelayanan Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Yang Dilaksanakan** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 85,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase tingkat pelayanan dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin PPLH yang dilaksanakan selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari jumlah dokumen lingkungan, izin lingkungan, dan izin PPLH yang diajukan dibandingkan dengan jumlah dokumen lingkungan, izin lingkungan, dan izin PPLH yang dibahas setiap tahunnya.
- 12. Indikator Cakupan Pemantauan Kualitas Air Sungai, Air Tanah Dan Situ, Serta Kualitas Udara Dan Kebisingan** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 85,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase cakupan pemantauan kualitas air sungai, air tanah dan situ, serta kualitas udara dan kebisingan selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari jumlah titik pemantauan kualitas air sungai, air tanah dan situ, serta kualitas udara dan kebisingan dibandingkan dengan jumlah titik pemantauan kualitas air sungai, air tanah dan situ, serta kualitas udara dan kebisingan yang ditetapkan.
- 13. Indikator Persentase Berfungsinya Alat Sumur Pantau Yang Terintegrasi Dengan Komunikasi Data** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase berfungsinya alat sumur pantau yang terintegrasi

dengan komunikasi data selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari jumlah alat sumur pantau yang terintegrasi dengan komunikasi data yang berfungsi baik dibandingkan dengan jumlah alat sumur pantau yang terintegrasi dengan komunikasi data yang ada

14. **Indikator Tingkat Akses/Informasi Bidang Lingkungan Hidup** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase tingkat akses/informasi bidang lingkungan hidup selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari banyaknya data dan informasi lingkungan yang tersedia dibandingkan dengan banyaknya data dan informasi lingkungan yang seharusnya tersedia
15. **Indikator Tingkat Frekuensi Pameran Bidang Lingkungan Hidup** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 85,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase tingkat frekuensi pameran bidang lingkungan hidup selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari jumlah pameran yang telah diikuti/dilaksanakan dibandingkan dengan jumlah pameran yang seharusnya diikuti/dilaksanakan selama 5 tahun.
16. **Indikator Banyaknya Sarana Dan Prasarana Pendukung Kinerja Administrasi Peralatan Dan Instrumen Pengukuran Yang Layak** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut adalah hasil dari rata-rata pencapaian persentase banyaknya sarana dan prasarana pendukung kinerja administrasi peralatan dan instrumen pengukuran yang layak selama periode 2014-2018 yang diperoleh dari Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan lingkungan yang layak dibandingkan dengan Jumlah keseluruhan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan lingkungan setiap tahunnya.

Pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh indikator nomor 4 sampai dengan 16 berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian inidikator sasaran misi “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)”. Hingga akhir masa jabatan 2018 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup masuk dalam kategori “Sangat Kurang”, pencapaian tersebut lebih

baik jika dibandingkan dengan pencapaian 2013-2016 yang masuk kategori "waspada". Realisasi kategori tersebut dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2013-2018.

Prestasi Selama Periode 2014 – 2018 :

1. Penghargaan Adipura Kencana 2014 sebagai Kota Metropolitan Terbersih Nasional
2. Penghargaan Asean Environmentally Sustainable City (ESC) Award Kategori Udara Bersih Tingkat Asean, pada tanggal 30 Oktober 2014.
3. Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat nasional tahun 2014 dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pada tanggal 22 Desember 2014.
4. Penghargaan Piala Adipura Kirana dan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tanggal 22 Juli 2016.
5. Penghargaan Piala Adipura Kencana dan Adiwiyata Mandiri (SDN Gondrong 4, SDN Total Persada, SMPN 5 Tangerang, SDN 15 Tangerang, dan SDN Sangiang Jaya) diberikan pada pelaksanaan Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 dan Landmark Hutan di Halaman Gedung Manggala Wana Bakti Jakarta, pada Rabu, 2 Agustus 2017.

4.1.11.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Pelayanan pengangkutan sampah meskipun telah melebihi target yang diharapkan tetapi : Masih ada masyarakat yang kurang disiplin membuang sampah, sehingga masih ditemukan sampah di saluran air/drainase atau TPS liar disekitar lingkungan tempat tinggal warga; Masih ada masyarakat yang kurang disiplin karena membuang sampah ke TPS di luar jadwal pengangkutan yang telah disosialisasikan, sehingga terkadang masih ditemukan sampah tertinggal di TPS.
- b. Pengurangan sampah belum optimal karena sebagian besar masyarakat masih belum melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sehingga menyulitkan petugas TPST dalam mengolah sampah karena sampah yang ditampung sementara di TPST harus dipilah dahulu sebelum diolah; Masyarakat umumnya masih kurang perhatian dalam menerapkan gerakan 3 R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) di rumah tangga dan lingkungannya; Jumlah TPST masih kurang, idealnya 1 (satu) kelurahan memiliki 1 (satu) fasilitas TPST. Hal tersebut karena kesulitan mencari lokasi yang tepat dan diterima warga untuk membangun TPST.

- c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Tangerang masih dalam kategori "Sangat Kurang" (SK) sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai tersebut.

2. Solusi

- a. Mengusulkan penyusunan regulasi tentang pembatasan jenis sampah yang tidak bisa tereduksi secara alami dan/atau melalui pengolahan; Penerapan sanksi hukum kepada siapa saja yang melanggar aturan lingkungan hidup seperti membuang sampah sembarangan dan pencemaran lingkungan; Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara berkelanjutan dalam mengelola sampah dan menerapkan gerakan 3R dengan cara memberikan sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah, sosialisasi pengolahan sampah, perlombaan kebersihan, pembinaan untuk komunitas masyarakat peduli sampah, meningkatkan efektifitas bank sampah dan TPST existing, membuat bank sampah induk, dan membangun Intermediary Treatment Facility (ITF) yakni tempat pengolahan sampah skala besar; Membangun/ merevitalisasi blok sanitary landfill, kolam air lindi, IPAL, dan instalasi pengolahan gas metan di TPA Rawa Kucing.
- b. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan cara : Pembangunan IPAL domestik di lingkungan perumahan dan pemukiman dan saluran pembuangan yang menuju ke sungai untuk memperbaiki indeks kualitas air; Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap sumber-sumber pencemaran lingkungan serta penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus lingkungan hidup bekerja sama dengan aparat penegak hukum, badan lingkungan hidup provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup, dan stakeholder lainnya.

4.1.12. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.45.216.389.292,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.14.606.705.244,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.12.1 Program dan Kegiatan

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program penataan administrasi kependudukan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.26.561.124.346,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.6.999.907.350,00 yang dilaksanakan melalui 45 (empat puluh lima) kegiatan

4.1.12.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.13. Capaian Indikator Program Pada Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	%	100,15	100,02	100,04	100,12	100,00	100,08
		Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	92,54	93,77	94,05	98,07	96,47	94,61
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	%	89,80	100,04	100,04	111,20	95,00	100,27
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	94,73	100,03	100,32	105,20	100,00	100,07
		Persentase Pasangan Suami-Isteri Ber-Akta Nikah	%	81,89	103,48	100,61	114,07	100,00	100,01

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Persentase Penerbitan Kartu Keluarga**, dengan formulasi jumlah keluarga yang sudah mempunyai kartu keluarga dibagi jumlah keluarga dikali seratus persen dengan tingkat capaian indikator dari tahun 2014-2017 sebesar 100,08% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 100,00% per triwulan I (satu) dan sampai akhir tahun 2018 akan tercapai realisasi sebesar 100,00%, dengan didukung kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan dan cetak blanko kartu keluarga dan akta catatan sipil;
2. **Indikator Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**, dengan formulasi jumlah penduduk yang wajib ber KTP-el yang sudah rekam dibagi jumlah penduduk wajib KTP-el dibagi seratus persen dengan tingkat capaian indikator dari tahun 2014-2017 sebesar 94,61% dan capaian pada tahun 2017 sebesar 98,07% sedangkan pada tahun 2018 capaiannya sebesar 96,47% per triwulan I (satu) dan sampai akhir tahun

2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%, dengan didukung kegiatan pengadaan cetak blanko kartu keluarga dan akta catatan sipil dan kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan;

3. **Indikator Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran**, dengan formulasi jumlah bayi yang mempunyai akta kelahiran dibagi jumlah bayi dikali seratus persen dengan tingkat capaian indikator dari tahun 2014-2017 sebesar 100,27% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 95,00% per triwulan I (satu) dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%, dengan didukung kegiatan pelayanan pencatatan sipil keliling dan pencatatan sipil di lokasi festival cisadane dan P2WKSS;
4. **Indikator Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian**, dengan formulasi jumlah penerbitan kutipan akta kematian dibagi jumlah permohonan penerbitan kutipan akta kematian dikali seratus persen tingkat capaian indikator dari tahun 2014-2017 sebesar 100,07% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 100,00% per triwulan I (satu) dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
5. **Indikator Persentase Pasangan Suami-Istri ber Akta Nikah**, dengan formulasi jumlah penerbitan kutipan akta nikah dibagi jumlah permohonan penerbitan kutipan akta nikah tingkat capaian indikator dari tahun 2014-2017 sebesar 100,01% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 100,00% per triwulan I (satu) dan sampai akhir tahun 2018 akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.12.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Masih banyak masyarakat yang belum mengupdate data Kartu Keluarga yang diterbitkan di bawah tahun 2008, karena Kartu Keluarga yang tercetak sebelum tahun 2008 tidak terekam dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pada waktu itu Kartu Keluarga tersebut diproses masih menggunakan sistem yang belum terintegrasi sehingga riwayat cetak masih belum dapat ditemukan.
- b. Untuk pengadaan blanko KTP Elektronik masih merupakan kewenangan Kemendagri sehingga dalam pendistribusianya tidak sesuai dengan kebutuhan (jumlah yang telah melakukan perekaman). Sebagai gantinya bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman diganti dengan surat keterangan (SUKET). Akan tetapi

banyak keluhan dari masyarakat surat keterangan mudah rusak. Serta masih ada data penduduk masih duplikat record (perekaman e-ktp lebih dari satu kali) yang menyebabkan data menjadi duplikat sehingga tidak tercetak.

- c. Masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran yang sudah lanjut usia, Akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk sekolah, sehingga permintaan pelayanan pembuatan akta kelahiran cukup tinggi dan terus meningkat.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya akta kematian yang digunakan untuk sebagai dokumen.
- e. Pemohon yang sudah mendaftarkan pembuatan akta perkawinan masih kurang persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon, sehingga belum dapat diproses.

2. Solusi

- a. Pelayanan keliling untuk melakukan update data kependudukan ke kecamatan, Monitoring kartu keluarga ke kelurahan untuk di update data kependudukan.
- b. Koordinasi dengan Kemendagri terkait stok blanko yang akan di distribusikan di setiap kab/kota;
- c. Melakukan kerjasama dengan kelurahan dan Kecamatan untuk mendata ulang penduduk yang belum melakukan perekaman sesuai dengan by name by address untuk segera melaksanakan perekaman;
- d. Melakukan perekaman bagi pemilik KTP pemula yang usia sudah memasuki 17 tahun di sekolah-sekolah.
- e. Pelayanan Akta kelahiran 1 hari jadi untuk usia 0-18 tahun di setiap kecamatan dengan kegiatan pelayanan pencatatan sipil keliling, Pelayanan online dengan kelurahan, rumah sakit, dan pada HUT kota Tangerang.
- f. Mengusulkan pembuatan regulasi pada saat pembuatan akta kematian akan mendapat santunan kematian dan menginformasikan masyarakat akan pentingnya akta kematian sebagai dokumen kependudukan.
- g. Mensosialisasikan pentingnya akta perkawinan sebagai salah satu persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran khusunya non muslim.

4.1.13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.18.586.708.359,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.6.420.809.000,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.13.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa selama tahun 2014-2018 dapat terealisasi sebesar Rp.12.030.789.900,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.6.420.809.000,00 yang dilaksanakan melalui 24 (dua puluh empat) kegiatan

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.987.851.450,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.0 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

4.1.13.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.14. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	16,67	100,00
		Tingkat Pembinaan SDM Dan Organisasi Keagamaan	%	310,88	161,36	116,79	108,62	11,11	174,66
		Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan	%	142,85	218,60	134,92	113,10	0,00	152,37

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Tingkat Pemberdayaan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	96,72	161,22	100,78	100,28	0,00	114,75
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/Kelurahan	Persentase Peningkatan Lembaga (Usaha Ekonomi, Badan Keswadayaan Masyarakat, Postantek) Setiap Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tangerang, Tahun 2018

- 1. Indikator Tingkat Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kegiatan pembinaan aparatur dan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan dibagi banyaknya kegiatan pembinaan aparatur dan organisasi kemasyarakatan yang seharusnya dilaksanakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, dan sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian indikator sebesar 16,67%, sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 2. Indikator Tingkat Pembinaan SDM Dan Organisasi Keagamaan** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kegiatan pembinaan SDM & organisasi keagamaan yang dilaksanakan dibagi banyaknya kegiatan pembinaan SDM & organisasi keagamaan yang seharusnya dilaksanakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 174,66%, dan tahun 2018 sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian indikator sebesar 11,11%. sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 3. Indikator Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Bantuan Kepada Organisasi Keagamaan** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen pelaksanaan pengendalian hibah yang tersedia dibagi banyaknya dokumen pelaksanaan pengendalian hibah yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 152,37%, dan sampai dengan triwulan I tahun 2018

tingkat capaian indikator sebesar 0,00%. sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4. **Indikator Tingkat Pemberdayaan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang diberdayakan dibagi Banyaknya kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang seharusnya diberdayakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 114,75%, dan sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian sebesar 0,00%. sampai akhir tahun 2018 diperkirakan akan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.13.3 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan pada saat pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4.1.14. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.54.748.705.338,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.7.042.632.400,00

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.14.1 Program dan Kegiatan

1. Program Keluarga Berencana

Program keluarga berencana selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.627.137.124,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.3.554.866.800,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

2. Program Pelayanan Kontrasepsi

Program pelayanan kontrasepsi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.603.697.300,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.388.046.500,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.547.035.900,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.271.820.200,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

4. Program Promosi Kesehatan ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.841.158.864,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.573.702.400,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.503.736.650,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.410.190.400,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.413.882.600,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.455.996.100,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

7. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.439.386.200,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.0 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

8. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

Program pengembangan model operasional BKB-posyandu-PADU selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.46.772.670.700,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.388.010.000,00 yang dilaksanakan melalui 15 (lima belas) kegiatan

4.1.14.2 Capaian Kinerja

**Tabel 4.15. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2018**

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	%	100,73	100,00	103,04	100,86	0,00	101,16
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Usia Istrinya < 20 Tahun	%	90,12	99,60	103,66	102,78	0,00	99,04
3	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase PUS Yang Menjadi Peserta KB Yang Memilih MKJP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Kelurahan	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	0,00	36,32	109,04	132,46	0,00	132,46
		Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap kelurahan	petu gas/ kel.	67,31	100,00	100,00	135,20	0,00	101,63
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Kelurahan	petu gas/ kel.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase Kecamatan Memiliki Fasilitas Pelayanan Konseling Remaja	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7	Program Penyiapan Tenaga Pendamping	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	100,00	100,00	159,30	107,22	0,00	116,63

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
	Kelompok Bina Keluarga								
8	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu	Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW	Pos yan du/ RW	108,00	100	115,00	108,00	0,00	107,74

Sumber: DP3AP2KB Kota Tangerang, Tahun 2018

- 1. Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif** diukur berdasarkan perbandingan antara Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif dibagi Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang usianya 15-49 tahun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 101,16%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 0,00% dan sampai akhir desember 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Capaian indikator melampaui target yang ditetapkan hal ini digambarkan karena Selama kurun waktu 4 tahun jumlah peserta kb aktif berada di kisaran 202 ribu dikarenakan adanya kesadaran dan kebutuhan masyarakat pentingnya akan mengatur angka kelahiran di kalangan masyarakat.
- 2. Indikator Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Usia Istrinya < 20 tahun** diukur berdasarkan perbandingan antara Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 20 tahun dibagi Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang usianya 15-49 tahun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 99,04%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 0,00% dan sampai akhir desember 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. PUS sudah diberikan KIE bagi PUS yang Usia calon istrinya < 20 Tahun.
- 3. Indikator Persentase PUS Yang Menjadi Peserta KB Yang Memilih MKJP** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB yang memilih MKJP dibagi banyaknya pasangan usia subur (PUS) yang usianya 15-49 tahun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 0,00% dan sampai akhir desember 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Adanya kesadaran masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi MKJP (IUD, MOP, MOW dan Implant).

4. **Indikator Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Kelurahan** diukur berdasarkan perbandingan antara Banyaknya kelurahan yang menyediakan rekap data mikro keluarga dibagi Banyaknya seluruh kelurahan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 0,00% dan sampai akhir desember 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00 %. Hal ini menggambarkan bahwa semua kelurahan telah menyediakan rekap data mikro 104 dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan program/kegiatan pada urusan KB di tahun berikutnya dan juga sebagai dasar untuk memotivasi agar kecamatan/kelurahan untuk capaian akseptor KB pada tahun selanjutnya.
5. **Indikator Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB** diukur berdasarkan perbandingan banyaknya anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB antara dibagi banyaknya seluruh anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 132,46%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 0,00% dan sampai akhir desember 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. adanya motivasi keluarga (PUS) peserta kelompok UPPKS untuk ikut berKB.
6. **Indikator Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) Di Setiap Kelurahan** diukur berdasarkan perbandingan banyaknya seluruh penyuluhan keluarga berencana (PLKB/PKB) antara dibagi banyaknya seluruh kelurahan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 101,63%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 0,00% dan sampai akhir desember 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
7. **Indikator Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Kelurahan** diukur berdasarkan perbandingan antara pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) dibagi banyaknya seluruh kelurahan , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 0,00% dan sampai akhir desember 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Indikator ini tercapai melalui kegiatan penyuluhan kesehatan, ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.
8. **Indikator Persentase Kecamatan Memiliki Fasilitas Pelayanan Konseling Remaja** diukur berdasarkan perbandingan Banyaknya kecamatan yang memiliki fasilitas

konseling remaja antara dibagi Banyaknya seluruh kecamatan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 0,00% dan sampai akhir desember 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh kecamatan di Kota Tangerang telah memiliki pelayanan konseling remaja, PIK KRR sebagai wadah memberikan informasi KRR, dapat meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku positif remaja, melatih keterampilan kecakapan hidup, pelayanan konseling dan rujukan KRR serta untuk mengembangkan kegiatan remaja lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan minat remaja.

9. **Indikator Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB Rasio Pelayanan Posyandu Aktif Di Setiap RW** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya anggota bina keluarga balita (BKB) yang ber-KB dibagi banyaknya pasangan usia subur (PUS) anggota BKB, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 0,00% dan sampai akhir desember 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
10. **Indikator Rasio Pelayanan Posyandu Aktif Di Setiap RW** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya posyandu aktif yang melayani masyarakat dibagi banyaknya seluruh RW, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 107,74 Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 0,00% dan sampai akhir desember 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Hal ini menggambarkan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dasar bagi ibu, bayi dan balita.

4.1.14.3 Permasalahan dan Solusi

1. **Permasalahan**
 - a. Adanya kelompok masyarakat yang masih tabu dengan berKB melalui MKJP.
 - b. Masih banyaknya anggota BKB yang masih usia muda dan ingin mendapatkan anak lagi.
2. **Solusi**
 - a. Mengadakan pembinaan kepada klinik pemerintah/swasta dan pada tokoh agama/masyarakat dalam meyakinkan masyarakat untuk turut berKB melalui MKJP.
 - b. Melakukan pembinaan kepada BKB untuk anggota BKB disarankan dua anak lebih baik.

4.1.15. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.405.366.679.957,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.125.622.164.067,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.15.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.27.025.359.490,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.028.670.000,00 yang dilaksanakan melalui 23 (dua puluh tiga) kegiatan

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.48.649.657.268,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.11.433.733.600,00 yang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program peningkatan pelayanan angkutan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.20.089.863.216,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.14.689.286.750,00 yang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.11.409.293.600,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.712.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan

5. Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Program pembangunan peningkatan dan pengamanan lalu lintas selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.181.570.262.285,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.58.13.907.000,00 yang dilaksanakan melalui 23 (dua puluh tiga) kegiatan

6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.3.304.627.300,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.332.500.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4.1.15.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.16. Capaian Indikator Program Pada Urusan Perhubungan Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capaian 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Angkutan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Ketersediaan Perencanaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pengendalian Simpang Dan Ruas Jalan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) Pada Berbagai Jenis Jalan Di Wilayah Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Ketersediaan Prasarana Angkutan Yang Terpelihara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Ketersediaan Prasarana Penunjang Pengendalian Simpang Dan Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tingkat Ketersediaan Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Kota Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Ketersediaan Angkutan Umum Yang Melayani Jaringan Trayek Penghubung Antar Wilayah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Ketersediaan	Bu ah/	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capaian 2014-2017
		Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	4.000						
		Tingkat Ketersediaan Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum Yang Melayani Trayek Di Dalam Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Ketersediaan Koridor Angkutan Umum Massal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Pengendalian Dan Disiplin Berlalulintas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Ketersediaan Pelayanan Perparkiran Penunjang Pengendalian Kinerja Simpang Dan Ruas Jalan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Dan Guardrail) Pada Jalan Di Wilayah Kota	% per tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
5	Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas								

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Tahun 2018

1. Indikator Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Angkutan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada

Triwulan I mencapai telah 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

2. **Indikator Tingkat Ketersediaan Perencanaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pengendalian Simpang Dan Ruas Jalan** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
3. **Indikator Tingkat Ketersediaan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) Pada Berbagai Jenis Jalan Di Wilayah Kota** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
4. **Indikator Tingkat Ketersediaan Prasarana Angkutan Yang Terpelihara** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
5. **Tingkat Ketersediaan Prasarana Penunjang Pengendalian Simpang Dan Ruas Jalan Dalam Kondisi Baik** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
6. **Indikator Tingkat Ketersediaan Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Kota Yang Telah Tersedia Jaringan Jalan** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
7. **Indikator Tingkat Ketersediaan Angkutan Umum Yang Melayani Jaringan Trayek Penghubung Antar Wilayah** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
8. **Indikator Tingkat Ketersediaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
9. **Indikator Tingkat Ketersediaan Standar Keselamatan Bagi Angkutan Umum Yang Melayani Trayek Di Dalam Kota** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017

sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

10. **Indikator Tingkat Ketersediaan Koridor Angkutan Umum Massal** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
11. **Indikator Tingkat Pengendalian Dan Disiplin Berlalulintas** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
12. **Indikator Tingkat Ketersediaan Pelayanan Perparkiran Penunjang Pengendalian Kinerja Simpang Dan Ruas Jalan** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
13. **Indikator Tingkat Ketersediaan Pelayanan Pengendalian Kinerja Simpang Dan Ruas Jalan Dengan Sistem ATCS (Area Traffic Control System)** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
14. **Indikator Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
15. **Indikator Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Dan Guardrill) Pada Jalan Di Wilayah Kota** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk Tahun 2018 pada Triwulan I telah mencapai 25,00%. Sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.15.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Secara umum seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan mencapai target. Kendala hanya terjadi pada pelaksanaan BRT di lapangan dimana terdapat beberapa permasalahan, diantaranya ada penolakan dari

angkutan kota pada trayek yang kendaraannya direduksi oleh BRT Kota Tangerang.

2. Solusi

- a. Mengatasi permasalahan diatas, untuk kedapannya Dinas Perhubungan akan lebih meningkatkan komunikasi baik formal maupun informal dengan pihak Organda dan pihak terkait.

4.1.16. Urusan Komunikasi Dan Informasi

Urusan Komunikasi Dan Informasi selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.91.479.847.579,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.41.387.118.584,94.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.16.1 Program dan Kegiatan

1. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

Program kerjasama informasi dan media massa selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.42.975.883.843,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.16.407.902.500,00 yang dilaksanakan melalui 65 (enam puluh lima) kegiatan

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.31.702.488.416,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.16.901.524.584,94 yang dilaksanakan melalui 40 (empat puluh) kegiatan

3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.871.249.959,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.685.170.800,00 yang dilaksanakan melalui 15 (lima belas) kegiatan

4. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.938.707.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.730.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

4.1.16.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.17. Capaian Indikator Program Pada Urusan Komunikasi Dan Informasi Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capaian 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Tingkat Pengembangan Komunikasi, Informasi, Dan Media Massa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	22,75	100,00
		Tingkat Ketersediaan Sistem Dan Jaringan Komunikasi Dan Informasi SKPD	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	38,77	100,00
2	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	42,25	100,00
3	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tingkat Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	34,00	100,00
4	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40,94	100,00
		Tingkat Publikasi Advetorial Informasi Pelayanan SKPD Pada Media Massa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40,94	100,00
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Persentase Pelayanan Publik Yang Menggunakan Media Informasi Berbasis Informasi Teknologi	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	14,80	100,00
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	21,38	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capaian 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20,83	100,00
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat Pelaksanaan Peliputan Dan Pendokumentasian Kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tingkat Ketersediaan Dokumen Visual Kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Tingkat Pelaksanaan Pengkajian Hasil Pemberitaan Kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Tingkat Pemahaman SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan	%	17.74	36.54	56.48	77.60	100.00	100.00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, Tahun 2018

- 1. Indikator Tingkat Pengembangan Komunikasi, Informasi, Dan Media Massa**
Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa yang dilakukan dibagi banyaknya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa yang seharusnya dilakukan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk tahun anggaran 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 22,75%, sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00 %, melalui kegiatan pembangunan database warehouse kota tangerang dan kegiatan pengelolaan website.
- 2. Indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Dan Jaringan Komunikasi Dan Informasi SKPD** Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD yang tersedia dibagi banyaknya sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD yang seharusnya tersedia dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk tahun anggaran 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 38,77%, sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%, melalui kegiatan pemeliharaan infrastruktur jaringan LAN - WAN dan kegiatan pengadaan akses internet.
- 3. Indikator Tingkat Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi**
Indikator ini diukur berdasarkan perbandingan banyaknya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi yang dilakukan dibagi Banyaknya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi yang seharusnya dilakukan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk tahun anggaran 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 42,25% sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00 %, melalui kegiatan penyusunan regulasi TIK dan penyusunan raperda tentang menara telekomunikasi bersama.
- 4. Indikator Tingkat Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi**
Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya aparatur yang dibina bidang pelayanan publik berbasis pada teknologi dibagi banyaknya aparatur di bidang pelayanan publik dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk tahun anggaran 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 34,00% sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%, melalui kegiatan fasilitasi penerapan dan pemanfaatan TIK dan kegiatan workshop system pengadaan secara elektronik.

5. **Indikator Tingkat Kerjasama Informasi Dan Media Massa** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya kerjasama informasi dan media massa yang dilakukan dibagi banyaknya kerjasama informasi dan media massa yang seharusnya dilakukan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00 dan untuk tahun anggaran 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 40,94% sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%, melalui kegiatan pelaksanaan desiminasi informasi melalui media massa dan pelaksanaan desiminasi informasi melalui media pameran.
6. **Indikator Tingkat Publikasi Advetorial Informasi Pelayanan SKPD Pada Media Massa** Indikator ini diukur berdasarkan frekuensi publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa yang dilakukan dibagi frekuensi publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa yang seharusnya dilakukan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, dan untuk tahun anggaran 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 40,94% sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%, melalui kegiatan pegelolaan media publikasi eksternal internal kota tangerang.
7. **Indikator Persentase Pelayanan Publik Yang Menggunakan Media Informasi Berbasis Informasi Teknologi** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya pelayanan kepada publik/masyarakat dibagi banyaknya pelayanan kepada publik/masyarakat yang sudah menggunakan media informasi berbasis Informasi teknologi dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, dan untuk tahun anggaran 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 14,80% sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%, melalui kegiatan pengembangan aplikasi layanan publik dan pemeliharaan aplikasi layanan publik.
8. **Indikator Tingkat Standarisasi Sistem Informasi Dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya aplikasi sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah distandarisasi dibagi banyaknya aplikasi sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tersedia dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk tahun anggaran 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 21,38% sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%, melalui kegiatan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik dan pengembangan aplikasi e-Government.

9. **Indikator Tingkat Integrasi Sistem Informasi Dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya aplikasi sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah diintegrasikan dibagi banyaknya aplikasi sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tersedia dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk tahun anggaran 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 20,83% sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%, melalui kegiatan integrasi aplikasi dan database e-Government.
10. **Indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Pemerintahan** Indikator ini berada pada program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (Urusan Pemerintahan di Sekretariat Daerah), diukur berdasarkan banyaknya sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan yang tersedia dibagi banyaknya sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan yang seharusnya tersedia dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk tahun anggaran 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 22,75%. sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%, Indikator ini tercapai melalui program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa di Dinas Kominfo dengan kegiatan Pengadaan Akses Internet dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN.
11. **Indikator Tingkat Pelaksanaan Peliputan Dan Pendokumentasian Kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah** Indikator ini diukur berdasarkan frekuensi peliputan jumpa pers dengan media massa yang dilakukan dibagi frekuensi peliputan jumpa pers dengan media massa yang dibutuhkan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 100,00% dan sampai akhir desember 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.
12. **Indikator Tingkat Ketersediaan Dokumen Visual Kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya dokumen visual yang tersedia dibagi banyaknya dokumen visual yang seharusnya tersedia dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 100,00% dan sampai akhir desember 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

13. **Indikator Tingkat Pelaksanaan Pengkajian Hasil Pemberitaan Kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya hasil kajian dan rekapitulasi pemberitaan media yang tersedia dibagi banyaknya hasil kajian dan rekapitulasi pemberitaan media yang seharusnya tersedia dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I realisasi capaian sebesar 100,00% dan sampai akhir desember 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.
14. **Indikator Tingkat Pemahaman SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya kegiatan peningkatan pemahaman SDM yang dilaksanakan dibagi banyaknya kegiatan peningkatan pemahaman SDM yang seharusnya dilaksanakan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk tahun anggaran 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 100,00% sampai dengan akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%, melalui kegiatan rakor sistem pengadaan secara elektronik.

4.1.16.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Dalam hal pengintegrasian system informasi (Aplikasi) masih ada beberapa "Source Code" (Bahasa Pemrograman) yang belum diserahkan ke Dinas Kominfo sehingga mempersulit proses pengintegrasian.

2. Solusi

- a. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak pengembang aplikasi agar dapat menyerahkan "Source Code" tersebut kepada Dinas Kominfo sehingga mempermudah proses pengintegrasian aplikasi.

4.1.17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.21.847.898.874,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.11.101.144.900,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.17.1 Program dan Kegiatan

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.567.500.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.203.395.000,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.660.398.650,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.888.705.000,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.7.855.995.350,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.3.427.685.000,00 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.315.522.524,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.2.731.332.900,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

4.1.17.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.18. Capaian Indikator Program Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM Yang Dibina/Dilatih	%	132,45	132,45	40,00	136,73	11,90	110,41
2	Program Kewirausahaan Dan Keunggulan	Tingkat Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama	%	50,00	50,00	726,15	730,08	0,00	389,06

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
	Kompetitif Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kemitraan Usaha Mikro Kecil, Menengah Dan Koperasi (UMKM)							
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM Yang Telah Mengikuti Pameran Promosi Produk	%	300,00	300,00	987,51	303,68	24,50	472,80
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Sehat	%	101,57	101,57	90,09	120,86	27,87	103,52

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang, Tahun 2018

- Indikator Persentase UMKM Yang Dibina/Dilatih** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya UMKM yang telah dibina dilatih dibagi banyaknya seluruh UMKM dan pada tahun 2017 ada 1.053 UMKM yang dibina, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 110,41%. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 11,90% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- Indikator Tingkat Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya fasilitasi kerjasama kemitraan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKM) yang diselenggarakan dibagi banyaknya fasilitasi kerjasama kemitraan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKM) yang seharusnya diselenggarakan, dan pada tahun 2017 ada 375 UMKM difasilitasi , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 389,06%. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- Indikator Persentase UMKM Yang Telah Mengikuti Pameran Promosi Produk** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk dibagi banyaknya seluruh UMKM dan pada tahun 2017 ada 312 UMKM yang mengikuti pameran, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 472,80%. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 24,50% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4. Indikator Persentase Koperasi Sehat Dengan Pengelolaan Keuangan Yang Sehat diukur berdasarkan perbandingan antara koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi, dan pada tahun 2017 ada 712 koperasi aktif di Kota Tangerang, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 103,52%. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 27,87% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.17.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. UMKM masih menghadapi kendala dalam hal akses permodalan dan pendanaan;
- b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM serta minimnya pengetahuan dan kompetensi berwirausaha mengakibatkan rendahnya produksi UKM;
- c. Pola kemitraan belum maksimal dan belum ada tempat penjualan;
- d. Kurangnya inovasi produk, UMKM masih belum menguasai teknologi, manajemen informasi;
- e. Kurang berkualitas koperasi dan tidak maksimal pelaporan keuangan koperasi;
- f. Belum optimalnya pendataan koperasi, baik koperasi aktif maupun koperasi tidak aktif
- g. Kurangnya pemahaman mengenai cara promosi produk yang efektif serta pemasaran yang belum terorganisir dengan baik dan kurangnya pemahaman mengenai cara promosi produk yang efektif.
- h. Belum maksimalnya pembentukan koperasi perusahaan dan masyarakat;
- i. Belum adanya PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) sebagai sarana pelatihan, laboratorium serta pusat oleh-oleh Kota Tangerang;

2. Solusi

- a. Akses permodalan persyaratan tersebut dipermudah, termasuk didalamnya kelengkapan administrasi dan perijinan;
- b. Peningkatan pembinaan kepada pelaku UKM pengetahuan dan kompetensi berwirausaha;
- c. Pola kemitraan dimaksimalkan dan disediakan tempat penjualan hasil produk KUMKM;
- d. Perlunya peningkatan pembinaan kepada pelaku UKM dan mengembang inovasi, dan penguasaan teknologi dan manajemen;

- e. Memberikan pembekalan dan penyuluhan serta sosialisasi kepada pengelola koperasi baik pengurus, pengawas maupun karyawan koperasi;
- f. Pendataan koperasi baik koperasi aktif maupun koperasi tidak aktif dan mengidentifikasinya;
- g. Pelatihan inovasi pemasaran produk yang baik menggunakan inovasi teknologi bagaimana promosi produk yang efektif;
- h. Memberikan pembekalan dan penyuluhan serta sosialisasi kepada perusahaan akan pentingnya koperasi di perusahaan dan masyarakat.
- i. Didirikannya PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) sebagai sarana pelatihan, laboratorium serta pusat oleh-oleh Kota Tangerang;

4.1.18. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.18.643.185.787,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.9.226.723.460,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.18.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.5.696.900.202,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.881.110.000,00 yang dilaksanakan melalui 18 (delapan belas) kegiatan

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.784.703.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.349.250.000,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.97.969.686,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.163.950.000,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

4.1.18.2 Capaian Kinerja

**Tabel 4.19 Capaian Indikator Program Pada Urusan Penanaman Modal
Tahun 2014-2018**

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Investasi	kali/ ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tingkat Penyelenggaraan Promosi Peluang Investasi Daerah	kali/ ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Investasi Daerah	%	100,00	100,00	100,00	466,67	100,00	191,67
3	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya , Sarana Dan Prasarana Daerah	Tingkat Ketersediaan Kajian Tentang Investasi Daerah	%	100,00	100,00	100,00	111,11	100,00	114,69

Sumber: DPMPTSP Kota Tangerang, Tahun 2018

- Indikator Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Investasi** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Indikator Tingkat pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan investasi terealisasi sebesar 1,00 dari target sebesar 1,00 setiap tahunnya. Oleh sebab itu mendapat capaian 100%. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 24,50% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- Indikator Tingkat Penyelenggaraan Promosi Peluang Investasi Daerah** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Pada tahun 2014 , Indikator Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah mendapat capaian 100% tetapi pada tahun 2014 kegiatan masih dilaksanakan di Indagkop, belum dilaksanakan di DPMPTSP. Pada Tahun 2015, Indikator Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah terealisasi sebesar 1,00 dari target sebesar 1,00. Oleh sebab itu pada tahun 2015 mendapat capaian 100%. Pada Tahun 2016, Indikator Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah terealisasi sebesar 4,00 (dilaksanakan 4 kali yaitu 2 kali pameran keluar Daerah, 1 kali Tangerang Expo dan 1

kali Festival Cisadane) dari target sebesar 4,00 sehingga mendapat capaian 100%. Tahun 2017 Indikator Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah terealisasi sebesar 4,00 dari target sebesar 4,00 sehingga mendapat capaian 100%. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 24,50% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

3. **Indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Investasi Daerah** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 191,67%. Indikator tingkat ketersediaan sistem Informasi Pelayanan Investasi Daerah terealisasi sebanyak 20 sistem izin online dari target 6 sistem informasi pelayanan daerah, sehingga mendapat capaian sebesar 466,67% (20 sistem online dibagi dengan 6 sistem informasi pelayanan investasi dikali 100% = $20/6 \times 100\% = 466,67\%$). Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 24,50% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
4. **Indikator Tingkat Ketersediaan Kajian Tentang Investasi Daerah** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 114,69%. Tingkat Ketersediaan Kajian Tentang Investasi Daerah yaitu proporsi banyaknya kegiatan yang terkait dengan investasi, dengan nilai pembilang banyaknya kegiatan setiap tahun dan dengan penyebut 23 kegiatan (target RPJMD) dikali 100%. Pada Tahun 2014, terealisasi 4 kegiatan. Pada tahun 2015 terelisasi dengan akumulasi 9 kegiatan. Pada Tahun 2016 terealisasi dengan akumulasi 16 kegiatan. Pada tahun 2017 terealisasi dengan akumulasi 20 kegiatan. Dan Pada Tahun 2018 terealisasi dengan akumulasi 28 kegiatan. Target RPJMD 23 kegiatan dengan realisasi 28 kegiatan, mendapat capaian 114,69%. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 24,50% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.18.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya memberikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) per semester Perusahaan PMDN dan PMA. Sehingga DPMPTSP kesulitan mengetahui data progress setiap perusahaan PMDN dan PMA di Kota Tangerang
- b. Tidak adanya profil investasi Daerah. Salah satu upaya promosi Kota Tangerang sebagai Kota yang mampu berdaya saing dan mempunyai iklim investasi yang kondusif.

2. Solusi

- a. Adanya Kegiatan Sosialisasi LKPM dengan Peserta 200 orang, dalam sosialisasi ini para Perusahaan PMDN dan PMA dapat berdialog langsung dengan DPMPTSP sehingga informasi akan pentingnya LKPM per semester juga dapat tersampaikan. Menjalin komunikasi efektif dengan perusahaan PMDN dan PMA agar dapat menjadi lebih baik kedepannya.
- b. Adanya Kegiatan Penyusunan Profil Investasi Daerah. Dalam profil investasi daerah berisikan informasi mengenai Kota Tangerang terbaru, dari letak geografisnya, jumlah penduduk dan keunggulan ber-investasi di Kota Tangerang.

4.1.19. Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.90.616.070.670,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.60.845.202.810,00

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.19.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.11.905.794.250,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.10.484.649.140,00 yang dilaksanakan melalui 22 (dua puluh dua) kegiatan

2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.711.348.600,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.488.492.000,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.717.336.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.0 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.3.314.919.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.340.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan

5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.15.887.199.900,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.5.710.493.972,00 yang dilaksanakan melalui 11 (sebelas) kegiatan

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.31.252.934.300,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.37.804.130.298,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

4.1.19.2 Capaian Kinerja

**Tabel 4.20 Capaian Indikator Program Pada Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga
Tahun 2014-2018**

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Kepemudaan	Percentase Organisasi Pemuda Yang Memiliki Sertifikat Standar Mutu Organisasi Kepemudaan	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Cakupan Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan	%	100,00	100,00	118,75	109,09	91,08	106,96
		Tingkat Peranserta Organisasi Kepemudaan Yang Ikut Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Musrenbang	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	116,66	133,33	104,17

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Tingkat Pertumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	%	100,00	625,00	433,33	370,00	200,00	382,08
4	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Cakupan Pencegahan Penyalahgunaan Bahaya Narhoba	%	120,00	166,67	126,29	107,68	100,00	130,16
5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga Yang Memiliki Sertifikat Standar Mutu Organisasi Keolahragaan	%	0,00	100,00	100,00	106,67	100,00	100,00
6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	%	101,60	101,01	100,00	110,00	109,52	103,15
		Cakupan Klub Olahraga Di Setiap Kecamatan	Klub per Kec.	102,10	117,07	114,85	110,39	100,82	111,10
		Tingkat Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Daerah	% per ta hun	100,00	100,00	104,00	101,00	90,00	101,25
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan Gedung Olahraga Di Setiap Kecamatan	ged ung/ kec.	100,00	100,00	100,00	100,00	93,90	100,00
		Cakupan Stadion Mini Di Setiap Kecamatan	Stadi on/ kec.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Lapangan Olahraga Di Setiap Kecamatan	Lap ang an/ kec.	100,00	110,82	142,72	137,07	119,75	122,66

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang, Tahun 2018

1. Indikator Persentase Organisasi Pemuda Yang Memiliki Sertifikat Standar Mutu Organisasi Kepemudaan diukur berdasarkan banyaknya organisasi kepemudaan yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan dibandingkan dengan

banyaknya organisasi kepemudaan di Kota Tangerang dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Proses Organisasi Pemuda Yang Memiliki Sertifikat Standar Mutu Organisasi Kepemudaan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini dicapai dengan bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili Bidang Deputi Organisasi Kepemudaan bersama-sama melakukan sosialisasi dan ditindak lanjuti dengan kunjungan ke Organisasi Kepemudaan melakukan penilaian standarisasi mutu organisasi kepemudaan sebanyak 33 Organisasi kepemudaan (OKP). Pada tahun 2015 realisasi 36,36% dari target 36,36%, realisasi tahun 2016 sebesar 66,67% dari target 66,67% sedangkan realisasi pada tahun 2017 sebesar 100,00% dari target 100,00%. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.

2. **Indikator Cakupan Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan** diukur berdasarkan banyaknya kegiatan kepemudaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan banyaknya kegiatan kepemudaan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 106,96%. Realisasi Indikator Cakupan Fasilitasi kegiatan kepemudaan telah tercapai sesuai dengan terget yang telah ditetapkan. Indikator ini dicapai melibatkan KNPI dan Organisasi Kepemudaan (OKP). Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 realisasi 80,00% dengan target sebesar 73,33% Pemerintahan Daerah melakukan fasilitasi kegiatan kepemudaan sebanyak 24 kegiatan. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.
3. **Indikator Tingkat Peranserta Organisasi Kepemudaan Yang Ikut Terlibat Aktif Dalam Kegiatan Musrenbang** diukur berdasarkan banyaknya organisasi kepemudaan yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang perbandingan banyaknya organisasi kepemudaan di Kota Tangerang dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 104,17%. Realisasi Indikator Peranserta organisasi kepemudaan yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang telah tercapai sesuai dengan terget yang telah ditetapkan. Indikator ini dapat tercapai melalui kegiatan musrenbang kecamatan dan pelaksanaan Forum SKPD. Target tersebut pada akhir tahun 2017 tercapai melebihi dari target dikarenakan adanya pembinaan OKP. Dari tahun 2014 sampai tahun 2017 pemerintahan daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan dalam peran aktif dalam pembangunan Kota Tangerang melalui pelaksanaan kegiatan musrenbang sebanyak 10

kali. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4. **Indikator Tingkat Pertumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda** diukur berdasarkan banyaknya pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda yang dilakukan dibandingkan dengan banyaknya pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda yang seharusnya dilaksanakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 382,08%. Realisasi indikator tingkat pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda tercapai melampaui di atas target. Indikator ini dicapai melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda dan pelatihan keterampilan bai pemuda. Capaian tingkat pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda sangat tinggi melebihi target dikarenakan era digital memudahkan pemuda untuk berwirausaha sebagai contoh berjualan secara *onlinedan* mendapat dukungan dari pemerintahan. Dari tahun 2014 sampai tahun 2017 telah menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi pemuda dan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda sebanyak 1.525 orang. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 200,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi melampaui 100,00%.
5. **Indikator Cakupan Pencegahan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba** diukur berdasarkan banyaknya organisasi kepemudaan yang mengikuti penyuluhan terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba dibandingankan dengan banyaknya seluruh organisasi kepemudaan dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 104,11% realisasi indikator cakupan pecegahan penyalahgunaan bahaya narkoba tercapai sesuai dengan target. Indikator ini dicapai melalui kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba. Pada tahun 2014 sampai dengan 2017 realisasi sebasar 100,00% terdiri dari 33 OKP, 654 orang dan perwakilan dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%..
6. **Indikator Persentase Organisasi Olahraga Yang Memiliki Sertifikat Standar Mutu Oraganisasi Keolahragaan** diukur berdasarkan banyaknya organisasi kepemudaan yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan dibagi dengan banyaknya seluruh organisasi keolahragaan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 106,67%. realisasi indikator persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu oraganisasi keolahragaan tercapai sesuai dengan

target. Indikator ini dicapai melalui kegiatan peningkatan standarisasi mutu organisasi mutu organisasi keolahragaan dan bekerja sama dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga melakukan penilaihan kecang olahraga melakukan penilaian. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 realisasi prosentase Organisasi Olahraga yang memiliki standar mutu Organisasi keolahragaan sebesar 106,67% (32 cabang olahraga) dari target 100,00% (30 cabang olahraga). Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.

7. **Indikator Persentase Cabang Olahraga Berprestasi** diukur berdasarkan jumlah cabang olahraga berprestasi dibandingkan dengan Jumlah cabang olahraga, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 103,15%. Realisasi Indikator Persentase Cabang Olahraga Berprestasi tercapai sesuai dengan target. Indikator ini dicapai melalui beberapa kegiatan antara lain penyelenggaraan kompetisi olahraga, pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi dan berdedikasi. Pada tahun 2014 sampai 2017 realisasi 50,50% dengan target 50,00% dengan cabang olahraga yang berprestasi sebanyak 22 cabang olahraga. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 109,52% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi melampaui 100,00%.
8. **Indikator Cakupan Klub Olahraga Di Setiap Kecamatan** diukur berdasarkan jumlah klub olahraga dibandingkan dengan banyaknya seluruh kecamatan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 106,18%. Realisasi Indikator Cakupan Klub Olahraga Di Setiap Kecamatan tercapai melabih Target. Indikator ini dapat dicapai dengan bekerjasama dengan KONI dan Cabang olahraga. Pada tahun 2014 sampai 2017 realisasi cakupan klub olahraga setiap kecamatan realisasi 44,48 dengan target 40,62 dengan jumlah klub olahraga sebesar 578 klub. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 100,82% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi melampaui 100,00%.
9. **Indikator Tingkat Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Daerah** diukur berdasarkan banyaknya kegiatan keolahragaan daerah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan banyaknya kegiatan keolahragaan daerah, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Realisasi indikator Tingkat Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Daerah tercapai sesuai dengan target. Indikator ini tercapai melalui kegiatan penyelenggaran kompetisi olahraga. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 tingkat fasilitasi kegiatan keolahragaan daerah dengan realisasi sebesar 101,00% dari target 100,00 % dengan dilaksanakan 104 kegiatan. Untuk tahun 2018 s/d

triwulan I terealisasi sebesar 90,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

10. **Indikator Cakupan Gedung Olahraga Di Setiap Kecamatan** diukur berdasarkan banyaknya gedung olahraga yang tersedia dibandingkan dengan banyaknya kecamatan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 97,95%. Realisasi Indikator Cakupan Gedung Olahraga Di Setiap Kecamatan target tercapai. Indikator tercapai dengan melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 cakupan gedung olahraga disetiap kecamatan dengan realisasi sebesar 1,54 dan target sebesar 1.54 dengan jumlah gedung olahraga sebanyak 20 gedung olahraga. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 93,90% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
11. **Indikator Cakupan Stadion Mini Di Setiap Kecamatan** diukur berdasarkan banyaknya stadion mini yang tersedia dibandingkan dengan banyaknya kecamatan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Realisasi Cakupan Stadion Mini Di Setiap Kecamatan tercapai sesuai target. Indikator tercapai melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Pada tahun 2014 sampai tahun 2017 cakupan stadion mini disetiap kecamatan dengan realisasi sebesar 0,69 dengan target 0,69. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.
12. **Indikator Cakupan Lapangan Olahraga Di Setiap Kecamatan** diukur berdasarkan banyaknya lapangan olahraga yang tersedia dibagi bayaknya kecamatan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 122,07%. Realisasi Indikator cakupan Lapangan Olahraga Di Setiap Kecamatan tercapai di atas target yang ditetapkan dikarenakan pemerintah mengapresiasi keinginan masyarakat dalam pemenuhan sarana dan prasarana olahraga sampai tingkat RW. Untuk tahun 2018 s/d triwulan I terealisasi sebesar 119,75% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi melampaui 100,00%.

4.1.19.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Kurangnya peran serta aktif pemuda dalam kegiatan kegiatan organisasi Kepemudaan
- b. Kurang minat pemuda dalam memulai berwirausaha

- c. Kurangnya Sumber Daya Keolahragaan/pelatih olahraga yang sesuai dengan standarisasi kepelatihan
- d. Pembangunan sarana dan prasarana Sport Center atau Pusat Pelatihan Atlet Pelayar Daerah (PPLPD)
- e. Belum tersedianya Perda Keolahragaan sebagai regulasi yang mengatur urusan kepemudaan dan olahraga

2. Solusi

- a. Akan dilakukan pembinaan dan motivasi serta pengaderan melalui Organisasi Kepemudaan
- b. Akan dilakukan pembinaan dalam rangka mengembangkan semangat kewirausahaan
- c. Perlu adanya Diklat Sumber Daya Keolahragaan terutama pelatih cabang olahraga yang belum berprestasi agar pelatih mempunyai kualitas, teknik dan program yang tepat untuk melatih para atlet
- d. Perlu pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar Nasional dan diperlukan mess atlet (sejak tahun 2017 Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah merintis Puslacap PPLPD)
- e. Dibuatkan Perda keolahragaan (Kajian) Kota Tangerang sebagai regulasi mengatur tentang hal-hal pelaksanaan urusan keolahragaan dan pembiayaan olahraga

4.1.20. Urusan Statistik

Urusan Statistik selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.3.463.958.630,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.566.734.000,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.20.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.3.463.958.630,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.566.734.000,00 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan

4.1.20.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.21. Capaian Indikator Program Pada Urusan Statistik Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2018
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pengembangan Data/Informasi / Statistik Daerah	Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Produksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,16	100,00
		Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Niaga Dan Jasa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	26,88	100,00
		Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Neraca Wilayah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	42,86	100,00
		Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40,95	100,00
		Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Kesejahteraan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	40,95	100,00
		Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Lintas Sektor	%	100,00	100,00	100,00	100,00	47,62	100,00

Sumber: Dinas Kominfo Kota Tangerang, Tahun 2018

- Indikator Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Produksi** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya data statistik produksi yang tersedia dibagi banyaknya data statistik produksi yang seharusnya tersedia dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,16% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- Indikator Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Niaga Dan Jasa** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya data statistik niaga dan jasa yang tersedia dibagi banyaknya data statistik niaga dan jasa yang seharusnya tersedia dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 26,88% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

3. **Indikator Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Neraca Wilayah** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya data statistik neraca wilayah yang tersedia dibagi banyaknya data statistik neraca wilayah yang seharusnya tersedia dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 42,86% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
4. **Indikator Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Sosial Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Kesejahteraan Masyarakat** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya data statistik kesejahteraan rakyat yang tersedia dibagi banyaknya data statistik kesejahteraan rakyat yang seharusnya tersedia dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00 %. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 40,95% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
5. **Indikator Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Statistik Lintas Sektor** Indikator ini diukur berdasarkan banyaknya data statistik lintas sektor yang tersedia dibagi banyaknya data statistik lintas sektor yang seharusnya tersedia dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 47,62% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.20.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Pada urusan statistik Tahun 2017 dengan indikator tingkat ketersediaan data/informasi statistik produksi belum tercapai, sebagai contoh data/informasi statistik produksi yaitu neraca bahan makanan dan data/informasi statistik pola pangan harapan
- b. Tupoksi urusan statistik di Dinas Kominfo pada TA 2017 berada di 2 (dua) bidang sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi pemenuhan target pada Renstra atau RPJMD.

2. Solusi

- a. Capaian urusan statistik Tingkat ketersediaan data/informasi statistik produksi akan dioptimalkan melalui kegiatan di TA 2018

- b. Untuk urusan statistik diharapkan adanya evaluasi dan diarahkan satu bidang agar bisa terfokus penanganan untuk mencapai target yang diharapkan

4.1.21. Urusan Persandian

Urusan Persandian selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.132.232.680,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.576.062.500,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.21.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Persandian

Program pengembangan dan pengelolaan persandian selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.132.232.680,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.576.062.500,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4.1.21.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.22. Capaian Indikator Program Pada Urusan Persandian Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Persandian	Persentase Informasi Pemerintah Daerah Yang Menggunakan Sandi	% per ta hun				100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kominfo Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Persentase Informasi Pemerintah Daerah Yang Menggunakan Sandi** dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I telah tercapai 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.21.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Teknologi persandian yang terus berkembang, namun belum diimbangi dengan SDM atau tenaga ahli yang profesional dalam bidang persandian.

2. Solusi

- a. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan persandian, dibutuhkan peralatan pendukung persandian serta penyediaan SDM atau tenaga ahli dibidang persandian.

4.1.22. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.9.635.317.272,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.8.176.823.526,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.22.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program pengelolaan keragaman budaya selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.904.156.586,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.350.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan

2. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program pengembangan nilai budaya selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.695.219.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.400.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.894.074.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program pengelolaan kekayaan budaya selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.255.304.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.368.512.000,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

4.1.22.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.23. Capaian Indikator Program Pada Urusan Kebudayaan Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Pelestarian Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	100,00
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Kajian Seni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Tempat Untuk Menggelar Seni, Memamerkan Dan Memasarkan Karya Seni, Serta Mengembangkan Industri Seni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	100,00
		Cakupan Organisasi Seni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	100,00
		Cakupan Gelar Seni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Cakupan Penyelenggaraan Misi Kesenian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Cakupan Fasilitasi Seni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Cakupan Group Kesenian Di Setiap Kelurahan	Group/ kel.	100,00	100,00	100,00	100,00	42,22	100,00
		Tingkat Ketersediaan Dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	35,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
4	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat Kerjasama Dalam Pengelolaan Keragaman Budaya	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

Sumber: Dinas Budpar Kota Tangerang, Tahun 2018

- Indikator Cakupan Pelestarian Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Daerah** diukur berdasarkan pembagian antara benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan *existing* benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 20,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Faktor penyebab pencapaian tersebut karena penetapan cagar budaya sudah mencapai 16 cagar Budaya yang sebelumnya hanya 9 cagar budaya ditambah dengan di tetapkannya 7 cagar budaya lainnya.
- Indikator Cakupan Kajian Seni** diukur berdasarkan nilai rata-rata cakupan kajian seni, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Faktor pencapaian tersebut karena terlaksananya kegiatan seminar dan workshop terkait seni dan budaya Kota Tangerang, seperti Seminar tari cokel, Seminar manajemen sanggar.
- Indikator Cakupan Tempat Untuk Menggelar Seni, Memamerkan Dan Memasarkan Karya Seni, Serta Mengembangkan Industri Seni** diukur berdasarkan nilai rata-rata cakupan tempat menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Faktor pencapaian tersebut karena banyaknya fasilitas taman-taman dan ruang terbuka hijau yang bisa di pergunakan untuk melakukan kegiatan kesenian, seperti pameran lukisan, tampilan kesenian, latihan tari.
- Indikator Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian** diukur berdasarkan nilai rata-rata cakupan SDM Kesenian, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar

100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 20,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Faktor pencapaian tersebut dikarenakan banyaknya minat siswa siswi dan seniman Kota Tangerang dalam kegiatan festival budaya dan festival cisadane Kota Tangerang, Tumbuhnya kantong kantong budaya dan kesadaran masyarakat di bidang kesenian dan sanggar seni yang tumbuh di kota Tangerang seperti banyaknya sanggar dan kelompok seni.

5. **Indikator Cakupan Organisasi Seni** diukur berdasarkan nilai rata-rata cakupan organisasi seni, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 20,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Faktor pencapaian tersebut karena bertambahnya sanggar seni yang tumbuh di Kota Tangerang yang mencapai 500 sanggar seni luar sekolah
6. **Indikator Cakupan Gelar Seni** diukur berdasarkan nilai rata-rata cakupan gelar seni, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Faktor pencapaian tersebut karena banyaknya sanggar yang menyelenggarakan kegiatan kesenian baik yang diselenggaran secara mandiri, bekerjasama dengan pihak swasta maupun bekerjasama dengan pemerintah
7. **Indikator Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya** diukur berdasarkan nilai rata-rata cakupan penyelenggaraan festival seni dan budaya, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Faktor penyampaian tersebut karena banyaknya jumlah pengunjung dan peserta tampilan kesenian yang terlibat dalam kegiatan festival seni dan budaya yang ada di Kota Tangerang
8. **Indikator Cakupan Penyelenggaraan Misi Kesenian** diukur berdasarkan nilai rata-rata cakupan penyelenggaraan misi kesenian, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Faktor pencapaian tersebut karena terlaksananya misi kesenian ke kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten dan kabupaten/kota lainnya di Indonesia

9. **Indikator Cakupan Fasilitasi Seni** diukur berdasarkan nilai rata-rata cakupan fasilitasi seni, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Faktor pencapaian tersebut karenaterlaksananya kegiatanpelatihan pelatihan dan terbentuknya kampung kampung budaya seperti kampung batik, banyaknya fasilitasi tampilan kesenian.
10. **Indikator Cakupan Group Kesenian Di Setiap Kelurahan** diukur berdasarkan nilai rata-rata cakupan group kesenian di setiap kelurahan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00 %. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 42,20% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Faktor pencapaian tersebut dikarenakan tumbuhnya grup grup kesenian yang ada di kelurahan kelurahan di Kota Tangerang, hal ini di tandai dengan banyaknya pegiat seni yang melaksanakan gelaran kesenian tingkat kelurahan.
11. **Indikator Tingkat Ketersediaan Dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Kesenian Dan Kebudayaan Daerah** diukur berdasarkan pembagian antara jumlah sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan daerah yang digunakan dengan jumlah sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan daerah yang tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 35,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Faktor pencapaian tersebut karena adanya fasilitas alat musik gambang kromong, tehyan, rampak bedug dan marawis yang bisa di gunakan untuk latihan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Tangerang
12. **Indikator Tingkat Kerjasama Dalam Pengelolaan Keragaman Budaya** diukur berdasarkan pembagian antara jumlah keragaman budaya yang dikelola dengan existing jumlah keragaman budaya yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. Faktor pencapaian tersebut karena banyaknya jumlah sanggar yang dibina oleh Disbudpar dengan menampilkan sanggar tersebut pada tampilan-tampilan kesenian baik dalam kota Tangerang maupun luar kota Tangerang.

4.1.22.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang budaya kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini masih terbilang minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini bukan berarti budaya lokal tidak sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi banyak budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Budaya lokal juga dapat di sesuaikan dengan perkembangan zaman, asalkan masih tidak meninggalkan ciri khas dari budaya tersebut.
- b. Minimnya komunikasi antar budaya Kemampuan untuk berkomunikasi sangat penting agar tidak terjadi salah pahaman tentang budaya yang dianut. Minimnya komunikasi budaya ini sering menimbulkan perselisihan yang akan berdampak turunnya ketahanan budaya daerah.
- c. Kurangnya pembelajaran kebudayaan masyarakat Pembelajaran tentang budaya, harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal di tengah perkembangan zaman.
- d. Kurangnya sumber daya manusia yang berkecimpung di kebudayaan. Kebudayaan terlihat sepele dan mudah namun tanpa di dukung oleh sumber daya yang tepat maka akan menjadi masalah yang besar. Kehilangan budaya berarti kehilangan jati diri dan identitas.
- e. Kurangnya keterlibatan budaya lokal dalam event event. Diperlukan keterlibatan dan kepercayaan pemerintah terhadap kekuatan dan kemampuan budaya lokal.
- f. Masih belum memadainya sarana dan prasarana kesenian Sarana dan prasarana kebudayaan membuat aktifitas budaya menjadi tidak terfokus, sehingga aktifitas budaya banyak di lakukan sendiri sendiri dan individualis. Seperti Gedung kesenian

2. Solusi

- a. Optimalisasi peran Siswa dan Mahasiswa dalam pelestarian seni dan budaya daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jalur Intrakurikuler dilakukan dengan menjadikan seni dan

budaya daerah sebagai substansi mata pelajaran; sedangkan jalur ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui pemanfaatan unit kegiatan siswa dan mahasiswa (UKM) kesenian dan keikutsertaan siswa dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya yang diselenggarakan oleh berbagai pihak untuk pelestarian seni dan budaya daerah.

- Jalur Intrakurikuler Untuk mengoptimalkan peran mahasiswa dalam pelestarian seni dan budaya daerah diperlukan adanya pemahaman siswa dan mahasiswa terhadap seni dan budaya daerah, artinya seni dan budaya daerah dijadikan sebagai salah satu substansi atau materi.
 - Jalur Ekstrakurikuler Pembentukan dan pemanfaatan Unit Kegiatan Siswa dan Mahasiswa untuk mengoptimalkan peran siswa dan mahasiswa dalam pelestarian seni dan budaya daerah. Sehubungan dengan hal itu, Kepala Dinas Pendidikan perlu mendorong pembentukan unit kegiatan siswa dalam bidang Kesenian Daerah.
- b. Pengadaan Forum-forum festival seni siswa dan mahasiswa. Seperti Pekan Senisiswa dan Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksiminas) yang merupakan wahana yang lain untuk optimalisasi peran siswa dan mahasiswa dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan seperti Gedung kesenian
 - d. Pembinaan dan Pendampingan terhadap komunitas kebudayaan seperti sanggar, padepokan dan lain lain
 - e. Memfasilitasi event-event kebudayaan lokal
 - f. Komunikasi Budaya yang harus dilakukan antara masyarakat budaya dengan pemerintah melalui dialog budaya dan diskusi kebudayaan
 - g. Penyediaan beasiswa pendidikan bidang kebudayaan
 - h. Penyediaan sumber daya manusia kebudayaan di dalam pemerintahan

4.1.23. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.18.268.282.746,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.5.109.203.100,00

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.23.1 Program dan Kegiatan**1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.6.457.953.170,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.448.390.500,00 yang dilaksanakan melalui 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan

4.1.23.2 Capaian Kinerja**Tabel 4.24. Capaian Indikator Program Pada Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2018**

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	101,33	117,38	100,33
		Tingkat Pembinaan Perpustakaan Umum Dan Khusus	%	100,00	100,00	100,00	100	84,72	100
		Tingkat Kenaikan Anggota Perpustakaan, Taman Bacaan, Klub Buku, Dll	%	100,00	100,00	100,00	100,52	25,94	100,13
		Tingkat Koleksi Dan Jenis Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	123,87	100
		Tingkat Keberadaan Perpustakaan Digital	%	100,00	100,00	100,00	100,00	71,16	100
		Tingkat Kelengkapan Sistem Layanan Perpustakaan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	67,29	100
		Tingkat Ketersediaan Dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	75	100

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan	Bu ah/ kec.	100,00	100,00	100,00	100,00	103,72	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah pada tahun ke n dengan kurang banyaknya kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah pada tahun ke n-1 dan hasilnya dibagi banyaknya kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah pada tahun ke n-1 yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 117,38% melalui kegiatan pemasyarakatan minat dan budaya baca (story telling dan lomba bercerita), bedah buku, pengembangan peperpustakaan, pameran buku, peningkatan pelayanan perpustakaan, fasilitasi duta baca, tingkat kota Tangerang. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 117,38% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi melampaui 100,00%.
2. **Indikator Tingkat Pembinaan Perpustakaan Umum Dan Khusus** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya pembinaan yang dilakukan terhadap perpustakaan umum dan khusus daerah dibagi banyaknya pembinaan yang seharusnya dilakukan terhadap perpustakaan umum dan khusus daerah, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 84,72% melalui kegiatan pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan, bimbingan teknis pengelola perpustakaan masyarakat, sekolah kecamatan, kelurahan, masjid, pesantren dan posyandu, lomba pengelola perpustakaan terbaik. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 84,72% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
3. **Indikator Tingkat Kenaikan Anggota Perpustakaan, Taman Bacaan, Klub Buku, Dll** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. Pada tahun ke-n dikurang banyaknya masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll pada tahun ke- n-1 dibagi banyaknya masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. Pada tahun ke- n-1 yang seharusnya tersedia, dengan tingkat

capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,13% melalui kegiatan penataan sirkulasi bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan sabtu minggu. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,94% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4. **Indikator Tingkat Koleksi Dan Jenis Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah dibagi banyaknya koleksi dan jenis buku yang seharusnya tersedia di perpustakaan daerah, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% melalui kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah, penyediaan bahan pustakauntuk masyarakat. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 123,87% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi melampaui 100,00%.
5. **Indikator Tingkat Keberadaan Perpustakaan Digital** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya perpustakaan daerah yang sudah menggunakan teknologi digital dibagi banyaknya perpustakaan daerah yang sudah menggunakan teknologi digital seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% melalui kegiatan pengembangan perpustakaan. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 71,16% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
6. **Indikator Tingkat Kelengkapan Sistem Layanan Perpustakaan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya sistem layanan perpustakaan daerah yang tersedia dibagi banyaknya sistem layanan perpustakaan daerah yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% melalui kegiatan perpustakaan keliling dan dropping buku, penyusunan database perpustakaan kota Tangerang, penyusunan pedoman. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 67,29% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
7. **Indikator Tingkat Ketersediaan Dan Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Pepustakaan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya sarana dan prasarana keperpustakaan yang lengkap dan tersedia dibagi banyaknya sarana dan prasarana keperpustakaan yang seharusnya lengkap dan tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan

triwulan I terealisasi sebesar 75,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

8. **Indikator Cakupan Perpustakaan Dan Taman Bacaan Di Setiap Kecamatan** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan dibagi banyaknya semua wilayah kecamatan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% melalui kegiatan bimbingan teknis pengelola perpustakaan masyarakat, sekolah, kecamatan, kelurahan, pesantren dan perpustakaan masjid. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 103,72% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi melampaui 100,00%.

4.1.23.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Jumlah tenaga pustakawan yang belum tersedia
- b. Kurangnya armada perpustakaan keliling yang saat ini beroperasi hanya 4 unit untuk melayani 13 wilayah kecamatan.
- c. Bangunan perpustakaan yang kurang representative dari segi luas perpustakaan karena lokasi untuk penyimpanan buku fisik sudah tidak bisa mencukupi lagi dan juga kurang luasnya lokasi parkir untuk para pengunjung
- d. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang perpustakaan digital.

2. Solusi

- a. Mengusulkan penambahan pegawai pustakawan.
- b. Penambahan jumlah armada perpustakaan keliling untuk meningkatkan kinerja pelayanan perpustakaan daerah kemasyarakatan.
- c. Pembangunan gedung baru untuk perpustakaan daerah agar lebih representative.
- d. Menambah jumlah sarana dan prasarana untuk menunjang perpustakaan digital

4.1.24. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.231.494.800,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.686.787.200,00

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.24.1 Program dan Kegiatan

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program perbaikan sistem administrasi karsipan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.5.231.494.800,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.686.787.200,00 yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan

2. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.158.396.900,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.153.288.000,00 yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan

3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.340.168.900,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.123.622.200,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.690.933.600,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.358.639.000,00 yang dilaksanakan melalui 12 (dua belas) kegiatan

4.1.24.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.25. Capaian Indikator Program Pada Urusan Karsipan Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Karsipan	Tingkat Keterse diaan Sistem Dan Pedoman Penyelenggaraan Karsipan Yang Handal, Dinamis, Komprehensif Dan Terpadu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	100,00
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Tingkat Ketersediaan Arsip Statis, Bernilaiguna, Dan Arsip Elektronik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	76,88	100,00
		Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00
3	Program Pemeliharaan	Tingkat Pemeliharaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	87,50	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
	Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Arsip Dan Sarana Prasarana Pendukungnya							
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Kearsipan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	77,08	100,00
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SDM Kearsipan Yang Berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	92,31	100,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang, Tahun 2018

- 1. Indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Dan Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan Yang Handal, Dinamis, Komprehensif Dan Terpadu** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah sistem dan pedoman penyelenggaraan karsipan yang ada dibagi jumlah sistem dan pedoman penyelenggaraan karsipan yang seharusnya ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% melalui kegiatan kajian sistem administrasi karsipan. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 90,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 2. Indikator Tingkat Ketersediaan Arsip Statis, Bernilaiguna, Dan Arsip Elektronik** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah arsip yang dinilai kembali dibagi jumlah arsip bernilai guna yang seharusnya ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% melalui kegiatan penduplikatan dokumen arsip/daerah dalam bentuk informatika, penyusutan/pemusnahan arsip, penilaian dokumen/ arsip daerah, preservasi arsip. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 76,88% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 3. Indikator Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD** diukur berdasarkan banyaknya laporan karsipan perijinan yang terpelihara dibagi banyaknya laporan karsipan perijinan yang seharusnya terpelihara dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% melalui iakuisi arsip, preservasi arsip. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4. **Indikator Tingkat Pemeliharaan Arsip Dan Sarana Prasarana Pendukungnya** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kegiatan pemeliharaan arsip dan sarana prasarana yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan pemeliharaan arsip dan sarana prasarana yang seharusnya diadakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% melalui kegiatan pemeliharaan berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, pemeliharaan rutin arsip daerah. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 87,50% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
5. **Indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Informasi Kearsipan** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pemenuhan informasi kearsipan yang dibutuhkan dibagi jumlah informasi kearsipan yang dibutuhkan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% melalui kegiatan penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip, pameran kearsipan, peningkatan dan pengembangan kualitas informasi dan layanan, penelusuran naskah sumber arsip. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 77,08% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
6. **Indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SDM Kearsipan Yang Berkualitas** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang seharusnya diadakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% melalui kegiatan lomba pengelolaan arsip terbaik, fasilitasi pembinaan kearsipan dilingkungan pemerintah/swasta, fasilitasi peningkatan pengetahuan kearsipan kepada masyarakat, koordinasi pengelola kearsipan. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 92,31% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.24.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Belum tersedianya depo arsip yang sesuai dalam hal standar bangunan.
- b. Belum adanya tenaga pengelola kearsipan yang bersertifikat.
- c. Belum terintegrasinya SIADA kepada seluruh SKPD

2. Solusi

- a. Pembangunan gedung baru yang dipentukukan sesuai kebutuhan.

- b. Menyediakan tenaga arsiparis yang bersertifikat.
- c. Mengintegrasikan SIADA keseluruh SKPD

4.1.25. Urusan Penunjang Inspektorat

Urusan Penunjang Inspektorat selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.27.320.828.792,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.5.929.826.250,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.25.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.11.777.537.112,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.760.986.500,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

2. Program Peningkatan Profesionalis Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program peningkatan profesionalis tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.707.932.830,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.337.563.500,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.024.679.656,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.12.704.000,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

4.1.25.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.26. Capaian Indikator Program Pada Urusan Penunjang Inspektorat
Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
	Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Tindak Lanjut Laporan Hasil Ekspose Temuan Hasil Pengawasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tingkat Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tingkat Ketersediaan Kebijakan Tentang Sistem Dan Prosedur Pengawasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

Sumber: Inspektorat Kota Tangerang, Tahun 2018

- Indikator Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah terbit dibagi dengan rencana Laporan Hasil Pemeriksaan (target), dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- Indikator Tingkat Tindak Lanjut Laporan Hasil Ekspose Temuan Hasil Pengawasan** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah temuan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dibagi Jumlah temuan secara keseluruhan pada Laporan Hasil Pemeriksaan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- Indikator Tingkat Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/Workshop/Pelatihan dibagi dengan Rencana pegawai yang akan mengikuti Diklat/Workshop/Pelatihan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4. Indikator Tingkat Ketersediaan Kebijakan Tentang Sistem Dan Prosedur Pengawasan diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dihasilkan dibagi dengan target Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk tahun anggaran 2018 sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.25.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) masih ada yang belum tepat waktu;
- b. Keterlambatan/tidak sesuainya waktu pelakssanaan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan oleh OPD dalam menindaklanjuti Rekomendasi sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Ketentuan dan peraturan yang diterbitkan oleh pusat dan daerah perubahannya begitu cepat, sehingga para pengwas harus selalu di bekali **pengetahuan** secara berkesinambungan
- d. Kurangnya pengetahuan dari OPD terhadap materi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), sehingga berkas dan data pendukung yang diminta sesuai rekomendasi belum dipenuhi untuk dijadikan bahan tindak lanjut;
- e. Adanya penggantian pegawai dari OPD yang menangani tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan, sehingga terputusnya informasi dan menghambat proses tindak lanjut;
- f. Adanya temuan, yang proses penyelesaiannya harus melibatkan beberapa stake holder, sehingga proses penyelesaiannya harus dibahas, dikaji secara teknis dan komprehensif sehingga perlu waktu yang relative lama dalam merumuskan dan menyelesaiakannya;
- g. Dalam Pelaksanaanya, Pegawai/ Auditor/P2UPD atau pegawai struktural lainnya yang ditugaskan dalam tim Penyusunan Dokumen Sistem dan Prosedur, waktunya bersamaan dengan penugasan lainnya atau Pemeriksaan sehingga tidak tepat waktu dalam penyelesaiannya;

2. Solusi

- a. Mengundang OPD atau Obyek Pemeriksaan secara periodik untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan;
- b. Mendorong Kepala OPD melalui laporan Hasil Tindak Lanjut pada acara Forum Rapat Evaluasi yang dipimpin langsung Walikota/Wakil Walikota;
- c. Melakukan Gelar Tindak lanjut hasil Pengawasan, yang dilakukan serentak sehingga dapat dituntaskan dalam waktu relatif singkat;
- d. Membahas secara rinci terkait dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh OPD;
- e. Dilaksanakannya Diklat Fungsional dan Akuntabilitas secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kompetensi APIP;
- f. Mengatur atau menyesuaikan waktu penugasan dalam PKPT.

4.1.26. Urusan Penunjang Perencanaan

Urusan Penunjang Perencanaan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.83.571.282.486,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.17.729.886.350,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.26.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Data/Informasi

Program pengembangan data/informasi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.13.852.951.376,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.989.894.000,00 yang dilaksanakan melalui 23 (dua puluh tiga) kegiatan

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah selama tahun 2014-2018 dapat terealisasi sebesar Rp.35.768.089.849,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.8.307.733.245,00 yang dilaksanakan melalui 88 (delapan puluh delapan) kegiatan

3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.003.681.665,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.972.266.000,00 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan

4. Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.40.420.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.330.478.900,00 yang dilaksanakan melalui .. (...) kegiatan

5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program perencanaan pembangunan ekonomi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.3.407.646.322,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.431.195.750,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

6. Program Perencanaan Sosial Budaya

Program perencanaan sosial budaya selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.5.442.357.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.849.546.900,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

7. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.3.183.114.200,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.304.133.600,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.745.393.800,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.198.292.200,00 yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan

9. Program Penelitian dan Pengembangan Strategis

Program penelitian dan pengembangan strategis selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.848.407.590,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.189.671.500,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

4.1.26.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.27. Capaian Indikator Program Pada Urusan Penunjang Perencanaan Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Kerjasama Pembangunan	Tingkat kerjasama perencanaan pembangunan daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Tingkat Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
		Tingkat koordinasi dan kerjasama pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	100.00	100.00	100.00	100.00	5.48	100.00
4	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Tingkat Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
		Tingkat koordinasi Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	5.48	100.00
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Tingkat Penye lengan Bimbingan Teknis, Workshop, Dise minasi, Seminar, dll. Terkait Perencanaan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Pembangunan Daerah							
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Utama Perencanaan Dan Penganggaran Pemb. Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	56.16	100.00
		Tingkat Ketersediaan Dokumen Utama Pengendalian, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Keg. Pemb. Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	14.29	100.00
		Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Dalam Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	14.29	100.00
		Tingkat Ketersediaan Peraturan/Regulasi Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota Tangerang Serta Berbagai Aturan Pendukungnya.	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Tingkat Peranserta/Partisipasi Kelompok Masyarakat Sebagai Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah	% per ta hun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat Perencanaan Bidang Ekonomi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.09	100.00
		Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Perencanaan Bidang Ekonomi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	16.55	100.00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
8	Program Perencana an Pembangun an Sosial Budaya	Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Perencanaan Bidang Sosial Budaya	%	100.00	100.00	100.00	100.00	26.44	100.00
		Tingkat Ketersediaan Kajian Kebijakan Dan Teknis Perencanaan Sosial Budaya	%	100.00	100.00	100.00	100.00	16.55	100.00
9	Program Perencana an Pembangun an Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Tingkat Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	%	100.00	100.00	100.00	100.00	5.48	100.00
		Tingkat Koordinasi Perencanaan Prasarna Wilayah Dan Sumber Daya Alam		100.00	100.00	100.00	100.00	5.48	100.00
10	Program Perencana an Pembangun an Daerah Rawan Bencana	Tingkat Perencanaan Pemb. Rawan Bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	5.48	100.00
		Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Perencanaan Pemb. Rawan Bencana	%	100.00	100.00	100.00	100.00	5.48	100.00
11	Program Pengembangan Data/Inform asi	Tingkat Ketersediaan Dan Kelengkapan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00
		Tingkat Ketersediaan Peraturan/Regul asi Tentang Sistem Pengelolaan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Pengelolaan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
		Tingkat Pengelolaan, Pengembangan , Dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah	% per tah un	100.00	100.00	100.00	100.00	1.80	100.00
		Tingkat Kompetensi Dan Kapasitas Pengelola Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	% per tah un	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Tingkat Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
		Tingkat Publikasi Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat	%	100.00	100.00	100.00	100.00	18.78	100.00
12	Program Penelitian dan Pengembangan Strategis	Tingkat Ketersediaan Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Infrastruktur Dan Prasarana Dan Sarana Wilayah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
		Tingkat Ketersediaan Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Ekonomi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
		Tingkat Ketersediaan Kajian, Penelitian, Dan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Pengembangan Terkait Masalah Sosial Kependudukan Dan Kesejahteraan Masyarakat							
		Tingkat Ketersediaan Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Terkait Tata Laksana Kepemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

Sumber: Bappeda Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Tingkat Kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koordinasi perencanaan pembangunan dengan berbagai komponen pemangku kepentingan pembangunan di daerah yang dilakukan dibagi banyaknya koordinasi perencanaan pembangunan dengan berbagai komponen pemangku kepentingan pembangunan di daerah yang seharusnya dilakukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018, sudah mencapai 100,00% dan sampai akhir desember 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.
2. **Indikator Tingkat Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koordinasi dan kerjasama pengembangan wilayah-wilayah perbatasan yang dilakukan dibagi banyaknya koordinasi dan kerjasama pengembangan wilayah-wilayah perbatasan yang seharusnya dilakukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018, sudah mencapai 100,00% dan sampai akhir desember 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%, karena indikator ini sudah terpenuhi di tahun sebelumnya.
3. **Indikator Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersedia dibagi banyaknya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-

2017 sebesar 100,00%. Sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018, capaiannya 0% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4. **Indikator Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dilakukan dibagi banyaknya koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang seharusnya dilakukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100%. Sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018, capaiannya baru 5.48% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
5. **Indikator Tingkat Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang tersedia dibagi banyaknya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar yang seharusnya ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018, capaiannya baru 0% karena kegiatan baru dimulai pada triwulan II. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
6. **Indikator Tingkat koordinasi Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota mengah dan besar yang dilakukan dibagi banyaknya koordinasi perencanaan pengembangan kota-kota mengah dan besar yang seharusnya dilakukan, untuk 2014-2017 sebesar 100% Sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018, capaiannya baru 5.48% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
7. **Indikator Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya aparatur perencanaan yang pernah mengikuti berbagai pelaituhan terkait perencanaan pembangunan daerah dibagi banyaknya aparatur perencanaan pembangunan daerah, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018 sebesar 100% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
8. **Indikator Tingkat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Diseminasi, Seminar, dll. Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah** diukur berdasarkan

perbandingan antara banyaknya bimbingan teknis, workshop, diseminasi, seminar, dll. terkait perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan dibagi banyaknya bimbingan teknis, workshop, diseminasi, seminar, dll. terkait perencanaan pembangunan daerah yang seharusnya diselenggarakan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018 sebesar 100% dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.

- 9. Indikator Tingkat Ketersediaan Dokumen Utama Perencanaan Dan Penganggaran Pemb. Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah yang tersedia dibagi banyaknya dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100%. sedangkan capaian sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 56.16%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 10. Indikator Tingkat Ketersediaan Dokumen Utama Pengendalian, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Keg. Pemb. Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung berbagai kajian teknokratis serta dipublikasikan dibagi banyaknya dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018 baru mencapai 14.29% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 11. Indikator Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Dalam Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi-Pelaporan Pemb. Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara (persentase tingkat koordinasi/kerjasama perenc. pemb. daerah bidang sosial-budaya) + (persentase tingkat koordinasi/kerjasama perenc. pemb. daerah bidang ekonomi) + (persentase tingkat koordinasi/kerjasama perenc. pemb. daerah bidang pemerintahan) + (persentase tingkat koordinasi/kerjasama perenc. pemb. daerah bidang sarana-prasarana) dibagi 4 tahun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018 sebesar 14.29 dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

12. Indikator Tingkat Ketersediaan Peraturan/Regulasi Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota Tangerang serta berbagai aturan pendukungnya diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya peraturan/regulasi sistem perencanaan pembangunan daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya yang tersedia dan terimplementasi dibagi banyaknya peraturan/regulasi sistem perencanaan pembangunan daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya yang tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. sedangkan untuk triwulan I tahun 2018 telah tercapai sebesar 100,00% karena indikator sudah tercapai di tahun sebelumnya dan sampai akhir desember 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.
13. Indikator Tingkat Peranserta/Partisipasi Kelompok Masyarakat Sebagai Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pemb. daerah yang terlibat dalam perenc. pemb. daerah dibagi banyaknya kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pemb. daerah, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%.sedangkan untuk triwulan I tahun 2018 capaian indikator telah mencapai 100,00% dan sampai akhir desember 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.
14. Indikator Tingkat Perencanaan Bidang Ekonomidiukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen perenc. bidang ekonomi yang tersedia dibagi banyaknya dokumen perenc. bidang ekonomi yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100%. sedangkan untuk triwulan I capaian indikator baru mencapai 0.09% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
15. Indikator Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Perencanaan Bidang Ekonomi diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koordinasi dan kerjasama perenc. bidang ekonomi yang terlaksana dibagi banyaknya koordinasi dan kerjasama perenc. bidang ekonomi yang seharusnya terlaksana, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan capaian indikator triwulan I tahun 2018 baru mencapai 16.55% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
16. Indikator Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Perencanaan Bidang Sosial Budaya diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koordinasi dan kerjasama perencanaan bidang sosial budaya yang terlaksana dibagi banyaknya koordinasi dan kerjasama perencanaan bidang sosial budaya yang seharusnya terlaksana, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100%.sedangkan capaian triwulan I

Tahun 2018 baru mencapai 16.55% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

17. **Indikator Tingkat Ketersediaan Kajian Kebijakan Dan Teknis Perencanaan Sosial Budaya** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen kajian teknis perencanaan sosial budaya yang tersedia dibagi banyaknya dokumen kajian teknis perencanaan sosial budaya yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100%, sedangkan untuk triwulan I tahun 2018 baru mencapai 26.44% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
18. **Indikator Tingkat Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang tersedia dibagi banyaknya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sukmber daya alam yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% Sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018, capaiannya baru 5.48% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
19. **Indikator Tingkat Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sukmber daya alam dibagi banyaknya koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sukmber daya alam yang seharusnya terlaksana, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100%.Sedangkan untuk capaian triwulan I tahun 2018, capaiannya baru 5.48% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
20. **Indikator Tingkat Perencanaan Pemb. Rawan Bencana** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen perencanaan penanganan rawan bencana yang tersedia dibagi banyaknya dokumen perencanaan penanganan rawan bencana yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% dengan capaian inidikator triwulan I tahun 2018 sebesar 100% karena indikator ini sudah tercapai di tahun sebelumnya dan sampai akhir desember 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00 %.
21. **Indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Pemb. Rawan Bencana** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koordinasi dan kerjasama pembangunan daerah terkait perencanaan penanganan rawan bencana yang dilakukan dibagi banyaknya koordinasi dan kerjasama pembangunan daerah terkait perencanaan

penanganan rawan bencana yang seharusnya dilakukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% dengan capaian indikator triwulan I tahun 2018 sebesar 100% karena indikator ini sudah tercapai di tahun sebelumnya

- 22. Indikator Tingkat Ketersediaan Dan Kelengkapan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya jenis/elemen data/informasi perencanaan pemb. daerah yang lengkap dan tersedia dibagi banyaknya jenis/elemen data/informasi perencanaan pemb. daerah yang lengkap dan seharusnya tersedia , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan untuk triwulan I tahun 2018 capaian indikator sebesar 50% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 23. Indikator Tingkat Ketersediaan Peraturan/Regulasi Tentang Sistem Pengelolaan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya peraturan/regulasi sistem pengelolaan data/informasi perenc. pemb. daerah yang tersedia dibagibanyaknya peraturan/regulasi tentang sistem pengelolaan data/informasi perenc. pemb. daerah yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan capaian untuk triwulan I tahun 2018 capaian indikator telah terealisasi sebesar 100%.
- 24. Indikator Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Pengelolaan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koordinasi dan kerjasama pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dibagi banyaknya koordinasi dan kerjasama pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah yang seharusnya dilakukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100%, sedangkan capaian indikator capaian triwulan I tahun 2018 sebesar 0% karena kegiatan baru berjalan pada triwulan II dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 25. Indikator Tingkat Pengelolaan, Pengembangan, Dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya aplikasi sistem informasi data perenc. pemb. yang terkelola, dikembangkan, dan terpelihara dibagi banyaknya aplikasi sistem informasi data perenc. pemb. yang seharusnya terkelola, dikembangkan, dan terpelihara, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan untuk capaian inidikator

triwulan I tahun 2018 baru mencapai sebesar 1.80% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

26. **Indikator Tingkat Kompetensi Dan Kapasitas Pengelola Data/ Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya aparatur perencanaan yang pernah mengikuti berbagai pelaituhan terkait pengelola data/ informasi perencanaan pembangunan daerah dibagi banyaknya aparatur perencanaan yang seharusnya mengikuti berbagai pelatihan terkait pengelola data/ informasi perencanaan pembangunan daerah, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan untuk capaian inidikator triwulan I tahun 2018 sebsesar 0% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
27. **Indikator Tingkat Publikasi Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya data/informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersedia, terkelola, dan terpublikasi dibagi banyaknya data/informasi perencanaan pembangunan daerah yang tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan untuk capaian inidikator triwulan I tahun 2018 sebsesar 18.78 dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
28. **Indikator Tingkat Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya penayangan /publikasi informasi pelaks. keg. pemb. daerah kepada masyarakat melalui media massa dibagi banyaknya keharusan penayangan/publikasi informasi pelaks. keg. pemb. daerah kepada masyarakat melalui media massa, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan capaian inidikator sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 0% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
29. **Indikator Tingkat Ketersediaan Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Infrastruktur Dan Prasarana Dan Sarana Wilayah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan infrastruktur dan prasarana dan sarana wilayah yang tersedia dibagi banyaknya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan infrastruktur dan prasarana dan sarana wilayah yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan capaian inidikator sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 0% dan sampai akhir

tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. karena kegiatan baru dilakukan triwulan IV .

30. **Indikator Tingkat Ketersediaan Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Ekonomi** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi yang tersedia dibagi banyaknya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan capaian inidikator sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 0% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%. karena kegiatan baru dilakukan triwulan IV
31. **Indikator Tingkat Ketersediaan Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Terkait Masalah Sosial Kependudukan Dan Kesejahteraan Masyarakat** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan terkait masalah sosial kependudukan dan kesejahteraan masyarakat yang tersedia dibagi banyaknya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan terkait masalah sosial kependudukan dan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan capaian inidikator sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 0% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.karena kegiatan baru dilakukan triwulan IV
32. **Indikator Tingkat Ketersediaan Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Terkait Tata Laksana Kepemerintahan Dan Pelayanan Publik** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan terkait tata laksana kepemerintahan dan pelayanan publik yang tersedia (kajian jangka menengah pemerintahan) dibagi banyaknya hasil kajian, penelitian, dan pengembangan terkait tata laksana kepemerintahan dan pelayanan publik yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100% sedangkan capaian inidikator sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 0% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.26.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Belum maksimalnya pengintegrasian antara sistem perencanaan dengan evaluasi.

- b. Belum terintegrasinya agenda kegiatan guna mendukung pemenuhan data perencanaan dan evaluasi.
- c. Belum terlaksananya pengupdate an data yang dapat digunakan sebagai base data program penanggulangan kemiskinan.
- d. Dalam melakukan pengkajian tingkat pemanfaatan dokumen belum optimal.

2. Solusi

- a. Mengintegrasikan system perencanaan dengan evaluasi.
- b. Mengintegrasikan agenda kegiatan guna mendukung pemenuhan data perencanaan dan evaluasi.
- c. Perlu melaksanakan Metode pemutahiran mandiri guna mendapatkan base data yang up to date dan akurat sehingga program tepat sasaran
- d. Dalam menyusun kajian perlu singkronisasi dengan data SKPD Teknis

4.1.27. Urusan Penunjang Keuangan

Urusan Penunjang Keuangan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.85.610.136.252,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.23.470.953.900,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.27.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.54.528.206.043,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.10.160.843.000,00 yang dilaksanakan melalui 47 (empat puluh tujuh) kegiatan

4.1.27.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.28. Capaian Indikator Program Pada Urusan Penunjang Keuangan Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2018
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan	Tingkat Ketersediaan Dokumen Dan Sistem Pengelolaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2018
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
	Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan Daerah							
		Tingkat Ketersediaan Dokumen Dan Sistem Pengelolaan Aset	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Pelaksanaan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

Sumber: DPKD dan Bapenda Kota Tangerang, Tahun 2018

- 1. Indikator Tingkat Ketersediaan Dokumen Dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah** Diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang tersedia dibagi yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I tingkat capaian indikator sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 2. Indikator Tingkat Ketersediaan Dokumen Dan Sistem Pengelolaan Aset** Diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen dan sistem pengelolaan aset yang tersedia dibagi yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I tingkat capaian indikator sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 3. Indikator Tingkat Pelaksanaan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah** Diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya dokumen intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang tersedia dibagi yang seharusnya tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00% dan untuk tahun 2018 sampai dengan triwulan I sebesar 25,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.27.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Belum optimalnya intensifikasi pemungutan pajak daerah khususnya pemeriksaan pajak daerah karena kurangnya tenaga pemeriksa pajak;
- b. Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya terkait dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah belum dilaksanakan secara optimal;
- c. Pemahaman sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah belum merata;
- d. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti gudang penyimpanan arsip dan barang milik daerah lainnya. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan aset daerah.
- e. Belum adanya tenaga fungsional penilai Pajak PBB dan juru sita yang bersertifikat;
- f. Subjek pajak yang ada tidak diketahui alamatnya sehingga menyulitkan dalam konfirmasi data dan dokumen kepemilikan;
- g. Masih terdapat data objek pajak PBB yang kurang akurat.

2. Solusi

- a. Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, yang dilaksanakan melalui :
 1. Pendataan potensi wajib pajak baru;
 2. Penurunan reklame kain yang belum membayar pajak;
 3. Penempelan stiker/baliho segel terhadap media reklame yang belum berizin, yang belum membayar pajak dan stiker lunas membayar pajak;
 4. Penyampaian surat teguran belum menyampaikan laporan omzet;
 5. Pemuthakhiran data wajib pajak (checker);
 6. Penagihan tunggakan pajak daerah;
 7. Penyegelan terhadap wajib pajak daerah yang belum membayar pajak;
 8. Peningkatakan pelayanan pajak online berupa laporan omzet secara online dan pembayaran secara online;
 9. Melakukan rapat koordinasi terkait pajak penerangan jalan dengan PT. PLN Distribusi Jakarta Raya dan PT. PLN Distribusi Banten per triwulan.
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan pajak daerah;

- c. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah serta mengintegrasikan dengan aplikasi lainnya yang terkait;
- d. Mengintegrasikan standar satuan harga barang dengan e-planning dan e-budgeting;
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara barang SKPD;
- f. Pengembangan sistem peta sebaran aset khususnya tanah, bangunan dan jalan (melakukan koordinasi dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsinya);
- g. Melaksanakan penghapusan barang milik daerah sesuai usulan yang disampaikan SKPD
- h. Mengajukan pegawai untuk dididik dan dilatih menjadi tenaga penilai pajak dan jurusita, sehingga penggalian potensi pajak menjadi maksimal khususnya untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari PBB dan BPHTB.
- i. Optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, yang dilaksanakan melalui:
 - Pemutakhiran data potensi wajib pajak PBB-P2 di Kota Tangerang, seperti Pendataan Objek dan Subjek Pajak PBB/BPHTB, Pemeriksaan PBB/BPHTB, penagihan tunggakan pajak PBB dan BPHTB; dan
 - Melakukan penyempurnaan Analisa Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan tujuan untuk mengetahui dasar pengenaan nilai jual objek pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan daerah, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak PBB-P2;
- j. Verifikasi lapangan untuk mengetahui objek atau subjek pajak secara riil dilapangan, baik itu mengenai luas tanah maupun luas bangunan.

4.1.28. Urusan Penunjang Kepegawaian

Urusan Penunjang Kepegawaian selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.68.077.169.637,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.15.785.728.100,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.28.1 Program dan Kegiatan

1. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.252.855.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.195.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.20.315.297.350,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.6.932.489.200,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

3. Program Pendidikan Kedinasan

Program pendidikan kedinasan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.9.810.931.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.2.577.579.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program pembinaan dan pengembangan aparatur selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.21.025.008.086,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.4.906.543.800,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4.1.28.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.29. Capaian Indikator Program Pada Urusan Penunjang Kepegawaian
Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	% per ta hun	100,00	100,00	86,26	97,64	17,89	95,98
		Tingkat Penurunan Indisipliner Pegawai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
2	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Tingkat Ketersediaan Pelayanan Pemensiunan Pegawai	%	100,00	100,00	100,00	100,00	12,35	100,00
3	Program Pendidikan Kedinasan	Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan	%	100,00	119,11	100,00	100,00	43,46	104,78
		Percentase Pejabat Fungsional Pemerintah Daerah Yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional	%	100,00	100,00	100,00	100,00	24,55	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas	Tingkat Pelayanan Penyelenggara	%	100,00	122,27	100,00	100,00	18,55	105,57

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
	Sumberdaya Aparatur	an Diklat Teknis Dan Fungsional Beserta Sarana Pendukungnya							

Sumber: BKPSDM Kota Tangerang, Tahun 2018

- 1. Indikator Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah pelayanan kepegawaian yang tersedia bagi aparatur kota dibagi dengan Jumlah pelayanan kepegawaian yang seharusnya tersedia pada tahun berjalan , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 95,98%. Capaian indikator ini tidak mencapai 100% karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebijakan moratorium dari pemerintah pusat. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 17,89%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 2. Indikator Tingkat Penurunan Indisipliner Pegawai** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Kasus Indisipliner yang ditetapkan dibagi dengan jumlah aparatur kota Tangerang , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I masih 0%, capaian ini masih nol karena jumlah kasus indisipliner belum ditetapkan. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 3. Indikator Tingkat Ketersediaan Pelayanan Pemensiunan Pegawai** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah SK Pensiu yang diselesaikan s.d tahun berjalan dibagi dengan jumlah target pemensiunan aparatur dalam lima tahunan , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 12,35%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 4. Indikator Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Peserta Diklat PIM s.d tahun berjalan dibagi dengan Jumlah Target Penyelenggaraan Diklat PIM selama lima tahun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 104,78%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 43,46% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%..

5. **Indikator Persentase Pejabat Fungsional Pemerintah Daerah Yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah pejabat fungsional yang telah mengikuti diklat fungsional dibagi dengan jumlah pejabat fungsional Kota Tangerang, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 100,00%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 24,55%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
6. **Indikator Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Beserta Sarana Pendukungnya** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Peserta Diklat Teknis dan Fungsional s.d tahun berjalan dibagi dengan jumlah Target Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional dalam lima tahun, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2018 sebesar 105,57%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 18,55%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.28.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Kompetensi pegawai yang belum mengarah ke spesialisasi atau masih general (umum) sehingga masih sulit dilakukan pemetaan kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan baik di posisi jabatan administrasi (struktural) maupun fungsional tertentu.
- b. Kurangnya inovasi dan kreativitas aparatur dalam pelaksanaan tugas sehingga terlihat kesan bahwa sector/bidang tugas pelayanan baik administrasi maupun pelayanan publik hanya sekedar rutinitas dan tidak mengalami pembaharuan metode dan teknik kerja dalam penyelesaian tanggung jawabnya.
- c. Kurangnya kesadaran dan disiplin pegawai dalam mematuhi jam kerja, penggunaan atribut lengkap, pakaian seragam dan peraturan tentang hak dan kewajiban aparatur dalam tugasnya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.
- d. Kurangnya pengendalian dan pengawasan internal di lingkungan SKPD sehingga banyak terjadinya pelanggaran kasus disiplin akibat akumulasi selama masa yang cukup lama.
- e. Belum meratanya tingkat kemampuan manajerial aparatur di berbagai SKPD.

2. Solusi

- a. Melakukan penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK).

- b. Menyusun kebutuhan peta formasi pada posisi jabatan Fungsional.
- c. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan serta pembinaan pegawai di lingkungan SKPD setiap bulannya.
- d. Melaksanakan monitoring ke berbagai SKPD setiap bulannya serta melakukan pembinaan pegawai berupa metode dialog komunikasi dengan para jajaran pejabat di lingkungan SKPD. Hal ini untuk dapat digali semua harapan dan masukan dalam perbaikan pembinaan pegawai serta memperoleh informasi atas para pegawai yang bermasalah dalam disiplin kerja.
- e. Melakukan penyusunan kurikulum diklat baik teknis maupun fungsional sesuai kebutuhan SKPD.

4.1.29. Urusan Pendukung Sekretariat Daerah

Urusan Pendukung Sekretariat Daerah selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.239.510.025.800,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.55.252.334.130,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.29.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.7.521.594.904,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.036.502.000,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.15.016.772.475,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.2.252.880.000,00 yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan

3. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program penataan peraturan perundang-undangan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.6.476.474.948,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.139.415.000,00 yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan

4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program penataan daerah otonomi baru selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.44.515.502.037,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.236.804.500,00 yang dilaksanakan melalui 41 (empat puluh satu) kegiatan

4.1.29.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.30. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	%	138,44	145,37	141,87	116,05	17,65	135,43
		Tingkat Koordinasi Dalam Penanganan Tugas Pemerintahan Umum	%	112,59	106,33	102,54	100,66	25,53	105,53
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kesesuaian Formasi Jabatan SKPD	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tingkat Analisis Beban Kerja Pegawai	%	166,67	100,00	151,52	120,48	100,00	141,07
		Tingkat Pelaksanaan Rencana Kebijakan Daerah	%	228,67	163,60	73,94	81,00	20,83	136,80
		Tingkat Pelayanan Dan Kinerja Aparatur	%	345,80	127,32	122,88	106,43	20,88	175,61
3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tingkat Penataan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	34,00	100,00
4	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Tingkat Ketertiban Administrasi Pembangunan Daerah	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an %	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
		Tingkat Kelengkapan Kelembagaan Dan Penataan Keorganisasian SKPD		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tangerang, Tahun 2018

- Indikator Tingkat Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan dibagi banyaknya koordinasi dan kerjasama yang seharusnya, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 135,43%, sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian indikator sebesar 17,65%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- Indikator Tingkat Koordinasi Dalam Penanganan Tugas Pemerintahan Umum** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum yang dilaksanakan dibagi banyaknya koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum yang seharusnya dilakukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 105,53%, sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian indikator sebesar 25,53%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- Indikator Tingkat Kesesuaian Formasi Jabatan SKPD** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya formasi jabatan SKPD yang sudah sesuai beban kerja dan tupoksi dibagi banyaknya formasi jabatan SKPD yang tersedia, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian indikator sebesar 100,00%. dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- Indikator Tingkat Analisis Beban Kerja Pegawai** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya analisis beban kerja pegawai yang dilakukan dibagi banyaknya analisis beban kerja pegawai yang seharusnya dilakukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 141,07%, sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian indikator sebesar 100,00%. dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.

5. **Indikator Tingkat Pelaksanaan Rencana Kebijakan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya rencana kebijakan daerah yang sudah dilaksanakan dibagi banyaknya rencana kebijakan daerah, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 136,80%, sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian indikator sebesar 20,83%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
6. **Indikator Tingkat Pelayanan Dan Kinerja Aparatur** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kegiatan kepelayanan aparatur yang dilaksanakan dibagi banyaknya kegiatan kepelayanan aparatur yang seharusnya, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 175,61%, sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian indikator sebesar 20,88%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
7. **Indikator Tingkat Penataan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang disusun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibagi banyaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang seharusnya disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian indikator sebesar 34,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
8. **Indikator Tingkat Ketertiban Administrasi Pembangunan Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kegiatan penertiban administrasi yang dilakukan dibagi banyaknya kegiatan penertiban administrasi yang seharusnya dilakukan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian sebesar 0,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
9. **Indikator Tingkat Kelengkapan Kelembagaan Dan Penataan Keorganisasian SKPD** diukur berdasarkan banyaknya lembaga/organisasi SKPD yang sudah lengkap dan tertata sesuai peraturan perundangan yang berlaku dibagi banyaknya seluruh lembaga/organisasi SKPD, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, sampai dengan triwulan I tahun 2018 tingkat capaian sebesar 100,00%. dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.29.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Pengadaan melalui E-Catalog khususnya diakhir tahun anggaran sering terdapat kendala keterbatasan barang dari distributor atau agen mengingat pada waktu bersamaan instansi-instansi pemerintah lainnya membutuhkan barang yang sama sehingga menjadi hambatan atau keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaannya.
- b. Penggunaan sistem/Aplikasi dalam penyusunan pelaporan keuangan diharapkan mempermudah pelaksanaan pekerjaan namun demikian masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. System yang dipergunakan harus komprehensif, meliputi semua aktivitas pengelolaan keuangan yang dimulai perencanaan sampai dengan pelaporan dan pengawasan.
- c. Perangkat daerah tidak matang dalam pengusulan draft produk hukum yang diajukan;
- d. Belum tersedia ruang perpustakaan khusus produk hukum;
- e. Respons masyarakat terhadap program konsultasi hukum keliling masih terasa kurang;
- f. Kurangnya jumlah organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Kota Tangerang untuk menunjang program bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
- g. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali UPTD yang sudah ada. Kota Tangerang telah menerbitkan Peraturan Walikota Tangerang tentang UPTD pada Tahun 2017 dengan jumlah UPTD sebanyak 103 UPTD sebelum dikeluarkannya Permendagri ini.
- h. Dikeluarkannya Permendagri yang mengatur Nomenklatur Perangkat Daerah, yaitu:
 - Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
 - Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
- i. Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan (Urusan Perencanaan, Urusan Kepegawaian dan Diklat, Urusan Keuangan dan Urusan

Litbang), dimana Permendagri di atas terlambat diterbitkan karena Pemerintah Kota Tangerang telah menerbitkan Peraturan Walikota Tangerang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada tanggal 23 November 2016, sedangkan kebijakan Provinsi Banten untuk sementara tidak menerima pengajuan fasilitasi perubahan Perda Perangkat Daerah sebelum 2 (dua) tahun berjalan pelaksanaan Perda Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai dengan PP. Nomor 18 Tahun 2016.

2. Solusi

- a. Sebaiknya penganggaran pengadaan tidak dialokasikan pada anggaran perubahan, khususnya untuk barang-barang spesifik.
- b. Penggunaan System/aplikasi pelaporan keuangan yang ada, harus terintegrasi satu sama lain, diharapkan dengan terintegrasinya semua Sistem/aplikasi yang ada pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan lebih cepat dan akurat serta akuntabel.
- c. Setiap pembahasan draft produk hukum di masing-masing perangkat daerah agar dipertajam untuk menghindari perubahan substansi yang signifikan pada akhir proses pembentukan produk hukum;
- d. Disediakannya ruangan khusus untuk perpustakaan produk hukum;
- e. Perlu dilakukan sosialisasi mekanisme akreditasi bagi organisasi bantuan hukum yang belum terakreditasi di Kota Tangerang.
- f. Perlu dikeluarkannya Peraturan Walikota Pembentukan UPTD sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD berdasarkan hasil kajian akademis yang sudah dilaksanakan dan rekomendasi hasil rapat finalisasi Pemerintah Provinsi Banten.
- g. Perlunya dilaksanakan Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah.

4.1.30. Urusan Pendukung Sekretariat DPRD

Urusan Pendukung Sekretariat DPRD selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.193.924.400.335,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.115.955.997.516,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.30.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Program peningkatan kapasitas lembaga dewan perwakilan rakyat daerah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.152.714.190.807,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.97.543.815.040,00 yang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) kegiatan

4.1.30.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.31. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017		
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat	Tingkat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	33,33	100
		Tingkat Fasilitasi Pembahasan dan Persetujuan Raperda	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tangerang, Tahun 2018

- 1. Indikator Tingkat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD** Pengukuran capaian indikator ini berupa fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Capaian Indikator tingkat fasilitasi peningkatan kapasitas lembaga DPRD dalam tahun 2014 sampai dengan 2017 terealisasi 100,00. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 33,33%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 2. Indikator Tingkat Fasilitasi Pembahasan dan Persetujuan Raperda** Pengukuran capaian indikator ini berupa fasilitasi sekretariat DPRD kepada DPRD dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah dan non peraturan daerah. Capaian Indikator tingkat fasilitasi pembahasan & persetujuan Raperda dalam tahun 2014 sampai dengan 2017 terealisasi 100%, dilaksanakan melalui kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah dan telah menghasilkan 55 Perda dan 24 Non Perda yang ditetapkan oleh DPRD. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 0,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.30.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Terkait program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan alokasi anggaran program yang paling besar yakni 80,69% dari total anggaran belanja urusan Sekretariat DPRD merupakan kegiatan berupa fasilitasi tugas DPRD. Artinya besarnya tingkat penyerapan sangat tergantung dari agenda dan kegiatan yang dilaksanakan DPRD.
- b. Selain hal dijelaskan pada poin a, masih belum optimalnya capaian kinerja dan anggaran program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, dalam pandangan DPRD karena terkendalanya fasilitas sarana ruang rapat yang kurang memadai untuk melakukan hearing baik dalam rangka pengawasan mitra komisi maupun sebagian rangkaian pembahasan Raperda serta pembahasan naskah akademik serta kajian perda lama, sementara bila menggunakan fasilitas rapat di luar kantor (hotel) belum bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Solusi

- a. Untuk mendukung fasilitasi secara optimal dalam pelaksanaan tugas DPRD (lebih dikenal dengan sebutan Trifungsi DPRD, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah/legislasi, penganggaran dan pengawasan), Sekretariat DPRD harus melakukan usulan perubahan Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah terlebih dahulu melakukan kajian/pembahasan terhadap peraturan yang mendasari perubahan pertaturan dimaksud yakni Permendagri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bila mana perubahan dimaksud dapat terwujud,tugas dan fungsi Sekretariat DPRD menjadi lebih fokus terhadap pemberian pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menjalankan Trifungsi DPRD sesuai agenda rencana kerja kegiatan tahunan yang telah ditetapkan, dan pada akhirnya akan berdampak baik terhadap kinerja program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
- b. Sekretariat DPRD melakukan fasilitasi/mediasi kegiatan secara lebih intens berupa pertemuan antara Pimpinan DPRD dan Pimpinan Pemerintah Daerah untuk terciptanya adanya pemahaman yang sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

terkait pembatasan rapat di luar kantor khususnya menyangkut kegiatan DPRD. Selanjutnya menjelang dilakukannya pembahasan perubahan anggaran, sesuai aturan yang berlaku Sekretariat DPRD harus berkonsultasi/berkoordinasi terkait penghapusan/pengurangan volume kegiatan yang diprediksi pelaksanaannya sulit/kecil peluang untuk dilakukan hingga akhir tahun anggaran.

4.1.31. Urusan Pendukung Kesatuan Bangsa Dan Politik

Urusan Pendukung Kesatuan Bangsa Dan Politik selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.27.836.265.111,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.7.652.177.540,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.31.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.10.502.940.750,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.2.014.305.600,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.691.696.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.152.614.700,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program penataan peraturan perundang-undangan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.610.490.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.905.123.600,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program pendidikan politik masyarakat selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.7.177.691.825,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.284.482.300,00 yang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) kegiatan

5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program pengembangan wawasan kebangsaan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.790.106.200,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.111.272.000,00 yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) kegiatan

4.1.31.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.32. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pendukung Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat Penyelesaian Kejadian Di Masyarakat Terkait Dengan Masalah Kebangsaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat Kemitraan Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan Peningkatan Kesadaran Wawasan Kebangsaan Pada Ormas, LSM, Dan OKP	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Cakupan Penyelenggaran Kemitraan Dan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Ormas Dan LSM Di Setiap Wilayah Kecamatan	keg iata n/ kec . .	100,00	100,00	100,00	100,00	32,61	100,00
		Tingkat Penyelenggaran Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Politik	% per ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

Sumber: Kantor Kesbangpol Kota Tangerang, Tahun 2018

1. Indikator Tingkat Penyelesaian Kejadian Di Masyarakat Terkait Dengan Masalah Kebangsaan diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kejadian di

masyarakat yang dipicu oleh masalah kebangsaan yang berhasil diselesaikan dibagi banyaknya kejadian dimasyarakat yang dipicu oleh masalah kebangsaan. Dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

2. **Indikator Tingkat Kemitraan Dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kerjasama dalam upaya pengembangan wawasan kebangsaan yang dilakukan dibagi banyaknya kerjasama dalam upaya pengembangan wawasan kebangsaan yang seharusnya dilakukan. Dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
3. **Indikator Cakupan Peningkatan Kesadaran Wawasan Kebangsaan Pada Ormas, LSM, Dan OKP** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya konflik antar golongan ormas dan OKP yang ditangani dibagi banyaknya konflik sosial masyarakat. Dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
4. **Indikator Cakupan Penyelenggaraan Kemitraan Dan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Ormas Dan LSM Di Setiap Wilayah Kecamatan** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya kegiatan kemitraan dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di wilayah kecamatan dibagi jumlah kecamatan. Dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
5. **Indikator Tingkat Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Politik** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang politik yang diselenggarakan dibagi banyaknya sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang politik yang seharusnya diselenggarakan. Dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%, adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 25,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.1.31.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Terkait masalah keamanan dan kenyamanan yang sering terjadi adalah bentrokan antar Ormas sekaligus terjadinya bentrokan antar warga, golongan, suku dan agama
- b. Belum adanya regulasi atau pedoman tata cara pengajuan hibah
- c. Kurangnya personil yang menangani konflik SARA di kantor Kesbangpol

2. Solusi

- a. Dalam menangani permasalahan terjadinya bentrokan antar suku, ras, agaman dan antar golongan sekaligus antar Ormas dan LSM upaya yang harus dilakukan:
 - Pembahasan dan pembentukan tim kewaspadaan dini dimana harus dibentuk tim sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.
 - Jambore Ormas yang melibatkan 16 ormas yang berbasis massa di wilayah Kota Tangerang dengan jumlah peserta 400 orang sekaligus pernyataan sumpah darah dari pengurus ormas agar tidak terjadi pertikaian di kendumian hari.
 - Melakukan pertemuan-pertemuan dan kerjasama antar pemerintah, aparat keamanan serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dalam menjaga keamanan dan ketenraman wilayah.
- b. Pembahasan untuk menyusun SOP tata cara pengajuan hibah dalam bentuk Peraturan Walikota
- c. Memberikan penambahan personil dan merubah status yang masih kantor menjadi badan, agar kesbangpol bisa berjalan lebih efektif dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

4.1.33. Urusan Kewilayahan Kecamatan

Urusan Kewilayahan Kecamatan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.222.271.161.905,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.89.101.376.914,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.32.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.134.333.038.178,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.68.913.390.446,00 yang dilaksanakan melalui 175 (seratus tujuh puluh lima) kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.76.846.055.827,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 8.237.882.918,00 yang dilaksanakan melalui 76 (tujuh puluh enam) kegiatan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.4.879.607.260,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.268.663.950,00 yang dilaksanakan melalui 12 (dua belas) kegiatan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.5.264.500.040,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.556.439.600,00 yang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) kegiatan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.947.960.600,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.125.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan

4.2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

4.2.1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

Urusan Kelautan Dan Perikanan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.978.359.664,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.355.938.400,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program pengembangan budidaya perikanan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.210.020.100,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.355.938.400,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

2. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.297.202.400,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.0 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

3. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.471.137.164,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.0 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

4.2.1.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.33. Capaian Indikator Program Pada Urusan Kelautan Dan Perikanan
Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2018
		Uraian	Sat uan	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Tingkat Produktivitas Hasil Perikanan Darat	%	100,00	100,00	106,57	120,61	37,56	116,18
2	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Cakupan Bina Kelompok Peternak Ikan	%	155,37	100,00	100,00			
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tingkat Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	%	109,00	100,46	100,00			
		Tingkat Promosi Hasil Pengolahan Perikanan	%	100,00	100,00	100,00			

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang, Tahun 2018

1. Indikator Tingkat Produktivitas Hasil Perikanan Darat diukur berdasarkan Nilai produktivitas ikan per m² pada tahun n dibagi Target produktivitas ikan per m² selama 5 (lima) tahun dikali 100% , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar

116,18%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Pembinaan dan pengembangan perikanan, kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perikanan dan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 37,56 %. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

2. antara Banyaknya kelompok peternak ikan yang dibina Banyaknya kelompok peternak ikan yang seharusnya dibina dibagi Banyaknya kelompok peternak ikan yang seharusnya dibina di kali 100%, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2016 sebesar 111,07%. Kegiatan yang mendukung indikator **Cakupan Bina Kelompok Peternak Ikan** sudah menjadi kewenangan Provinsi Banten sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 sehingga Kota Tangerang tidak menganggarkan kembali.
3. **Indikator Tingkat Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan** diukur berdasarkan perbandingan antara dibagi, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2016 sebesar 101,89%. Kegiatan yang mendukung indikator **Tingkat Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan** sudah menjadi kewenangan Provinsi Banten sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 sehingga Kota Tangerang tidak menganggarkan kembali.
4. **Indikator Tingkat Promosi Hasil Pengolahan Perikanan** diukur berdasarkan perbandingan antara Banyaknya produksi perikanan yang dikelola dan dipasarkan antara dibagi Banyaknya produksi perikanan yang seharusnya dikelola dan dipasarkan dikali 100%, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2016 sebesar 100,00%. Kegiatan yang mendukung indikator **Tingkat Promosi Hasil Pengolahan Perikanan** sudah menjadi kewenangan Provinsi Banten sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 sehingga Kota Tangerang tidak menganggarkan kembali.

4.2.1.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Lahan yang digunakan budidaya ikan terbatas dan akses sumber air juga terbatas, misalnya untuk budidaya di lokasi yang jauh dari aliran sungai atau irigasi
- b. Kekeruhan dan polusi air sungai terutama pada musim kemarau mengakibatkan beberapa pelaku usaha perikanan menghentikan budidaya.

2. Solusi

- a. Pemanfaatan teknologi perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan pada lahan terbatas misalnya bioflok dan kolam terpal.
- b. Pelaku usaha perikanan harus melaksanakan treatment air dengan cara penampungan dan pengendapan air dengan kaporit.

4.2.2. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.12.639.023.110,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.4.046.414.500,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.2.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.7.071.136.100,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.2.772.016.000,00 yang dilaksanakan melalui 12 (dua belas) kegiatan

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.4.766.400.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.060.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Program selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.801.486.510,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.214.398.500,00 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan

4.2.2.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.34. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pariwisata Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s/d Maret)	
1	Program Pengembangan Pemasaran	Tingkat Pemasaran Obyek Wisata Daerah	%	33,33	68,75	66,67	83,33	45,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an %	2014	2015	2016	2017	2018 (s/d Maret)	
	Pariwisata	Tingkat Kenaikan Kunjungan Wisatawan Ke Obyek Wisata Daerah		25,00	56,25	149,73	192,80	292,80	189,04
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tingkat Perkembangan Destinasi Pariwisata Daerah	%	0,00	40,00	60,00	80,00	0,00	100,00
3	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tingkat Perkembangan Jenis Kelas Dan Jumlah Hotel	%	95,00	105,08	95,24	95,24	20,00	100,00

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang, Tahun 2018

- 1. Indikator Tingkat Pemasaran Obyek Wisata Daerah** diukur berdasarkan perhitungan pembagian antara jumlah objek wisata daerah yang dipasarkan dengan existing jumlah objek wisata daerah yang ada, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Faktor penyebab pencapaian target tersebut adalah objek wisata daerah yang dipasarkan ke daerah-daerah di nusantara dalam kurun waktu 2014-2017 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 objek wisata daerah yang dipasarkan berjumlah 4 objek wisata (kawasan pasar lama, situ cipondoh, sungai cisadane dan masjid kali pasir) dan pada tahun 2015 dan 2016 bertambah menjadi 8 objek wisata daerah (kawasan pasar lama, situ cipondoh, sungai cidasane, masjid kali pasir, masjid al adzom, situ bulakan, bandara internasional soekarno hatta dan kawasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya). Pada tahun 2017, seiring meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata mulai dari penataan bantaran sungai cisadane dan pembangunan taman-taman tematik, menambah objek wisata daerah yang dipasarkan. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 45,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
- 2. Indikator Tingkat Kenaikan Kunjungan Wisatawan Ke Obyek Wisata Daerah** diukur berdasarkan perbandingan persentase kunjungan wisatawan ke objek wisata daerah dengan persentase kunjungan wisatawan ke objek wisata daerah tahun lalu, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Pencapaian target tersebut disebabkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata daerah di Kota

Tangerang setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah objek wisata daerah. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 292,80%. dan sampai akhir tahun 2018 tercapai realisasi melampaui 100,00%.

3. **Indikator Tingkat Perkembangan Destinasi Pariwisata Daerah** diukur berdasarkan perhitungan perbandingan jumlah destinasi wisata daerah yang terbangun dengan jumlah destinasi wisata yang telah dibangun tahun lalu, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00 %. Beberapa destinasi pariwisata yang terbangun dalam kurun waktu 2014-2017, yaitu Cisadane Walk, Panggung Pasar Lama, Flaying Deck, dan Dermaga Apung adalah merupakan faktor utama pencapaian target indikator program tersebut. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 0,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
4. **Indikator Tingkat Perkembangan Jenis Kelas Dan Jumlah Hotel** diukur berdasarkan perhitungan perbandingan antara jumlah jenis kelas dan jumlah hotel yang ada dibagi dengan jumlah jenis kelas dan jumlah hotel tahun lalu, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00 %. Penyebabnya adalah bertambahnya jumlah hotel dari tahun ke tahun, pada tahun 2014 tercatat 50 hotel, tahun 2015 naik menjadi 52 hotel, tahun 2016 naik menjadi 54 hotel dan tahun 2017 naik menjadi 60 hotel. Jumlah hotel yang ada rata-rata bintang 1 dan 2. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 20,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.2.2.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Sulit mendapatkan data kunjungan, kendala yang sampai saat ini masih sulit dipecahkan yaitu laporan data kunjungan dari situ cipondoh, situ bulakan dan hotel.
- b. Belum tertatanya pedagang kaki lima atau destinasi kuliner, penataan pedagang kaki lima tentu berdampak baik bagi kelangsungan aktivitas yang terjadi di tempat tersebut, beberapa diantaranya adalah mengurangi kemacetan serta menciptakan kenyamanan bagi pengunjung yang datang.
- c. Belum tersedianya lahan parkir yang memadai, kurangnya lahan parkir saat ini menjadi permasalahan utama dalam menunjang kegiatan pariwisata, jumlah destinasi pariwisata yang telah meningkat sangat tidak seimbang dengan lahan parkir yang ada saat ini.

- d. Belum adanya agenda event tahunan
- e. Belum adanya taman rekreasi
- f. Sebagai kota yang layak kunjung perlu adanya destinasi wisata taman bermain seperti Dufan dan Universal Studio yang belum dimiliki saat ini.
- g. Belum memiliki perahu wisata, Kota Tangerang terkenal dengan kearifan lokal festival Pehcun di kali Cisadane, dan pembangunan flying deck cisadane sebagai wisata alam yang kurang maksimal jika tidak dilengkapi dengan perahu pariwisata, dengan adanya perahu wisata maka wisata di kali cisadane dapat lebih dimaksimalkan lagi.
- h. Belum tersedianya bus pariwisata, destinasi pariwisata yang sangat menunjang saat ini perlu didukung dengan transportasi khusus pariwisata sehingga para pelancong luar daerah tidak kebingungan saat ingin berkunjung ke setiap destinasi pariwisata yang ada.
- i. Belum adanya resto apung, sama seperti Perahu wisata, resto apung juga perlu menjadi pelengkap agar destinasi flying deck cisadane lebih maksimal.
- j. Kurangnya pemanfaatan PIP secara maksimal, berdasarkan data kunjungan yang telah kami yang sedikit, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan PIP masih kurang maksimal
- k. Belum adanya home stay, tidak adanya home stay di kampung wisata
- l. Kawasan Kuliner Pasar Lama yang kumuh, kondisi bangunan yang sudah sangat tua, serta berdekatan dengan pasar membuat kawasan kuliner terlihat kumuh.

2. Solusi

- a. Memberikan penghargaan kepada pimpinan daerah serta hotel yang memberikan laporan data kunjungan tepat waktu, yang dimaksudkan untuk meningkatkan antusiasme para pihak terkait dengan berlomba-lomba mendapatkan citra yang baik bagi instansi mereka.
- b. Bekerjasama dengan pihak terkait seperti Dishub, komunitas UMKM, dan satpol PP dalam menertibkan para pedagang dengan melakukan penertiban serta pembinaan terhadap pedagang dan hanya memperbolehkan pedagang yang telah terdaftar di UMKM pemerintah Kota Tangerang saja yang boleh berjualan di tempat tersebut
- c. Membangun lahan parkir bertingkat
- d. Membuat agenda event tahunan

- e. Merangkul Investor untuk merealisasikan pembangun Taman Rekreasi di Kota Tangerang.
- f. Menyediakan Perahu Wisata
- g. Mengadakan bus Pariwisata yang dikhkususkan hanya untuk keperluan transportasi pariwisata dan pemberhentian hanya dilakukan di setiap destinasi pariwisata saja.
- h. Mendirikan resto apung disekitaran flying deck cisadane atau pinggir kali cisadane.
- i. Dengan segala perencanaan yang ada, diharapkan PIP menjadi pusat informasi serta pusat wisata souvenir dan halte bus pariwisata utama bagi para pengunjung pada saat ingin melakukan tour.
- j. Memberikan pembinaan terhadap masyarakat akan tata cara serta prosedur dalam mengadakan home stay.
- k. Merangkul instansi atau organisasi terkait untuk melakukan CSR (Corporate Sosial Responsibility) dalam hal peremajaan terhadap kawasan kuliner pasar lama tanpa merubah keaslian dari bangunan lama tersebut

4.2.3. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.12.474.993.766,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.708.955.200,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.3.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.717.373.096,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.161.506.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.5.346.779.969,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.488.391.700,00 yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.525.803.868,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.237.468.700,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.878.215.313,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.669.504.000,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program peningkatan produksi hasil peternakan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.2.146.142.770,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.87.929.800,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.860.678.750,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.64.155.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4.2.3.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.35. Capaian Indikator Program Pada Urusan Pertanian Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian	%	100,20	109,38	122,80	114,60	0,00	111,74
2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat Produktivitas Pertanian	%	98,04	20,19	182,40	279,73	0,00	136,91
3	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Pendistribusian Bibit Tanaman Buah	%	104,48	95,21	39,71	102,09	9,82	138,00
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Angka Prevalensi Penyakit Zoonosis	%	178,00	180,00	200,00	200,00	0,00	189,50

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
	Ternak								
5	Program Pening-katan Produksi Peternakan	Tingkat Produktivitas Peternakan	%	100,00	150,00	122,80	115,35	31,40	122,04
6	Program Pening-Katan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	%	100,00	109,80	160,00	126,67	25,68	124,12
7	Program Pening-Katan Penerapan Teknologi Peternakan	Tingkat Penerapan Teknologi Peternakan	%	0,00	100,00	100,00	100,00	17,50	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Tingkat Pemasaran Hasil Produksi Pertanian** diukur berdasarkan perbandingan antara Kenaikan hasil produksi tanaman pangan dan holtikultura yang dipasarkan dibagi Seluruh hasil produksi tanaman pangan dan holtikultura tahun (n-1) dikali 100%, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 111,74%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah. Realisasi pada tahun 2014 sebesar 5,01% dari target 5,00%; pada tahun 2015 sebesar 5,6% dari 5,00%; tahun 2016 sebesar 6,14% dari target 5,00%; tahun 2017 sebesar 5,73% dari target 5,00%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 0,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
2. **Indikator Tingkat Produktivitas Pertanian** diukur berdasarkan perbandingan antara (Besaran hasil provitas tanaman pangan dan holtikultura pada tahun ke-n) - (Besaran hasil provitas tanaman pangan dan holtikultura pada tahun ke-(n-1) dibagi Besaran hasil provitas tanaman pangan dan holtikultura pada tahun ke-(n-1) dikali 100%, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 136,91%. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana UPT Pertanian Terpadu. Realisasi pada tahun 2014 sebesar 2,00% dari target 2,04%; tahun 2015 sebesar 0,42% dari target 2,08%; tahun 2016 sebesar 3,65% dari target 2,13%; tahun 2017 sebesar 5,60% dari target 2,17%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I

tercapai 0,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

3. **Indikator Persentase Pendistribusian Bibit Tanaman** diukur berdasarkanbanyaknya bibit tanaman buah yang terdistribusi dibandingkan dengan banyaknya bibit tanaman buah yang seharusnya terdistribusi. Pendistribusian bibit tanaman di UPT Pertanian Terpadu, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 138,00%.Tanaman yang didistribusikan terdiri dari tanaman buah, tanaman toga, tanaman hias, tanaman penghijauan dan tanaman cabe. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan. Realisasi pada tahun 2014 sebesar 18,90% dari target 18,09%; tahun 2015 sebesar 18,09% dari target 19,00%; tahun 2016 sebesar 49,91% dari target 19,95%; tahun 2017 sebesar 21,39% dari target 20,95%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 98,20%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
4. **Indikator Angka Prevalensi Penyakit Zoonosis** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah angka prevalensi pada lokasi kasus dalam satu tahun dibagi 1 (satu) dikali 1, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 189,50%. Indikator ini mempunyai rumus capaian yang berbeda dari indikator-indikator yang lainnya. Sehingga jika dilihat dari realisasi dan pencapaian indikator tersebut dapat diartikan dengan kemampuan menekan kasus penyakit zoonosis sebanyak 100% jika terjadi 1 kasus di Kota Tangerang.Indikator ini dicapai melalui kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, Pengawasan perdagangan ternak antar daerah dan Penyuluhan Keswan dan Kesmavet. Realisai pada tahun 2014 terdapat 2 kasus zoonosis ; pada tahun 2015 terdapat 2 kasus zoonosis ; pada tahun 2016 tidak terdpat kasus zoonosis demikian pula pada tahun 2017 tidak terdapat kasus zoonosis. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 0,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
5. **Indikator Tingkat Produksivitas Peternakan** diukur berdasarkan perbandingan antara Nilai produktivitas ternak sasaran dalam 1 (satu) tahun dibagi Total produktivitas ternak dalam 5 (lima) tahun dikali 100%, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 122,04% telah mencapai target yang ditetapkan.Indikator ini dicapai melalui kegiatan pembibitan dan perawatan ternak, kegiatan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak dan kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan. Realisasi pada tahun 2014 sebesar 20% dari target 20%; pada tahun 2015 sebesar 30% dari target 20%;

tahun 2016 sebesar 24,56% dari target 20% dan tahun 2017 sebesar 23,07% dari target 20%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 31,40%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

6. **Indikator Tingkat Pemasaran Hasil Produksi Peternakan** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil produksi peternakan yang dipasarkan di wilayah Kota Tangerang dibagi jumlah hasil produksi peternakan yang dipasarkan dikali 100%, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 124,12%. Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Penyuluhan hasil pemasaran produksi peternakan. Realisasi pada tahun 2014 sebesar 25% dari target 25%; pada tahun 2015 sebesar 80% dari target 72,86%; tahun 2016 sebesar 80% target 50%; tahun 2017 sebesar 95% dari target 75%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 25,68 %. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
7. **Indikator Tingkat Penerapan Teknologi Peternakan** diukur berdasarkan perbandingan antara Banyaknya penerapan teknologi peternakan dibagi Banyaknya seluruh unit teknologi peternakan yang diterapkan dikali 100%, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%.Teknologi peternakan yang diterapkan berupa inseminasi buatan (IB), teknologi pemotongan di UPT RPH dan biogas yang berasal kotoran ternak. Indikator ini dicapai melalui kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana UPT RPH dan kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasarana UPT RPH. Realisasi pada tahun 2015 sebesar 25% dari target 25%; tahun 2016 sebesar 50% dari target 50%; tahun 2017 sebesar 75% dari target 75%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 17,50 %. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.2.3.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali setiap tahun kurang lebih 2-10% dari lahan baku sehingga mengakibatkan pengembangan pertanian terkendala.
- b. Adanya resistensi masyarakat terhadap polusi bau dampak dari limbah peternakan yang mengganggu lingkungan sekitar, sehingga menghambat berkembangannya sentra peternakan di Kota Tangerang.
- c. Struktur kegiatan di bidang pertanian sudah dibatasi karena Kota Tangerang merupakan wilayah perkotaan

2. Solusi

- a. Disusunnya regulasi yang mengatur alih fungsi lahan seperti LP2B (Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan) yang mampu meningkatkan dan mempertahankan lahan pertanian di Kota Tangerang.
- b. Melakukan sosialisasi penerapan teknologi pemeliharaan ternak dan lingkungan yang baik kepada peternak dan penanganan limbah peternakan menjadi pupuk kendang dan teknologi yang dapat mengurangi polusi bau.
- c. Merubah strategi kegiatan pertanian menuju pertanian perkotaan yang mudah diterapkan oleh masyarakat perkotaan, seperti: metode vertikultur, tabulampot, hidroponik, dan memanfaatkan lahan pekarangan dengan tanaman yang produktif (cabe, terong, kangkung, bayam, caisim, pakcoy)

4.2.4. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.14.681.789.347,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.7.515.445.465,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.4.1 Program dan Kegiatan

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.454.325.050,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.469.000.000,00 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program peningkatan dan pengembangan ekspor selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.164.911.900,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.462.285.000,00 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.11.038.333.397,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.6.521.709.425,00 yang dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) kegiatan

4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.888.519.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.,00 yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan

5. Program Pemantauan Ketersediaan Harga

Program pemantauan ketersediaan harga selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.135.700.000,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.62.451.040,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4.2.4.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.36. Capaian Indikator Program Pada Urusan Perdagangan Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Tingkat Perlindungan Konsumen	%	100,00	100,00	159,45	460,97	49,17	205,10
2	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Cakupan Produksi Daerah Yang Dieksport Ke Luar Negeri	%	100,00	100,00	100,00	167,50	0,00	116,88
3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Tingkat Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	%	100,00	100,00	267,02	100,00	0,00	141,75
4	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri	%	100,00	100,00	100,00	142,86	28,57	110,71
5	Program Pemantauan Ketersediaan Harga Dan Pasokan Pangan	Tingkat Pemantauan Ketersediaan Harga Dan Pasokan Pangan	%	0,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan Ketersediaan Pasar Tradisional Daerah Di Setiap Kecamatan	Pasar/ kec.	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Tingkat Pembinaan Pasar/Toko Modern Dan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
	Pasar Tradisional Daerah								

Sumber: Dinas Perindag Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Tingkat Perlindungan Konsumen** diukur berdasarkan perbandingan antara Banyaknya pelaku usaha, pasar, pasar modern, pasar tradisional yang dibina dibagi Jumlah pasar, pasar modern, pasat tradisional di Kota Tangerang dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 205,10%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 49,17%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Keberhasilan ini dikarenakan adanya sinergitas dari seluruh komponen yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya pada Bidang Perdagangan dalam rangka pengawasan barang dan jasa serta UPTD Metrologi Legal yang telah berhasil melaksanakan tugas pokoknya dalam rangka Pembinaan Teknis dan pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dengan keberhasilannya meraih Penghargaan dari Kementerian Perdagangan RI yang secara berturut-turut diraih dari tahun 2016 (Pasar Tertib Ukur untuk Pasar Sipon Kel. Cipondoh dan Pasar Kebon Besar di Kel. Kebon Besar Kec. Batu Ceper), serta Tahun 2017 yang meraih 2 Penghargaan , yaitu : Kota Tangerang sebagai Daerah Tertib Ukur dan 35 Pasar Tertib Ukur di Kota Tangerang.

2. **Indikator Cakupan Produksi Daerah Yang Diekspor Ke Luar Negeri** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah perusahaan yang mengikuti promosi perdagangan luar negeri dibagi Jumlah total perusahaan yang mengikuti promosi perdagangan luar negeri , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 116,88%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 0,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Keberhasilan indikator ini didukung oleh pembinaan yang berkesinambungan yang dilakukan terhadap para pengusaha ekspor impor dengan memberi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang terbaru dengan mendatangkan naras umber dari: Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Keuangan RI serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sehingga peengetahuan/informasi yang diberikan menjadi acuan bagi mereka dalam operasionalisasi pengembangan usahanya serta terbuka lebarnya media promosi

produk-produk pengusaha di Kota Tangerang melalui wadah pameran-pameran investasi dan promosi perdagangan luar negeri, antara lain melalui : Pameran Inacraf yang dilaksanakan di Jakarta serta Pameran-pameran lainnya di luar kota Jakarta.

3. **Indikator Tingkat Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang asongan yang menerima pembinaan dibagi Jumlah seluruh PKL dan pedagang asongan , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 141,75%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 0,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Keberhasilan program ini didukung oleh keinginan yang kuat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam membina dan menata para Pedagang Kaki Lima dan Asongan, sehingga para pedagang kaki lima dan asongan akan terlindungi dalam berusahaanya, aman karena tempat berusahaanya sudah sesuai dengan peruntukannya sehingga pendapatannya meningkat dan pusat-pusat perdagangan dan keramaian di Kota Tangerangpun tertib, bersih dan nyaman untuk investasi dan dikunjungi baik oleh masyarakatnya maupun oleh wisatawan/pengunjung dari luar Kota Tangerang.

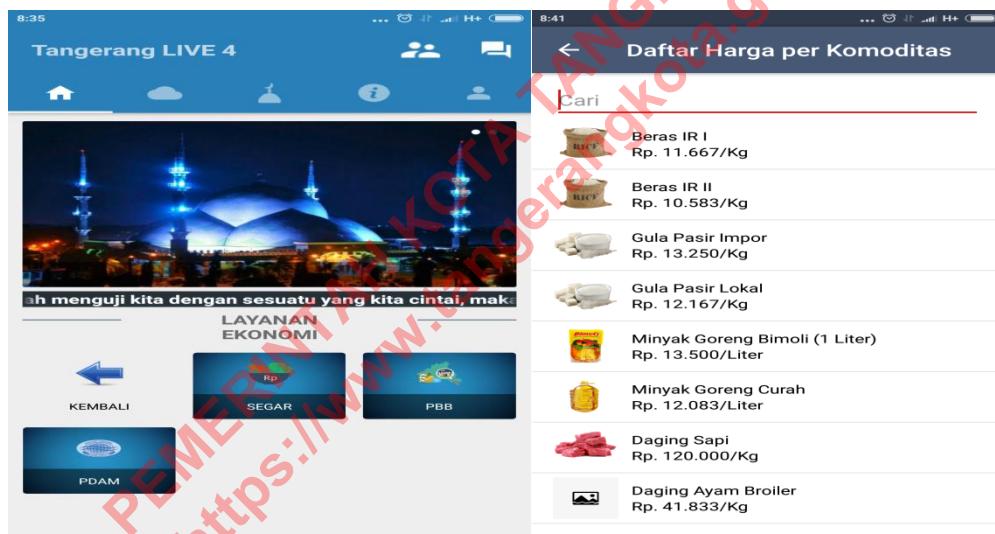
4. **Indikator Tingkat Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah laporan/dokumen pembinaan perdagangan dalam negeri dibagi Jumlah total dokumen pembinaan perdagangan dalam negeri , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 110,71%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 28,57%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya maupun pemerintah Kota Tangerang umumnya , antara lain : 1) berhasil dibangunnya 15 (lima belas) Pasar Lingkungan Keluaran dan 1 (satu) Pasar Lingkungan Kecamatan dalam rangka membuka akses yang lebih besar bagi masyarakat Kota Tangerang terhadap fasilitas sarana Perdagangan/Pasar, 2) Adanya 5 (lima) mobil pasar lingkungan sebagai media pasar berbelanja kebutuhan sayuran dan lauk pauk lainnya bagi masyarakat yang akses ke pasarnya terbatas karena lokasi yang jauh dan padat, 3) Pembinaan yang berkelanjutan terhadap masyarakat dan pengelola pasar tentang pentingnya pasar yang bersih menuju standar SNI, sehingga akan terciptanya budaya hidup bersih baik bagi

pedagangnya maupun pengunjung pasarnya untuk sama-sama menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam berbelanja di pasar.

5. **Indikator Tingkat Pemantauan Ketersediaan Harga Dan Pasokan Pangan** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah laporan ketersediaan harga dibagi Jumlah bulan /12 bulan, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 25,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Adapun data pemantauan ketersediaan harga dan pasokan pangan ini dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Kota Tangerang melalui aplikasi Segar pada informasi Layanan Ekonomi Tangerang Live. Dimana informasi data tersebut diperoleh dari laporan langsung harian petugas yang ada di 6 (enam) pasar di Kota Tangerang :1)Pasar Anyar, 2) Pasar Ramadhani, 3) Pasar Malabar, 4) Pasar Poris, 5) Pasar Bandeng dan 6) Pasar Jatiuwung .



Informasi ketersediaan Harga dan Pasokan Pangan pada Aplikasi Segar di Tangerang Live

6. **Indikator Cakupan Ketersediaan Pasar Tradisional Daerah Di Setiap Kecamatan** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah pasar tradisional di Kota Tangerang dibagi jumlah kecamatan di Kota Tangerang, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 0,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Dalam rangka mencapai target Ketersediaan Pasar Tradisional Daerah, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah membangun Pasar Lingkungan di Kota Tangerang pada tahun 2016-2017, dimana pasar yang dibangun

menggunakan sarana Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum) milik Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Adapun lokasi pasar yang telah dibangun pasar lingkungan tersebut berdasarkan usulan dari masyarakat setempat yang menyatakan kebutuhan dan ketersediaan lahan untuk dibangun Pasar Lingkungan Keluhanan di lokasinya masing-masing. Adapun Pasar Lingkungan yang berhasil dibangun sebagai berikut :

No.	Tahun	Lokasi/Kelurahan	Ket.
1.	2016	Kelurahan Benda	 Pasar Lingkungan Kelurahan Larangan Utara
2.		Kelurahan Kunciran Indah	
3.		Kelurahan Larangan Utara	
4.		Kelurahan Periuk	
5.		Kelurahan Manis Jaya	
1.	2017	Kelurahan Cipondoh Indah	 Peresmian Pasar Lingkungan Kelurahan Cimone oleh Bapak Walikota Tangerang
2.		Kelurahan Cimone	
3.		Kelurahan Cibodas Baru	
4.		Kelurahan Sangiang Jaya	
5.		Kelurahan Gebang Raya	
6.		Kelurahan Nambo Jaya	
7.		Kelurahan Nusa Jaya	
8.		Kel. Pabuaran Tumpeng	
9.		Kelurahan Pondok Bahar	
10.		Kelurahan Batu Ceper	

7. **Indikator Tingkat Pembinaan Pasar/Toko Modern Dan Pasar Tradisional Daerah** diukur berdasarkan perbandingan antara Jumlah pasar/toko modern dan pasar tradisional yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah seluruh pasar/toko modern dan tradisional di Kota Tangerang , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 100,00%. Untuk capaian indikator pada tahun 2018 sampai dengan Triwulan I tercapai 0,00%. dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh adanya sinergitas antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang dengan Kementerian Perdagangan RI Jakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan PD Pasar Kota Tangerang. Pembinaan yang dilakukan antara lain melalui kegiatan monitoring dan pendataan langsung ke Pasar dan Toko modern, termasuk pada saat menjelang bulan puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Natal.

4.2.4.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Kurangnya jumlah tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaksana pada bidang perdagangan sebanyak 3 (tiga) orang untuk 3 (tiga) seksi yaitu ; perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta bina pasar dan distribusi sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sangat dirasakan kurang optimal.
- b. Masih rendahnya kesadaran dari para pelaku usaha/pengusahakhususnya pengusaha ekspor/impor untuk memberikan laporan secara berkala tentang kegiatan usahanya sehingga kami kurang mempunyai informasi dan data yang memadai tentang jumlah pelaku ekspor dan impor di Kota Tangerang.

2. Solusi

- a. Memberdayakan Tenaga Harian Lepas (THL) yang berjumlah 3 (tiga) orang,
- b. Mengkaryakan kembali tenaga mantan pelaksana (pensiunan ASN bidang perdagangan) yang berjumlah 1 (satu) orang, namun secara keseluruhan tidak maksimal mengingat keterbatasan yang dimiliki.
- c. Melakukan pembinaan yang berkala terhadap para pengusaha, diantaranya Pembinaan Kelola Tertib administrasi ekspor impor bagi 200 pengusa ekspor impor di Kota Tangerang. Melalui media ini diharapkan tingkat pengetahuan, wawasan dan data pengusaha ekspor impor terhimpun dan akurat terhadap kebijakan prosedur dan dokumen ekspor impor.

4.2.5. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian selama tahun 2014-2017 dapat direalisasikan sebesar Rp.12.527.383.239,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.6.786.735.720,00.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.5.1 Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.668.050.500,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.180.775.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program pengembangan industri kecil dan menengah selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.3.058.068.109,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.1.594.214.000,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program peningkatan kemampuan teknologi industri selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.469.390.322,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.494.514.000,00 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan

4. Program Penataan Struktur Industri

Program penataan struktur industri selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.1.011.059.834,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.622.475.000,00 yang dilaksanakan melalui 4 (tiga) kegiatan

5. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial selama tahun 2014-2017 dapat terealisasi sebesar Rp.198.340.400,00 dan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp.78.828.000,00 yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan

4.2.5.2 Capaian Kinerja

Tabel 4.37. Capaian Indikator Program Pada Urusan Perindustrian Tahun 2014-2018

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014-2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
1	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Tingkat Kapasitas Sistem Produksi	%	100,00	100,00	100,00	123,36	0,00	105,84
2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Tingkat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	100,00	100,00	100,00	191,30	37,37	122,83
3	Program Peningkatan kemampuan Teknologi Industri	Tingkat Kemampuan Teknologi Industri	%	100,00	100,00	100,00	217,68	55,29	129,42
4	Program Penataan Struktur Industri	Tingkat Penataan Struktur Industri	%	100,00	100,00	100,00	110,00	32,00	102,50
5	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Tingkat Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	%	100,00	100,00	100,00	276,25	50,00	144,06

No	Program	Indikator Program		Tahun					Capai an 2014- 2017
		Uraian	Satu an	2014	2015	2016	2017	2018 (s.d Maret)	
	Potensial								

Sumber: Dinas Perindag Kota Tangerang, Tahun 2018

1. **Indikator Tingkat Kapasitas IPTEK Sistem Produksi** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah perusahaan yang mengikuti pembinaan dibagi Jumlah industri menengah besar, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 105,84%, adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 0,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
2. **Indikator Tingkat Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM)** diukur berdasarkan perbandingan antara banyaknya industri kecil yang mengikuti pelatihan dibagi jumlah industri kecil , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 122,83%, adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 37,37% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
3. **Indikator Tingkat Kemampuan Teknologi Industri** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah IKM yang mengikuti pelatihan ISO, SNI,dan Desain Kemasan dibagi jumlah industri , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 129,42%, adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 55,29% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
4. **Indikator Tingkat Penataan Struktur Industri** diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah data IKM yang dilatih dibagi jumlah industri kecil menengah, dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 102,50%, adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 32,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.
5. **Indikator Tingkat Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial** diukur berdasarkan perbandingan antara dibagi , dengan tingkat capaian indikator tahun 2014-2017 sebesar 144,06%, adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar 50,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan tercapai realisasi sebesar 100,00%.

4.2.5.3 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Untuk pengawasan industri yang menjadi domain bidang industry adalah pengawasan penerapan standar nasional indonesia (SNI). Namun kita belum bisa maksimal melaksanakan pengawasan SNI Wajib tersebut mengingat sampai saat ini belum memiliki petugas pengawas standarisasi industri (PPSI) dan PPNS Industri.
- b. Dalam hal Data Industri, data yang dipergunakan adalah data hasil survey tahun 2011 sehingga kurang update mengingat banyaknya industry baru yang hadir dan industry yang pindah/berhenti produksi.
- c. Terkait industri kecil/industri rumah tangga sebagian besar belum memiliki PIRT mengingat untuk mengurus PIRT persyaratan masih mewajibkan IMB, PBB dan persyaratan legal lainnya yang sulit dipenuhi industry kecil rumahan.
- d. Kegiatan untuk industry logam, mesin dan elektronika masih terbatas , mengingat anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas IKM disektor tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar.
- e. Kurangnya sumber daya manusia (pegawai ASN) khususnya untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan.

2. Solusi

- a. Terkait Pengawasan Industri di Kota Tangerang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang telah melakukan upaya melalui dibentuknya Tim Pengawasan dan Pengendalian Industri yang bersinergi dengan Kepolisian RI, BPOM Prov. Banten, LPPOM MUI Banten, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan. Kedepan (Anggaran Perubahan 2018) Tim ini akan ditambah dengan Petugas Pengawas Standarisasi Industri (PPSI) dari Provinsi Banten.
- b. Mengenai kurang updatenya data industry, upaya yang sedang dilakukan oleh kami yaitu membentuk Tim Surveyor untuk pendataan industri di Kota Tangerang yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang yang berhasil kami rekrut dari 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang dan Tim Pengelola data sebanyak 9 orang mereka bekerja selama 25 hari.
- c. Terkait industri kecil/industri rumah tangga yang belum memiliki PIRT kami telah melakukan berbagai upaya, antara lain :
 - Pembinaan dengan memberikan bantuan pengetahuan tentang pentingnya PIRT dengan narasumber dari Dinas Kesehatan, melalui media ini pula diharapkan

adanya kesempatan dan kemudahan persyaratan dari Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan untuk memberikan PIRT gratis atau tumbuhnya kesadaran dan kemandirian dari peserta untuk mendaftarkan dan membiayai sendiri / mandiri pembuatan sertifikat pelatihan dan ijin PIRT.

- Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ijin PIRT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah gratis dengan syarat sebelumnya telah memiliki sertifikat pelatihan PIRT dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- d. Terkait terbatasnya Kegiatan untuk industri logam, mesin dan elektronika, kami telah mengusulkan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas IKM disektor tersebut pada Anggaran Tahun 2019 .
- e. Terkait Kurangnya sumber daya manusia (pegawai ASN) khususnya untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan kami melakukan sinergitas baik dengan Kementerian Perindustrian RI maupun dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dengan meminta personilnya sebagai narasumber/ Pengawas dalam kegiatan-kegiatan pembinaan yang kami lakukan, namun kedepan kami mengarapkan Pemerintah Kota Tangerang melalui BKPSDM untuk membuka kesempatan pada ASN terbaik Kota Tangerang untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagai Pegawai Pengawas Standarisasi Industri (PPSI) dan PPNS Industri.

4.3 CAPAIAN SASARAN RPJMD KOTA TANGERANG

Capaian Indikator Sasaran Misi kurun waktu 2014 – 2017 dan triwulan I tahun 2018 disajikan dalam tabel 4.38 dibawah ini.

Capaian indikator sasaran misi selama 4 (empat) tahun perioide tahun 2014 – 2018 secara umum rata-rata mencapai 100,00% atau lebih, untuk capaian indikator sasaran misi sampai dengan triwulan I tahun 2018 terealisasi bervariasi antara 0,00% s/d 100,00% dan sampai akhir tahun 2018 diperkirakan seluruh indikator sasaran misi terealisasi capaian sebesar 100,00%.

Dengan demikian sampai akhir RPJMD 2014-2018 seluruh indikator sasaran misi diperkirakan dapat terealisasi capaian rata-rata sebesar 100,00%.

Tabel 4.38. Capaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018

No.	Sasaran Misi	Indikator Sasaran Misi	Satuan	Tahun					Capai An 2014-2017
				2014	2015	2016	2017	2018 (S.D Maret)	
1.1.1	Terwujudnya Penataan Pertanahan Yang Berkualitas	Luas Lahan Bersertifikat (Rasio Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Total Jumlah Luas Lahan Yang Seharusnya Bersertifikat)	%	100,00	100,00	110,21	112,39	39,34	105,65
		Penyelesaian Kasus Tanah Negara (Rasio Jumlah Kasus Tanah Negara Yang Diselesaikan Terhadap Jumlah Kasus Tanah Negara Yang Terdaftar)	% Per Ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	100,00
1.1.2	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Prima	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran Dan Akta Kematian	%	94,93	98,89	98,90	105,38	98,29	105,38
1.1.3	Terwujudnya Sistem Dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Responsif, Komunikatif; Koordinatif, Integratif, Sederhana Dan Sinergis	Nilai/Skor Kiner ja Penyeleng garaan Pemerintahan Daerah	Poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada SKPD Pelayanan Publik	%	100,00	100,00	100,00	100,88	0,00	100,22
		Raperda Yang Disetujui DPRD Tahun Berkenan (Proporsi Jumlah Raperda Yang Disetujui DPRD Menjadi Perda Terhadap Jumlah Raperda Yang Diusulkan)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1.1.4	Terwujudnya Peningkatan	Jumlah Pendapatan	Rp. Tri	106,32	111,19	107,44	108,41	20,04	108,34

No.	Sasaran Misi	Indikator Sasaran Misi	Satuan	Tahun					Capai An 2014-2017
				2014	2015	2016	2017	2018 (S.D Maret)	
1.1.4	Kapasitas, Sistem Manajemen Dan Administrasi Keuangan Dan Aset Yang Transparan Dan Akuntabel	Daerah	liun						
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. Tri liun	116,05	125,83	110,33	121,92	19,26	118,54
		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	%	109,15	113,17	102,69	112,46	96,10	109,37
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP / WD P/ TMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.5	Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Yang Berkualitas Dan Akuntabel	Persentase Hasil Temuan Yang Di Tindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00
		Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase SKPD/PD Yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal B	%				100,00	100,00	100,00
1.1.6	Terwujudnya SDM Aparatur Yang Profesional Yang Didukung Dengan Manajemen Dan Administrasi Kepegawai an Yang Berkualitas	Nilai Rata-Rata Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Poin	-	-	100,00	101,18	50,00	100,59
		Jumlah Pegawai Yang Terkena Hukuman Disiplin	Orang	100,00	100,00	100,00	133,33	0,00	108,33
1.1.7	Terwujudnya Statistik Dan Persandian Yang Berkualitas	Presentase Publikasi Data Statistik Daerah Berbasis Aplikasi	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran Misi	Indikator Sasaran Misi	Satuan	Tahun					Capai An 2014-2017
				2014	2015	2016	2017	2018 (S.D Maret)	
		Persentase Penggunaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.8	Terwujudnya Perencanaan Serta Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Yang Berkualitas	Persentase Keselarasan RKP Dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Keselarasan Renstra SKPD Dengan Renja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Keselarasan Renja SKPD Dan RKP D	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Presentasi Usulan Masyarakat Yang Diakomodir (RKP D)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan	% Per Tah un	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Indikator Sasaran Yang Tercapai	%	100,00	100,00	100,00	101,14	0,00	100,28
		Persentase Output Kegiatan Yang Tercapai	%	100,00	100,00	100,00	103,37	0,00	100,84
1.1.9	Terwujudnya Kearsipan Yang Berkualitas	Persentase SKPD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	%	100,00	100,00	100,00	125,00	100,00	106,25
1.2.1	Terwujudnya Pendayagunaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi Yang Efektif, Efisien,	Tingkat Pelayanan Publik Yang Menggunakan Media Informasi Berbasis Teknologi Informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran Misi	Indikator Sasaran Misi	Satuan	Tahun					Capai An 2014-2017
				2014	2015	2016	2017	2018 (S.D Maret)	
	Terintegrasi, Terstandarisasi Dan Memadai Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Integrasi Sistem Informasi Dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1	Terwujudnya Keberdayaan UMKM Dan Koperasi Sebagai Pendukung Perekonomian Berbasis Sumberdaya Lokal	Persentase UMKM Aktif	% Per Ta hun	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Persentase Koperasi Aktif	%	110,64	100,34	89,62	126,90	24,88	106,87
2.1.2	Terwujudnya Peningkatan Penanaman Modal (Investasi), Perijinan Serta Iklim Investasi Yang Kondusif	Jumlah Penanaman Modal (Investasi)	Rp. Tri liun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tingkat Pelayanan Waktu Pengurusan Perizinan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.3	Terwujudnya Ketahanan Pangan Yang Didukung Ketersediaan Produk Pertanian Dan Perikanan Serta Distribusi Pangan Yang Memadai Dan Berkualitas	Tingkat Keterse-Dian, Cadangan, Distribusi, Akses, Pengane karag am An, Keamanan, Dan Penanganan Kerawanan Pangan	%				184,67	100,00	100,00
		Produksi Pertanian :							
		Produksi Padi	Ton	100,00	100,00	100,00	100,12	2,19	100,03
		Produksi Sayuran	Ton	100,00	100,00	100,10	100,27	21,12	100,09
		Produksi Buah-Buahan	Ton	100,00	100,00	129,82	185,05	41,74	128,72
		Produksi Tanaman Bio Farmaka	Kg	100,00	100,00	100,00	121,78	5,75	105,45
		Produksi Daging	Ton	100,00	100,00	100,00	131,69	22,31	107,92
2.1.4	Terwujudnya Kepariwisata	Jumlah Kunjungan	Orang	125,56	148,22	155,14	306,87	76,73	183,95

No.	Sasaran Misi	Indikator Sasaran Misi	Satuan	Tahun					Capai An 2014-2017	
				2014	2015	2016	2017	2018 (S.D Maret)		
2.1.5	Terwujudnya Perdagangan Yang Berkualitas Serta Peningkatan Perlindungan Konsumen	Wisatawan								
		Rata-Rata Lama Kunjungan Wisatawan (Rata-Rata Lama Menginap Di Hotel)	Hari	100,00	100,00	102,86	100,51	25,12	100,84	
2.1.6	Terwujudnya Industri Yang Maju Serta Peningkatan Kapasitas Industri Kecil Dan Menengah	Percentase Alat Ukur Yang Terstandar	%				102,86	71,48	102,86	
		Rasio Pasar Tradisional Yang Modern, Bersih Dan Sehat Terhadap Total Jumlah Pasar	%	100,00	100,00	100,00	100,65	97,50	100,16	
3.1.1	Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau Bermutu Dan Berdaya Saing Yang Berbasis Kompetensi Dan Berorientasi Pada Kebutuhan Pembangunan	Percentase Industri Yang Memiliki Standarisasi	%	100,00	100,00	110,96	121,67	34,17	108,16	
		Nilai PDRB Sektor Industri (ADHK)	Rp. Mil yar	100,00	100,00	114,85	112,39	23,25	106,81	
		Percentase IKM Memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui PIRT Dan Halal	%	378,57	128,57	124,74	174,91	50,00	201,70	
3.1.2		Indeks Pendidikan	Point	100,00	100,00	100,06	101,80	101,50	100,46	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	100,00	100,00	101,62	103,27	102,93	101,22	
		Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	99,74	100,00	
3.1.3		Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun	%	100,00	100,00	101,22	101,20	101,17	100,61	
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Dan Terjangkau	Indeks Kesehatan	Point	100,00	100,00	100,00	100,01	0,00	100,00		
	Angka Harapan Hidup	Tahun	100,00	100,00	100,01	100,00	0,00	100,00		
	Presentase Balita Gizi Buruk (BB/TB)	%	100,00	100,00	100,00	216,67	189,58	129,17		
3.1.3	Terwujudnya Peningkatan Upaya	Indeks Pembangunan Gender	Point	100,00	100,00	99,87	99,75	0,00	99,90	

No.	Sasaran Misi	Indikator Sasaran Misi	Satuan	Tahun					Capai An 2014-2017
				2014	2015	2016	2017	2018 (S.D Maret)	
3.1.4	Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender	Point	100,00	96,19	95,52	94,87	0,00	96,65
		Persentase Indikator Kota Layak Anak Yang Terpenuhi	%			100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.4	Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Norma Keluarga Kecil, Bahagia, Dan Sejahtera	Cakupan Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif (Prevalensi Peserta KB Aktif)	%	100,00	93,26	96,23	95,13	0,00	96,16
		Persentase Posyandu Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Proporsi Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I Terhadap Total Jumlah Keluarga Yang Ada	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.5	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Penanganan PMKS (Rasio Jumlah PMKS Yang Tertangani Terhadap Jumlah PMKS Yang Ada)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00
3.1.6	Terwujudnya Ketenagakerjaan Yang Berkualitas Dan Berbasis Keahlian Serta Berorientasi Pada Penciptaan Dan Perluasan Lapangan Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan (Tingkat Penempatan Tenaga Kerja)	%	101,67	101,56	101,47	102,50	82,89	101,80
		Jumlah Lowongan Kerja	Orang	100,08	101,31	100,05	100,02	60,65	100,36
3.1.7	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Dan	Cakupan Pelestarian Benda, Situs Dan Kawasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00

No.	Sasaran Misi	Indikator Sasaran Misi	Satuan	Tahun					Capai An 2014-2017
				2014	2015	2016	2017	2018 (S.D Maret)	
	Pelestarian Kebudayaaan Daerah	Cagar Budaya Daerah							
		Cakupan SDM, Organisasi, Pelestarian, Kajian, Fasilitasi, Gelar, Misi Dan Tempat Kesenian Dan Budaya	%	100,00	100,00	100,00	107,21	33,33	101,80
3.1.8	Terwujudnya Kepemudaan Dan Keolahragaan Yang Mandiri Dan Berprestasi	Prosentase Organisasi Pemuda Yang Meniliki Sertifikat Standar Mutu Organisasi Kepemudaan	%	0,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Prosentase Organisasi Olahraga Yang Memiliki Sertifikat Standar Mutu Organisasi Olahraga	%	0,0	100,00	100,00	106,67	100,00	102,22
		Jumlah Altet Berprestasi Tingkat Provinsi	Orang	100,00	100,00	100,00	158,82	45,23	152,94
3.1.9	Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesatuan, Kebangsaan, Kepolitanan Dan Hukum	Tingkat Penyelesaian Konflik SARA	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Tingkat Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
3.1.10	Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Yang Berbasis Pada Kebutuhan Dasar Dan Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1.11	Terwujudnya Peningkatan Kesadaran Dan Kegemaran Membaca	Jumlah Kunjungan Masyarakat Ke Perpustakaan Daerah	Orang	100,00	100,00	117,52	112,68	113,51	107,55

No.	Sasaran Misi	Indikator Sasaran Misi	Satuan	Tahun					Capai An 2014-2017
				2014	2015	2016	2017	2018 (S.D Maret)	
	Masyarakat								
4.1.1	Terwujudnya Pengendalian Banjir Dan Genangan Yang Memadai	Luas Genangan Dan Banjir	Ha	100,00	100,00	100,00	100,00	101,74	100,00
		Luas Genangan	Ha	100,00	100,00	100,00	100,00	101,74	100,00
4.2.1	Terwujudnya Jaringan Jalan Dan Sarana Pendukungnya Yang Memadai Dan Berkualitas	Persentase Kondisi Jalan Kota Yang Baik Dan Sedang	%	100,00	100,00	100,02	100,00	99,93	100,00
		Persentase Keterhubungan Pusat-Pusat Kegiatan Dan Pusat-Pusat Produksi Di Wilayah Kota	%	100,00	100,00	100,06	100,00	99,49	100,02
4.2.2	Terwujudnya Sistem Dan Manajemen Pelayanan Transportasi Perkotaan Yang Modern Dan Terpadu Yang Didukung Oleh Teknologi Informasi Yang Canggih Dan Memadai	Persentase Kemacetan Yang Tertangani	%	100,15	100,00	100,00	102,28	97,55	100,00
		Jumlah Koridor Angkutan Umum Masal Yang Beroperasi	Koridor			100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.1	Terwujudnya Peningkatan Mitigasi, Pencegahan, Pengendalian Dan Penanganan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00	100,00
		Jumlah Penanganan Korban Bencana	%	100,00	100,00	100,00	205	0,05	126,30
5.1.2	Terwujudnya Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Yang Bersih, Sehat, Aman, Dan Nyaman	Tingkat Ketersediaan Rumah	%	100,00	100,06	100,00	100,00	101,13	100,02
		Rumah Layak Huni (Proporsi Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap Total Jumlah Rumah Yang Ada)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	Ha	100,00	100,00	100,00	144,13	100,37	111,03

No.	Sasaran Misi	Indikator Sasaran Misi	Satuan	Tahun					Capai An 2014-2017
				2014	2015	2016	2017	2018 (S.D Maret)	
		Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum Yang Aman	%	100,00	100,00	100,00	99,61	100,38	99,90
		Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai	%	100,00	100,00	100,00	98,39	100,01	99,60
5.1.3	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Berkualitas	Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Berserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1.4	Terwujudnya Peningkatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Kategori Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(U, SB, B, C, K, SK, W)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Pengurangan Sampah Di Perkotaan	%	104,63	126,33	100,00	100,00	100,00	106,19

BAB 5

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Pasal 1 ayat 4 PP 3 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaannya. Tugas pembantuan terbagi menjadi tugas pembantuan yang diterima serta tugas pembantuan yang diberikan.

5.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Selama tahun anggaran 2014-2018 Pemerintah Kota Tangerang menerima berbagai program/kegiatan dari anggaran tugas pembantuan Pemerintah Pusat, dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima Tahun 2014,

Tahun 2014, Tugas Pembantuan Yang Diterima pada Bidang Kesehatan melalui Upaya kesehatan yang diselenggarakan melalui dana BOK adalah kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi dan merupakan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7.

Upaya kesehatan prioritas meliputi :

- MDG 1 : Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk
- MDG 4 : Upaya menurunkan angka kematian balita
- MDG 5 : Upaya menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua
- MDG 6 :
 - a. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS
 - b. Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan
 - c. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB

MDG 7 : Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak

Berikut beberapa kegiatan yang berdaya ungkit tinggi dalam rangka pencapaian target MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7. Pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, sesuai dengan hasil Lokakarya Mini Puskesmas :

Tabel 5.1 Tugas Pembantuan yang Diterima Tahun 2014

No	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1	Pendidikan gizi	<ul style="list-style-type: none">• PMT Penyuluhan• Penyuluhan gizi• Konseling ASI & MP-ASI	Ibu Bayi/Balita, Bumil, Bulin, Bufas, Buteki	Posyandu, CFC, Kelas Ibu, Rumah	Fokus MDG 1
2	Pelayanan gizi	<ul style="list-style-type: none">• Posyandu• Sweeping• Pemantauan status gizi• Survei	Ibu Bayi/Balita, Bumil	Posyandu, CFC, Kelas Ibu, Rumah	Fokus MDG 1
3	Tata laksana gizi	<ul style="list-style-type: none">• PMT Pemulihan Balita	Balita	Posyandu, CFC, Kelas Ibu, Rumah	Fokus MDG 1
4	Pelayanan Kesehatan Neonatus	<ul style="list-style-type: none">• Kunjungan Neonatus• Pemantauan neonatus risiko tinggi• Pelacakan kematian neonatal, termasuk otopsi verbal	Neonatus, neonatus risti	Posyandu, Rumah	Fokus MDG 4
5	Pelayanan Kesehatan Bayi	<ul style="list-style-type: none">• Posyandu• Sweeping• Deteksi dini risiko tinggi• Pemantauan Bayi risiko tinggi• Imunisasi	Bayi, Bayi risti, Ibu Bayi/Bayi Risti	Posyandu, Rumah	Fokus MDG 4
6	Pelayanan Kesehatan Balita	<ul style="list-style-type: none">• Posyandu• Sweeping• Pemberian Vit. A• Deteksi dini risiko tinggi• Pemantauan Balita risiko tinggi• Penemuan dan tata laksana kasus penyebab utama kematian balita (Pneumonia, Diare, Campak dan Malaria)• Imunisasi	Balita, Balita risti, Ibu Balita/Balita Risti	Posyandu, Rumah	Fokus MDG 4

No	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
7	Pelayanan kesehatan Ibu hamil (ANC)	<ul style="list-style-type: none"> • Posyandu • Sweeping • Deteksi dini risiko tinggi • PMT Bumil KEK • Pemantauan risiko tinggi • Kelas ibu hamil • Kunjungan rumah tunggu • Pelacakan kasus kematian ibu hamil, termasuk otopsi verbal • Kemitraan bidan dukun 	Bumil, Bumil Risti	Posyandu, Poskesdes/Polindes, Rumah, Kelas ibu, Rumah Tunggu	Fokus MDG 5
8	Pendampingan P4K	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan rumah • Penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bumil, Suami, Keluarga, • TOGA, TOMA, Kader, Dukun, Kelompok Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah • Posyandu, RT/RW, Kelurahan, Dusun, Desa 	Fokus MDG 5
9	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	<ul style="list-style-type: none"> • Inisiasi Menyusu Dini (IMD) • Pelacakan kasus kematian ibu bersalin, termasuk otopsi verbal 	Bulin	Posyandu, Poskesdes/Polindes, Rumah	Fokus MDG 5
10	Pelayanan kesehatan ibu nifas	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan ibu nifas • Pemantauan ibu nifas risiko tinggi • Pelacakan kasus kematian ibu nifas, termasuk otopsi verbal 	Bufas	Posyandu, Poskesdes/Polindes, Rumah	Fokus MDG 5
11	Pelayanan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan dan konseling KB dan kesehatan reproduksi 	Pasangan Usia Subur, Remaja	Posyandu, Balai desa, Majlis Ta'lim, Sekolah	Fokus MDG 5
12	Mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi (ABAT, Pemakaian Kondom, Pengetahuan komprehensif HIV/AIDS, dll) • Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit HIV / AIDS dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat 	Penderita, Masyarakat kelompok berisiko tinggi, termasuk Remaja, Bumil , Anak.	Posyandu, Poskesdes, Lokalisasi, Lokasi Risti, Balai desa.	Fokus MDG 6

No	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
13	Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV /AIDS bagi semua yang membutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (HIV/AIDS, IMS) Sero surveilans bagi populasi risiko tinggi (serologi, mass blood survey, blood survey, dll) Pendistribusian pemakaian kondom bagi populasi risiko tinggi 	Penderita, Masyarakat kelompok berisiko tinggi, termasuk Remaja, Bumil , Anak.	Posyandu, Poskesdes, Lokalisasi, Lokasi Risti, Lokalisasi khusus (lapas), Balai desa.	Fokus MDG 6
14	Mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB	<ul style="list-style-type: none"> Promosi (etika batuk, PHBS, dan lain-lain) Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (TB dan Malaria) Spot Survei terhadap tempat perindukan vector Pengendalian vector Pendistribusian kelambu kepada kelompok berisiko 	Penderita, Masyarakat kelompok berisiko tinggi	Posyandu, Poskesdes, Lokalisasi, Lokasi Risti, Lokalisasi khusus (lapas), Balai desa.	Fokus MDG 6
15	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan penyusunan rencana kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Pemicuan stop buang air sembarangan (pemberdayaan masyarakat) Pemantauan kualitas air minum 	Masyarakat	Rumah	Fokus MDG 7
16	Pendataan	<ul style="list-style-type: none"> Pendataan sasaran Pendataan PHBS Pendataan risiko 	Masyarakat, institusi, tempat-tempat umum, tempat risiko tinggi kesehatan	Institusi, tempat-tempat umum, tempat risiko tinggi kesehatan	

No	Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
17	Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none">• Penyuluhan kelompok• Konseling• Penyebarluasan informasi melalui media (massa dan elektronik)	Masyarakat	Posyandu, Puskesmas, Institusi, tempat-tempat umum, tempat risiko tinggi kesehatan	
18	Refreshing Kader Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Pertemuan penyegaran teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif	Masyarakat	Balai desa, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes.	
19	Kegiatan lain yang berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian MDGs sesuai dengan kondisi lokal/setempat				

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Tahun 2014

Di samping kegiatan upaya kesehatan di Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai prioritas di atas, Puskesmas dapat melakukan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif lainnya, mengacu pada upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan sesuai Kebijakan Dasar Puskesmas Nomor 128/MENKES/SK/II/2004. Perencanaan kegiatan harus melalui mekanisme lokakarya mini, memperhatikan kearifan lokal serta searah dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Upaya kesehatan lainnya meliputi :

- 1) Pengendalian Penyakit Menular;
- 2) Promosi Kesehatan;
- 3) Penyehatan Lingkungan;
- 4) Kesehatan Ibu Dan Anak Serta KB;
- 5) Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 6) Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- 7) Kesehatan Kerja;
- 8) Kesehatan Olahraga;
- 9) Kesehatan Tradisional;

- 10) Kesehatan Sekolah;
- 11) Kesehatan Gigi Dan Mulut;
- 12) Kesehatan Haji;
- 13) Kesehatan Indera;
- 14) Kesehatan Jiwa;
- 15) Kesehatan Lanjut Usia;
- 16) Perawatan Kesehatan Masyarakat;
- 17) Kesehatan Matra;
- 18) Upaya kesehatan lainnya bersifat lokal spesifik.

Untuk dapat terselenggaranya upaya kesehatan di Puskesmas secara optimal, tepat sasaran, efisien, dan efektif perlu dilaksanakan manajemen Puskesmas yang meliputi :

a. Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1)

- 1) Kegiatan perencanaan tingkat Puskesmas meliputi penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau *Plan of Action* (POA) Tahunan, dan POA Bulanan. Perencanaan dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh sumber anggaran, baik dari APBD, BOK maupun sumber anggaran lainnya.
- 2) Setelah RUK disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas menyusun RPK/POA Tahunan pada awal tahun berjalan. RPK/POA Tahunan merupakan dokumen perencanaan Puskesmas yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target yang akan dicapai selama satu tahun di wilayah kerjanya.
- 3) RPK/POA Tahunan dibahas pada forum Lokakarya Mini Puskesmas yang dilaksanakan secara berkala untuk menghasilkan POA Bulanan. Rencana kegiatan pada POA Bulanan dapat berbeda dengan rencana kegiatan pada RPK/POA Tahunan, karena disesuaikan dengan kebijakan dan atau kondisi/permasalahan terkini yang terpantau melalui PWS (Pemantauan Wilayah Setempat).

b. Penggerakan Pelaksanaan (P2) melalui Lokakarya Mini Puskesmas

- 1) Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan (P2) dilakukan secara berkala melalui Lokakarya Mini. Lokmin Puskesmas terdiri dari Lokmin Bulanan (lintas program internal Puskesmas) dan Lokmin Tribulanan (lintas sektor).

- 2) Pada forum Lokmin Bulanan dilakukan pembahasan mengenai kebijakan terkini dan hasil analisis PWS yang dilakukan lintas program. Hasil Lokmin digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bulan berikutnya, yang dituangkan dalam POA Bulanan.
 - 3) Pelaksanaan Lokmin Bulanan idealnya diselenggarakan setiap bulan. Pada daerah dengan kondisi geografis sulit, dimungkinkan waktu pelaksanaan Lokmin disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas, minimal 4 kali dalam setahun. Lokmin Bulanan melibatkan seluruh jajaran Puskesmas dan jaringannya serta Bidan di Desa dan PLKB.
 - 4) Pelaksanaan Lokmin Tribulanan idealnya diselenggarakan setiap 3 bulan. Pada daerah dengan kondisi geografis sulit, dimungkinkan waktu pelaksanaan Lokmin Tribulanan disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Lokmin Tribulanan melibatkan lintas sektor di wilayah kerja Puskesmas, seperti kepala desa/lurah, camat, TP PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat/agama, sektor pendidikan, sektor pertanian, dan lain-lain.
- c. Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)
- 1) Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan atau administrasi pengelolaan keuangan di lapangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tertib administrasi termasuk untuk mengatasi hambatan yang ditemui.
 - 2) Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan melalui kegiatan supervisi/bimbingan teknis/pembinaan ke lapangan (Pustu, Poskesdes, Polindes, UKBM dan tempat lain) pada saat kegiatan maupun di luar kegiatan yang dilakukan di masyarakat.
 - 3) Kegiatan dapat dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tribulanan/semesteran sesuai dengan kebutuhan program.
 - 4) Untuk melakukan penilaian keberhasilan pencapaian program dan laporan keuangan maka Puskesmas dapat melakukan penilaian secara periodik yang dapat terintegrasi dengan rapat Lokakarya Mini di Puskesmas.
 - 5) Hasil penilaian berupa laporan secara periodik dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan format yang disepakati.

5.1.2. Tugas Pembantuan Yang Diterima Tahun 2015,

Pada tahun 2015, Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp.3.035.303.000,00 dengan realisasi anggarannya sebesar Rp.2.932.201.250,00 atau Sebesar 96,60%.

Dinas Kesehatan memperoleh dana dukungan manajemen BOK yang dipergunakan untuk kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi) tingkat kabupaten/kota yang melibatkan Puskesmas, lintas program, lintas sektor;
2. Penyelenggaraan rapat teknis pengelolaan BOK;
3. Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke Puskesmas dan jaringannya serta UKBM;
4. Pelaksanaan konsultasi/koordinasi teknis program BOK ke provinsi;
5. Pelaksanaan konsultasi/rekonsiliasi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPbN); dan
6. Pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan BOK ke pusat (berdasarkan undangan).

Puskesmas

Pada tahun 2015 Proporsi pemanfaatan dana BOK di Puskesmas diatur sebagai berikut:

1. Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan Prioritas melalui berbagai kegiatan yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian tujuan MDGs bidang kesehatan
2. Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Program Kesehatan lainnya dan Manajemen Puskesmas.

Rincian ruang lingkup program kesehatan dan manajemen Puskesmas meliputi:

Upaya Kesehatan Prioritas

Upaya kesehatan yang diselenggarakan melalui dana BOK adalah kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi dan merupakan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7 sebagai berikut:

MDG 1	Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk
MDG 4	Upaya menurunkan angka kematian balita

MDG 5	Upaya menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua
MDG 6	a. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS
	b. Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan
	c. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB
MDG 7	Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak

Adapun kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan adalah:

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan
1	Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)	Pelayanan Antenatal bagi Ibu Hamil (Antenatal Care/ANC)
		Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin (bulin)
		Pelayanan kesehatan ibu nifas (bufas)
		Pelayanan KB
		Pelayanan kesehatan neonatus
		Pelayanan kesehatan bayi
2	Pelayanan Gizi	Pendidikan dan Perbaikan Gizi
		Penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk
3	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS
		Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria dan Tuberculosis (TB)
4	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan akses masyarakat terhadap sumberair minum dan sanitasi dasar yang layak

Upaya Kesehatan Lainnya

Ruang lingkup kegiatan program kesehatan lainnya meliputi:

- a. UKM esensial di luar kegiatan prioritas MDGs berdaya ungkit tinggi antara lain pelaksanaan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dan tindak lanjutnya dalam UKS; kegiatan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin, penyuluhan gizi bagi pekerja perempuan termasuk kelompok resiko tinggi; senam nifas; pelaksanaan senam ibu hamil; pelaksanaan pemantauan kebugaran jasmani anak sekolah, remaja dan pekerja; pelaksanaan penyuluhan pemanfaatan tanaman obat keluarga
- b. Upaya kesehatan lainnya sesuai dengan UKM Pengembangan berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014; pelacakan kasus kematian ibu dan bayi; *autopsi verbal* kematian ibu dan bayi
- c. Penyegaran/*refreshing* kader kesehatan; dan
- d. Upaya kesehatan lainnya yang bersifat lokal spesifik.

Manajemen Puskesmas

Untuk dapat terselenggaranya upaya kesehatan di Puskesmas secara optimal, tepat sasaran, efisien, dan efektif perlu dilaksanakan manajemen Puskesmas yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan rapat lokakarya mini untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau *Plan of Action* (POA) Tahunan setelah Puskesmas menerima alokasi dana BOK dari kabupaten/kota. Proses penyusunan RPK melibatkan seluruh jajaran Puskesmas dan jaringannya;
- b. Penyelenggaraan rapat lokakarya mini bulanan atau tribulanan untuk membahas evaluasi kegiatan bulan sebelumnya dan menyusun rencana kegiatan bulan yang akan datang. Penyelenggaraan lokakarya mini bulanan melibatkan seluruh jajaran Puskesmas dan jaringannya, sedangkan penyelenggaraan lokakarya mini tribulanan yang membahas dukungan lintas sektoral untuk mengatasi berbagai masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi, melibatkan kepala desa, anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lintas sektor kecamatan;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat yang diperlukan di tingkat desa untuk membahas pelaksanaan program kesehatan di tingkat desa;
- d. Pelaksanaan pembinaan/supervisi kegiatan ke lapangan oleh kepala Puskesmas dan koordinator program/kegiatan; Pelaksanaan konsultasi, pengiriman laporan, menghadiri undangan dan keperluan lainnya terkait dengan BOK ke kabupaten/kota.

Tabel 5.2. Realisasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak Terserap

No	Jenis Kegiatan	Pagu (Rp)	Sisa (Rp)	Keterangan
1	Bantuan Operasional Untuk Puskesmas	2,585,303,000.00	24,516,750.00	
2	Dukungan Administrasi Kegiatan	222,540,000.00	39,955,000.00	Honor Operasional dan Output Kegiatan Bulan Januari – Maret tidak dicairkan
3	Perencanaan BOK	28,070,000.00	6,010,000.00	Sisa Belanja Jasa Profesi dan sisa pembelian Makan rapat
4	Monitoring Ke Puskesmas	28,800,000.00	-	
5	Pertemuan Koordinasi Program BOK	140,000,000.00	26,150,000.00	Sisa Belanja Jasa Profesi dan sisa pembelian Makan rapat

No	Jenis Kegiatan	Pagu (Rp)	Sisa (Rp)	Keterangan
6	Pembinaan Program BOK Puskesmas	19,210,000.00	2,430,000.00	Sisa Belanja Jasa Profesi dan sisa pembelian Makan rapat
7	Koordinasi Ke KPPN/KPKNL	3,000,000.00	3,000,000.00	Transport dalam Kota ke KPPN dan KPKNL tidak diserap
8	Koordinasi Ke Kanwil DJPB	3,120,000.00	1,040,000.00	Sisa Belanja Perjalanan Dinas
9	Koordinasi Ke Dinkes Provinsi	4,160,000.00	-	
10	Konsolidasi Keuangan ke Pusat	1,100,000.00	-	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Tahun 2018

5.1.3. Tugas Pembantuan Yang Diterima Tahun 2016,

Pada tahun 2016 kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang meliputi 1 (satu) program dan 1 (satu) Output kegiatan dengan alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp.1.747.786.000,00- (*Satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

5.1.4. Permasalahan dan Solusi

5.1.4.1 Permasalahan

Tahun 2014:

Bidang Kesehatan

Permasalahan dalam program Biaya Operasional Kesehatan yaitu

- a. Petunjuk Teknis BOK Tahun 2014 baru diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2014, sehingga bulan januari dan februari kegiatan yang berkaitan dengan dana BOK tidak dapat dilaksanakan yang berdampak pada tidak dapat diserapnya dana BOK secara maksimal.
- b. Penyaluran dana BOK yang diterima Puskesmas tidak tepat waktu dibandingkan dengan realisasi Pelaksanaan POA BOK Bulanan yang diajukan. Penyebab: Pengajuan SPU dan LPJ atas Pelaksanaan Kegiatan sebelumnya oleh Pengelola BOK Puskesmas Kepada Pengelola BOK Dinkes Kota Terlambat.

Tahun 2015 :

Bidang Kesehatan

Permasalahan dalam program Biaya Operasional Kesehatan yaitu:

- a. Petunjuk Teknis BOK Tahun 2015 baru diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2015, sehingga bulan januari, februari dan Maret kegiatan yang berkaitan dengan dana BOK tidak dapat dilaksanakan yang berdampak pada tidak dapat diserapnya dana BOK secara maksimal.
- b. Penyaluran dana BOK yang diterima Puskesmas tidak tepat waktu dibandingkan dengan realisasi Pelaksanaan POA BOK Bulanan yang diajukan. Penyebab: Pengajuan SPU dan LPJ atas Pelaksanaan Kegiatan sebelumnya oleh Pengelola BOK Puskesmas Kepada Pengelola BOK Dinkes Kota Terlambat.

Tahun 2016 :

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pertambahan tahun 2016, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan tugas pertambahan kegiatan yang disusun melalui Kementerian Dalam Negeri RI, tidak melalui koordinasi sehingga hal ini akan menyulitkan dalam pelaksanaan serta pengukuran capaian kinerja;
2. Dalam pelaksanaan rencana perubahan (cropping) informasi yang diperoleh sangat mendadak, sehingga hal ini mengakibatkan keraguan dalam pelaksanaannya;

Standar Harga yang ada dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan keadaan pada saat pelaksanaan kegiatan.

5.1.4.2. Solusi

Tahun 2014:

Bidang Kesehatan

Adapun upaya yang dilakukan tahun 2014, untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi ke Pengelola BOK Puskesmas.
2. Memperbaiki penatausahaan laporan keuangan.

Tahun 2014:

Bidang Kesehatan

Adapun upaya yang dilakukan tahun 2015, untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi ke Pengelola BOK Puskesmas.
2. Memperbaiki penatausahaan laporan keuangan.

Tahun 2016 :

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun upaya yang dilakukan, yaitu:

1. Dalam penyusunan anggaran tugas pembantuan untuk tahun-tahun berikutnya seyogyanya melibatkan Perangkat Daerah, sehingga pengalokasian;
2. Anggaran pada kegiatan-kegiatan yang ada merupakan kebutuhan real;
3. Pelaksanaan rencana perubahan (cropping), disarankan adanya pemberitahuan terlebih dahulu atau adanya jadual rencana dimaksud;
4. Untuk Standar Harga disarankan menyesuaikan pada daerah masing-masing.

5.2 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pada pelaksanaan tahun anggaran 2014-2018, Pemerintah Kota Tangerang tidak memberikan tugas pembantuan ke daerah bawahan hal ini dikarenakan Kota Tangerang tidak memiliki daerah bawahan. Organisasi terendah yang ada yaitu kecamatan dan kelurahan merupakan aparat Pemerintah Kota Tangerang.

BAB 6

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Pada Tahun 2014-2018, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Tangerang berupaya menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, dimana dibutuhkan suatu pemerintahan yang mampu melaksanakan penegakan hukum dan menciptakan ketertiban, serta dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 meliputi tugas sebagai berikut:

1. Kerjasama Antar Daerah;
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Koordinasi dengan Pihak Vertikal di Daerah;
4. Pembinaan Batas Wilayah;
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dalam menyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Kota Tangerang memperhatikan prinsip-prinsip yaitu: efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, pengertian kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam rangka melaksanakan tugas umum pemerintahan yang lebih baik, maka kerjasama dengan pihak atau instansi lain merupakan suatu hal yang mutlak.

Begitupun dengan Pemerintah Kota Tangerang, agar dapat menjalankan tugas umum pemerintahannya maka dapat dilaksanakan kerjasama antar daerah.

Pada tahun 2014-2018, Pemerintah Daerah Kota Tangerang telah melakukan kerjasama antar daerah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Kerjasama Antar Daerah Tahun 2014 -2018

No	Kerja Sama Antar Daerah	Jenis Kegiatan	Hasil Yang Dicapai	Tahun
1	2	3	4	5
1	Provinsi DKI Jakarta	Kerjasama Pembangunan	Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang	2014
2	Provinsi DKI Jakarta	Kerjasama Pembangunan	Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang	2015
3	Provinsi Banten	Kerjasama Pembangunan	Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang	2016
4	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan	Pelayanan Publik Kesehatan	Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal Lintas Batas	2016
5	Propinsi Banten	Pelayanan Kepegawaian	Penyelesaian Sk Pensiu Pns Atas Permintaan Sendiri Secara Dokumen Elektronik Bagi Pns Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	2016
6	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan	Pelayanan Publik Pendidikan	Pelayanan Pendidikan Lintas Batas	2016
7	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan	Pelayanan Publik Perhubungan	Pelayanan Perhubungan Lintas Batas	2016
8	Kota Bandung, Kabupaten Lebak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Belitung Timur, Kota Makasar, Kabupaten Lombok Barat, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Batam, Kota Malang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bangka, Kabupaten Badung, Kabupaten Sleman,	Komunikasi Dan Informatika	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	2016
9	Kabupaten Lombok Barat,	Komunikasi Dan Informatika	Implementasi Aplikasi Smart City	2016
10	Provinsi Banten	Kerjasama	Bantuan Keuangan	2017

No	Kerja Sama Antar Daerah	Jenis Kegiatan	Hasil Yang Dicapai	Tahun
		Pembangunan	Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang	
11	Kab Jepara, Kab Belitung Timur, Kab Bangka Selatan, Pemkot Balikpapan, Pemkab Pinrang, Kota Bandung	Komunikasi Dan Informatika	Implementasi Aplikasi Smart City	2017
12	Kabupaten Purworejo	Komunikasi Dan Informatika	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	2017
13	Provinsi Banten	Kerjasama Pembangunan	Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang	2018

Sumber: Bagian Pembangunan Setda Kota Tangerang, Tahun 2018

6.2 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, yang dimaksud dengan Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang dijalin oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2014-2018 sebagai berikut:

Tahun 2014

- a. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 - Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp.750.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
 - Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Dewan Kesenian Kota Tangerang (DKT) Tahun 2014 sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
 - Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp.8.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%

- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp.250.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Kerjasama Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Tahun 2014 sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Purna Paskibra Indonesia (PPI) Tahun 2014 sebesar Rp.150.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Tahun 2014 sebesar Rp.75.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Tahun 2014 sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Kerjasama Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Tahun 2014 sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Kontak Majlis Ta'lim (BKMT) Tahun 2014 sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 0,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum Komunikasi Ustadzah (FKU) Tahun 2014 sebesar Rp.200.000.000,00
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PPIH Tahun 2014 sebesar Rp.600.000.000,00

- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Majlis Ulama Indonesia Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp.750.000.000,00
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Tahun 2014 sebesar Rp.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar 0,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Tahun 2014 sebesar Rp.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar 0,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Mathlaul Anwar (MA) Tahun 2014 sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Nadhlatul Ulama (NU) Tahun 2014 sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Muhammadiyah Tahun 2014 sebesar Rp.150.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama (NU) Tahun 2014 sebesar Rp.75.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Yayasan Muslimin Indonesia (YASMI) Tahun 2014 sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2014 sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2014 sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PWI Tahun 2014 sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PWRI Tahun 2014 sebesar Rp1.00.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%

- b. Hibah dan Bantuan Sosial kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat
- Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada DKM Mesjid (135 DKM) Kota Tangerang Tahun 2014 dengan alokasi sebesar Rp.2.025.000.000,00 dan realisasi hibah diberikan kepada 93 DKM sebesar Rp.1.395.000.000,00
 - Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Musholla (150 musholla) se-Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp.1.500.000.000,00 dengan realisasi hibah diberikan kepada 107 musholla sebesar Rp.1.070.000.000,00
 - Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Majelis Ta'lim (230 majlis ta'lim) se-Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp.2.300.000.000,00 dengan realisasi hibah diberikan kepada 199 Majelis Ta'lim sebesar Rp.1.990.000.000,00
 - Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan se-Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp.294.000.000,00 dengan realisasi hibah sebesar 0,00%
 - Bantuan PNPM sebesar Rp.616.250.000,00 kepada 104 lembaga dengan realisasi sebesar 100,00%
 - Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.062.421.100,00 dengan realisasi sebesar 100,00%.

Tahun 2015

- a. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang Tahun 2015 sebesar Rp.875.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- b. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Dewan Kesenian Kota Tangerang (DKT) Tahun 2015 sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- c. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Tahun 2015 sebesar Rp.8.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%.
- d. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang Tahun 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%

- e. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Tangerang Tahun 2015 sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- f. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tangerang Tahun 2015 sebesar Rp.850.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- g. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum Pemuda Lintas Agama Tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- h. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) Tahun 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- i. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2015 sebesar Rp.765.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- j. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tahun 2015 sebesar Rp.150.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- k. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PPIH Tahun 2015 sebesar Rp.800.000.000,00 dengan realisasi 100,00%
- l. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Majlis Ulama Indonesia Kota Tangerang Tahun 2015 sebesar Rp.950.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%.
- m. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Tahun 2015 sebesar Rp.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- n. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Tahun 2015 sebesar Rp.700.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- o. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2015 sebesar Rp.125.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%

- p. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2015 sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- q. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Tahun 2015 sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- r. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Karang Taruna Tahun 2015 sebesar Rp.75.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%
- s. Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Bank Sampah Sungai Cisadane (Bangsa Suci) Tahun 2015 sebesar Rp.75.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100,00%.
- t. Hibah dan Bantuan Sosial kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
- u. Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada DKM Mesjid (117DKM) Kota Tangerang Tahun 2015 dengan alokasi sebesar Rp.1.755.000.000,00 dan realisasi hibah diberikan kepada 104 DKM sebesar Rp.1.560.000.000,00 dengan realisasi 89,00%
- v. Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Musholla (105 musholla) se-Kota Tangerang Tahun 2015 sebesar Rp.1.050.000.000,00 dengan realisasi 90,00% hibah diberikan kepada 94 musholla sebesar Rp.940.000.000,00
- w. Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Majelis Ta'lim (145 majlis ta'lim) se-Kota Tangerang Tahun 2015 sebesar Rp1.450.000.000,00 dengan realisasi 97,00% hibah diberikan kepada 140 Majelis Ta'lim sebesar Rp.1.400.000.000,00
- x. Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Pondok Pesantren (20 Pondok Pesantren) se-Kota Tangerang Tahun 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 dengan realisasi 95,00% hibah diberikan kepada 19 Pondok Pesantren sebesar Rp.475.000.000,00
- y. Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan se-Kota Tangerang Tahun 2015 sebesar Rp.4.853.500.000,00 dengan realisasi hibah sebesar 94,00% hibah diberikan kepada Lembaga Pendidikan sebesar Rp.4.560.500.000,00
- z. Bantuan Sosial Tangerang Berbenah sebesar Rp.25.876.000,00 kepada 104 Kelurahan se-Kota Tangerang Tahun 2015 dengan realisasi hibah diberikan

kepada 101, bedah rumah sebesar Rp.20.800.000.000 dan MCK sebesar Rp.5.076.000.000 dengan realisasi sebesar 100,00%

- aa. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.888.218.527,00 dengan realisasi sebesar 69,00%.

Tahun 2016

- a. Perjanjian Kerja Sama antara DPKD dengan BJB Cabang Tangerang tentang Layanan Penerimaan Setoran Pajak Daerah di Kota Tangerang;
- b. Kesepahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tangerang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota tangerang;
- c. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tangerang yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2015 (Tindak Lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tangerang tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota tangerang);
- d. Perjanjian Kerja Sama antara Setda Kota Tangerang dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada tentang Pendampingan Penyusunan dan Updating Analisis Standar Belanja (ASB) Pemerintah Kota Tangerang;
- e. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan 28 Rumah Sakit tentang Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Kota Tangerang;
- f. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Perusahaan Umum Bulog Sub Divisi Regional Tangerang tentang Pengadaan Beras Cadangan Pangan;
- g. Nota Kesepahaman antara PT.Angkasa Pura II dengan Pemerintah Kota Tangerang tentang Kerja Sama Penyaluran dan Pelayanan Penyediaan Air Minum di Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- h. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PT.Taspen tentang Pelayanan Proaktif;

- i. Perjanjian Kerja Sama antara BPMPTSP Kota Tangerang dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang tentang Pelaksanaan ajminan Sosial Ketenagakerjaan;
- j. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Tangerang (APINDO) tentang Penemapatian Tenaga Kerja Terlatih pada Perusahaan di Kota Tangerang;
- k. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PT.Gajah Tunggal, Tbk tentang Penyediaan Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Taman Gajah Tunggal Tangerang;
- l. Perjanjian Kerja Sama antara BKPP Kota Tangerang dengan PT.Taspen tentang Pelayanan Proaktif, yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2016 (Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PT.Taspen tentang Pelayanan Proaktif);
- m. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Tangerang dengan BJB cabang Tangerang tentang Administrasi Pengelolaan Data Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang yang akan memasuki Pensiuin dan memiliki Pinjaman di BJB Cabang Tangerang;
- n. MoU antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Tangerang;
- o. Perjanjian Kerja Sama antara Disnaker Kota Tangerang dengan BPJS Kesehatan Cabang Tangerang;
- p. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Tangerang dengan 28 Rumah Sakit tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Kota Tangerang Tahun 2017;
- q. Perjanjian Kerja Sama antara Disnaker Kota Tangerang dengan PT.Sulindafin tentang Pemagangan.

Tahun 2017

- a. Perjanjian Kerja Sama Antara Diskominfo Kota Tangerang dengan Diskominfo Kab Jepara terkait aplikasi *smart city*, yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 2017;

- b. PKS Antara BKPSDM Kota Tangerang dengan BKPPD Kab Belitung Timur terkait aplikasi *smart city* yang ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2017;
- c. PKS Antara Dinas Kominfo Kota Tangerang dengan Setda Kab Bangka Selatan terkait aplikasi *smart city* yang ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2017;
- d. Nota Kesepahaman Antara Pemkot Tangerang dengan Pemkot Balikpapan tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 2017;
- e. Kesepakatan Bersama Antara Pemkot Tangerang dengan Pemkab Pinrang tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2017;
- f. Perjanjian Kerja Sama Antara BKPSDM Kota Tangerang dengan BKD Kab Pinrang terkait aplikasi *smart city* yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2017;
- g. Perjanjian Kerja Sama Antara Diskominfo Kota Tangerang dengan Diskominfo Kab Pinrang terkait aplikasi *smart city* yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2017;
- h. Perjanjian Kerja Sama Antara BKPSDM Kota Tangerang dengan BKD Kota Balikpapan terkait aplikasi *smart city* yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2017;
- i. Perjanjian Kerja Sama Antara Diskominfo Kota Tangerang dengan Diskominfo Kota Balikpapan terkait aplikasi *smart city* yang ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2017;
- j. Nota Kesepahaman Antara Pemkot Tangerang dengan Pemkab Purworejo tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2017;
- k. Perjanjian Kerja Sama Antara Diskominfo Kota Tangerang dengan Diskominfo Kab Purworejo terkait aplikasi *smart city* yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2017;
- l. Nota Kesepahaman Antara Pemkot Tangerang dengan Pemkot Bandung Tentang Kerjasama Antar Daerah yang ditandatangani pada tanggal 1 November 2017;

6.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

6.3.1. Kebijakan

Dalam rangka mendukung tugas, wewenang dan kewajiban Walikota Tangerang dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dengan meningkatkan dan mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, persatuan serta kesatuan bangsa.

Untuk mewujudkan harapan tersebut di atas, perlu ditetapkan pola hubungan koordinasi antar aparatur pemerintahan di daerah sesuai hak dan kewajiban serta kewenangannya dalam suatu sistem penyelenggaraan koordinasi pemerintahan di daerah.

Pada tahun anggaran 2013-2018, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan sehingga berhasilguna dan berdayaguna.

Dalam melaksanakan koordinasi itulah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, Walikota Tangerang telah melaksanakan fungsinya antara lain:

- Mengidentifikasi kaitan dan kepentingan antara instansi, baik fungsional, sektoral maupun regional;
- Memadukan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan berkaitan;
- Menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi;
- Mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas instansi vertikal;
- Meminta keterangan pelaksanaan tugas instansi vertikal.

Bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan yaitu koordinasi perencanaan, pelaksanaan, sektoral, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud di atas, diselenggarakan melalui rapat koordinasi, permintaan dan penyampaian data/informasi atau pembentukan forum koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3.2. Realisasi

Tahun 2014

Realisasi koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan beberapa instansi terkait, yang meliputi antara lain:

1. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Kota Tangerang Nomor 03/ NKRID/2014 tentang Pengembangan dan Operasi Pemeliharaan Situ di Wilayah Kota Tangerang
2. Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan melalui Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri dan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
3. Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri. Kegiatan ini merupakan upaya terjalannya hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri. Adapun ruang lingkup pekerjaan ini meliputi hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri selama Tahun 2014 dengan pelaporan per-triwulan. Untuk menyelenggarakan Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri ini, Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.149.999.900,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.135.560.000,00 (90,37%).
4. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Kegiatan ini merupakan upaya terbangunnya pola kerjasama antar daerah dan antar lembaga yang efektif dan saling menguntungkan. Adapun ruang lingkup pekerjaan ini meliputi fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kerjasama daerah. Untuk menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya ini, Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.439.132.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.313.710.800,00 (71,44%).

5. Pembinaan kewilayahan melalui Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) dengan unsur, yaitu: 1) Kodim 0506; 2) Polres Metro Tangerang; dan 3) Kejaksaan Negeri; Kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:
 - a. Pada hari buruh sedunia ada rencana aksi *sweeping* yang akan dilakukan oleh oknum buruh kepada buruh lainnya disetiap perusahaan se-Kota Tangerang yang memprovokasi untuk melakukan demo buruh, atas rencana tersebut Muspida telah melakukan koordinasi dengan hasil sebagai berikut:
 - Tercapainya kesepakatan antara MUSPIDA dengan LKS TRIPARTIT mengenai aksi demo damai tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan.
 - Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban Kota Tangerang yang kondusif.
 - Tindak lanjut hasil koordinasi ditandatanganinya Pernyataan Bersama oleh Unsur MUSPIDA, Unsur Serikat Pekerja dan Serikat Buruh serta Unsur Pengusaha.
 - b. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah;
 - c. Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan tahun baru.
- Kegiatan rapat koordinasi unsur MUSPIDA pada Tahun Anggaran 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp.804.210.000,00 untuk melaksanakan 12 kali rapat, dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.632.417.500,00 (78,64%).
6. Kegiatan penertiban di bidang perhubungan yang dilaksanakan melalui forum Badan Koordinasi Lalu Lintas (BAKORLANTAS) yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, BAPPEDA, Polres Metro Tangerang, Kodim 0506 Tangerang, Komando Pos POM, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Hukum, ORGANDA dan Instansi lain yang terkait dengan kegiatan lalu lintas.
7. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, telah dilaksanakan kegiatan operasi penertiban pedagang kaki lima, becak, PSK, dan penertiban penyandang penyakit sosial lainnya. Selanjutnya bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban umum telah dilaksanakan sidang tindak pidana ringan (tipiring).

Untuk menyelenggarakan sidang tipiring, Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.166.290.000,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.155.040.000,00 (93,23%).

Tahun 2015

Realisasi koodinasi dengan instansi vertikal di daerah dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan beberapa instansi terkait yang meliputi:

1. Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama antara BPMPTSP Kota Tangerang dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang, Cikokol, Cimone dan Batuceper tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Tertentu Pada BPMPTSP Kota Tangerang
2. Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama Pemerintah Kota Tangerang dengan BPJS Kesehatan Cabang Tangerang

Tahun 2016

Kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi dengan pihak vertikal di daerah diantaranya:

1. Dalam hal penertiban aset negara yang ada di wilayah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang berkoordinasi dengan pihak POLRI dan TNI;
2. Pada Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kota Tangerang melaksanakan pembebasan lahan dalam hal pembangunan jalur Kereta API Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan PT. KAI; dan
3. Melakukan sosialisasi mengenai pemberantasan narkoba bekerjasama dengan BNN.

Tahun 2017

Kegiatan yang dilakukan dalam koordinasi dengan pihak vertikal di daerah diantaranya:

1. Dalam hal penertiban aset negara yang ada di wilayah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang berkoordinasi dengan pihak POLRI dan TNI;
2. Melakukan sosialisasi mengenai pemberantasan narkoba bekerjasama dengan BNN.

6.4 PEMBINAAN BATAS WILAYAH

6.4.1 Kebijakan

Penyelenggaraan pembinaan batas wilayah di Kota Tangerang telah dilaksanakan sejak berdirinya Kota Tangerang pada tahun 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Luas wilayah Kota Tangerang adalah 164,55 km² (tidak termasuk luas bandara seluas 19,69 Km²) terbagi dalam 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tangerang, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Batuceperdan Kecamatan Benda.

6.4.2 Realisasi dan Kegiatan

Selama Tahun 2014-2018 kegiatan pembinaan batas wilayah, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang perihal permasalahan batas wilayah di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Kecamatan Benda. Penyelesaian masalah batas wilayah tersebut telah diselesaikan di tingkat Kementerian Dalam Negeri melalui Provinsi Banten yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Terkait dengan kegiatan pembinaan batas wilayah telah dilakukan koordinasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait permasalahan batas wilayah di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Kecamatan Benda. Penyelesaian masalah batas wilayah tersebut telah diselesaikan di tingkat Kementerian Dalam Negeri melalui Provinsi Banten yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten.

- b. Pemerintah Kota Tangerang melaksanakan pembinaan batas wilayah melalui kegiatan pelacakan dan penegasan batas antar kecamatan di wilayah Kota Tangerang. Kegiatan tersebut dilakukan guna memberikan penegasan batas wilayah secara pasti di lapangan dan dalam bentuk peta informasi batas wilayah kecamatan sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa persyaratan

dasar kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi : luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah, dan batas usia minimal daerah.

Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap pada 13 wilayah Kecamatan, pada Tahun Anggaran 2015 dilakukan dilakukan pelacakan dan penegasan batas antar kecamatan pada wilayah Kecamatan Benda, Batuceper, dan Cipondoh, Tahun Anggaran 2016 pada wilayah Kecamatan Neglasari, Periuk, Jatiuwung, dan Cibodas, Tahun Anggaran 2017 sudah direncanakan akan dilaksanakan pelacakan dan penegasan batas antar kecamatan pada wilayah Kecamatan Larangan, Ciledug, KarangTengah, dan Pinang. Selanjutnya untuk berikutnya pada Tahun Anggaran 2018 akan dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Tangerang dan Karawaci.

6.4.3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Kota Tangerang telah berkembang menjadi salah satu kota metropolitan yang membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota secara umum. Disamping manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan kota yang begitu pesat, masih terdapat permasalahan salah satunya pada aspek kewilayahan. Saat ini terjadi pembiasan batas-batas wilayah di Kota Tangerang, baik dengan kota/kabupaten lain maupun batas antar kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota Tangerang. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pengembangan kawasan yang kurang memperhatikan eksistensi batas wilayah. Kondisi tersebut tentu saja memerlukan penanganan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga mampu membangun kejelasan batas wilayah administrasi yang berdampak pada semakin jelasnya lingkup dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Pesatnya perkembangan kota tentunya membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota secara umum. Namun demikian pada aspek kewilayahan, terjadi pembiasan batas-batas wilayah di Kota Tangerang, baik dengan kota/kabupaten lain maupun batas antar kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota Tangerang. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh pengembangan kawasan yang kurang memperhatikan eksistensi batas wilayah. Kondisi tersebut tentu saja memerlukan penanganan

secara intensif dan berkesinambungan, sehingga mampu membangun kejelasan batas wilayah administrasi yang berdampak pada semakin jelasnya lingkup dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

b. Solusi

Terkait dengan pembinaan batas wilayah pada wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota lain, kebijakan pembinaan tersebut ada pada tingkat Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga Pemerintah Kota Tangerang tidak maksimal dalam hal penegasan batas di wilayah tersebut. Sehubungan dengan hal itu, sebelum dilakukan penegasan batas, terlebih dahulu dibutuhkan kesepakatan antar 2 (dua) kabupaten/kota yang berbatasan dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten.

6.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Selama tahun 2014-2108 Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana, dengan memberikan prioritas utama kepada peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat serta jajaran Pemerintah Daerah, melalui kegiatan penyuluhan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran serta evakuasi korban bencana khususnya di daerah rawan bencana dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kota Tangerang baik secara geografis serta tingginya kepadatan penduduk di sebagian wilayah kecamatan menjadi sangat rawan terjadinya bencana, terutama banjir dan kebakaran.

Bencana Banjir

Mengingat bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Kota Tangerang maka Pemerintah Kota Tangerang telah mengantisipasinya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir secara menyeluruh yang merupakan kegiatan lintas bidang dan lintas sektoral.

Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2014-2018, sebagai berikut:

1. Koordinasi lintas sektoral/SKPD (Dinas PU, Dinas Damkar, DKP, Dinkes, Kantor Kesbang Linmas, BPSDA, Tagana, PMI dll);

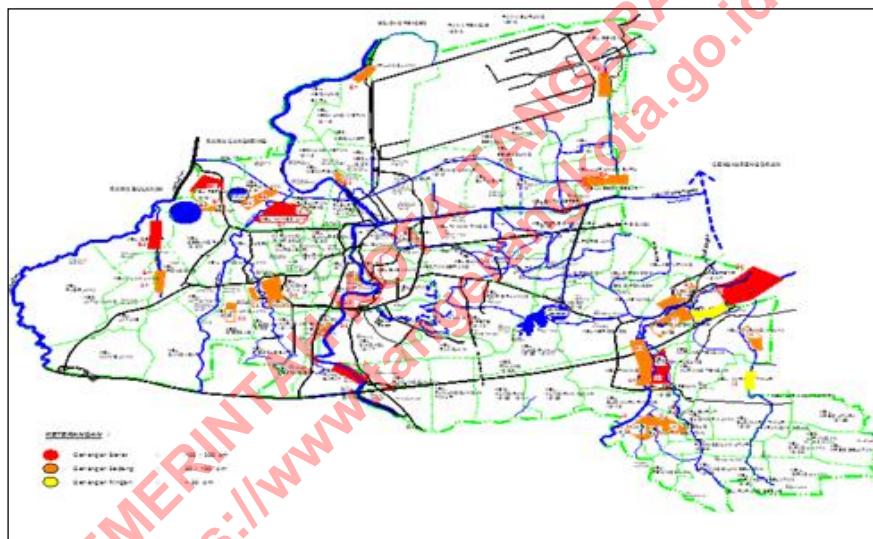
2. Koordinasi untuk meningkatkan "early warning"/ peringatan dini tentang kenaikan level air pada hulu Sungai Cisadane, khususnya di Batu Belah Kampung Cidokom – Desa Siang Kecamatan Rumpin Selatan – Kabupaten Bogor;
3. Meningkatkan koordinasi pada titik rawan banjir di wilayah timur Kota Tangerang (Ciledug Indah 1 & 2, Wisma Tajur, dll) dan wilayah barat Kota Tangerang (Pondok Arum, Total Persada Raya, Alam Jaya, Puranti dan Periuk Damai);
4. Menetapkan alternatif jalur evakuasi dan lokasi pendirian posko bencara pada wilayah rawan banjir bersama tokoh masyarakat;
5. Mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di saluran/drainase air dan sungai/kali.
6. Menyelenggarakan mitigasi banjir dengan membangun fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, antara lain melalui Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya, Program Pengendalian Banjir, Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam, Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, serta Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.
7. Mempersiapkan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan untuk menghadapi bencana banjir yang dilaksanakan Dinas Sosial, antara lain melalui Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Program ini mencakup beberapa kegiatan yang antara lain menyelenggarakan Pembinaan Organisasi Tagana (Taruna Siaga Bencana), serta Peningkatan Kelengkapan Sarana Rescue sebagai upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan penyelamatan korban dan memenuhi kebutuhan kelengkapan sarana penyelamatan (rescue).
8. Mempersiapkan ketersediaan kebutuhan dasar pada saat terjadinya bencana (buffer stock) yang dilaksanakan Dinas Sosial melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Dengan program kerja ini dilaksanakan Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa. Adapun ruang lingkup pekerjaan yaitu: (1). Assesment ke lokasi bencana; (2). Penyediaan buffer stock bantuan; (3). Untuk kebutuhan bahan bakar (solar) sesuai dengan permintaan dari lokasi banjir; (4). Evakuasi korban bencana oleh anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana); (5). Distribusi bantuan kepada korban bencana.

9. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dengan Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi a) Monitoring daerah rawan bencana dengan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam b) Latihan teknis antisipasi terjadi bencana alam (Glady Posko) c) Pelatihan evakuasi bencana alam.

Status Bencana

Pada tahun 2014, bencana banjir yang terjadi dalam kategori sedang, karena tidak berdampak terlalu luas pada korban bencana. Terjadi banjir dan genangan air akibat curah hujan yang cukup tinggi dengan waktu genangan tidak terlalu lama.

Gambar 6.1. Peta Lokasi Banjir Tahun 2014



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, Tahun 2014

Tabel 6.2. Lokasi Genangan Banjir Tahun 2014

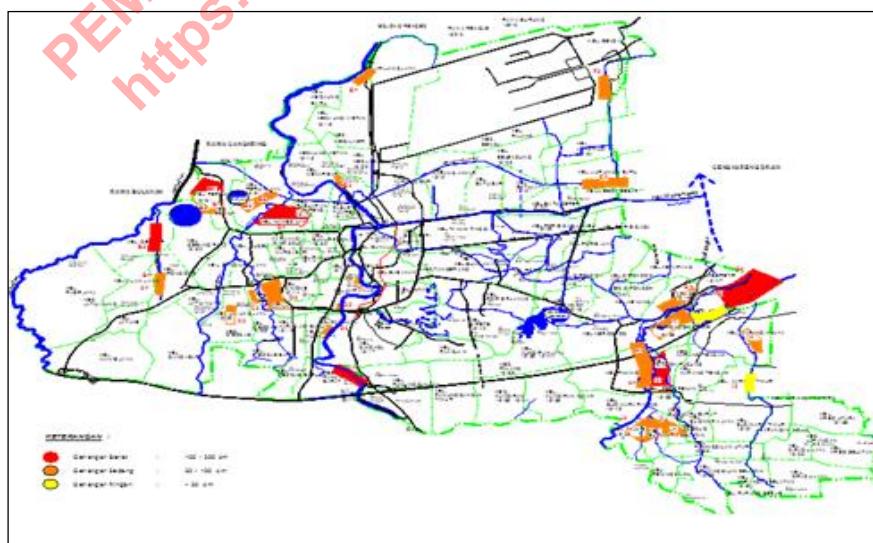
No.	Kecamatan	Jumlah Lokasi Genangan (untuk kedalaman)			Keterangan
		> 2 m	0,5 – 2 m	< 0,5 m	
1	Cibodas		100-200 cm		Kel. Panunggangan Barat
			30-80 cm		Kel. Uwung Jaya
			20-50 cm		Kel. Cibodas
2	Cipondoh		100-150 cm		Kel. Petir
			40-60 cm		Kel. Gondrong
3	Jatiuwung		30-60 cm		Perumahan Purati Kel. Alam Jaya
4	Karawaci		160 cm		Pondok Arum Kel. Nambo Jaya
			40-80 cm		Kel. Bojong Jaya
			60-80 cm		Perumahan Cimone Mas Permai
			60-80 cm		Kel. Sukajadi
			40-60 cm		Kel. Karawaci Baru

No.	Kecamatan	Jumlah Lokasi Genangan (untuk kedalaman)			Keterangan	
		> 2 m	0,5 – 2 m	< 0,5 m		
5	Karang Tengah		60-75 cm		Kel. Pondok Bahar	
			70-80 cm		Kel. Karang Mulya	
			80-200 cm		Kel. Padurenan	
			20-30 cm		Kel. Parung Jaya	
			20-30 cm		Kel. Karang Timur	
6	Ciledug		70-100 cm		Puri Kartika RW 06 & 09 Perumahan Duren Villa Tajur	
7	Pinang		60-80 cm		Pinang Griya Kel. Pinang	
			30-50 cm		Perumahan Taman Pinang Kel. Pinang	
8	Periuk		40-200 cm		Purati, Total Persada Kel. Gembor, Mutiara Pluit, Periuk Damai, Gebang Raya, Alamanda, Periuk Jaya, Taman Elang	
9	Benda		20-50 cm		Kel. Jurumudi Baru	
			30-50 cm		Kel. Benda	
Jumlah					24 Titik	
Jumlah Titik Genangan Air					6 Titik	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, Tahun 2014

Pada Tahun 2015 bencana banjir yang terjadi dalam kategori sedang, karena tidak berdampak terlalu luas pada korban bencana. Terdapat 25 titik banjir dan 6 titik genangan air yang tersebar di 10 kecamatan. Terjadinya banjir dan genangan air sebagai akibat curah hujan yang cukup tinggi dengan waktu genangan tidak terlalu lama, untuk lokasi banjir titik paling banyak terdapat di Kecamatan Periuk sebanyak 7 titik/lokasi.

Gambar 6.2. Peta Lokasi Genangan Banjir Tahun 2015



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, Tahun 2015

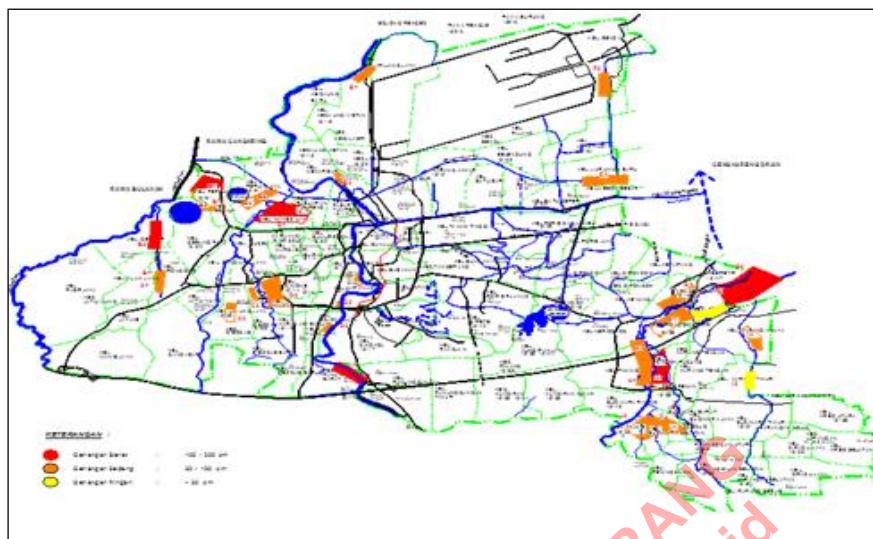
Tabel 6.3. Genangan Banjir Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Lokasi Genangan (untuk kedalaman)			Keterangan	
		> 2 m	0,5 – 2 m	< 0,5 m		
1	Larangan					
2	Cibodas		100-200 cm		Kel. Panunggangan Barat	
			30-80 cm		Kel. Uwung Jaya	
			20-50 cm		Kel. Cibodas	
3	Cipondoh		100-150 cm		Kel. Petir	
			40-60 cm		Kel. Gondrong	
5	Jatiuwung		30-60 cm		Perumahan Purati Kel. Alam Jaya	
6	Karawaci		160 cm		Pondok Arum Kel. Nambo Jaya	
			40-80 cm		Kel. Bojong Jaya	
			60-80 cm		Perumahan Cimone Mas Permai	
			60-80 cm		Kel. Sukajadi	
			40-60 cm		Kel. Karawaci Baru	
8	Karang Tengah		60-75 cm		Kel. Pondok Bahar	
			70-80 cm		Kel. Karang Mulya	
			80-200 cm		Kel. Padurenan	
			20-30 cm		Kel. Parung Jaya	
			20-30 cm		Kel. Karang Timur	
9	Ciledug		70-100 cm		Puri Kartika RW 06 & 09 Perumahan Duren Villa Tajur	
10	Pinang		60-80 cm		Pinang Griya Kel. Pinang	
			30-50 cm		Perumahan Taman Pinang Kel. Pinang	
12	Periuk		40-200 cm		Purati, Total Persada Kel. Gembor, Mutiara Pluit, Periuk Damai, Gebang Raya, Alamanda, Periuk Jaya, Taman Elang	
13	Benda		20-50 cm		Kel. Jurumudi Baru	
			30-50 cm		Kel. Benda	
Jumlah						
Total						

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, Tahun 2015

Pada Tahun 2016 bencana banjir di Kota Tangerang yang terjadi secara umum masuk dalam kategori sedang, karena tidak berdampak terlalu luas pada korban bencana, hanya yang terberat ada di Perumahan Total Persada namun bisa ditangani dalam waktu singkat (\pm 3 hari) Terdapat 15 titik banjir pada tahun 2016 yang tersebar di 9 Kecamatan dan kejadian tersebut terjadi di awal tahun 2016, namun seiring dengan pelaksanaan program dan kegiatan penanganan banjir yang dilaksanakan pada tahun 2016 serta adanya manajemen tata air seperti pengeringan/ penggelontoran sungai/saluran dan situ atau embung dilaksanakan, lokasi – lokasi tersebut di akhir tahun pada saat curah hujan cukup tinggi tidak mengalami banjir misalnya periuk damai, ciledug indah duren villa dan puri kartika.

Gambar 6.3. Peta Lokasi Genangan Banjir Tahun 2016



Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang, Tahun 2016

Tabel 6.4. Genangan Banjir Tahun 2016

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Lokasi Genangan (untuk kedalaman)			Keterangan
			> 2 m	0,5 – 2 m	< 0,5 m	
1	Tangerang	Sukasari		1,05 (0,7 + 0,35)		Jl. MT. Haryono dan Jl. KH. Soleh Ali
		Sukarasa		1,45(0,35+0,35+0,05+0,7)		Jl. Kisamaun (Depan Mesjid Agung, Depan Ciapensi, Dalam Pasar Lama) Jl. Kiasnawi (Depan Stasiun KA)
		Babakan	2,35(0,35+2)			Jl. Moh Yamin (Depan LP Wanita)
		Cikokol		0,7		Jl. Perintis Kemerdekaan (Depan Pasar Babakan)
		Buaran Indah				Jl. Moh. Thamrin (Depan RS. Awal Bros) Terminal Bayargon Kebon Nanas
2	Karawaci	Panungga ngan Barat			0,35	Jl. Imam Bonjol (Depan Betawi, Palm Semi, Pertigaan Kav. Pri)
		Cimone			0,2	Jl. Proklamasi (Depan Kelurahan, Depan Terminal)
3	Periuk	Periuk			0,25	Jl. M. Toha Pertigaan Kota Bumi
4	Neglasari	Kedaung Baru			0,1	Jl. Iskandar Muda Depan Kuburan Rawa Kucing

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Lokasi Genangan (untuk kedalaman)			Keterangan
			> 2 m	0,5 – 2 m	< 0,5 m	
5	Batu Ceper	Batu Ceper			0,35	Perumahan Batu Ceper Indah Depan Posyandu
6	Pinang	Panungga ngan Utara				Jl. M.H Thamrin Jembatan Pelengkung
7	Cipondoh	Poris Plawad Utara				Pinang Griya Kel.Pinang
8	Ciledug	Sudimara Barat				Jl. HOS. Cokroaminoto (Depan CBD)
						Jl. Raden Fatah (Depan SMP)
9	Karang Tengah	Karang Timur		1,4		Jl. HOS. Cokroaminoto (Depan Hari-Hari)
		Karang Mulya			0,35	Depan raden Saleh, Depan DDN
10	Larangan	Kreo			0,1	Jl. HOS. Cokroaminoto Kreo
		Gaga			0,7	Jl. Dr. Hamka (Caplin), Taman Asri Depan Indomart
Jumlah Titik Banjir						21 titik

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang, Tahun 2016

Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Mengingat dampak yang diakibatkan oleh banjir sangat merugikan bagi masyarakat Kota Tangerang, maka perlu dilakukan upaya dan kebijakan yang konsisten sehingga masalah banjir ini dapat dikurangi secara bertahap. Hal ini sangat diperlukan, mengingat kecenderungan yang ada, daerah rawan banjir terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa hal yang menyebabkan ini antara lain:

1. Berubahnya/beralihnya fungsi tata guna lahan, yang semula merupakan daerah cekungan dan resapan air menjadi bangunan, perumahan, industri/pabrik, pertokoan, pergudangan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan semakin berkurangnya areal yang berfungsi sebagai tempat penampungan air sebelum menuju saluran pembuangan;
2. Beberapa ruas jalan belum dapat direalsiasikan pembangunannya hal ini disebabkan karena terkendala pada pembebasan lahan.
3. Kurangnya sarana dan sistem drainase yang memadai sebagai pengganti lahan yang mengalami perubahan fungsi tersebut, terlebih apabila perubahan tersebut tidak disertai dengan analisa tentang dampak lingkungan;

4. Belum optimalnya pembangunan bangunan penampung air sebagai tendon air, embung serta sumur resapan di wilayah rawan banjir dan daerah cekungan;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan pemeliharaan terhadap sarana drainase lingkungan yang menyebabkan sistem drainase lingkungan tidak dapat berfungsi dengan optimal;
6. Penyempitan sungai/saluran pembuangan diakibatkan pendangkalan, sedimentasi ataupun pemanfaatan secara liar, sehingga kapasitas daya tampung sungai semakin berkurang.

Permasalahan banjir merupakan masalah lintas urusan dan lintas wilayah sehingga upaya penangannya harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, yaitu komprehensif meliputi aspek lingkungan, pengaturan, manajemen, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan, yang terintegrasi melibatkan koordinasi seluruh pemerintah daerah yang dilewati Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sama. Selain itu solusi lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, sebagai berikut:

1. Perlunya penyempurnaan dan penegakkan peraturan mengenai persyaratan atas perubahan fungsi lahan yang semula merupakan daerah penampung/resapan, antara lain dengan mensyaratkan diadakannya analisa mengenai dampak lingkungan beserta fasilitas drainase yang memadai sebagai pengganti fungsi lahan semula;
2. Perlu digalakkannya sosialisasi, penerapan dan penegakkan aturan, baik itu Perda, Keppres ataupun UU yang berkaitan dengan pemanfaatan bantaran sungai/jaringan irigasi;
3. Perlu adanya upaya percepatan proses pembebasan lahan pada ruas jalan yang akan dibangun guna menunjang kesiapan lahan untuk keperluan pembangunan jalan sehingga dapat menambah aksesibilitas dan memperlancar mobilitas pengguna jalan.
4. Pelaksanaan normalisasi dan pengeringan lumpur dalam rangka memanfaatkan saluran pembuangan dan jaringan irigasi yang ada secara optimal;
5. Untuk mengurangi dampak banjir yang terjadi, perlu dilakukan pembuatan, perbaikan, dan peninggian tanggul yang dikombinasikan dengan perbaikan sistem

drainase dan pengadaan pompa air, terutama pada lokasi yang rendah dan di tepi sungai;

6. Berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka melaksanakan penanganan DAS secara menyeluruh dari hulu ke hilir;
7. Melaksanakan Program pencegahan dini
8. Pendirian posko banjir di setiap lokasi bencana banjir di 13 kecamatan.
9. Fasilitas evakuasi korban menggunakan 24 perahu karet dan alat komunikasi lapangan;
10. Bantuan makanan dan minuman melalui posko banjir;
11. Pompanisasi.

Bencana Kebakaran

Disamping itu Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran selama tahun 2013-2018 telah melakukan program melalui kegiatan penyuluhan, kegiatan pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran, kegiatan simulasi evakuasi korban bencana, kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam, nono alam dan social, kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pemeliharaan sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi korban, kegiatan latihan ketrampilan personil penyelamatan korban bencana dan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Adapun penyebab-penyebab terjadinya kebakaran pada tahun 2014-2018 di Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.5. Penyebab Terjadinya Kebakaran Tahun 2014

No.	Kecamatan	Penyebab			
		Arus Pendek	Kompor	Puntung Rokok	Lain-Lain
1	Tangerang	6	1	0	1
2	Priuk	6	1	1	3
3	Cibodas	0	0	0	0
4	Karawaci	5	1	0	3
5	Jati Uwung	8	0	0	3
6	Neglasari	3	0	0	2
7	Batuceper	3	0	0	2
8	Benda	4	0	0	1
9	Ciledug	3	0	0	1
10	Larangan	1	0	0	2

No.	Kecamatan	Penyebab			
		Arus Pendek	Kompor	Puntung Rokok	Lain-Lain
11	Karang Tengah	2	1	0	0
12	Pinang	4	1	0	1
13	Cipondoh	7	0	0	2
Jumlah		52	5	1	21

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, Tahun 2014

Tabel 6.6. Penyebab Terjadinya Kebakaran Tahun 2015

No.	Kecamatan	Penyebab			
		Arus Pendek	Kompor	Puntung Rokok	Lain-Lain
1	Tangerang	15	1	0	9
2	Priuk	5	0	0	8
3	Cibodas	1	0	0	0
4	Karawaci	6	0	1	3
5	Jati Uwung	6	0	0	4
6	Neglasari	1	0	1	4
7	Batuceper	2	1	1	4
8	Benda	2	0	0	2
9	Ciledug	4	0	0	6
10	Larangan	5	1	0	2
11	Karang Tengah	1	2	0	3
12	Pinang	4	0	0	4
13	Cipondoh	8	1	0	7
Jumlah		60	6	3	56

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016

Tabel 6.7. Penyebab Terjadinya Kebakaran Tahun 2016

No.	Kecamatan	Penyebab			
		Arus Pendek	Kompor	Puntung Rokok	Lain-Lain
1	Tangerang	3	-	-	3
2	Priuk	10	-	-	1
3	Cibodas	2	1	-	-
4	Karawaci	9	-	-	5
5	Jati Uwung	3	-	-	1
6	Neglasari	2	-	-	3
7	Batuceper	7	-	-	4
8	Benda	2	-	-	-
9	Ciledug	3	-	-	2
10	Larangan	1	-	-	1
11	Karang Tengah	6	1	-	2
12	Pinang	6	-	-	3
13	Cipondoh	10	-	-	2
Jumlah		64	2	0	27

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017

Tabel 6.8. Penyebab Terjadinya Kebakaran Tahun 2017

No.	Kecamatan	Penyebab			
		Arus Pendek	Kompor	Puntung Rokok	Lain-Lain
1	Tangerang	6	-	-	2
2	Priuk	7	-	-	9

No.	Kecamatan	Penyebab			
		Arus Pendek	Kompor	Puntung Rokok	Lain-Lain
3	Cibodas	6	2	-	1
4	Karawaci	11	2	-	2
5	Jati Uwung	4	-	-	1
6	Neglasari	8	-	-	1
7	Batuceper	4	2	-	1
8	Benda	7	-	-	1
9	Ciledug	8	1	-	2
10	Larangan	2	1	-	-
11	Karang Tengah	4	3	-	3
12	Pinang	3	1	-	3
13	Cipondoh	19	-	-	2
Jumlah		79	12	0	28

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2018

Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2014, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Program ini bertujuan untuk mencapai indikator sasaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran (RPJMD Kota Tangerang 2014-2018) dengan target pada Tahun 2014 sebesar 80%. Adapun kegiatan yang diselenggarakan dalam program ini adalah Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran, Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pendataan Potensi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran, Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Laboratorium Kebakaran, Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kebakaran, Pengujian Laboratorium Kebakaran;
2. Pada Tahun 2014 dilakukan operasi pemadaman kebakaran sebanyak 116 kali di Kota Tangerang yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Frekuensi operasi pemadaman tersebut berada dibawah target kegiatan sebanyak 130 kali pemadaman, sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 98,46% yang merupakan hal yang sangat baik karena semakin sedikit jumlah kasus kebakaran maka semakin berkurang kerugian yang ditanggung masyarakat;

3. Pada Tahun 2015 dilakukan operasi pemadaman kebakaran sebanyak 125 kali di Kota Tangerang yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Frekuensi operasi pemadaman tersebut berada dibawah target kegiatan sebanyak 120 kali pemadaman.
4. Pada Tahun 2016 dilakukan operasi pemadaman kebakaran sebanyak 93 kali di Kota Tangerang yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
5. Pada Tahun 2017 dilakukan operasi pemadaman kebakaran sebanyak 119 kali di Kota Tangerang yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
6. Mempersiapkan sumber daya manusianya dengan melakukan pelatihan terhadap aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan korban yang meliputi gedung tinggi/vertikal rescue, korban kebakaran/fire rescue dan korban banjir/water rescue, melalui kegiatan Pelatihan Dasar Kebencanaan Bagi Aparatur, Bintek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana, Bintek Pelayanan Rehabilitasi Psyiko Social, Bintek Bagi Tim Reaksi Cepat, Bintek Penanggulangan Bencana Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Pelatihan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana;
7. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan bencana meliputi: 1) apel siaga bencana; 2) melakukan pengecekan dan persiapan peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi korban; 3) melakukan monitoring daerah rawan bencana; 4) mendistribusikan perahu karet dan perlengkapannya ke kecamatan rawan banjir, dan (5) koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanganan bencana;
8. Melakukan simulasi evakuasi korban banjir meliputi pelatihan yang berisi materi mengenai: 1) pengenalan dan penggunaan perahu karet untuk evakuasi korban; 2) pengenalan dan pemasangan tenda untuk posko banjir dan bencana; dan 3) pertolongan pertama pada korban bencana.
12. Melakukan sosialisasi terkait pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam melalui Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 ini di 24 kelurahan.yaitu Poris gaga baru, Kelurahan Belendung, Jatiuwung, Kelurahan Uwung Jaya, Sudimara Selatan, Peninggilan, Parung Serab, Cipondoh, Poris Plawad Utara, Kenanga, Manis, Marga Sari, Sumur

Pacing, Gerendeng, Gaga, Larangan Utara, Kreo, Kedaung Wetan, Panunggangan Utara, Nerogtog, Pinang, Kunciran, Cikokol, Buaran Indah. Selain itu BPBD melakukan pelatihan simulasi kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan di kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh dan Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang Tengah.

13. Melakukan koordinasi penanggulangan bencana dengan membentuk satuan gugus tugas di Kecamatan Jatiuwung, Batu Ceper, Ciledug dan Pinang dan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Periuk

6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Secara umum, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diarahkan kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi kebijakan dan peraturan serta operasi penertiban.
2. Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, penataan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Secara khusus, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diselenggarakan melalui:

1. Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan daerah-daerah vital dan masyarakat.
2. Peningkatan sosialisasi hukum masyarakat.
3. Peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
4. Peningkatan pengamanan swakarsa baik di lingkungan pemukiman maupun tempat-tempat vital.
5. Penegakkan peraturan daerah.
6. Membangun komunikasi dan silaturahmi di antara komponen-komponen masyarakat.

Gangguan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Tangerang dan posisi sebagai penyangga ibu kota negara, menuntut penyediaan fasilitas kebutuhan sosial dan ekonomi (lapangan kerja) yang merupakan daya dukung kehidupan bagi masyarakat. Sepanjang tahun 2014-2018 dampak negatif dari perkembangan Kota Tangerang menimbulkan berbagai gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi antara lain:

1. Gangguan Ketertiban dan Sarana Umum

Gangguan yang terjadi meliputi pelanggaran ketertiban tempat hiburan dan keramaian, pelanggaran ketertiban bangunan dan sarana umum, pelanggaran ketertiban pasar dan pedagang kaki lima, pelanggaran ketertiban penyandang penyakit sosial serta pelanggaran ketertiban peredaran minuman beralkohol, narkotika dan obat terlarang. Pelanggaran kawasan bebas becak, serta kawasan bebas rokok dan penanggulangan bencana alam sebagai bagian tugas dari Satpol PP sebagai Aparatur penegak Perda.

2. Pelanggaran Perda

- a. Pelanggaran Jasa Hiburan dan Tempat-tempat Umum;
- b. Pelanggaran Operasional Tempat Hiburan (jam operasional dan pola operasional);
- c. Pelanggaran Perda Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Tempat-tempat Hiburan, Tempat Umum;
- d. Pelanggaran Perda Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran/ PSK(Prostitusi);
- e. Pelanggaran Perda Nomor: 7 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Pelanggaran Perda Nomor: 5 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan;
- g. Pelanggaran Perda Nomor: 13 Tahun 2007 tentang Ijin Gangguan (IG);
- h. Pelanggaran tempat hiburan malam pada hari besar keagamaan.
- i. Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kawasan bebas rokok.
- j. Penerapan Perda Nomor 18 Tahun 2000 tentang K3/Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

3. Kejahatan Narkoba

Gangguan penyalahgunaan dan pengedaran Narkoba dikalangan generasi muda khususnya di Kota Tangerang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan melaksanakan Tupoksi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Dalam upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sehingga program dan kebijakan yang akan dilaksanakan terarah. Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang adalah; terwujudnya kenyamanan dan ketertiban lingkungan, terwujudnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Kualifikasi Pegawai

Secara keseluruhan, sampai dengan tahun 2018 jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang berjumlah 382 orang. Rata-rata tingkat pegawai adalah lulusan SMP s/d Pascasarjana (S-2). Dari jumlah tersebut terdistribusi pada tingkat petugas operasional berjumlah 323 orang dan tingkat pelaksana administrasi sebanyak 42 orang, selebihnya adalah pegawai yang memangku jabatan Kepala Seksi/Kasubag sebanyak 11 orang, Sekretaris/Kepala Bidang sebanyak 5 orang dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1 orang.

Komposisi status pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang terdiri atas TKK (tenaga kerja kontrak) sebanyak 62 orang atau 16,23%, THL (tenaga harian lepas) sebanyak 184 orang atau 48,16% dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 136 orang atau 35,60%. Komposisi tersebut di atas diperlihatkan berikut ini:

Tabel 6.9. Komposisi Pegawai Satpol PP Tahun 2014

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Struktural:					
	a. S2			1	1	2
	b. S1				4	4
	c. D3			8		8
	d. SMA					
2	Fungsional:					
	a. S2					
	b. S1					
	c. D3					
	d. SMA					
3	Pelaksana:					
	a. S2			1		1
	b. S1			24		24
	c. D3					
	d. SMA		125			125
4	SD/SMP	3	6			9
	TKK:					
	a. S1			12		12
	b. D3		2			2
	c. SMA		56			56
	d. SMP	3				3
	e. SD	1				1
	Jumlah					247

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Tahun 2014

Tabel 6.10. Komposisi Pegawai Satpol PP Tahun 2015

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Struktural:					
	a. S2			1	2	3
	b. S1			10	4	14
	c. D3					
	d. SMA					
2	Fungsional:					
	a. S2					
	b. S1					
	c. D3					
	d. SMA					
3	Pelaksana:					
	a. S2					
	b. S1			1		1
	c. D3			39		39
	d. SMA		114			114
4	SD/SMP	2	5			7
	TKK:					
	a. S1			12		12
	b. D3		2			2
	c. SMA		51			51
	d. SMP					
	e. SD					
	Jumlah					243

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Tahun 2015

Tabel 6.11. Komposisi Pegawai Satpol PP Tahun 2016

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Struktural:					
	a. S2			1	4	5
	b. S1			8	4	12
	c. D3					
	d. SMA					
2	Fungsional:					
	a. S2					
	b. S1					
	c. D3					
	d. SMA					
3	Pelaksana:					
	a. S2			1		1
	b. S1			49		49
	c. D3					
	d. SMA		85			85
	d. SD/SMP	2	4			6
4	TKK:					
	a. S1			15		15
	b. D3		1			1
	c. SMA		45			45
	d. SMP		3			3
5	e. SD					
	THL:					
	a. S1		25			25
	b. D3		6			6
	c. SMA		153			153
	d. SMP					
	Jumlah					406

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Tahun 2016

Tabel 6.12. Komposisi Pegawai Satpol PP Tahun 2017

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Struktural:					
	a. S2			4	2	6
	b. S1			10	1	11
	c. D3					
	d. SMA					
2	Fungsional:					
	a. S2					
	b. S1					
	c. D3					
	d. SMA					
3	Pelaksana:					
	a. S2					
	b. S1			36		36
	c. D3					
	d. SMA		77			77
	d. SD/SMP	2	4			6
4	TKK:					
	a. S1			18		18
	b. D3					
	c. SMA		41			41

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
	d. SMP		3			3
	e. SD					
5	THL:					
	a. S1		21			21
	b. D3		6			6
	c. SMA		157			157
	d. SMP					
Jumlah						382

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Tahun 2018

Anggaran

Dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tangerang, Satuan Polisi Pamong Praja telah mengalokasikan anggaran Tahun 2014-2018, sebagai berikut:

Tabel 6.13. Jumlah Anggaran Satpol PP Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran (Rp.)	Jumlah Program dan Kegiatan	
		Program	Kegiatan
2014	29.094.330.164,00	9	36
2015	36.125.134.064,00	10	45
2016	39.579.183.053,00	11	40
2017	39.466.884.053,00	12	41
2018	47.263.620.769,00	12	41

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Tahun 2018

Penanggulangan dan Kendala

Bentuk Operasi Terpadu dari kegiatan ini meliputi Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar, Operasi Minuman Keras, Operasi Pelacuran/PSK, Operasi Gepeng dan Anjal, Operasi Becak, serta Pengawasan Tempat Hiburan dan Bangunan.

Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar

Penertiban pedagang kaki lima dan bangunan liar yang menggunakan badan jalan, trotoar dan fasilitas umum lainnya tidak dapat dihindari, hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi sesuai tujuan dibuatnya fasilitas umum tersebut, sebagaimana terurai berikut ini:

Tabel 6.14. Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar
Tahun 2014 – 2018 (s.d triwulan I)

Tahun	Kaki Lima	Bangunan Liar
2014	2.414	22
2015	2.920	71
2016	1.294	11
2017	824	80
2018	156	0

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Tahun 2018

Operasi Minuman Keras

Salah satu pemicu gangguan keamanan dan ketertiban adalah konsumsi minuman keras. Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang melakukan operasi secara intensif terhadap peredaran minuman keras. Tidak sedikit kendala yang kami hadapi untuk memberantas peredaran miras ini, antara lain adanya perlawanan dari pemilik miras sehingga menimbulkan korban luka petugas di lapangan.

Upaya tersebut berhasil menurunkan peredaran minuman keras di Kota Tangerang sebagaimana dapat dilihat berikut ini:

**Tabel 6.15. Peredaran Minuman Keras Di kota Tangerang
Tahun 2014 – 2018 (s.d triwulan I)**

Tahun	Minuman Keras	Pemusnahan
2014	5.064 (Botol/Kaleng/Plastik)	5.064 (Botol/Kaleng/Plastik)
2015	5.746 (Botol/Kaleng/Plastik)	5.746 (Botol/Kaleng/Plastik)
2016	6.060 (Botol/Kaleng/Plastik)	6.060 (Botol/Kaleng/Plastik)
2017	4.953 (Botol/Kaleng/Plastik)	4.953 (Botol/Kaleng/Plastik)
2018	3.547(Botol/Kaleng/Plastik)	3.547(Botol/Kaleng/Plastik)

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Tahun 2018

Operasi ini dilaksanakan dengan target operasi rawan miras di lokasi hotel, penginapan, tempat-tempat hiburan malam, warung remang-remang dan supermarket/ toko/ warung.

Operasi Pelacuran/PSK

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang akhlakul karimah maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk meminimalisir peluang terjadinya praktek-praktek pelacuran yang ada di Kota Tangerang. Sehubungan dengan upaya tersebut, selama tahun 2014-2018 telah diselenggarakan operasi terhadap pelacuran sebanyak kali dengan hasil terjaringnya ... pasangan selingkuh.

Adapun rekapitulasi jumlah kegiatan dan hasil operasi pelacuran/PSK selama tahun 2014–2018, sebagai berikut:

Tabel 6.16. Operasi Pelacuran/PSK Tahun 2014-2018 (s.d triwulan I)

Tahun	Operasi	Terjaring (orang)
2014	36	256
2015	36	311
2016	36	312
2017	36	219
2018	5	87

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Tahun 2018

Operasi Gepeng dan Anjal

Pesatnya pembangunan diselenggarakan Kota Tangerang menjadi daya tarik orang tertentu untuk mengadu nasib mencari pekerjaan, namun dengan keterampilan yang terbatas membuat sebagian orang tidak mampu bersaing dan mengambil jalan pintas dengan menjadi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

Di Kota Tangerang juga ada Rumah Sakit yang mengobati penderita kusta dimana mantan penderita kusta tidak mau kembali ke daerah asal walaupun sudah dinyatakan sembuh, orang tersebut memilih tinggal di Kota Tangerang dengan menjadi pengemis sebagai mata pencarian, keberadaan para gelandangan para pengemis dan anak jalanan tersebut sangat mengganggu ketertiban di beberapa titik sehingga perlu ditertibkan.

Sampai dengan tahun 2017 operasi yang dilaksanakan Satpol PP adalah sebanyak 12 kali dan terjaring sebanyak 132 orang dapat disampaikan adanya penurunan pelanggar Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.

Pengawasan Tempat Hiburan dan Bangunan

Adalah suatu bentuk pola operasional kegiatan pengawasan dan pengendalian jasa hiburan umum dan pembangunan bangunan baru atau renovasi bangunan yang sudah ada, terkait dengan penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kondusifitas ketentraman dan ketertiban Kota Tangerang, serta untuk meningkatkan tertib bangunan (perijinan, peruntukan, skala bangunan) terutama pada sektor retribusi bangunan dan kesesuaian tata ruang perkembangan kota.

Adapun jenis-jenis kegiatan ini antara lain:

1. Pengawasan dan Pengendalian Jasa Hiburan dan Umum
2. Operasional Tempat Hiburan (jam operasional dan pola operasional)
3. Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Tempat-tempat Hiburan dan Tempat Umum;
4. Penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran/PSK (prostitusi);

5. Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
6. Penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ijin Gangguan (IG);
7. Pengawasan Hiburan pada Malam Hari Raya Keagamaan.
8. Rekomendasi Kegiatan Hiburan dan Keramaian.
9. Pengarahan Perijinan dan Peruntukan Usaha Jasa Hiburan.

Beberapa kendala penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dihadapi, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Perda
2. Kurangnya pengetahuan tentang Perda
3. Tidak adanya/Alokasi tempat untuk berjualan
4. Adanya desakan ekonomi/kebutuhan Pedagang
5. Kurangnya kerjasama antar SKPD
6. Rasio jumlah personil Satpol PP tidak sebanding dengan jumlah penduduk
7. Terbatasnya anggota Satpol PP yang menjadi PPNS

Peran Serta Aparat Keamanan

Pemkot Tangerang dalam melaksanakan program ketentraman dan ketertiban umum melibatkan unsur-unsur di luar perangkat Pemkot Tangerang, yaitu instansi terkait/jajaran samping, diantaranya:

1. Polres Metro Tangerang
2. Kodim 0506 Tangerang
3. Kejaksaan Negeri Tangerang
4. Pengadilan Negeri Tangerang

BAB 7 PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013-2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan melalui perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Pelaksanaan Urusan tersebut yang direalisasikan kedalam program dan kegiatan yang ada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2014-2018. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2013-2018, diupayakan dapat terselesaikan pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berikutnya.

Sebagai bukti keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah selama tahun 2014-2018, Pemerintah Kota Tangerang telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan dari berbagai kalangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu:

Tahun 2014

1. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).
2. Penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha Tahun 2014 yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah (OTDA) terutama dengan usaha untuk mensejahterakan masyarakatnya.
3. Penghargaan Adipura Kencana 2014 sebagai Kota Metropolitan Terbersih Nasional
4. Penghargaan Government Award dari Sindo Weekly 2014 karena Kedulian Kota Tangerang Terhadap Lingkungan
5. Penghargaan Wahan Tata Nugraha Kategori Lalulintas Kota Metropolitan dari Kementerian Perhubungan.
6. Piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas (Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LPKD) Kota Tangerang Tahun 2013 yang mendapatkan WTP untuk yang ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

7. Penghargaan ASEAN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE CITY (ESC) Award kategori Udara Bersih tingkat ASEAN.
8. Penghargaan National Procurement Award 2014 untuk kategori Akselerasi Penerapan E-Procurement dari LKPP atas komitmen Pemrerintah Kota Tangerang dalam menerapkan E-Procurement dengan akselerasi yang cepat termasuk dalam pengembangan organisasi, sumberdaya manusia (SDM) serta pelayanan LPSE
9. Penghargaan APE (Anugrah Parahita Ekapraya) / Pembangunan Berbasis Gender Kategori Madya Tingkat Nasional
10. Juara II Kriteria P2WKSS Tk.Provinsi Banten (Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang)
11. Juara II Kriteria Pengelola BKB Tk. Provinsi Banten (Ibu Sutiyah, Kecamatan Larangan)
12. Juara III Kriteria Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Perempuan Tk.Provinsi Banten (PT. Mayora)
13. Juara I Kriteria Perlombaan Kelurahan Tk. Provinsi Banten (Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Ciledug)
14. Juara Harapan II Tingkat Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke XVI Tahun 2014 di Kota Samarinda untuk Mesin Pembuat Mie yang dimasukkan kedalam stand TTG Unggulan Nasional mewakili Provinsi Banten
15. Juara II Kriteria Klinik KB MKJP Tk. Provinsi Banten (Puskesmas Pedurenan)
16. Juara II Kriteria UPPKS Tk. Provinsi Banten (Kecamatan Karang Tengah)
17. Juara II Kriteria Keluarga Harmonis Tk. Provinsi Banten (Kecamatan Karang Tengah)
18. Juara II Kriteria BKB Tk. Provinsi Banten (Kecamatan Karang Tengah)
19. Juara III Kriteria IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan/Pedesaan) Tk. Provinsi Banten (Kecamatan Periuk).

Tahun 2015

1. Anugerah Pangripta Nusantara (APN) Untuk RKPD 2014 di Tingkat Provinsi Banten.
2. Peringkat Kedua Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015 Untuk Kategori Kota Berpenduduk di Atas 1 Juta Jiwa dari Media Kompas.
3. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Dari Kementerian Perhubungan Karena

Mampu Melakukan Penataan Transportasi Yang Berkelanjutan, Berbasis Kepentingan Publik dan Ramah Lingkungan.

4. Peringkat Kedua Tingkat Nasional Untuk Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dari Kementerian Hukum dan HAM.
5. Penghargaan WTP Kedelapan Kalinya Secara Berturut-turut, WTP Kali ini Pertama Kalinya Diperoleh Oleh Pemkot Tangerang Dalam Penerapan Akuntasi Berbasis Akrual Untuk Penyusunan Laporan Keuangan.
6. National E-Procurement Award Kategori Kepemimpinan dan Transformasi Elektronik 2015 dari LKPP.
7. Penghargaan Piala Adipura Kategori Kota Metropolitan Tahun 2015 Yang Diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Kepada Walikota Tangerang H.Arief R.Wismansyah di Jakarta.
8. Penghargaan Plakat Adipura Dari Kementerian Lingkungan Hidup Atas Keberhasilan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Terbaik Dengan Kategori Pasar Bersih Dan Terminal Bersih 2015
9. Penghargaan Swastisaba Wistara Dari Kementerian Kesehatan Yang diserahkan Langsung Oleh Menteri Kesehatan, Nila Djuwita F. Moeloek Atas Komitmen Pemerintah Kota Tangerang Yang Telah Berhasil Menerapkan 7 Dari 9 Tatatan Kota/Kabupaten Sehat
10. Penghargaan Sebagai Kota Dengan Peningkatan Indeks Total Keselamatan Jalan Dalam 3 Tahun, Di Ajang Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2015, Penghargaan ini Diberikan Kepada Kota Tangerang Karena Dianggap Mampu Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Selama 3 Tahun Terakhir.

Tahun 2016

1. Penghargaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas Kemandirian Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan terobosan inovatif menerbitkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
2. Penghargaan Sindo Weekly.
3. Penghargaan Indonesia Digital Economy Award 2016 (IDEA) dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai upaya perwujudan Kota Cerdas di Kota Tangerang.
4. Penghargaan Otonomi Daerah Terbaik dari Pemerintah Provinsi Banten.

5. Penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2016 Kategori Implementasi Penilaian Kinerja dan BKD Inovatif.
6. Penghargaan Badan Narkotika Nasional dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
7. Penghargaan Piala Adipura Kirana dan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Penghargaan Attractiveness Award 2016 dari Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group sebagai Kota Terbaik dan Kategori TOP 3 Investasi Potensial.
9. Anugerah Jawa Public Relations (PR) Indonesia Media Relations Awards and Summit (JAPRIMAS) 2016, untuk kategori pemerintah kota.
10. Penghargaan National Procurement Award 2016, Kategori Penerapan Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
11. Penghargaan Laporan Kinerja Humas dalam Anugerah Media Humas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.
12. Anugerah Dana Rakca tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang di berikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan.
13. Penghargaan Peringkat Pertama Badan Publik Terbaik dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
14. Penghargaan Parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas prestasi dan kontribusi, dalam mendukung pelaksanaan dan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.
15. Penghargaan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2 WKSS), Juara I Tingkat Provinsi Banten.
16. Peringkat ke-2 UN SMP Tingkat Propinsi Banten.
17. Peringkat ke-1 UN SMA Tingkat Provinsi Banten.
18. Peringkat ke-1 UN SMK Tingkat Provinsi Banten.
19. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tingkat Nasional (SMAN4).
20. Duta Sanitasi Tingkat Provinsi Banten (SMPN 2).
21. Juara I PL2SN Jenjang SD Tingkat Provinsi Banten.
22. Juara Umum ke-2 LKS SMK Tingkat Provinsi Banten.
23. Peringkat ke-2 Pengawas Sekolah SD Berprestasi Tingkat Provinsi.

24. Peringkat ke-3 Pengawas Dikmen Berprestasi Tingkat provinsi.
25. Juara OSN SMP Tingkat Provinsi Banten.
26. Juara OSN SMA Tingkat Provinsi Banten.
27. Juara OSN SMK Tingkat Provinsi Banten.

Tahun 2017

1. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kategori Lalu-Lintas.
2. Penghargaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Penghargaan Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2017, yang digelar di Convention Hall Hotel Harris, Sunset Road, Kuta, Bali, Jumat . Kategori Digital Public Relations, Departement Public Relations, Media Relations, Media Internal untuk Kategori Cetak.
4. Penghargaan Recognition of Excellence atas keberhasilan Kota Tangerang dalam menerapkan Teknologi Informasi.
5. Penghargaan iNew Maker Awards 2017 sebagai kepala daerah yang menerapkan Smart City atau Kota Pintar.
6. Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten, Rabu (31/05) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang.Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesepuluh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten, Rabu (31/05) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang.
7. Piagam Penghargaan Role Model Pelayanan Publik di Indonesia yang diselenggarakan oleh MenPANRB.
8. Penghargaan Perencanaan Terbaik yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tahun 2017.
9. Penghargaan dari Menteri kesehatan Bagi PEMDA yang telah menerapkan PERDA/Kebijakan Lain dalam pengendalian konsumsi hasil tembakau di Jogjakarta.
10. Penghargaan Jasa Dharma Bakti Koperasi dari Kementerian UKM dan Koperasi Republik Indonesia di Makasar.
11. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif Tahun 2017 dari Koran Sindo.
12. Penghargaan Adipura Kencana Tahun 2017 kategori kota Metropolitan.

13. Penghargaan Lencana Melati Atas Kepedulian Gerakan Pramuka di kota.
14. Penghargaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional.
15. Penghargaan Icon Humas 2017 dari majalah PR Indonesia.
16. Penghargaan Best Communicator 2017 kategori Walikota dari Majalah PR Indonesia.
17. Penghargaan Indeks Kondisi Keuangan Daerah T.A 2015 dari Universitas Gajah Mada.
18. BPI KPNPA Award atas kepuasan masyarakat terhadap kinerja, dedikasi dan kerja nyata dalam mengimplementasikan Nawacita Jokowi & Jk dari Badan Peneliti Independen kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pengawas Anggaran RI.
19. Penghargaan Kota Layak Pemuda dari kementerian Pemuda dan Olahraga.
20. Penghargaan Swasti Saba Wistara sebagai kota Sehat Tahun 2017 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
21. Penghargaan Kepala Daerah Peduli PAUD dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
22. Penghargaan Smart City 2017 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk aplikasi E-Plesiran.
23. Penghargaan Anugerah Pandu Negeri dengan predikat Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Tata Kelola Sangat Baik dari Indonesian Institute Publik Governance (IIPG).
24. Penghargaan Daerah Tertib Ukur Tahun 2017 untuk kategori kota besar dari kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
25. Entrepreneur Award dari Mark Plus.
26. Penghargaan IRSN tahun 2017 untuk kategori Kota dengan Kepadatan Penduduk Tinggi dari ADIRA dan Majalah SWA.,
27. Badan Publik Terbaik tingkat Provinsi Banten dari KIP Banten.
28. Penghargaan Indonesia Visionary Leader untuk Wali Kota Tangerang kategori Best In Information Technology oleh koran Sindo.

Tahun 2018 (sampai dengan Maret 2018)

1. Pemerintah Daerah yang berprestasi kinerja terbaik yang dinilai dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2017 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia).

2. Penghargaan Dalam Bidang Smart City Indoensia, Smart Nation Best Smart Brabding Category Smart City oleh Menteri Pariwisata.
3. Media Cetak Internal Untuk Majalah I IVF, Aplikasi Tangerang LIVE, Program Digital PR dari Aplikasi LAKSA (menghimpun aspirasi masyarakat bercita rasa lokal), Departemen PR dan Kota yang populer di media dari majalah PR Indonesia pada acara Publik Relation Indonesia Award (PRIA) 2018.
4. Pendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2013-2018 disusun untuk menjadi keterangan atas penyelenggaraan urusan desentralisasi pemerintahan daerah, program, dan kegiatan pembangunan di Kota Tangerang selama Tahun 2014-2018. Pada prinsipnya, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang merupakan upaya bersama antara aparat pemerintah dan peran serta masyarakat untuk membangun kota kita tercinta. Seperti yang diharapkan kita bersama, supaya kerja keras ini dapat menciptakan sebuah tata kelola kepemerintahan yang baik, bertanggungjawab, mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, sehingga terwujud kondisi masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera serta berakhhlakul karimah.

Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagaimana maksud dan tujuan penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Periode 2013 - 2018.